

**MENJADI
ENVIRONMENTALIS**

ITU

GAMPANG!

Sebuah Panduan Bagi Pemula

**Panduan ini didedikasikan kepada kaum muda,
mahasiswa dan aktivis muda yang ingin mewujudkan
bumi yang damai dan hijau.**

**Panduan ini ditulis sebagai media pilihan untuk siapa saja
yang ingin mempertanyakan dan menantang mitos-mitos
pembangunan ekonomi, kemiskinan dan globalisasi.**

**Panduan ini hanya pembuka pikiran bagi para
environmentalis muda. Selanjutnya, kamu harus terus belajar,
belajar dan pada akhirnya berjuang
mewujudkan demokrasi bumi.**

Un bel domani.

Mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini
untuk kepentingan masyarakat luas dapat dilakukan
tanpa seijin tertulis penerbit
dan sepanjang mencantumkan sumbernya.



**MENJADI ENVIROMENTALIS
ITU GAMPANG!**
Sebuah Panduan bagi Pemula

TIM PENULIS

DANI WAHYU MUNGGORO
ANDY ARMANSYAH

Editor

DJUHENDI TADJUDIN

“Pangan, Energi dan Kemiskinan”

FARID GABAN

“Globalisasi dan Lingkungan Hidup”

NUR HIDAYATI

“Korporasi dan Lingkungan Hidup”

DICKY LOPULALAN

Penyelaras Akhir

DITO SUGITO

Desainer Grafis

Cetakan pertama, April 2008
Hak Cipta pada WALHI

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)
Munggoro, Dani., (ed.)

Menjadi Enviromentalis itu Gampang!:

Sebuah Panduan bagi pemula, editor: Dani Munggoro, Jakarta: WALHI:2007

352+xiii; 19 cm x 20,5 cm

ISBN 978-979-8071-71-3

Menjadi Enviromentalis itu Gampang!

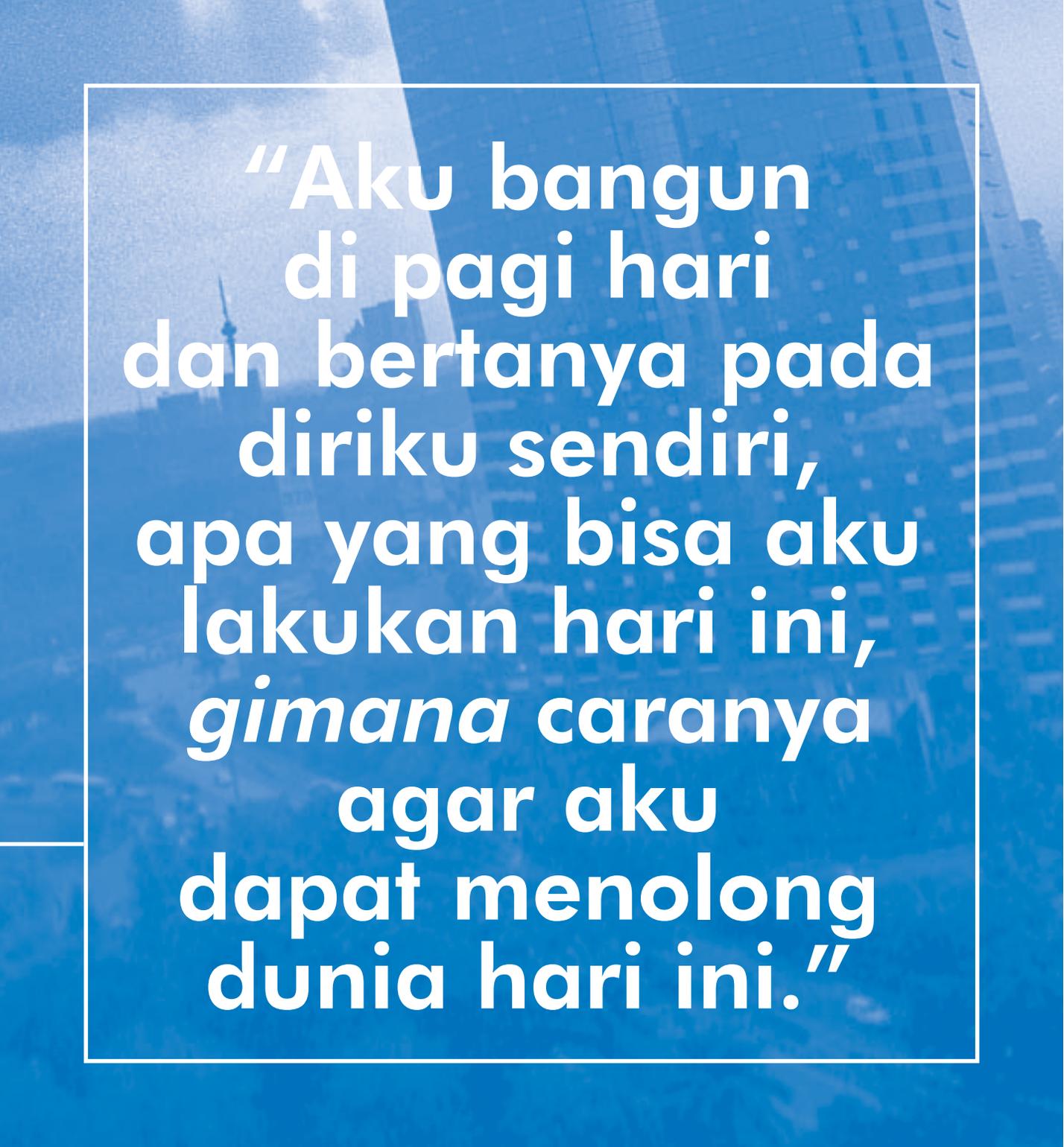
Sebuah Panduan bagi Pemula

WALHI



An aerial photograph of a city skyline, including several high-rise buildings and a highway with traffic. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. A white rectangular box with a thin border is positioned in the center, containing the text 'Julia Butterfly Hill, Enviromentalis'.

Julia Butterfly Hill, *Enviromentalis*



**“Aku bangun
di pagi hari
dan bertanya pada
diriku sendiri,
apa yang bisa aku
lakukan hari ini,
gimana caranya
agar aku
dapat menolong
dunia hari ini.”**





Foto: Timur Angin/Dok. Keyword Innovative Communication

**“Kau pribumi
terpelajar!
Kalau mereka
itu, pribumi itu,
tidak terpelajar,
kau harus bikin
mereka
jadi terpelajar.
Kau harus,
harus,
harus bicara
pada mereka,
dengan bahasa
yang mereka
tahu.”**

Pramoedya Ananta Toer,
Anak Semua Bangsa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI viii
KATA PENGANTAR 3
BAGIAN PEMBUKA 19
MENGENAL WALHI 29

"Apa yang kita lakukan atas hutan-hutan di dunia adalah refleksi cermin dari apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri dan sesama."

Gerakan Lingkungan di Indonesia 29
Kisah Kelompok Sepuluh 37
Pertemuan Oktober 1980 41
Daur Pertama: Pendidikan Kesadaran Publik 47
Daur Kedua: Demokratisasi Kekayaan Alam 53
Daur Ketiga: Perluasan Gerakan Lingkungan 57

BAGIAN 1 MENDEDAH ENVIRONMENTALISME 61

Apa itu Environmentalisme 65
Siapa itu Kaum Environmentalis? 67
Apa itu Gerakan Lingkungan 69
Fokus Pembaruan pada Aksi Lokal 75
Kritik pada Environmentalisme 77
Deep Ecology 81
Eco-Anarkisme 89
Optimisme Ekologi Modernisasi 91
Empat Pilar Politik Hijau 93
Syarekat Hijau 97

Mahatma Gandhi

Pemimpin spiritual India

BAGIAN 2 PANGAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP 99

Pertikaian Teknologi 105

'Solusi' Revolusi Hijau 107

Prasyarat Kearifan Lokal 111

Teknologi Alternatif 115

Ketimpangan Kelembagaan 119

Akses pada Lahan dan Air 121

Distribusi Pangan yang Tidak Adil 123

Mitos dan Realitas tentang Pangan 125

Kemana Keanekaragaman Pangan Kami 129

Tantangan bagi Environmentalis 133

M.S. Swaminathan

"Tersebutlah perkataan Suku Indian di Amerika Utara: Langit disangga oleh pepohonan. Jika hutan hilang, atap langit dunia akan runtuh. Alam dan manusia akan binasa bersama-sama."

DAFTAR ISI

BAGIAN 3 KEMISKINAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP 137

Gaya Pembangunan Tak Berubah 147

Kota Sentris 151

Pembangunan= "Mimpi" Para Elir 153

Kemiskinan 155

Kemiskinan Struktural 156

Kemiskinan Kultural 157

Thailand: Penataan Evolutif 159

Kuba: Revolusi yang Sukses 165

Tantangan bagi Environmentalis 169

Menemukan Identitas Kebangsaan 171

Memelihara Forum yang Cerdas 173

Penciptaan Ekonomi yang tidak Mengecoh 175

Pembaruan Desa 177

"Kita sedang memotong ginjal kita untuk membesarkan perut kita."

Eric Freyfogle

Profesor hukum asal Illinois, AS.

BAGIAN 4 ENERGI

DAN LINGKUNGAN HIDUP 179

Kecenderungan Energi Dunia 181

Energi Terbarukan 185

“Energi” Masa Depan 195
Situasi Energi di Indonesia 199
Arah Perkembangan Energi 201
Tantangan Para Environmentalis 203
Evaluasi Diversifikasi Energi 207
Kebijakan Energi Terbarukan 209
Keunggulan Energi Lokal 211

BAGIAN 5 KORPORASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 213

Negara, Korporasi, dan Rakyat 219
Demokrasi Tidak Ada Harapan 231
Kamufase Korporasi Hijau 235
Akuntabilitas Korporasi 241

BAGIAN 6 GLOBALISASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 245

Dari Mana Datangnya Utang? 253
Resep Beracun Bank Dunia dan IMF 257
Benalu yang Tak Mau Pergi 261
Gerakan Anti-Neoliberal 265
Globalisasi, Mitos dan Realitas 269

“Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup diri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih sukar dari pada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula.”

R.A. Kartini

*Surat kepada
Nyonya Abendadon,
12 Desember 1902*

DAFTAR ISI

BAGIAN 7 MENUJU DEMOKRATISASI BUMI 275

Zamrud Khatulistiwa, No More! 277

Suku Indian, Schumacher dan Hatta 285

Demokrasi Bumi, Berpikir, dan Bertindak Berbeda 289

Sepuluh Prinsip Demokrasi Bumi 293

BAGIAN AKHIR

MENJADI ENVIRONMENTALIS ITU GAMPANG 297

Cara Mudah Menjadi Environmentalis 309

Langkah Pertama: Nilailah Situasi di Sekitarmu 314

Langkah Kedua: Rencanakan Pendekatanmu 315

Langkah Ketiga: Laksanakan Rencanamu 318

Langkah Keempat: Selalu Belajar dari Pengalaman 328

Kamu Muda Bergerak 320

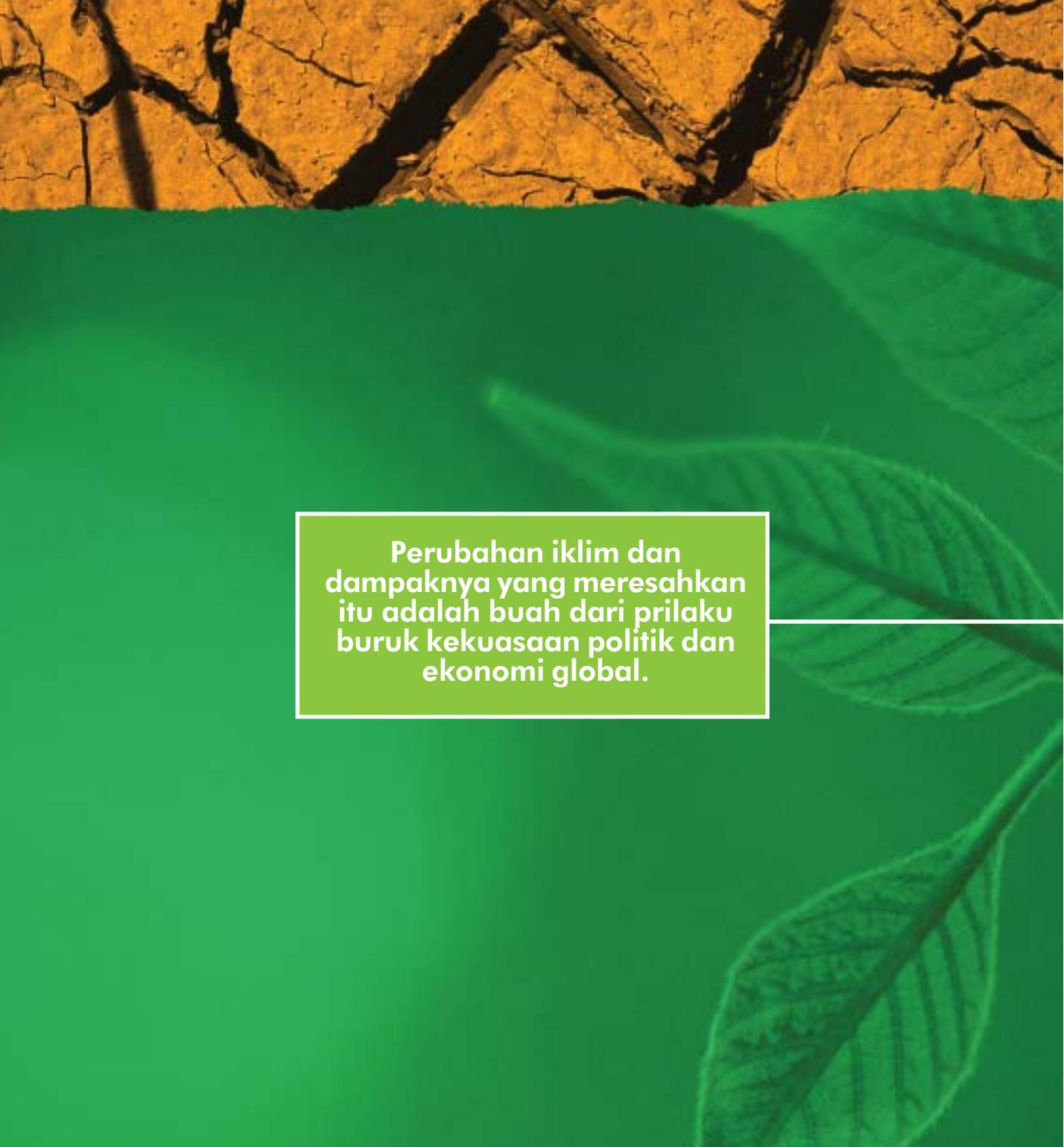
BAHAN DISKUSI DAN BACAAN LANJUTAN 331



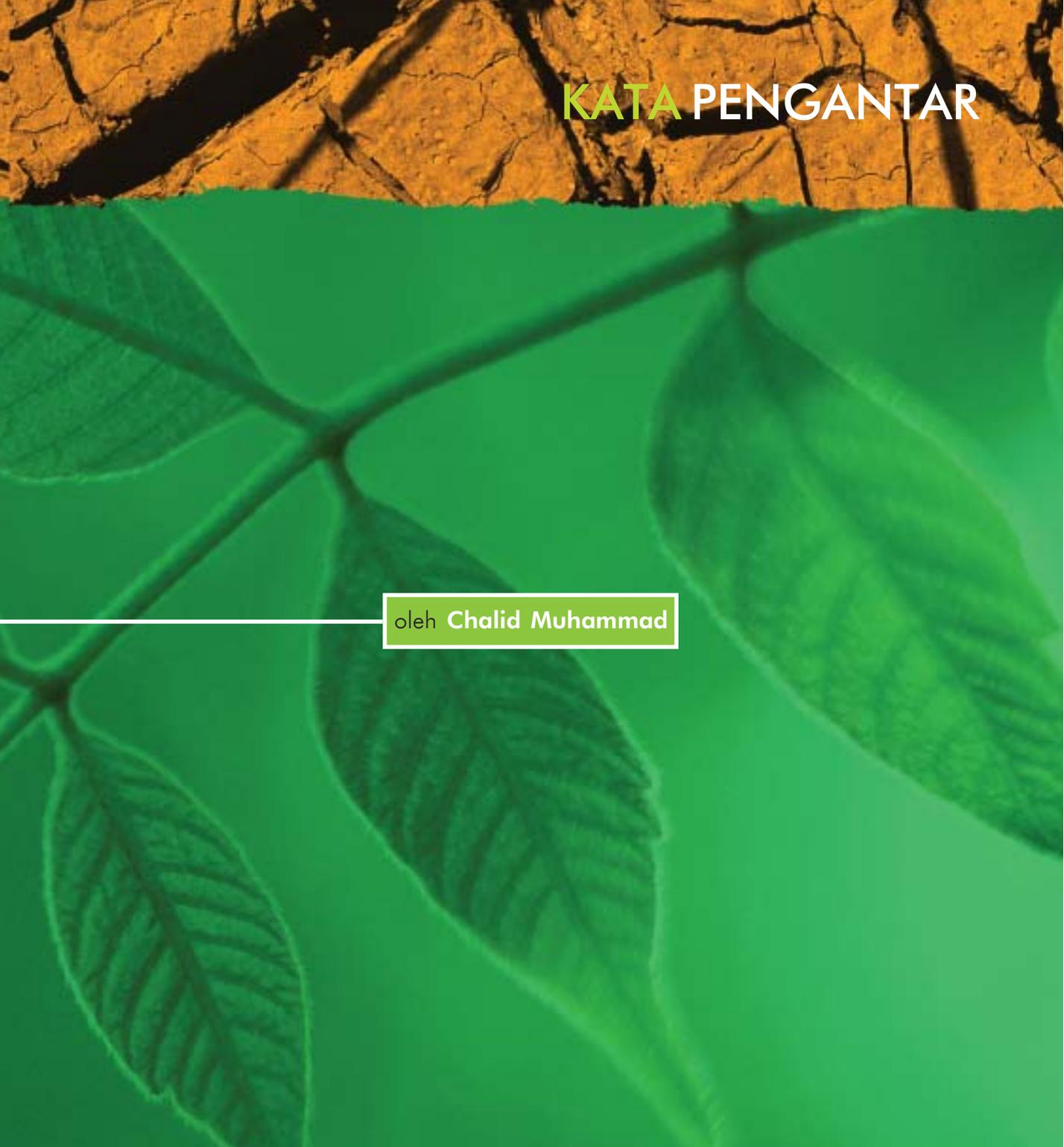
**“Revolusi itu
menciptakan!!”**

Tan Malaka

Aksi Massa 1926



Perubahan iklim dan dampaknya yang meresahkan itu adalah buah dari perilaku buruk kekuasaan politik dan ekonomi global.



KATA PENGANTAR

oleh **Chalid Muhammad**

A faint, light green image of a tea plant branch with several leaves and a bud, positioned in the upper right quadrant of the page. The background is a solid, light teal color.

Pramoedya Ananta Toer

Anak Semua Bangsa

“Semua yang terjadi di kolong langit ini adalah urusan setiap orang yang berfikir.”



Foto: Dok. WALHI

*Orasi direktur WALHI
pada aksi Hari Bumi
22 April 2007, Jakarta*

BULAN Desember tahun 2007 jutaan pasang mata penduduk bumi tertuju pada pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim di Bali. Pertemuan yang di selenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) itu diharapkan lahirkan kesepakatan global yang mengikat untuk atasi petaka bagi bumi dan penghuninya akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Hasil pertemuan Bali yang dituangkan dalam *Bali Roadmap* oleh banyak kalangan dipandang belum lahirkan kesepakatan-kesepakatan berarti untuk dibawah pada putaran perundingan berikutnya di Warsawa (Polandia) dan Copenhagen (Denmark) tahun 2009. Walau demikian, pertemuan Bali sukses menarik perhatian publik akan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang lima belas tahun terakhir hanya menjadi *concern* para ilmuwan dan aktivis lingkungan hidup saja.

Kini semakin banyak orang yakin bahwa pemanasan global yang memicu perubahan iklim adalah suatu keniscayaan dan bukan rekayasa para ilmuwan. Tanda dan buktinya dengan mudah dapat dilihat dan dirasakan. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007 menyebutkan pemanasan sistem klimat adalah hal yang nyata, dan terbukti dari sejumlah pengamatan atas meningkatnya suhu udara dan samudra, meluasnya salju dan es yang meleleh serta naiknya muka air laut rata-rata. IPCC juga melaporkan telah terjadi

kenaikan temperatur global 0.76 C° antara tahun 1850 dan 2005. Sepanjang abad ke 20, benua Asia telah mencatat rekor kenaikan tertinggi 1 derajat C. Karena emisi akan tetap berada di atmosfer dalam waktu lama, IPCC memprediksikan pemanasan 10 tahunan sebesar 0.2 derajat C hingga 2030, yang mengindikasikan kenaikan suhu rata-rata 0.6 derajat C (IPCC WGI 2007).

Berbagai prediksi dampak perubahan iklim juga dinyatakan dalam laporan IPCC tahun 2007. Perubahan iklim memiliki kemungkinan tinggi dalam merubah ketersediaan sumber air, yang didorong oleh menurunnya curah hujan dan limpasan di Asia Selatan dan Asia Tenggara serta meningkatnya limpasan di daerah lain, terutama di Pulau-pulau Pasifik. Ketersediaan air dan limpasan diperkirakan akan turun hingga 10-30 % pada ketinggian lintang rendah dan daerah tropika kering. Ketersediaan air tawar di Asia Tengah, Timur, Selatan, dan Tenggara terutama di DAS yang luas akan berkurang. Menurunnya ketersediaan air tawar akan berakibat tak terbendung pada miliaran orang pada tahun 2050

Perubahan iklim juga memberikan dampak sangat berarti pada dunia pertanian. Berubahnya musim dan menurunnya ketersediaan air dapat menyebabkan petani mengalami gagal panen dan gagal tanam secara sistematis. Kelangkaan pangan dan kelaparan meningkat seiring dengan perubahan iklim secara ekstrem.

United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) menduga bahwa perubahan iklim menghasilkan hilangnya produksi sereal sebesar 280 juta ton di 65 negara selatan. Di negara-negara selatan, perubahan iklim mereduksi produksi pertanian yang tergantung hujan sebesar 11% di tahun 2080 (CANA 2006). Ilmuwan-ilmuwan International Rice Research Institute (IRRI) di Manila menemukan bahwa setiap derajat kenaikan temperatur akan mengurangi 10 persen produksi beras. Beragam dampak lain juga telah diprediksi oleh banyak kalangan, termasuk kemungkinan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan kota-kota serta pemukiman yang secara geografis berada di pinggiran pantai. Naiknya permukaan laut sebagai konsekuensi dari mencairnya es di kutub sebagai penyebabnya.

Perubahan iklim dan dampaknya yang meresahkan itu adalah buah dari perilaku buruk kekuasaan politik dan ekonomi global. Dalam rentang waktu panjang, negara-negara industri maju (utara) telah melakukan pemujaan sempurna terhadap pertumbuhan ekonomi. Akumulasi kapital menjadi target utama dan pembangunan dipuja sebagai ajaran suci. Konsumsi energi fosil (batubara, minyak dan gas bumi) terus meningkat dan lahirkan emisi gas buang secara besar-besaran. Pola konsumsi dan produksi berubah secara mendasar. Makin tinggi konsumsi setiap orang, makin besar emisi gas buang terlepas ke atmosfer. Akumulasi emisi gas buang itu menjadi penyebab utama

Makin tinggi konsumsi setiap orang, makin besar emisi gas buang terlepas ke atmosfer. Akumulasi emisi gas buang itu menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia kini terjebak dalam keserakahan kapital. Neoliberalisme ekonomi semakin meneguhkan jebakan itu.

pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia kini terjebak dalam keserakahan kapital. Neoliberalisme ekonomi semakin meneguhkan jebakan itu.

Tak dapat dipungkiri relasi kuasa yang selama ini dibangun dan langgeng oleh negara-negara Utara telah menimbulkan ketidakadilan global. Negara-negara utara melipatgandakan kekayaan dengan "menyedot" sumberdaya negara-negara berkembang (selatan). Beragam cara digunakan negara Utara untuk akselerasi akumulasi kapitalnya. Bersama perusahaan multi dan transnasional serta institusi keuangan internasional semisal World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank dan lain sebagainya, beragam paket kebijakan moneter, fiskal dan pemanfaatan sumberdaya alam "ditawarkan" pada negara-negara berkembang. Alhasil negara berkembang takluk dalam dominasi mereka. Praktik yang tidak adil itu hanyalah bagian dari kegagalan model pembangunan global sebagai pemicu perubahan iklim.

Dalam kertas posisi menuntut keadilan iklim (climate justice) yang disiapkan Civil Society Organization Forum (CSOF) Indonesia, menyebutkan ada enam ciri model pembangunan global yang gagal, yaitu: *per-*

tama pemujaan atas pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi setinggi-tingginya oleh individu, dan persaingan demi mencapai tingkat konsumsi yang tinggi. *Kedua*, berlanjutnya pembagian kerja antara negara-negara maju dan berkembang, dimana negara berkembang diletakkan sebagai penyedia bahan mentah dan industri kotor bagi konsumsi boros dan berlebihan di negara-negara maju. *Ketiga*, pemaksaan utang luar negeri ke negara-negara berkembang yang menjebak negara-negara tersebut dalam kemiskinan dan keterbelakangan karena utang digunakan demi melegitimasi ekspor bahan mentah secara murah ke luar negeri. *Keempat*, standar ganda oleh negara maju dalam pemeliharaan lingkungan demi mempertahankan pasokan bahan mentah murah yang menghancurkan sosio-ekosistem penting di negara-negara selatan. *Kelima*, diletakkannya perdagangan sebagai aturan utama hubungan antar negara-bangsa saat ini yang merendahkan integritas kerekatan sosial dan berlanjutnya pelayanan ekosistem demi mempertahankan kehidupan didalamnya. *Keenam*, semakin kayanya korporasi dibandingkan negara yang mempertahankan semakin tingginya tingkat akumulasi para pemegang saham atas biaya manusia dan lingkungan yang rusak. Keseluruhannya membangun aristokrasi modernitas baru di utara, segelintir elit korup dan otoriter di negara-negara selatan, yang gagal mengangkat harkat hidup mayoritas populasi di negara-negara selatan (CSO Forum, 2007).

BENCANA EKOLOGIS

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah jadi korban dari ketidakadilan global itu. Kekayaan alam Indonesia yang harusnya dapat dimanfaatkan secara arif demi kesejahteraan rakyatnya telah berubah menjadi kutukan. Kini Indonesia terancam bencana ekologis. Yaitu suatu bencana berupa akumulasi dari krisis ekologis akibat dari ketidak-adilan (*un-justice*) dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah menyebabkan kolapsnya pranata kehidupan rakyat.

Sampai dengan tahun 2007 WALHI tidak melihat ada terobosan yang berarti dilakukan negara untuk mereduksi kehancuran ekologis dan ketidakadilan sosial ekonomi yang makin membesar di negeri ini. Pengurus negara cenderung mengabaikan fakta bahwa Indonesia sedang dalam fase kritis, baik dari segi ekologis maupun kemampuan bertahan hidup mayoritas rakyat terkena dampak pembangunan. Praktik eksploitasi alam terus menjadi pilihan walau beragam peringatan telah diberikan oleh organisasi dan pemerintah lingkungan hidup dalam dan luar negeri.

Konversi kawasan-kawasan hutan terus dilakukan untuk perkebunan swasta skala besar, pertambangan, dan kebutuhan industri. Di hulu, hutan sebagai kawasan pemasok air terus mengalami penggundulan hingga mencapai 2,7 juta hektar/tahun. Di hilir, ekosistem mangrove terus mengalami penyempitan, hingga menyisakan kurang dari 1,9 juta hektar disepanjang pesisir Indonesia.

Tujuh puluh lima persen (75%) dari 12.000 varietas padi lokal harus musnah, dan memaksa petani untuk tergantung pada pupuk dan pestisida kimia dari perusahaan-perusahaan lintas negara (*Transnational Corporations/TNC's*). Sepuluh negara yang sering melakukan pencurian ikan di laut Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, terus beroperasi di tahun 2007. Sekitar 2-4 juta ton ikan dari perairan Indonesia pun terus dicuri. Perusahaan-perusahaan lintas negara telah menguasai lebih dari 90% ladang-ladang minyak dan gas bumi Indonesia. Sementara sekitar 60% total produksi gas bumi dan lebih dari 80% batubara pertahun terus di ekspor.

Hasilnya di 2007, lebih dari 37 juta orang masih berada pada kategori miskin dan angka pengangguran masih berada pada kisaran 10%. Beban utang negara pun terus bertambah. Hingga Januari 2008, untuk *outstanding* Surat Utang Negara (SUN) saja sudah hampir menyentuh angka Rp 900 triliun. Belum lagi beban utang luar negeri yang pada triwulan kedua tahun 2007, sedikitnya sudah tercatat US\$ 79 milyar.

Demikian pula dengan bencana ekologis, yang belum juga dapat diminimalisir, tapi justru semakin mengkhawatirkan. Terakhir, periode tahun 2006-2007, tercatat telah terjadi 840 kejadian bencana, dengan menelan korban 7.303 jiwa meninggal dunia dan 1.140 orang dinyatakan hilang; sedikitnya 3 juta orang menjadi pengungsi dan 750.000 unit rumah rusak atau terendam

**Sampai dengan tahun 2007
WALHI tidak melihat ada
terobosan yang berarti dilakukan
negara untuk mereduksi
kehancuran ekologis dan
ketidakadilan sosial ekonomi yang
makin membesar di negeri ini.
Pengurus negara cenderung
mengabaikan fakta bahwa
Indonesia sedang dalam fase
kritis, baik dari segi ekologis
maupun kemampuan bertahan
hidup mayoritas rakyat terkena
dampak pembangunan. Praktik
eksploitasi alam terus menjadi
pilihan walau beragam peringatan
telah diberikan oleh organisasi
dan pemerhati lingkungan hidup
dalam dan luar negeri.**

Negara-negara utara melipatgandakan kekayaan dengan "menyedot" sumberdaya negara-negara berkembang (selatan). Beragam cara digunakan negara Utara untuk akselerasi akumulasi kapitalnya.

banjir. Akibat dari intensitas dan luasan bencana yang terus bertambah sembilan bulan dalam setahun Indonesia menghabiskan sumberdaya-nya hanya untuk mengurus bencana (www.walhi.or.id)!

JAWABAN ATAS KRISIS

Tabiat pengurus negara untuk memperdagangkan kekayaan bumi Indonesia secara cepat, murah, marak, dan mudah justru semakin diperteguh dari tahun ke tahun. Dita-hun 2007, pemerintah dan parlemen kembali membuat beberapa peraturan perundang-an yang semakin menjebak Indonesia dalam relasi yang tidak adil secara global itu. Salah satunya adalah Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang ini memberikan berbagai keleluasaan dan keistimewaan kepada pemodal (*private sector*) untuk memperoleh manfaat dari bumi Indonesia; diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai 95 tahun, keringanan berbagai bentuk pajak, hingga terbebas dari ancaman nasionalisasi.

Belum selesai dengan pro-kontra UUPM, masyarakat Indonesia kembali di ke-jutkan dengan lahirnya Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UUPWP-PPK), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2007 lalu. Tidak jauh ber-beda dengan UUPM, UUPWP-PPK-pun men-jadi landas kebijakan untuk memprivatisasi wilayah perairan, pesisir (termasuk kolom air) dan pulau-pulau kecil, melalui Hak Pengusa-

haan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam catatan panjang sejarah Indonesia, ini merupakan kali pertama negara memberikan landasan hukum atas pengusahaan wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan masa penguasaan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya.

Demikian juga terjadi pada sektor perkebunan. Perluasan perkebunan sawit sudah jauh dari kebutuhan domestik akan sawit. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh luasan lahan yang cocok dan berpotensi

satu wilayah propinsi atau kabupaten. Sebelumnya, swasta hanya diperkenankan memiliki kebun seluas 20.000 hektar (SK Menteri Pertanian No.357 Tahun 2002).

Teranyar, dalam isu perubahan iklim, kepentingan ekosistem hutan Indonesia, tidak dijawab dengan kebijakan jeda tebang (*moratorium logging*). Pemerintah Indonesia justru mempercayakan pengelolaan hutan Indonesia pada mekanisme pasar global melalui proposal REDD-I (*Reduce Emission from Deforestation and Degradation in Indonesia*).

Kekayaan alam Indonesia yang harusnya dapat dimanfaatkan secara arif demi kesejahteraan rakyatnya telah berubah menjadi kutukan. Kini Indonesia terancam bencana ekologis. Yaitu suatu bencana berupa akumulasi dari krisis ekologis akibat dari ketidak-adilan (*un-justice*) dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah menyebabkan kolapsnya pranata kehidupan rakyat.

untuk ditanami sawit, namun juga oleh kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah, diantaranya program kredit khusus guna mendukung revitalisasi perkebunan dengan menjanjikan kredit modal usaha dengan bunga hanya 10% bagi para investor. Tidak hanya dari aspek permodalan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007, pengusaha perkebunan kelapa sawit kini diberi keleluasaan menguasai areal hingga 100.000 hektar di

Proposal ini tidak saja telah menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia, namun dalam saat yang bersamaan terkesan telah menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia atas sumberdaya hutan, sekaligus menapikan kepentingan masyarakat yang tinggal disekitar hutan terhadap ekosistem hutan.

Bahkan, inisiatif progresif dari masyarakat sipil yang berpegang dan percaya atas keberpihakan hukum di Indonesia, justru dicerai dengan berbagai keputusan yang

Tabiat pengurus negara untuk memperdagangkan kekayaan bumi Indonesia secara cepat, murah, marak, dan mudah justru semakin diperteguh dari tahun ke tahun. Ditahun 2007, pemerintah dan parlemen kembali membuat beberapa peraturan perundangan yang semakin menjebak Indonesia dalam relasi yang tidak adil secara global itu.

diambil oleh lembaga peradilan. Lolosnya Adelin Lis atas kasus pembalakan hutan di Sumatera Utara melalui Keputusan Pengadilan Negeri Medan No.2240/Pid.B/2007 tanggal 5 November 2007; ditolaknya gugatan WALHI atas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) terkait pembuangan limbah B3 (tailing) ke Teluk Buyat melalui Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.548/Pdt.G/2007 pada 18 Desember 2007; serta diabaikannya kesalahan PT Lapindo Brantas dengan menyebutkan tragedi lumpur panas Lapindo sebagai bencana alam melalui Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.284/Pdt.G/2007 pada 27 Desember 2007 lalu, adalah tiga kasus yang secara terang-terangan mencederai rasa keadilan dan kebutuhan akan keberlanjutan lingkung-

an hidup di Indonesia.

Bencana ekologis yang tidak juga teratasi telah membawa Indonesia keambang kehancuran yang cukup serius. Hilangnya kepercayaan dan semangat optimisme rakyat-pun turut melengkapi kemerosotan mental dan harga diri bangsa.

PREDIKSI KEDEPAN

Respon negara yang ada hingga hari ini tentu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Indonesia. Bahkan, inisiatif-inisiatif pe-ngurus negara terkini antara lain: UUPM, UUPR, UUPWP-PPK, justru menunjukkan peluang kehancuran yang lebih masif kedepannya.

Sejalan dengan insentif yang diberikan negara pada perbaikan dan perluasan in-

dustri perkebunan, ditambah lagi dengan praktek *illegal* dan *destructive logging* yang belum juga terselesaikan, maka kemusnahan hutan alam Indonesia adalah sebuah realitas. WALHI memperkirakan seluruh hutan alam dataran rendah Indonesia akan musnah pada tahun 2022.

Di laut, kebijakan revitalisasi perikanan, dengan bertumpu pada peningkatan jumlah ekspor produk perikanan Indonesia ke berbagai negara di dunia diperburuk lagi dengan aktivitas pencurian ikan yang belum juga teratasi dipastikan sebelum 2015 Indonesia akan masuk pada paradoks baru, yakni krisis ikan Indonesia. Sebagai konsekuensinya, konflik perikanan akan semakin kerap terjadi, sejumlah ikan-ikan konsumsi akan sulit ditemukan dipasaran, harga ikan di pasar akan terus mengalami kenaikan, dan volume impor perikanan akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Industri-industri strategis yang sangat dekat dengan pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat seperti pangan dan energi akan semakin banyak dimiliki asing, dengan rentang waktu penguasaan yang semakin panjang. Kawasan-kawasan akses terbuka dan merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, seperti wilayah pesisir, akan terus dikonversi dan berubah menjadi kawasan-kawasan *private*. Ruang hidup dan ruang kelola rakyat pun akan semakin sempit dan terus menyempit.

Respon negara yang ada hingga hari ini tentu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Indonesia. Bahkan, inisiatif-inisiatif pengurus negara terkini antara lain: UUPM, UUPR, UUPWP-PPK, justru menunjukkan peluang kehancuran yang lebih masif kedepannya.

JADILAH ENVIROMENTALIS

Kondisi Indonesia hari ini sudah jauh dari cita-cita para pendiri bangsa, yakni, untuk Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Berdaulat atas setiap jengkal bumi pertiwi, dan bermartabat sebagai bangsa dan negara dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia.

Darurat Indonesia! Ini harus segera diakhiri.

Sudah saatnya Indonesia bangkit dengan kecerdasan dan kekuatan kolektif rakyat, dengan menekankan kepada 2 (dua) pemikiran mendasar:

Pertama, situasi darurat Indonesia membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang kuat, efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat, yang bercirikan: berani untuk mendorong penghapusan utang negara, serta berani menagih utang ekologis yang telah menyebabkan menurunnya kualitas hidup rakyat. Kepemimpinan yang dimaksud juga harus anti terhadap pendekatan sektoral, karena telah nyata terbukti gagal dalam mengurus sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indonesia secara efektif, adil dan lestari. Sebagai konsekuensi, diperlukan pula keberanian politik untuk meninjau-ulang seluruh kebijakan yang berpotensi menghancurkan

ekologis dan kepentingan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan rakyat.

Kedua, membangun rakyat kritis (*critical mass*) sebagai wujud dari percepatan perjuangan lingkungan hidup yang sejati menjadi mutlak diperlukan; untuk menahan dan melawan laju ketidakadilan lingkungan di bumi Indonesia. Rakyat kritis yang dimaksud adalah rakyat yang mengetahui sedang hidup dalam ancaman ekologis, siap berbuat untuk keselamatan kolektif, dan berani untuk membangun kekuatan politik alternatif, yang anti terhadap model pembangunan neoliberalisme yang telah menghancurkan ekologis dan melanggar HAM di bumi pertiwi. Hanya dengan rakyat kritis-lah percepatan terjadinya perubahan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat dapat tercapai.

**Untuk itu jadilah enviromentalis,
karena menjadi enviromentalis itu
sesungguhnya gampang.**

Jakarta, 21 Januari 2007

Chalid Muhammad
Direktur Eksekutif Nasional WALHI



**Lingkungan hidup
tak pernah menjadi agenda
utama bangsa Indonesia.
Lingkungan hidup
hanya menjadi
etalase pembangunan
selama tiga dekade terakhir.
Kini saatnya mengubah sejarah
dan haluan bangsa kita!**

BAGIAN PEMBUKA

MEROMBAK PARADIGMA PEMBANGUNAN

oleh **Emil Salim**



*Aksi WALHI di pertemuan internasional
UNFCCC Bali Desember 2007*

Foto: Dok. WALHI

KETIKA bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ikut menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Pertama 1968-1973, saya merasa betapa sulit memobilisasi dana untuk pembangunan. Indonesia sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi yang berat. Di bidang politik, sedang berlangsung peralihan pimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Di bidang ekonomi sedang ditempuh rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi.

Masyarakat sangat mengharapkan perubahan. Tetapi dana pembiayaan pembangunan tidak cukup. Laju inflasi yang tinggi telah menggerogoti sumber pembiayaan dalam negeri. Sedangkan sumber pembiayaan luar negeri terhambat oleh utang luar negeri yang dikemplang tempo hari. Investor dalam maupun luar negeri cenderung menanti sampai keadaan politik lebih terang dan tenang.

Dalam kondisi seperti ini, peranan forum *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) sebagai wadah kerjasama negara sahabat membantu pulihnya keadaan ekonomi Indonesia, menjadi penting. Pada 1970-an Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut agar 0,7% Produk Domestik Bruto (PDB) tiap negara maju dialihkan ke negara berkembang untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara negara maju dengan negara berkembang.

Bantuan dana pembangunan memang diberikan, namun tak sampai 0,7% PDB. Pokok masalahnya terletak pada syarat-syarat

(*conditionality*) pinjaman yang dikenakan kepada negara berkembang, seperti dana pinjaman harus dibelanjakan di negara yang memberikannya (dikenal dengan "*tied-aid*"); perlunya konsultan asing menyusun studi kelayakan dan mengawasi pembangunan (pembiayaan diambil dari pinjaman); besarnya suku bunga, masa tenggang tanpa-bayar dan jangka waktu pinjaman. Karena itu, fokus negosiasi terpusatkan pada ikhtiar memperkecil berbagai syarat-syarat ini demi keuntungan negara kita.

Setiap perkembangan dunia yang bisa mengakibatkan munculnya syarat-kondisi baru dalam pembiayaan pembangunan pun, mau tidak mau, selalu ditanggapi secara hati-hati dan kritis. Dalam suasana begitulah Indonesia diundang menghadiri *United Nations Conference on Human Environment* di Stockholm, Swedia, Juni 1972.

Saya memimpin delegasi Indonesia ke konferensi ini. Dan, saya berangkat dengan pertanyaan mengenai apa dan mengapa "lingkungan hidup" itu dimunculkan. Akankah konsep ini berkembang menjadi semacam syarat kondisi pembangunan baru?

Ada dua hal yang menarik perhatian saya selama Konferensi Stockholm itu, yaitu:

Pertama, timbul semacam pelangi pendapat mengenai substansi permasalahan lingkungan hidup. Semua negara maju mendukung usaha institusi internasional dalam lingkungan PBB untuk menanggulangi masalah lingkungan secara global. Sebaliknya, Brasil memelopori negara-negara berkem-

bang untuk bersikap kritis. Mereka curiga curiga pada “pembangkitan” isu lingkungan. Ini dilihat sebagai ikhtiar negara maju untuk menghambat proses industrialisasi negara berkembang. Itu yang membuat, dari podium pembicara, sang Menteri Brasil mengundang investor untuk membangun industri di negerinya. Beliau tak ambil peduli pada kemungkinan timbulnya polusi dengan berseru: “for the sake of development, we welcome pollution!”. Beberapa negara berkembang

lainnya bisa menerimanya dengan syarat jika diikuti penambahan bantuan (*new and additional aid*).

Indira Gandhi adalah satu-satunya kepala pemerintahan dari negara berkembang yang menghadiri Konferensi Stockholm ini. Pendapat India pada waktu itu, “kemiskinan



adalah perusak utama lingkungan". Karena itu usaha penanggulangan lingkungan harus dimulai dengan pemberantasan kemiskinan.

Dalam kemelut perkembangan aneka aliran pikiran ini, Indonesia yang baru keluar dari krisis dan mulai menata negara untuk merintis pembangunan, mengambil sikap hati-hati dan membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak merintis jalan "membangun tanpa merusak lingkungan." Dan sejak itu tumbuh berkembang keinginan untuk mencari pola "pembangunan berwawasan lingkungan."

Kedua, kehadiran dan peranan NGO (*non-governmental organization*). Ini adalah konferensi PBB pertama yang melibatkan NGO berbagai negara. Mereka membantu penyiapan konsep, penyelenggaraan dan kegiatan konferensi dengan dukungan penuh dari Maurice Strong, Sekretaris Jenderal Konferensi ini. Para pemimpin NGO ini mempunyai pendekatan permasalahan non-konvensional dan berpikir "di luar kotak"

(*outside the box thinking*). Menurut pandangan mereka, pembangunan konvensional sudah tidak memadai lagi. Saya memperoleh banyak hal-hal baru di luar buku teks ekonomi sehingga meluaskan cakrawala pembangunan. Dan, dari Maurice Strong, saya peroleh banyak kiat dan pengetahuan tentang hal-hal NGO ini. Sungguh pun begitu, dalam pikiran saya belum terjawab pertanyaan apa, mengapa dan untuk apa peranan NGO dalam pembangunan?

Ketika bertugas selaku menteri di bidang lingkungan hidup (1978-1993) saya mendapat kesempatan untuk lebih mendalami masalah lingkungan dan hal-hal NGO. Masa belajar yang sangat berarti ketika saya ikuti *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau lebih dikenal dengan *Brundtland Commission* selama Oktober 1984 hingga Maret 1987, yang dipimpin Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Menariknya, saat bersidang di Jakarta (Maret 1985) untuk pertama kali dilaksanakan acara *public hearings* dengan berbagai kelompok masyarakat, pengusaha dan wakil Pemerintah. Melihat manfaatnya, pola sidang ini kemudian dijadikan model pendekatan kerja WCED dan diterapkan juga di Brasil, Zimbabwe, Uni Sovyet, Jepang, Kanada dan Norwegia.

Pembelajaran berharga kedua, ketika saya mengikuti rangkaian pertemuan internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi "Sepuluh tahun sesudah Stockholm" (Nairobi, 1982), KTT Bumi Rio (1992), KTT Pem-

bangunan Berkelanjutan (Johannesburg, 2002), serta berbagai seminar, *workshop* juga konferensi regional dan internasional lainnya. Diskusi dengan berbagai pihak di forum internasional ini memperluas wawasan saya tentang pengkaitan pembangunan dengan lingkungan.

Hasil pengalaman berkecimpung dalam lingkungan melahirkan keyakinan, pola pembangunan konvensional yang diterapkan selama 1950-2000 perlu diubah menjadi pola pembangunan berkelanjutan. Perubahan pola mencakup:

- Proses pembangunan satu jalur (*single track*) “ekonomi saja” menjadi **proses banyak jalur (*multi track*) “ekonomi, sosial dan lingkungan”**;
- Pengutamaan sasaran jangka pendek menjadi **pencapaian sasaran jangka panjang melalui keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan**;
- Perlakuan “ekonomi sebagai kendala utama” menjadi **“ekologi sebagai kendala utama”**;
- Dari pola pembangunan konvensional mengejar kenaikan pendapatan materi, melalui usaha privat individual menjadi **pola pembangunan berkelanjutan mengejar keseimbangan equilibrium materi ekonomi, kehidupan sosial dan alam (*tri hita karana*) melalui kesetaraan kerja antara peme-**

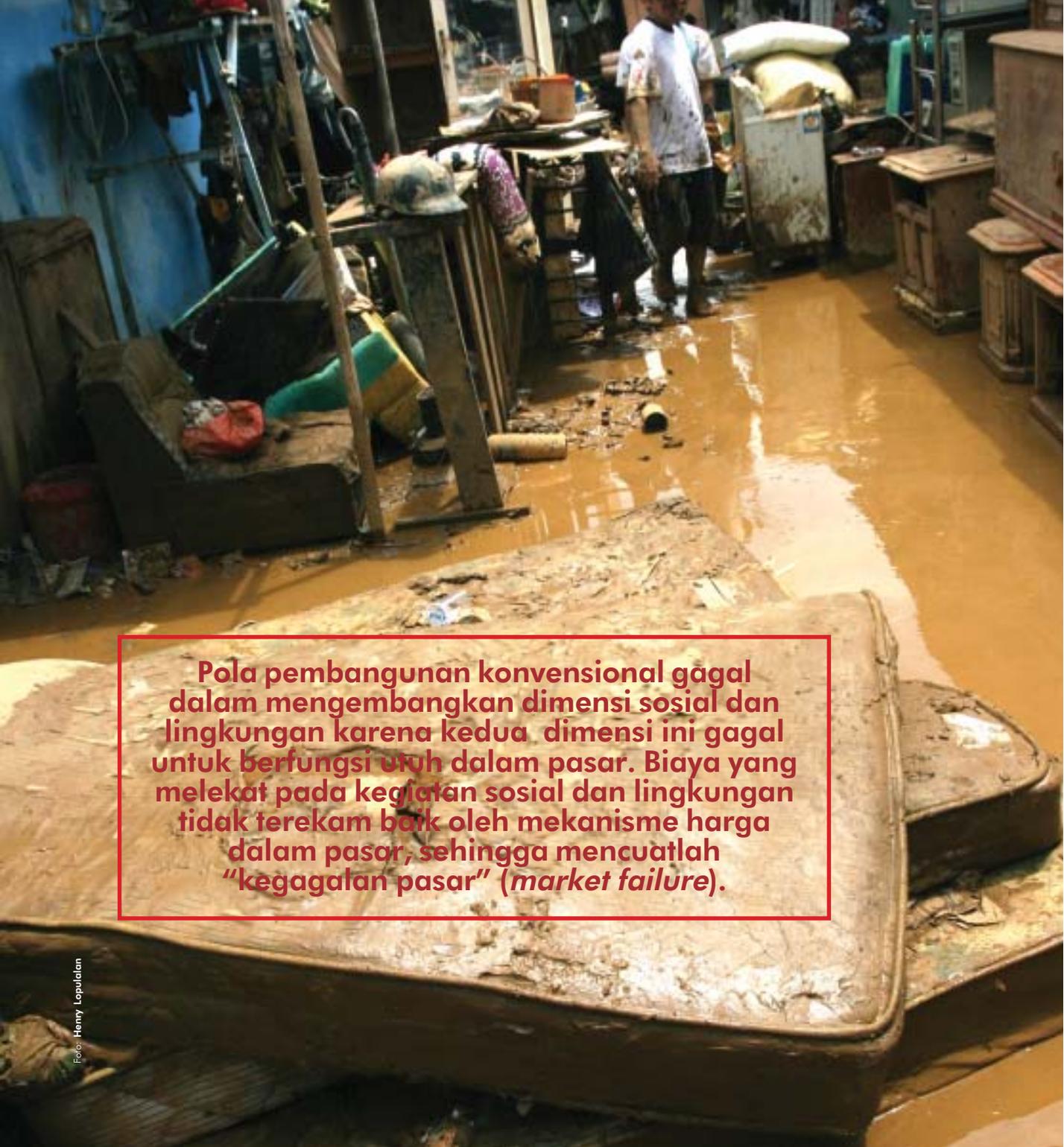
rintah, pengusaha dan masyarakat Madani;

- Memprioritaskan maksimalisasi kesejahteraan pribadi menjadi **maksimalisasi keadilan sosial melalui pengutamaan pemberantasan kemiskinan.**

Perubahan paradigma pembangunan ini adalah konsekuensi logis dari perubahan tantangan pembangunan. Pembangunan konvensional telah berhasil menaikkan pendapatan materi penduduk dunia pada tahun 2000 sampai tujuh kali keadaan pada 1950. Hidup manusia sekarang kelimpahan kekayaan materi yang lebih banyak, lebih beragam dan lebih baik dibandingkan setengah abad tahun lalu.

Namun pembangunan konvensional telah gagal memberantas kemiskinan, mencegah konflik sosial yang sekarang meletus di banyak negara, dan mengurangi ketidakadilan sosial yang semakin dalam antara negara maju dengan negara berkembang, serta antara masyarakat di dalam negara masing-masing.

Pembangunan konvensional juga gagal membendung proses kerusakan dan degradasi lingkungan. Akibatnya, sistem penunjang kehidupan alami sekarang terancam serius oleh jebolnya lapisan ozon, naiknya suhu bumi, berubahnya cuaca iklim, naiknya permukaan laut sehingga mampu menenggelamkan pulau dalam Musim Angin Barat, meningkatnya frekuensi banjir di musim hujan dan mengering-gersangkan alam di musim



Pola pembangunan konvensional gagal dalam mengembangkan dimensi sosial dan lingkungan karena kedua dimensi ini gagal untuk berfungsi utuh dalam pasar. Biaya yang melekat pada kegiatan sosial dan lingkungan tidak terekam baik oleh mekanisme harga dalam pasar, sehingga mencuatlah "kegagalan pasar" (*market failure*).

kemarau, menciutnya hutan, menyempitnya keanekaragaman hayati, meluasnya tanah kering gersang, meningkatnya evaporasi air permukaan dan berkurangnya secara kritis volume air, serta meluasnya pencemaran udara, laut, sungai dan tanah.

Pola pembangunan konvensional gagal dalam mengembangkan dimensi sosial dan lingkungan karena kedua dimensi ini gagal untuk berfungsi utuh dalam pasar. Biaya yang melekat pada kegiatan sosial dan lingkungan tidak terekam baik oleh mekanisme harga dalam pasar, sehingga mencuatlah “kega-

galan pasar” (*market failure*).

Kegagalan pasar ini harus dan perlu dikoreksi oleh pentadbiran (*governance*) yang baik, di sektor pemerintahan (*good governance*) dan di sektor pengusaha (*good corporate governance*). Namun sering-sering pula kita menderita “kegagalan pentadbiran” di sektor pemerintahan (*governance failures*) dan pengusaha (*corporate governance failures*).

Untuk mengatasi “kegagalan pasar” dan “kegagalan pentadbiran” ini diperlukanlah kekuatan pengimbang dalam wujud



“masyarakat madani” yang sifatnya “bukan pengusaha” dan “bukan pemerintah”. Masyarakat madani dengan kedua ciri pokok ini memungkinkan proses ekuilibrium dalam mengembangkan pembangunan tiga jalur: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tantangan pembangunan abad ke-21 kini tidak bisa hanya ditanggapi oleh pemerintah atau pengusaha saja. Ancaman kooptasi yang satu oleh yang lain akan menimbulkan korupsi dan kolusi yang merugikan pembangunan sehingga tidak bisa berlanjut.

Tantangan ini harus ditanggulangi secara bersama dan serentak dalam hubungan kerja yang setara antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil dalam pola pembangunan berkelanjutan. Pelaksananya sendiri, dengan mengoreksi pasar agar arus pembangunan terkelola menuju cita-cita pembangunan manusia yang fitri dengan masyarakat sosial yang adil sejahtera dalam ruang lingkup lingkungan hidup yang alami dan lestari.

Emil Salim,
mantan Menteri Lingkungan Hidup
Republik Indonesia 1978-1993
dan salah satu pendorong utama
berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)



Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menjadi pelopor gerakan lingkungan hidup di Indonesia selama seperempat abad. Mengalami pasang surut, WALHI melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari kampanye penyadaran kelestarian lingkungan hidup, advokasi kebijakan, sampai dengan perjuangan pada keadilan lingkungan hidup.



MENGENAL WALHI

**GERAKAN LINGKUNGAN
DI INDONESIA**

“Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”



Soekarno,
Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945



DUA bulan menjadi Menteri Lingkungan Hidup, pada 1978 Emil Salim berdialog dengan beberapa kawan, seperti Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Rio Rahwartono, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Tjokropranolo, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta saat itu. Emil Salim ingin lingkungan hidup menjadi sebuah gerakan masyarakat di Indonesia.

dengan isu lingkungan.

Emil Salim sebenarnya ingin terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat agar persoalan-persoalan lingkungan bisa diketahui dan dicarikan solusi. Sayangnya, ia tidak punya kaki tangan di



Menteri PPLH Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup Sabah-Malaysia, Gubernur DKI Tjokropranolo



Emil Salim di Pertemuan di Gedung YTKI pada Oktober 1980

“Saya ingin bola salju gerakan lingkungan hidup bisa cepat membesar,” kata Emil saat itu. Bukan hanya itu, Emil Salim juga merasa harus belajar banyak tentang ihwal lingkungan. Ia seorang ekonom dan sama sekali buta

daerah-daerah. Karena itulah, ia mencari akal agar “bola salju lingkungan” itu bisa menggelinding lebih cepat.

Dalam diskusi-diskusi informal, Emil Salim tahu, ia tidak punya pilihan lain kecuali minta bantuan NGO lingkungan dan pecinta alam. Ia berharap, kelompok NGO lingkungan dan pecinta alam dapat membantu



mengatasi pelbagai persoalan lingkungan. Ia menilai kedua kelompok ini memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sehingga, pemerintah bisa menyampaikan program lingkungan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bisa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dengan cepat melalui peran fasilitasi NGO lingkungan dan pencinta alam.

Keinginan Emil Salim yang begitu besar membuat Gubernur Tjokropranolo menawarkan sebuah ruangan untuk arena pertemuan kelompok NGO lingkungan. Gayung bersambut, tanpa pikir panjang Emil Salim langsung menerima tawaran Tjokropranolo untuk melakukan pertemuan NGO seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Lantai 13, Balaikota, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Tak disangka, pertemuan itu dihadiri sekitar 350 lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari lembaga profesi, hobi, ling-

kungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, jurnalis, dan lain sebagainya. Arena itu menjadi ajang "curhat" Emil Salim kepada komunitas NGO. Ia ingin lingkungan hidup menjadi arus utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan ini Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur sempat hadir sebentar. Boleh jadi ia menilai Kelompok NGO dan Pecinta Alam seharusnya tetap berada dalam kendali kementeriannya. Ia ingin cari tahu apa sebenarnya akan dikerjakan oleh kalangan NGO lingkungan.

Pada akhir pertemuan disepakati sepuluh NGO akan membantu program-program pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Ke-sepuluh organisasi itu kemudian dikenal dengan nama Kelompok 10.

Awalnya, kelompok ini akan bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Kelompok Sepuluh. Namun, George Aditjondro menolak nama "Sekber", ia menilai nama ini amat dekat dengan partai yang berkuasa pada masa itu, Golongan Karya (Golkar). Akhirnya, George mengusulkan nama Kelompok 10. Di Lantai 13, Gedung Balai Kota Jakarta itulah, lahir Kelompok 10 yang dua tahun kemudian berubah menjadi WALHI.



Foto: Dok. WALHI



**“Dua puluh tahun
dari sekarang,
kita akan lebih
menyesali hal-hal
yang tidak
kita lakukan
dibandingkan
yang telah kita
lakukan.”**

David McTaggart

pendiri Greenpeace

Di Pulau Kyusu, Jepang, seorang ibu sedang memandikan anak perempuan, Tamoko Uemura (16) yang keracunan limbah logam. Tubuhnya mengerut, cacat fisik dan buta sejak dilahirkan dikarenakan racun merkuri industri yang meracuni persediaan air di Minamata, Jepang.

KISAH KELOMPOK SEPULUH

KELOMPOK Sepuluh (dideklarasikan pada 23 Mei 1978) menjadi wadah tukar informasi, tukar pikiran, dan penyusunan program bersama mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia maupun dunia.

Anggota Kelompok Sepuluh yaitu:

1. Ikatan Arsitek Landsekap Indonesia (IALI), Ketua: Ir. Zein Rachman
2. Yayasan Indonesia Hijau (YIH), Ketua: Dr Fred Hehuwed
3. Biologi Science Club (BCS), Ketua: Dedy Darnaedi
4. Gelanggang Remaja Bulungan, Ketua: Bedjo Raharjo
5. Perhimpunan Burung Indonesia (PBI), Ketua H. Kamil Oesman
6. Perhimpunan Pecinta Tanaman (PPT), Ketua Ny. Mudiati Jalil
7. Grup Wartawan Iptek, Ketua Soegiarto PS
8. Kwarnas Gerakan Pramuka, Ketua Drs. Poernomo
9. Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup (HUKLI), George Adjidjondro,
10. Sekolah Tinggi Publisistik, Srutaman-dala

Kelompok 10 kemudian menambah anggota untuk menguatkan kelompok, antara lain Yayasan Pendidikan Kelestarian

Alam yang diketuai oleh Ibu Aziz Saleh, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang diketuai oleh Zumrotin, Persatuan Radio Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI), Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang diketuai oleh Ismed Hadad, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Harian *Sinar Harapan* yang diwakili oleh Winarta Adisoebrata.

Meskipun keanggotaannya tidak lagi sepuluh organisasi, namun nama Kelompok 10 tetap dipertahankan untuk memberikan penghargaan kepada sepuluh organisasi pendirinya.

Kelompok ini diketuai oleh Zein Rachman (IALI), dengan Sekretaris I Dedy Darnaedi (BSCc) dan Sekretaris II Bedjo Rahardjo (GRJS-Bulungan). Untuk menjalankan kegiatannya, kelompok ini menempati sebuah ruangan di kantor PPLH, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kelompok ini bertugas menjadi jembatan antara pemerintah dan NGO. Beberapa NGO ini menawarkan bantuan kepada Emil Salim untuk membantu menjadi sukarelawan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pada medio 1980, berita pencemaran Teluk Jakarta disiarkan media massa mengejutkan banyak orang, termasuk aktivis lingkungan. Kasus ini mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat, terlebih ketika



*Foto-foto korban
"Penyakit Minamata"*

Foto-foto: Dok. WALHI

Komplek perusahaan kimia Chisso di Minamata, Jepang. Setiap harinya, limbah kimia dibuang ke teluk, meracuni air dan bahan makanan masyarakat dan menyebabkan apa yang disebut dengan Penyakit Minamata.

Foto: William Eugenesmith, 1972/Dok. WALHI



hasil penelitian terhadap kematian beberapa anak di Teluk Jakarta diindikasikan sama dengan kejadian di Minamata, Jepang. Mereka tewas akibat keracunan logam berat, merkuri.

Selepas kejadian itu, NGO lingkungan menyelenggarakan seminar berkaitan dengan pencemaran di Teluk Jakarta. Seminar ini mengundang Profesor Harada dari Jepang dan Dr. Meizer, seorang dokter yang melakukan pengamatan di Teluk Jakarta bersama Kelompok Sepuluh.

Laporan seminar ini direspon dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Menteri Negara PPLH, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, dan para dokter. Kelompok Sepuluh kemudian diundang ke Jepang untuk mempelajari kasus

Minamata di Jepang.

Selain menangani Teluk Jakarta, Kelompok Sepuluh juga melakukan kegiatan penelitian dan pendampingan masyarakat di Dukuh Tapak, Semarang. Kasusnya, pencemaran air oleh limbah pabrik. Itu mengakibatkan lahan pertanian, air tanah dan tambak masyarakat tercemar logam berat.

Semakin maraknya masalah lingkungan, mendorong Kelompok Sepuluh berniat memperluas dampak programnya dengan menyelenggarakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) I. Di sinilah WALHI dicetuskan.



Foto: Dok. WALHI

Teluk Jakarta



PERTEMUAN OKTOBER 1980

KETUA *Indonesia Wildlife Fund* Sultan Hamengku Buwono IX memberikan dukungan politik yang luar biasa pada akhir 1970. Ia menyatakan, mendukung inisiatif Kelompok Sepuluh menyelenggarakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) I bagi kalangan NGO Lingkungan di Indonesia.

Kemudian, Emil Salim dan Erna Witoelar sepakat menggabungkan Pertemuan PNLH dan Konferensi Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang pertama di Jakarta. Untuk acara ini, Emil Salim melapor kepada Presiden Soeharto. Ini kebiasaan para menteri tetapi memiliki aura lain saat berbicara lingkungan pada masa itu.

Pertemuan ini disponsori oleh Yayasan Pembinaan Suaka Alam dan *Indonesia Wildlife Fund*. Selain itu, juga muncul beberapa nama yang memberikan dukungan, seperti Menteri Pekerjaan Umum Purnomo, Menteri Kehutanan Soedjarwo dan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.

Mereka memberikan bantuan dana yang digabungkan dengan hasil “bantuan” antar-kawan, berhasil terkumpul sekitar sepuluh juta rupiah. Erna Witoelar dan Nasihin Hasan mengambil dana sumbangan itu dari *World Wild Fund* (WWF) yang diserahkan oleh Soedjarwo (Menteri Kehutanan sekaligus bendahara WWF).

“Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.”

Peter F. Drucker

PNLH Pertama berlangsung pada 13-15 Oktober 1980, di Gedung YTKI, Jakarta bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi PSL se-Indonesia. Pertemuan ini diikuti oleh 130 peserta dari 78 organisasi, kelompok masyarakat, organisasi pecinta

alam, dan organisasi profesi.

Tokoh yang dianggap menonjol saat itu, antara lain George Junus Aditjondro (Bina Desa) M.S. Zulkarnaen (Yayasan Mandiri Bandung), Satjipto Wirosardjono (PKBI) Rudy Badil (Mapala UI), dan Zen Rahman (IAI). Dari kalangan PSL kampus tercatat nama Otto Soemarwoto, Hasan Poerbo, Soeratno Partoatmodjo, Abu Dardak, dan lain-lain.

Pertemuan ini dilaporkan berjalan alot

nik, mondar-mandir sambil sesekali menyeka keringat di kening dan pipinya. Sesaat setelah masuk ruangan, Erna kembali keluar, kali ini matanya merah, ia menangis. "Tidak... kita harus memutuskan sekarang, pertemuan ini harus menghasilkan sesuatu," katanya sambil terbata-bata.

Pemilihan nama itu memakan waktu cukup lama. Setelah sidang dilanjutkan, saat itulah lobi tahap kedua dilanjutkan. Kali ini,



Foto: Dok. WALHI

Para peserta Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) I

karena beberapa NGO lingkungan pecinta alam alergi dengan gerak pemerintah yang selalu ingin membentuk organisasi payung, mirip KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Kelompok pecinta alam yang terkenal dengan sikap independen menolak keras usaha kooptasi semacam itu.

Kamis sore, menjelang penutupan tetap belum diperoleh sebuah nama. Erna Witoelar, salah seorang panitia tampak pa-



Foto: Dok. WALHI

Erna Witoelar menyambut para peserta PNLH-I

lobi difokuskan untuk mendekati kelompok muda yang terdiri dari pecinta alam dan kelompok agama yang takut terkooptasi ideologinya.

Menjelang senja, Erna masih gelisah. Ia tahu sidang akan ditutup dua jam lagi, sementara sidang belum beranjak soal nama forum nasional yang akan menghimpun NGO Lingkungan Hidup.

Dalam percakapan di pojok ruangan

depan, terjadi percakapan antara Erna dengan Zen Rachman dan Wicaksono Noeradi. Yang penting bentuknya bukan federasi atau fusi.

“Mengapa tidak sekretariat bersama yang dalam bahasa Inggrisnya, *Coordinating Secretariate?*” katanya.

“Tidak bisa,” jawab Erna. “Sebab mirip Sekber Golkar!”

Mereka mengusulkan nama “Forum”



Emil Salim dan para peserta PNLH-I

cukup baik. Namun, Erna menjawab “Tidak cukup.” Mereka berdua malah sudah menyebutkan nama Forum Komunikasi.

Erna tetap tidak setuju, “Tidak mungkin, sebab mirip forum komunikasi putra-putri purnawirawan ABRI dan putra-putri ABRI.”

Setelah lama termenung-menung, walaupun agak pesimis “Bagaimana kalau Wahana?” usul Wicaksono.

“Apa artinya itu?” tanya Erna.

“Artinya, *vehicle* atau *means*.”

Entah karena terdesak waktu atau memang sepakat, Erna melesat masuk ke ruangan, kemudian duduk di depan sidang. Ia menawarkan nama “Wahana” dilengkapi penjelasan arti—sehingga namanya menjadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI.

Nama ini dianggap independen, tidak berbau parpol, serta mencerminkan nama

Nama ini dianggap independen, tidak berbau parpol, serta mencerminkan nama khas Indonesia (bukan nama asing). Peserta mulai riuh kembali. Saling tanya dan berceletuk tentang nama tersebut.

khas Indonesia (bukan nama asing). Peserta mulai riuh kembali. Saling tanya dan berceletuk tentang nama tersebut.

George Aditjondro yang paling vokal soal nama mengacungkan jari dan menyatakan setuju dengan nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Beberapa lembaga kemudian juga mengacungkan jari tanda setuju. Ketika Erna menawarkan pengambilan keputusan untuk menggunakan nama

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mayoritas menyatakan setuju.

Tok...tok..., Kamis malam, 15 Oktober 1980, palu diketok. Nama disepakati menggunakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Suasana haru mendominasi malam itu, terutama ketika peserta bergandeng tangan sambil menyanyikan lagu *Indonesia Raya* sebelum penutupan.

Erna menutup pertemuan dengan meniup lilin sebagai simbol kelahiran WALHI. Deklarasi dilakukan bersamaan dengan penutupan Konferensi PSL seluruh Indonesia. Selain memutuskan pembentukan WALHI juga disepakati pertemuan sejenis akan dilakukan secara periodik setiap dua tahun. Duet Erna dan Zen Rachman mengantar WALHI pada periode 1980-1982.

Untuk mencegah kooptasi pemerintah, WALHI mengusung tiga asas organisasi, yakni: Asas Kemandirian, Asas Bekerjasama Tanpa Ikatan, dan Asas Kerja Nyata untuk Masyarakat. Untuk itulah para aktivis NGO mendeklarasikan WALHI sebagai organisasi jaringan. Forum komunikasi dipandang sebagai bentuk paling tepat saat itu di tengah sistem politik yang tidak demokratis.

Untuk memudahkan koordinasi, WALHI membentuk presidium yang dijalankan oleh seorang sekretaris eksekutif. Tugas presidium WALHI dalam masa dua tahun pertama adalah melakukan fungsi-fungsi kehumasan organisasi.

Hubungan dengan lembaga pemerintah dijelaskan sebagai hubungan yang tetap dijaga jaraknya dan bersifat timbal balik. Dengan alasan tetap menjaga jarak, para aktivis itu menyatakan tidak menggabungkan diri atau membantu Emil Salim di kementerian sebagai staf. Hanya Linus Simanjuntak yang kemudian menjadi Sekretaris Menteri.

Pada 18 Oktober 1980, tiga hari setelah Deklarasi WALHI, para aktivis ini diundang ke Bina Graha oleh Presiden Soeharto. Menurut Zen Rachman, Presiden Soeharto mengatakan tidak semua hal tentang keles-tarian lingkungan hidup dapat dikerjakan oleh pemerintah. Dengan kehadiran NGO lingkungan dan pecinta alam, Presiden berharap penanggulangan masalah dan pelestarian lingkungan hidup dapat dijalankan lebih cepat.





SUKUR DEH
'KANG GALINYE
UDAH PADA
DIBRENTIIN...
MAKASI, YEEE
PA WALI!!



DAUR PERTAMA: PENDIDIKAN KESADARAN PUBLIK

WALHI telah lahir dan kekuatannya sebagai forum komunikasi sangatlah besar. Keanggotaan WALHI mekar dengan cepat. Ini di luar perkiraan rezim otoriter masa itu. Sekaligus, menjadi waspada pada sepak terjang kampanye lingkungan WALHI.

Pemerintah pantas kuatir dengan perkembangan WALHI. Bayangkan saja, dalam waktu dua tahun anggota WALHI melonjak dari 80-an NGO lingkungan pada 1980, menjadi 320 organisasi pada 1982. Tiga tahun berikutnya, 1985, anggota WALHI sudah berjumlah 400 organisasi dari seluruh Indonesia. Pada 1986, PNLH III mencatat dari 486 NGO lingkungan yang ada di Indonesia, 350 organisasi menggabungkan diri ke WALHI.

Pada masa awal kerja, WALHI lebih memfokuskan diri pada promosi diri. Memperkenalkan keberadaannya ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kegiatan utama WALHI pada saat itu, kampanye kesadaran pelestarian lingkungan hidup. Antara lain, pendidikan konservasi alam dan kampanye lingkungan bersama para seniman, seperti Iwan Fals, Sam Bimbo, Uly Sigar Rusady, dan lain-lain. Pendidikan konservasi ini kebanyakan diselenggarakan di kampus-kampus.

Meski kegiatan pendidikan dan kampa-

“...
**Sekarang matahari,
semakin tinggi.
Lalu akan bertaha juga di
atas puncak kepala.
Dan di dalam udara yang
panas, kita juga beranya:
Kita ini dididik untuk
memihak yang mana?
Ilmu-ilmu yang diajarkan
di sini akan menjadi
alat pembebasan,
ataukah alat penindasan?**
...”

W.S. Rendra

Sajak Pertemuan Mahasiswa

nye ini membuat WALHI dikenal publik, tapi WALHI juga melakukan kerja-kerja lain. Misalnya, terlibat aktif dalam setiap pembahasan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) mulai dari *draft* akademik sampai pada tahap akhir saat diserahkan kepada Sekretariat Negara. Usulan WALHI yang

penting terlihat di Pasal 6 UULH dengan dicantumkannya “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan lingkungan hidup. Karena itu pula, DPR mengundang WALHI hadir pada acara dengan pendapat tentang UULH.

Pemerintah belum mengganggu eksistensi WALHI. Kemenangan gemilang Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1982 juga tidak mengubah konjungtur politik.

Indonesia Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Jangan bayangkan hal seperti ini bisa terjadi sekarang.

Selain dapat dukungan dana dari pemerintah, WALHI coba menggalang dana lewat pendirian Yayasan Dana Mitra Lingkungan (DML) pada 27 Oktober 1983. Yayasan ini didirikan oleh beberapa tokoh nasional, seperti Soemitro Djोधadikusumo, Jakob Oetama, Erna Witoelar dan Haroes



Foto: Dok. WALHI

Bahkan, WALHI menjadi tempat berkiprah para aktivis kampus yang “dibabat” pada 1978.

Pada masa itu, NGO ingin bekerja nyata untuk rakyat tanpa afiliasi dengan partai politik dan kelompok agama tertentu. Tidak heran, PNLH II bisa diselenggarakan di Sekolah Calon Perwira Tentara Nasional

Al Rasjid. Strategi ini relatif berhasil menggalang dana dan berkontribusi cukup signifikan untuk pertumbuhan WALHI di masa awal itu.

Kampanye WALHI mendapatkan dukungan pemerintah, masyarakat dan media massa. Media Massa bahkan mulai menempatkan lingkungan hidup sebagai isu



**SAKSIKANLAH
PAGELARAN
LAGU
LINGKUNGAN
HIDUP
OLEH**

**BIMBO
GROUP**
Gedung Koni
3-4 Des. '82
Sario MANADO

**BOURAO
INDONESIA
AIRLINES**

DISELENGGARAKAN OLEH :
WANA LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA DAN
FORUM KOMUNIKASI PENGEMBA
NDAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP - SULAWESI UTARA





utama. Misalnya saja, liputan pencemaran merkuri di Teluk Jakarta pada 1980 menjadi berita sampul majalah *Tempo*.

Pada 1984, WALHI menerbitkan buku *Neraca Tanah Air*. Isinya, kondisi lingkungan hidup secara komprehensif. Buku ini menjadikan WALHI disegani di kalangan akademisi dan media massa. Pada tahun yang sama, WALHI menerbitkan *Warta Tanah Air* secara reguler.

Emil Salim dalam pembukaan PNLH III kembali mengulang keinginan pemerintah terhadap peran WALHI sebagai perekat antara masyarakat, komunitas NGO dan pemerintah. Peringatan ini sebagai respon atas sikap kritis kalangan NGO pada kebijakan pembangunan yang ekspansif dan ekstraktif.

Pada akhir 1980-an terjadi pergulatan dalam jaringan WALHI, terutama di

antara NGO lingkungan yang mulai berani melakukan kampanye isu-isu lingkungan yang panas dan NGO lingkungan ingin tetap murni mengkampanyekan kelestarian lingkungan hidup tanpa embel-embel kepentingan politik. Memang, situasi pada saat itu sedang panas, misalnya saja rencana Scott Paper menanam investasi di Papua dan meluasnya demonstrasi mahasiswa menentang proyek-proyek pembangunan, seperti Pembangunan Bendungan Kedung Ombo.

WALHI berada di persimpangan jalan. Advokasi keras atau advokasi lembut?

SPECIAL ISSUE

APRIL 22, 2003

TIME

Asian Heroes

Indonesian
Folk Singer
Iwan Fals

Pramoedya Ananta Toer on the Women Who Made Him, Pico Iyer on Doraemon,
William T. Vollmann on The Hope Giver and William Gibson on "Beat" Takeshi
PLUS: Ichiro Suzuki, Hidetoshi Nakata, Sachin Tendulkar, Jackie Chan,
Xanana Gusmão, Aung San Suu Kyi, the Karmapa, A-Mei, Zhao Ziyang

Iwan Fals yang ikut berkontribusi pada masa awal perjuangan WALHI, pada 2003 dipilih Majalah Time sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Asia, "Pahlawan Asia".



Foto: Istimedia

Tambang Freeport

DAUR KEDUA: DEMOKRATISASI KEKAYAAN ALAM

PADA awal dekade 1990-an, WALHI benar-benar mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. WALHI menggugat Presiden Soeharto karena menggunakan Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai industri pesawat terbang. Ini pelanggaran kewenangan dan pelanggaran hukum, kata WALHI. Ini sebuah sikap dan pilihan strategi baru WALHI. Dengan pilihannya ini, WALHI senantiasa berada di garda terdepan untuk melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata mengancam kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam.

Sejalan pilihan strategi barunya, WALHI melawan PT. Freeport Indonesia. WALHI menegaskan diri tidak berkompromi kepada para perusak lingkungan di Indonesia.

Pada Desember 1989, WALHI memutuskan menggugat enam pejabat negara karena mengizinkan pembangunan pabrik pulp dan rayon, PT Inti Indorayon Utama di Porsea. Dalam sejarah hukum negeri ini, ini untuk pertama kalinya *legal standing* diajukan oleh NGO. Ini jadi catatan pembaruan hukum, karena sebelumnya Indonesia menganut “*asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*”. Artinya, kepentingan hukum biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat

“Aku bukan seorang pembebas. Pembebas itu tidak ada. Rakyat membebaskan dirinya sendiri.”

Ernesto Che Guevara

Legal standing WALHI selalu saja diperdebatkan saat WALHI melakukan gugatan kepada subyek hukum. Tapi dalam perjalanannya, *legal standing* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini akhirnya diterima dan dimasukkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini dikenal dengan nama Hak Gugat Organisasi Lingkungan.

Tercatat ada 10 gugatan yang dilakukan WALHI pada periode 1988 – 2000. Antara lain, menggugat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Inti Indorayon Utama (1988), Dana Reboisasi (1999), Amdal PT. Freeport Indonesia, (1995), Pencemaran air di Surabaya (1995), Penyelewengan dana Reboisasi oleh PT. Kiani Kertas (1997), Kebakaran Hutan di Sumsel (1998), Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar (1999), Hak Atas Informasi yang diberikan PT. Freeport (2000), Hak Penguasaan Hutan di Palu (2001), dan Banjir di Sumatera Utara (2002).

Dari 10 kasus gugatan lingkungan itu, ada satu kasus yang berhasil dimenangkan, yaitu Hak Atas Informasi. Dalam putusannya, Majelis hakim hanya mengabulkan gugatan WALHI sebagian dan mengakui bahwa PT Freeport Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. **Kemenangan ini menjadi catatan sejarah, bahwa lingkungan dapat dimenangkan meskipun harus melewati perjalanan panjang.**



Foto: Istimewa

Pabrik Indorayon



Aksi Freeport di depan pengadilan

Foto: Dok. WALHI



Pesawat CN-235

Foto: Istimewa



Aksi menolak Indorayon Porsea

Foto: Istimewa



*Aksi petani perempuan
di Kontu Sultra melawan
kekejaman aparat pmda
yang menggusur
lahan adat mereka*

Foto: Dok. WALHI

DAUR KETIGA: PERLUASAN GERAKAN LINGKUNGAN

BEGITU bikin advokasi, sesungguhnya, WALHI sudah bersentuhan dengan politik. Ini terutama berdasar pada penilaian WALHI atas persoalan lingkungan di Indonesia. "Pada dasarnya, semua kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang sarat dengan kepentingan politik." Begitu kira-kira sikap analisis WALHI saat itu.

WALHI memang selalu kritis pada persoalan-persoalan politik. Tak ada yang bisa memungkirinya. Sikap kritis itu bersumber pada Statuta WALHI yang memberi mandat untuk menjadi bagian dari upaya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. WALHI sadar, rintangan terbesar ada di depan mata, yakni sistem politik Indonesia yang otoriter. Termasuk, keterlibatan militer yang sangat besar dan ruang sangat kecil bagi gerakan politik dan demokratisasi. Pada April 1998, WALHI kemudian mengubah prioritas enam bulanan menjadi 70% politik dan 30% re-guler.

Pada Juli 1999, WALHI mendaftar sebagai Utusan Golongan di MPR. Tujuannya, agar isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam menjadi isu sentral di parlemen. Tapi, batal karena anggota WALHI yang hadir dalam PNLH ke - VII di Banjarmasin tidak mengizinkan WALHI masuk dalam parlemen.

"Bumi memang tidak sebatas pandang dan udara luas menunggu namun kalian tidak bisa menyingkir kemanapun melangkah kalian pijak air mata kami kemanapun terbang kalian temukan air mata kami kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami bahkan nafas yang kalian reguk tumbuh dari uap airmata kami

**Kalian sudah terkepung
Tak bisa kemana pergi
Maka menyerahlah
ke dalam airmata kami**

Sutardji Calzoum Bachri

Tanah Airmata

Dalam PNLH ke VIII di Parapat, Sumatera Utara, akhir Juni 2002, anggota WALHI memutuskan untuk fokus pada pembenahan organisasi. Soalnya, di depan sana, perjuangan merebut dan mempertahankan kelestarian lingkungan dan sumber-sumber kehidupan itu akan semakin berat. Pilihannya, WALHI harus menjadi organisasi yang profesional dan didukung publik luas.

Transformasi berikutnya, WALHI menca-
nangkan diri jadi organisasi publik. Implika-
sinya ada pada strategi dan taktik perjuang-
an WALHI menyelamatkan lingkungan dan
menjaga kedaulatan rakyat atas kekayaan
alamnya.

Pada 2003 WALHI resmi menolak ban-
tuan kerjasama dari Pemerintah Inggris dan
Pemerintah AS. Dua negara tersebut, dalam
pandangan WALHI, telah terang-terangan



Dok. WALHI

***Di masa
kepengurusan
Longgema
Ginting,
WALHI
menolak
dana
bantuan dari
AS dan
Inggris yang
memotori
penyerangan
Afghanistan
dan Irak***

Direktur Eksekutif WALHI periode 1986–1989 Agus Purnomo mengungkapkan, NGO lingkungan tumbuh dalam “keanekaragaman hayati” dengan aneka bentuk dan ukuran, jenis, serta kegunaan. Belajar dari ekologi hutan tropis, keragaman, konflik internal, bahkan persaingan antarkomunitas bukan faktor yang memperlemah kehidupan di hutan.

melanggar hak asasi manusia dan penggu-
naan kekuatan militer besar-besaran dalam
mencapai misi politik dan ekonomi di Timur
Tengah. Itu ditandai dengan serangan ke
Afghanistan dan Irak.

Penolakan ini realisasi dari nilai-nilai
WALHI yang menolak bantuan dari peme-
rintah dan korporat yang terang-terangan anti
lingkungan dan anti hak asasi manusia. Se-
bagai gantinya, WALHI telah mencanangkan
penggalangan dana publik dengan berba-
gai bentuk kegiatan. Misalnya saja, kam-
panye publik bersama, rekrutmen *Sahabat
WALHI*, penjualan produk-produk “hijau”,
pendidikan publik yang luas, pengembangan
lembaga kajian strategis dan gagasan *Ru-
mah Komunitas WALHI* di Jakarta.

WALHI pun tidak malu-malu mendorong perluasan kekuatan “Kaum *Green*” dengan melemparkan wacana Partai Hijau di Indonesia. Wacana ini penting untuk menilai seberapa luas eksistensi “Kaum *Green*” di Indonesia dan seberapa strategis cita-cita “politik hijau” bisa diwujudkan di Indonesia.

WALHI masa depan adalah organisasi publik yang terkemuka, bermartabat dan selalu konsisten pada pilar keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, demokrasi kerakyatan dan anti kekerasan. Ini semua untuk menjamin kedaulatan rakyat atas kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya.



Tatan Syuliana/APRepro katalog Pameran Karya Pawana Foto Indonesia: Suara Rakyat

Hasil Riset WALHI pada 1999 menunjukkan, dari 48 partai politik peserta Pemilu, hanya ada empat partai politik yang menempatkan lingkungan sebagai agenda utama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK), dan Partai Kedaulatan Bangsa (PKB). Sayangnya, tidak satu partai pun yang merealisasikan agenda tersebut, termasuk PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang Pemilu 1999.

Pada Pemilu 1999, WALHI hampir mendaftar sebagai Utusan Golongan di MPR



Gerakan lingkungan mencapai puncak perjuangannya pada Pertemuan Rio de Jenairo, Brasil, 1992.

Selepas itu gerakan ini bermetamorfosa menjadi gerakan anti globalisasi dan gerakan anti korporasi.

BAGIAN 1

**MENDEDAH
ENVIRONMENTALISME**



Selama 738 hari Environmentalis Julia Butterfly tinggal di kanopi pohon Reedwood, dinamai Luna, di Kalifornia bagian utara.

T **ONGGAK** gerakan lingkungan hidup di Indonesia adalah WALHI. Selama seperempat abad, WALHI telah melekat sebagai wahana perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia. Dan, WALHI telah mencanangkan akan melakukan pendidikan environmentalisme. Gunanya, mengajak kaum muda terlibat aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Dan, untuk itulah Panduan ini dibuat.

Panduan ini tak memaparkan seberapa besar kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, melainkan memperkenalkan cara berpikir “Kaum Environmentalis” dalam membaca keadaan alam sekitar dan kaitannya dengan keberlanjutan perikehidupan komunitas-komunitas di perdesaan dan perkotaan.

Pada bagian ini, Panduan menjelaskan

**“Jika laba-laba bersatu,
mereka dapat merobohkan
seekor singa.”**

Peribahasa Ethiopia

Intinya, menjadi Environmentalis itu mudah!

beberapa istilah yang sering dipadankan dengan gerakan lingkungan. Bagian-bagian selanjutnya adalah teladan bagaimana Kaum Environmentalis memadamkan alam, negara dan dunia. Pada bagian akhir dipaparkan kiat-kiat menjadi environmentalis. Intinya, menjadi Environmentalis itu mudah!

Foto-foto: Dok. WALHI



Foto: Dok.WALHI



Aksi gugatan WALHI
terhadap kasus
NEWMONT, 2007

APA ITU ENVIRONMENTALISME?

ENVIRONMENTALISME adalah gerakan sosial yang dimotori kaum penyelamat lingkungan hidup. Gerakan ini berusaha dengan segala cara, tanpa kekerasan — mulai dari aksi jalanan, lobi politik, hingga pendidikan publik — untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem.

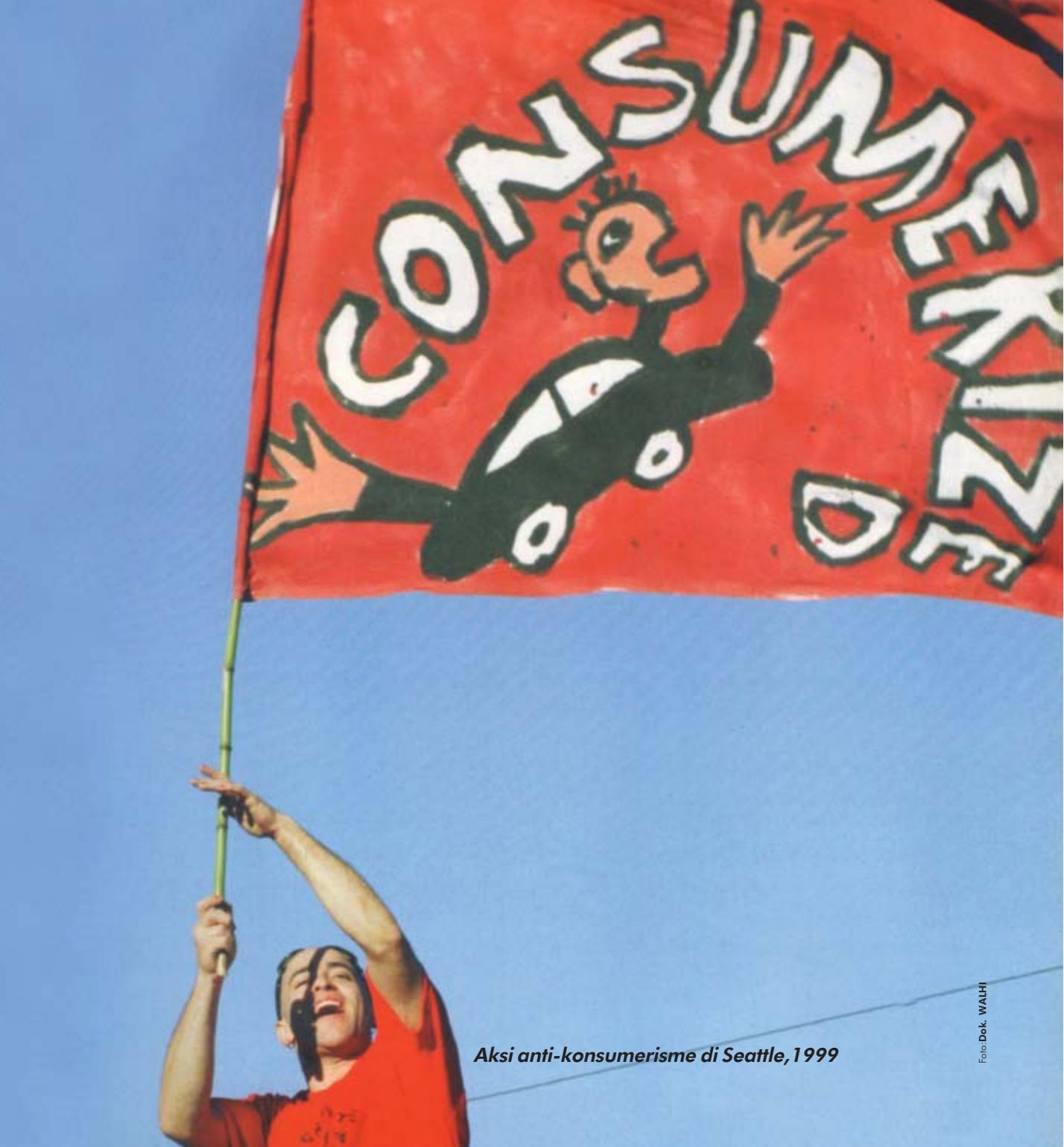
Kaum Environmentalis peduli pada isu pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim dan rekayasa genetika pada produk-produk makanan.

“Satu bumi, milik bersama, tanpa batas, tanpa negara, tanpa tentara.”

Slogan Kaum *Anarchist*

Gerakan Environmentalisme saat ini telah bermetamorfosa menjadi Gerakan Antikorporasi dan Gerakan Anti-Globalisasi. Mengapa? Karena, penguasa dan perusak lingkungan terbesar di dunia adalah perusahaan-perusahaan transnasional.





Aksi anti-konsumerisme di Seattle, 1999

SIAPA ITU KAUM ENVIRONMENTALIS?

KAUM Environmentalis adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendukung setiap tujuan gerakan lingkungan hidup. Umumnya kaum Environmentalis secara politik dikategorikan sebagai “Greens” atau “Kaum Hijau”.

Kaum Environmentalis memiliki pandangan yang kuat atas isu-isu lingkungan hidup dan mengamalkan nilai-nilainya sebagai aktivis, relawan, akademisi dan profesional.

Kaum environmentalis sering disamakan dengan Kaum Konservasionis — kelompok yang berjuang melakukan pelestarian, restorasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kaum Environmentalis yang radikal sering dilabel sebagai *Eco-Terrorism*. Mereka melakukan cara-cara kekerasan, sabotase, vandalisme, perusakan properti dan intimidasi dengan terang-terangan mengatasnamakan paham environmentalisme.

“Jika kita berakar pada hormat dan cinta yang dalam pada inter-koneksi setiap makhluk hidup, ini akan menjadi sebuah kegembiraan untuk membuat pilihan-pilihan yang menolong kelangsungan hidup, ketimbang menghancurkannya.”

Julia Butterfly



Aksi-aksi Kaum Environmentalis



Aksi Bali



Aksi hari bumi 2007

Foto: Dok. WALHI

“Bagi mereka yang membuat revolusi damai tidak akan mungkin melahirkan revolusi kekerasan.”

John F. Kennedy

APA ITU GERAKAN LINGKUNGAN?



GERAKAN Lingkungan adalah gerakan sosial dan politik yang diarahkan untuk pelestarian, restorasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendidikan publik, advokasi perubahan gaya hidup, perbaikan perencanaan komunitas, perubahan ekonomi uang serta perombakan kebijakan negara.

Gerakan Lingkungan terdiri dari berbagai organisasi yang berbeda-beda dan terpisah-pisah, baik organisasi yang memiliki dana besar di tataran nasional dan internasional, sampai ribuan organisasi lingkungan atau individu-individu yang bekerja nyata di tingkat lokal.

Sering dikatakan, Gerakan Lingkungan muncul untuk merespon ramalan Malthus pada abad 18. Malthus adalah orang pertama yang mengingatkan kita akan bahaya keterbatasan persediaan pangan dunia yang tak mampu mencukupi kebutuhan penduduk dunia. Kemudian, Teddy Roosevelt, inisiator konsep Taman Nasional di AS, adalah orang yang juga berpengaruh

pada Gerakan Lingkungan.

Gerakan Lingkungan mulai berkembang pada paruh awal abad 20 di era kebangkitan industri di Barat. Gerakan Lingkungan modern mulai memperoleh angin saat Rachel Carson menulis *The Silent Spring*— cerita bahaya pestisida pada awal 1960-an. Buku ini memberikan pesan tentang kematian bumi atas ulah manusia sendiri.

Pada dekade 1970-an, saat level polusi industri dan kendaraan mulai menguatirkan,



Henry Lopulalan

Di Indonesia, WALHI pernah secara hukum bertindak mewakili pohon-pohon di hutan yang terbakar di Riau, gajah yang habitatnya dikonversi menjadi waduk di Sumatera Barat, dan Sungai Ajkwa di Timika, Papua Barat.

Gerakan Lingkungan memberikan fokus pada pencemaran air dan udara. Tekanan Gerakan Lingkungan hidup pada dekade itu mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah berkenaan dengan penyelamatan kawasan lindung dan habitat satwa liar, serta perlindungan pada spesies langka. Di AS, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang pokok seperti *Clean Water Act*, *Clean Air Act*, *Endangered Species Act* dan *National Environmental Policy Act*. Undang-undang ini kemudian menjadi pijakan dan standar baku

“Ketika makhluk terakhir dari perlombaan ras bernafas tiada, surga dan bumi mesti berlalu sebelum salah satu menjadi.”

William Beebe

naturalis



Berbagai cara dilakukan, termasuk hadangan barisan polisi, agar perubahan dapat terjadi.

Foto: Dek.WALHI



Organisasi ekologi radikal melakukan aksi jalanan menentang kerusakan lingkungan

mutu lingkungan hidup di AS dan kemudian diikuti banyak negara.

Meluasnya kesadaran publik dan ilmuwan berkenaan dengan isu lingkungan, Gerakan Lingkungan hidup dan mulai melebarkan isu ke arah konsep “Sustainability” atau “Keberlanjutan”. Konsep ini mengantarkan Gerakan Lingkungan mulai peduli pada isu-isu dunia, seperti kerusakan lapisan ozon, perubahan iklim dan pencemaran biogenetika.

Gerakan Lingkungan telah berkembang dan bercabang-cabang dengan menciptakan berbagai cara untuk bisa melakukan perubahan. Ada cabang politik dengan Partai Hijau. Ada organisasi ekologi yang radikal seperti Greenpeace yang melakukan aksi jalanan menentang kerusakan lingkungan.

Pandangan ini mempengaruhi banyak orang, kelakuan orang serta berimplikasi pada politik, gaya hidup serta ilmu penge-



Sebuah laporan kondisi lingkungan yang dipublikasikan pada 1972 oleh Club of Rome berjudul *Limits to Growth* menjadi buku suci Kaum Environmentalis. Laporan lain berjudul *The Global 2000 Report* diterbitkan oleh The Council on Environmental Quality, melaporkan keprihatinan yang sama. Baru-baru ini laporan *The Millenium Ecocystem Assessment* memberikan bukti-bukti yang lebih jelas.

tahun ekologi. Gerakan Lingkungan menjadi payung bagi kelompok-kelompok yang berbeda baik ideologi maupun perilaku.

Banyak orang bingung dengan Gerakan Lingkungan dan kaitannya dengan Politik Hijau — yang memiliki kepedulian pada keadilan sosial melampaui ekologi. Karena, Partai Hijau, representasi Politik Hijau, memiliki akar pemikiran dari Gerakan Lingkungan.

Dewasa ini, Gerakan Lingkungan kerap

dikaitkan dengan gerakan moral, gerakan konfrontasi serta posisi radikal, seperti yang diambil oleh Greenpeace dan kelompok-kelompok lain yang lebih radikal, misal Earth First atau Sea Shepherd. Pun begitu, dalam kaitannya dengan *Precautionary Principle* dan mencegah dengan sungguh-sungguh hal-hal yang bisa memperburuk keadaan seperti *biosafety*, *biosecurity* dan *biodiversity*, sayap radikal ini amat menonjol sumbangannya. Metode kerja kelompok-kelompok ini

sering menggunakan ide-ide aksi jalanan.

Sayap radikal Gerakan Lingkungan selalu menentang dan berani melakukan sabotase kepada siapa saja yang dinilai sebagai “*earth rapist*”, pemerkosa bumi. Kelompok Gerakan Lingkungan radikal seperti Anarchist Golfing Association dan Earth Liberation Front bahkan sering dituduh sebagai teroris walau tidak ada bukti-bukti mereka merugikan ekologi atau nyawa manusia. Tindakan mereka memang benar-benar me-



Sayap radikal Gerakan Lingkungan selalu berani menentang siapa saja yang dianggap earth rapist (pemukosa bumi)

Foto: Dok. WALHI

ngancam keberadaan industri-industri besar. Salah satu tindakan yang dinilai tindakan pidana adalah keberanian mereka mem bakar kantor-kantor perusak lingkungan. Gerakan Lingkungan yang anarkis ini memang sering tidak diterima di kalangan Gerakan Ekologi utama. Bahkan badan-badan intelijen di Amerika Serikat mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok teroris terutama pada Earth Liberation Front.

Faksi lain dalam Gerakan Lingkungan, adalah individu dan kelompok yang percaya pada proses-proses politik melalui lobi atau argumentasi saintifik. Paling tidak sejak *Earth Summit* 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, Gerakan Lingkungan telah mendiskusikan konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep sustainability yang kemudian seba-



Foto: Dok. WALHI

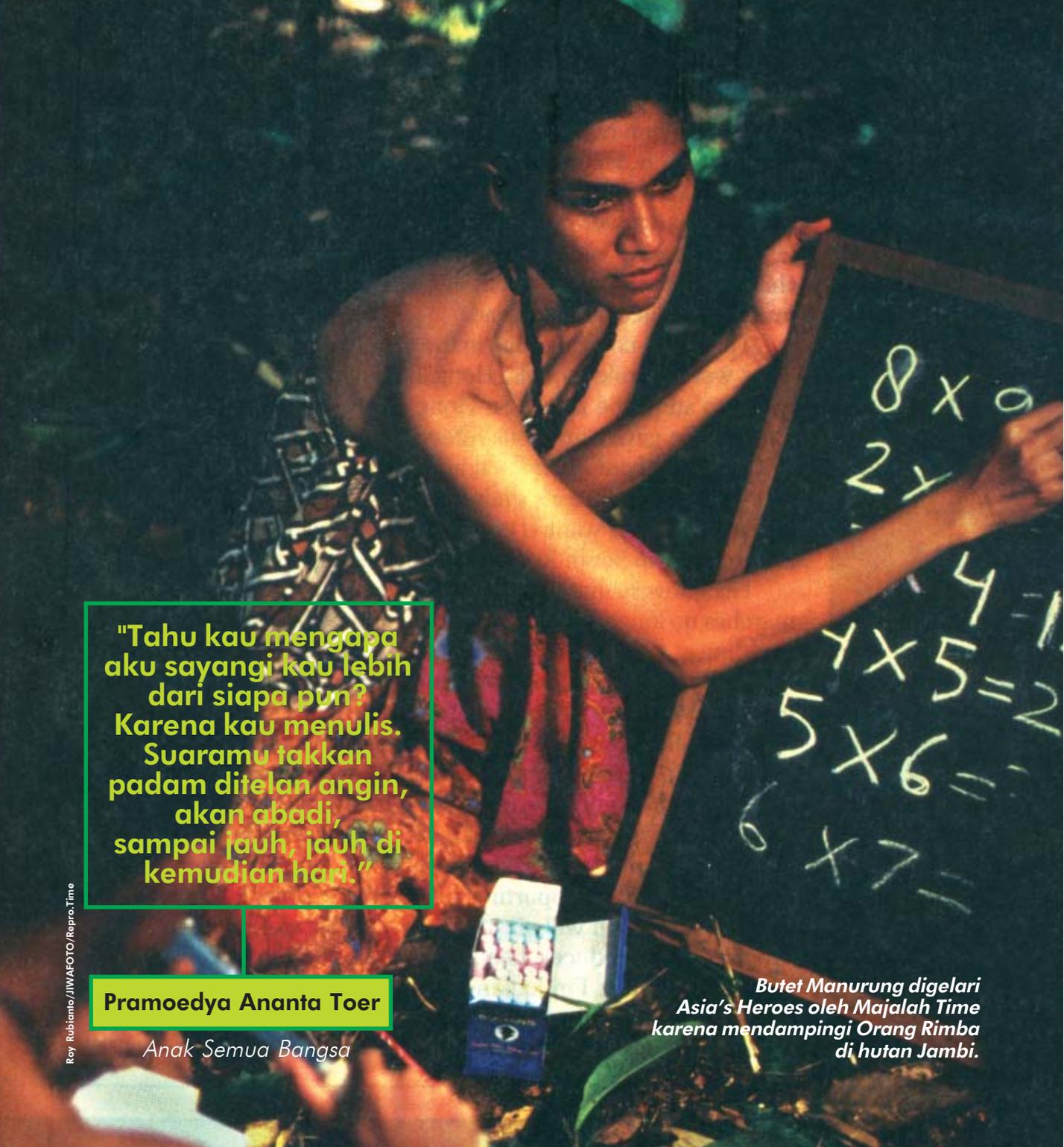
Aksi nelayan di depan Kantor DKP Jakarta Februari 2008

gian pandangannya telah mengubah ideologi yang berorientasi pada ekologi. Gerakan Lingkungan adalah pelopor pendirian Gerakan Anti-Globalisasi dunia pada akhir 1990-an. Inilah metamorfosa Gerakan Ekologi menjadi Gerakan Anti Neoliberalisme.

HAK-HAK LINGKUNGAN HIDUP

Banyak kasus-kasus lingkungan hidup akhir-akhir ini bertanya siapa yang paling memiliki hak atas lingkungan hidup? Apakah hukum lingkungan hidup dibatasi oleh hak-hak pribadi? Apakah masyarakat luas memiliki hak melakukan intervensi? Esai Christopher D. Stone pada 1972 berjudul *"Should trees have standing?"* secara sungguh-sungguh mempertanyakan apakah obyek alam memiliki hak di mata hukum termasuk hak berpartisipasi dalam kasus legal.

Stones menyatakan tak ada yang absurd dalam hal ini karena pada masa lalu pun perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak di mata hukum. Pertanyaan sejenis ini sering dianggap aneh atau sesat pikir oleh pemerintah yang berkuasa dan masyarakat kebanyakan.

A man with a serious expression is writing on a chalkboard in a forest. He is wearing a traditional woven garment. The chalkboard has several multiplication problems written on it. The background is dark and filled with foliage.

"Tahu kau mengapa
aku sayangi kau lebih
dari siapa pun?
Karena kau menulis.
Suaramu takkan
padam ditelan angin,
akan abadi,
sampai jauh, jauh di
kemudian hari."

Pramoedya Ananta Toer

Anak Semua Bangsa

*Butet Manurung digelari
Asia's Heroes oleh Majalah Time
karena mendampingi Orang Rimba
di hutan Jambi.*

FOKUS PEMBARUAN PADA AKSI LOKAL

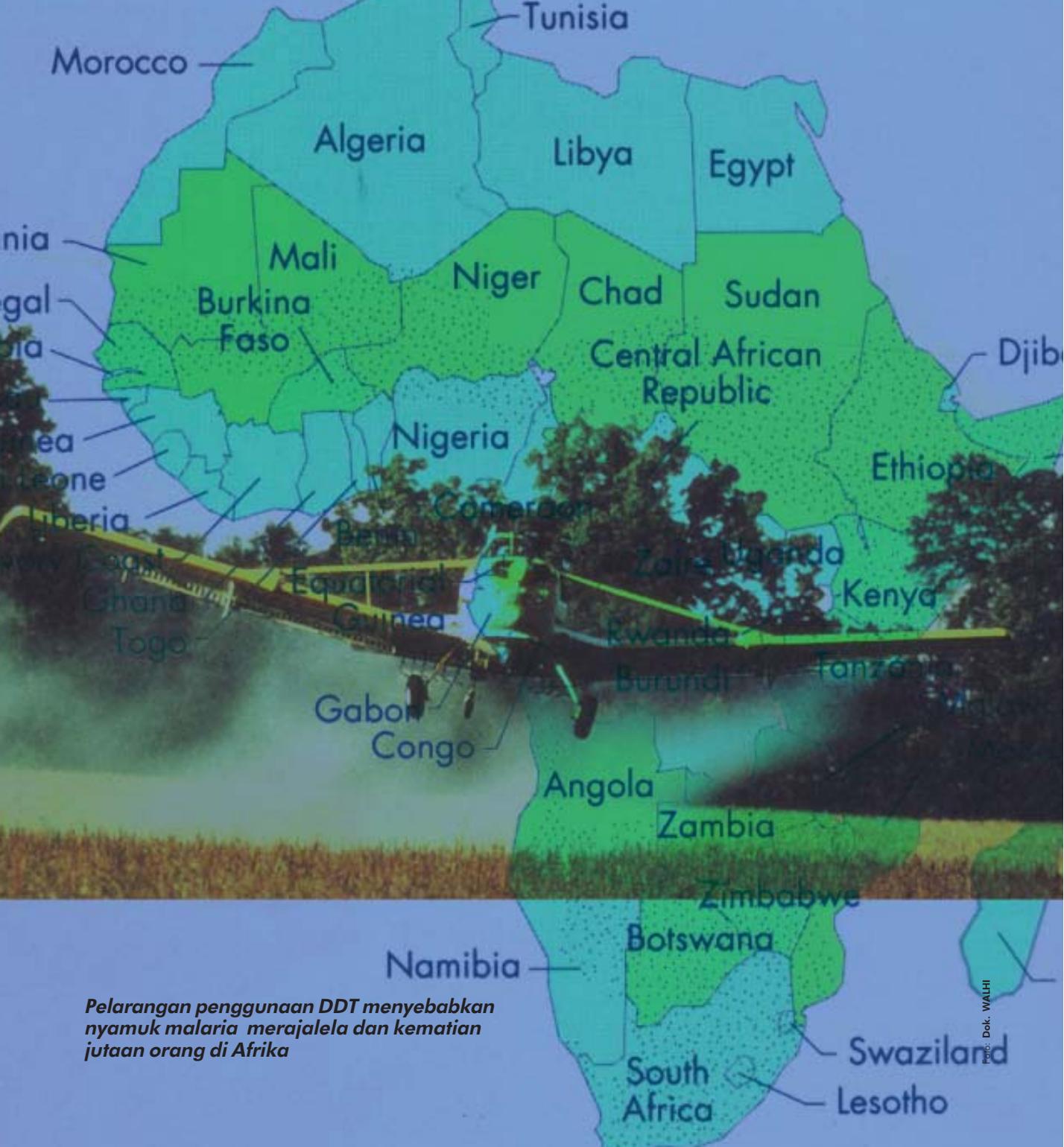
SAAT ini gerakan lingkungan di dunia bertahan dalam bentuk kluster-kluster masyarakat peduli lingkungan hidup yang bersifat lokal. Kelebihan kelompok lingkungan lokal semacam ini memiliki pilar kebudayaan dan nilai-nilai kepercayaan tempatan.

Mereka kebanyakan lebih peduli pada urusan-urusan lokal. Asal lingkungan di tempat bisa dipertahankan, maka gerakan itu sudah puas. Sebagai contoh, beberapa kelompok masyarakat adat cenderung ingin memurnikan gerakan lingkungan sebagai gerakan pelestarian kebudayaan dan alam tempatan.

Pun begitu, ada beberapa kelompok lokal lainnya menemukan manfaat dengan melakukan kolaborasi antarpihak untuk menemukan konsensus atau mengandalkan pada ketersediaan hukum yang menjamin keselamatan mereka.

Kelompok seperti The Bioregional Revolution sedang bekerja dalam membangun konvergensi antara kelompok-kelompok gerakan lingkungan hidup dan masalah bumi manusia abad 21: bersatu menentukan masa depan. WALHI juga kini mempromosikan perspektif bioregionalisme sebagai upaya mempersatukan gerakan lingkungan di Indonesia.

Dewasa ini ilmu pengetahuan tentang ekologi memegang peran kunci dalam menyatukan gerakan lingkungan hidup. Semua pihak bisa menerima penjelasan saintifik pada beberapa level untuk mengambil kebijakan tentang biodiversitas dan pemanfaatan kekayaan hutan. Ilmu konservasi biologi kini menjadi lapangan pengetahuan yang penting.



Morocco

Tunisia

Algeria

Libya

Egypt

Senegal

Mali

Niger

Chad

Sudan

Gambia

Burkina Faso

Sierra Leone

Central African Republic

Djibouti

Liberia

Nigeria

Ethiopia

Ivory Coast

Cameroon

Guinea

Benin

Zaire

Uganda

Ghana

Equatorial Guinea

Kenya

Togo

Rwanda

Tanzania

Gabon

Congo

Angola

Zambia

Zimbabwe

Namibia

Botswana

South Africa

Swaziland

Lesotho

Pelarangan penggunaan DDT menyebabkan nyamuk malaria merajalela dan kematian jutaan orang di Afrika

Foto: Dok. WALHI

KRITIK PADA ENVIRONMENTALISME

STILAH “gerakan lingkungan hidup” acapkali sudah membuat orang malas “bergerak”, dianggap berkaitan dengan politik daripada ilmu pengetahuan. Banyak “serangan” Kaum Environmentalis pada industri dan globalisasi dilihat sebagai klaim politik dibandingkan benar-benar menyelamatkan alam sekitar. Cuma untuk dijadikan tameng menyerang lawan politik, misalnya.

Sudah begitu, yang lebih memperburuk lagi, teori dan prediksi kehancuran lingkungan yang dikeluarkan Kaum Environmentalis seringkali tidak terlalu akurat. Bahkan, banyak rekomendasi Kaum Environmentalis justru memperburuk kondisi masyarakat alih-alih menyelamatkan alam sekitar.

Sekedar contoh, Rachel Carson, dalam bukunya menyebutkan pestisida DDT sebagai penyebab kanker dan akan menyebabkan kehancuran ekosistem. Meski data pendukungnya lemah, banyak negara kemudian melarang produksi dan peredaran DDT. Baru kemudian diketahui, penyebab kanker bukan hanya akibat penggunaan DDT, serta sedikit bukti DDT menyebabkan gangguan pada tanaman dan binatang. Satu yang diketahui kemudian hari, larangan DDT telah menyebabkan nyamuk malaria semakin merajalela di Afrika dan menyebabkan kematian jutaan orang.

Belakangan ini muncul sejumlah teori

“Jika orang menghancurkan benda buatan manusia, mereka disebut vandal; jika mereka menghancurkan sesuatu yang tak tergantikan buatan Tuhan, mereka disebut para pembangun.”

Joseph Wood Krutch



Burung-burung ini memakan ulat yang telah tersemprot DDT, kematian segera menjelang.

lingkungan yang kontroversial, seperti penipisan lapisan ozon dan pemanasan global yang disebabkan emisi efek *green house*. Teori-teori ini ditopang oleh data-data yang akurat. Tapi, pada saat bersamaan, pengumpulan data yang sama pun ditafsirkan untuk kepentingan lain. Perdebatan seputar isu lingkungan pada galibnya perdebatan politik. Masing-masing pihak menggunakan data untuk memperkuat argumentasinya. Kasus ini menjadi tantangan bagi ilmuwan lingkungan hidup untuk benar-benar melakukan penelitian yang akurat dan tak terbantahkan.

Seorang penulis anti gerakan lingkungan ternama, Michael Crichton, lulusan Harvard Medical School, menawarkan gagasan *double blind experimentation* dalam riset lingkungan hidup. Pada proses *double blind experiment*, para pihak bisa menentukan dua kelompok peneliti independen. Kedua tim yang berbeda melakukan penelitian yang sama. Tujuannya agar hasil yang diperoleh tidak bias dan lebih berkualitas. Crichton menyarankan, karena isu lingkungan hidup memang sangat politis, maka para pengambil keputusan membutuhkan data-data yang netral sebagai landasan keputusannya ketimbang bertumpu pada retorika dan konjungtur politik.

Dukungan dan kritik pada gerakan lingkungan hidup adalah konsekuensi

dari keterbatasan pengetahuan kita tentang bumi. Kebanyakan studi lingkungan hidup relatif masih baru. Karenanya, penelitian lingkungan hidup bersifat terbatas dan belum mampu secara lengkap membaca kecenderungan perubahan lingkungan dalam jangka panjang.

Keterbatasan ini mendorong sejumlah Environmentalis mendukung penggunaan *the precautionary principle* dalam pengambilan kebijakan. Prinsipnya lebih baik berjaga-jaga sebelum kita mengetahui hal sebenarnya yang akan berdampak pada lingkungan hidup.

Sebaliknya para penentang menolak prinsip jaga-jaga karena keputusan politik harus diambil bila kita telah memiliki informasi selengkap mungkin. Penolakan ini banyak berasal dari kalangan industri, karena bila prinsip ini dipakai maka akan mengganggu kegiatan industri mereka di negara-negara dunia ketiga.

**"Pada 2080,
lapisan es di Kutub akan mencair hingga
menenggelamkan Terusan Panama.
30 persen garis pantai di dunia akan lenyap.
Perang memperebutkan air
akan terjadi"**

Edmundo de Alba

Anggota Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)
dalam konferensi pers di Brussels,
Belgia, 6 April 2007.

Srigala kutub, Greenland

DEEP ECOLOGY

DEEP Ecology adalah filsafat baru atau *Ecosophy* yang bertumpu pada perubahan dari antroposentrik menjadi gerakan lingkungan murni. Filsafat ini ditandai dengan tafsir baru tentang identitas manusia dengan cara menghilangkan dualisme rationalistik antara manusia dan lingkungannya. Karenanya, *Deep Ecology* menekankan pada nilai-nilai intrinsik pada spesies lain, sistem dan proses-proses yang terjadi di alam.

Posisi ini melahirkan pandangan sistem ekosentrik pada etika lingkungan hidup. *Deep Ecology* menyebutkan dirinya sebagai “*deep*” karena ia mempertanyakan hal-hal kompleks dan spiritual tentang peran manusia di ekosfir.

Ekologi telah mempertontonkan kepada kita bahwa alam hanya hidup dalam keadaan keseimbangan dinamik dan hanya mampu menerima perubahan-perubahan kecil. Kaum Environmentalis percaya kegiatan umat manusia yang begitu luas telah mendorong biosfir tidak lagi dalam keadaan seimbang seperti gejala penurunan biodiversitas dan perubahan iklim.

Konsekuensi dari cara pandang ini adalah ideologi peradaban barat telah menyebabkan hilangnya sumber-sumber kehidupan. Inilah yang melahirkan kebutuhan paradigma baru seperti *Deep Ecology* yang mampu

“Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia.”

Pramoedya Ananta Toer

Anak Semua Bangsa

menjadi panduan kegiatan manusia menghindari kerusakan lingkungan yang lebih buruk.

Frasa “*deep ecology*” diungkap oleh Filsuf Norwegia Arne Naess pada 1972 dan ia kemudian memberikan sebuah landasan teorinya. Naess menolak gagasan bahwa segala sesuatu bisa di-*ranking* sesuai nilai-nilai relatifnya. Seperti, manusia dinilai lebih tinggi dari binatang. Ia menyatakan semua

bentuk kehidupan berhak hidup di dunia. Tak ada satu pun spesies yang memiliki hak lebih dari spesies lain.

Deep Ecology memperoleh dukungan ilmiah dari lapangan ilmu ekologi dan sistem dinamis. Naess tidak menggunakan logika induksi dalam menyampaikan filsafatnya tetapi secara langsung masuk pada metafisika termasuk gagasan tentang “self”. Salah satu pikiran berpengaruh pada *deep ecology* adalah “Hipotesis Gaia”.

Manusia bagian dari bumi dan tak terpisahkan

Pokok spiritualitas *Deep Ecology* adalah spesies manusia bagian dari bumi dan tidak terpisahkan. Sebuah proses realisasi diri atau “re-earthing” digunakan bagi seseorang

Konsekuensi dari cara pandang ini adalah ideologi peradaban barat telah menyebabkan hilangnya sumber-sumber kehidupan. Inilah yang melahirkan kebutuhan paradigma baru seperti *Deep Ecology* yang mampu menjadi panduan kegiatan manusia menghindari kerusakan lingkungan yang lebih buruk.

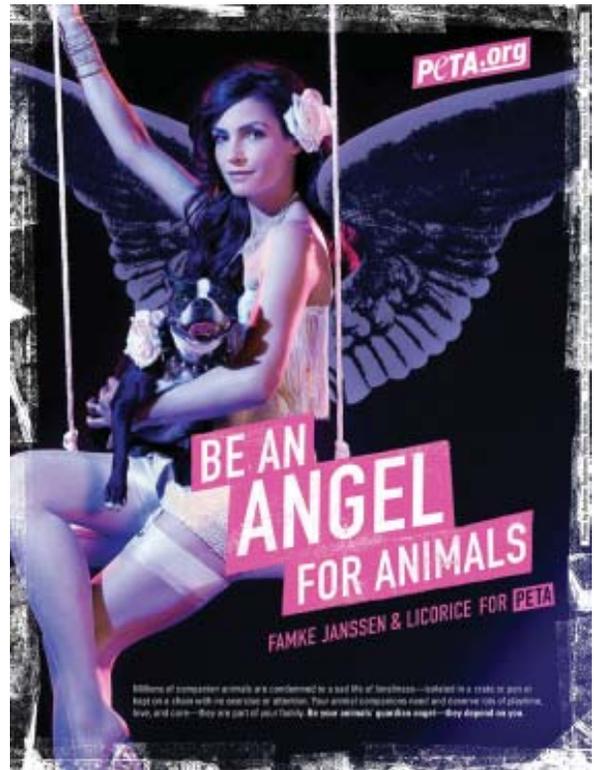


Foto: Dok. WAHNI

untuk memperoleh intuisi perspektif ekosentrik. Gagasannya adalah selama kita mampu meregangkan kedirian kita dan kemudian menemukanli pihak lain (manusia, binatang, ekosistem), kita akan semakin mengenal diri sendiri (transpersonal).

Tradisi lain yang mempengaruhi *Deep Ecology* adalah Taoisme dan Buddhisme, terutama karena ajaran ini tidak mengenal pendekatan dualisme dalam memandang obyek dan subyek. Dalam kaitannya dengan tradisi agama-agama besar lainnya, Naess berpandangan pada ajaran ini manusia tetap dinilai superior atas alam.

8 PRINSIP *DEEP ECOLOGY*

PARA pemikir *Deep Ecology* percaya bahwa dunia bukan sumberdaya yang bisa secara bebas dieksploitasi manusia. Etika *Deep Ecology* adalah sistem alam lebih superior dibandingkan manusia atau bagian-bagiannya. Pandangan mereka memiliki delapan prinsip yakni:

- 1** Setiap hal baik benda maupun makhluk hidup di muka bumi pasti memiliki nilai pada dirinya (*intrinsic value, inherent value*). Nilai ini bersifat independen baik untuk manfaat manusia atau non manusia.
- 2** Kekayaan dan keragaman bentuk kehidupan menyumbangkan pada realisasi nilai-nilai intrinsik dan juga nilai itu sendiri.
- 3** Manusia tidak memiliki hak mengurangi kekayaan dan keragaman kecuali untuk memenuhi kebutuhan vital manusia.
- 4** Kehidupan manusia dan kebudayaan berkembang seiring dengan penurunan populasi manusia. Keberlanjutan kehidupan non manusia pun membutuhkan penurunan populasi manusia.
- 5** Gangguan manusia pada dunia non manusia sangat dahsyat dan manusia cenderung memperburuk keadaan.
- 6** Kebijakan negara harus dirombak secara mendasar karena kebijakan negara berdampak pada tatanan ekonomi dasar, struktur masyarakat, teknologi dan ideologi.
- 7** Perubahan ideologi untuk memberikan apresiasi pada kualitas hidup— menghargai *inherent value*— dibandingkan dengan peningkatan standar kehidupan.
- 8** Siapa pun memiliki kewajiban baik langsung dan tidak langsung melakukan perubahan.



"Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda tanya tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah."

Soe Hok Gie

Mandalawangi-Pangarango
19 Juli 1966

Filsafat Deep Ecology tegas-tegas menolak gagasan manusia sebagai penjaga lingkungan.

Green Movement menjaga prinsip *Deep Ecology*

PADA tataran praktis, kaum *Deep Ecologist* mendukung desentralisasi, eko-region, reformasi industri dari bentuk yang sekarang serta menolak pemerintahan otoriter.

Deep Ecology tidak didudukkan sebagai gerakan yang berbeda, melainkan bagian dari *Green Movement*. Gerakan *Deep Ecology* bisa dipetakan sebagai *Green Movement* yang menjaga prinsip-prinsip *Deep Ecology*. Ia sering dilabel sebagai "*Gaian*" dan "*Green*" (sebuah terminologi politik yang lebih luas berkenaan dengan komitmennya pada perdamaian).

***Deep Ecology* berpengaruh pada *Green Movement* dengan mempersembahkan platform etika independen bagi Partai Hijau, *Political Ecologist* dan Kaum Environmentalis.**

Filsafat *Deep Ecology* membantu mengubah roh gerakan ekologi modern dengan dekonstruksi istilah "*environment*" yang cenderung antroposentrik dan tegas-tegas menolak gagasan manusia sebagai penjaga lingkungan.

"Cintai bumi seperti kamu mencintai dirimu sendiri."

John Denver

Penyanyi dan pencipta lagu



Foto: Timur Angin



Perburuan ikan paus oleh nelayan di pantai barat Islandia

KRITIK PADA *DEEP ECOLOGY*

DEEP *Ecology* dikritik memiliki gagasan misantropi yang bertujuan menurunkan populasi manusia. Pandangan kaum *Deep Ecology* pada peran alam dalam epidemi penyakit dan kelaparan ditafsirkan secara negatif.

Kaum *Deep Ecology* berargumentasi bahwa penurunan populasi dilakukan melalui kontrol kelahiran. Mereka akan berargumentasi juga bahwa kelangkaan akan meningkatkan nilai. Sebaliknya, populasi yang berlebihan akan mengurangi nilai manusia sebagai individu.

Prinsipnya mereka menghargai setinggi-tinggi semua ciptaan Tuhan di muka bumi sebagai bagian dari alam. Hanya manusia yang teralienasi dari alam dan terlibat pada perusakan alam yang akan menjadi musuh besar mereka.

Filsafat politik kaum *Deep Ecology* banyak dikritik sebagai *Eco-Fascism*. Tuduhan ini dibantah karena mereka memperjuangkan suatu relasi yang baru antara manusia dan ekosfir, berjuang melawan otoritarian melalui desentralisasi dan mendukung kekeerasan pada alam. Posisi ini sama sekali berlawanan dengan fasisme.

Kaum Ekologi Sosial menilai *Deep Ecology* gagal mengkaitkan antara krisis lingkungan dengan konsep otoritarian dan hirarki. Kaum Ekologi Sosial percaya bahwa

masalah lingkungan berakar pada interaksi sosial manusia. Menurut mereka pada masyarakat yang ekologis berkelanjutan pun masih bisa terjadi eksploitasi sosial.

Kaum *Deep Ecology* menolak argumentasi perilaku ekologi berakar pada paradigma sosial (ini tetap warisan antroposentrik). Mereka melanjutkan perdebatan dengan keberatan Kaum Ekologi Sosial dengan argumentasi pada masyarakat yang egaliter pun tetap akan melanjutkan eksploitasi pada bumi.

Beberapa pihak mengkritik Kaum *Deep Ecology* sebagai borjuis dalam cara mereka memperjuangkan gaya hidup karena yang ditawarkan lebih mudah bagi orang-orang kaya. Beberapa kelompok masyarakat adat tidak bisa melakukan cara makan yang ditawarkan oleh *Deep Ecologist* karena mereka harus tetap berburu binatang. Pada kelompok masyarakat, semisal, berburu ikan paus adalah bagian kebudayaannya. Pada kasus ini *Deep Ecology* dinilai *Etnocentric* atau *Imperialistic*. Tindakan misantropi menyebabkan *Deep Ecologist* dituduh menghancurkan ras manusia. Sementara, Kaum *Deep Ecologist* menerima pada kasus-kasus perburuan binatang oleh masyarakat adat asal tidak menyebabkan kelangkaan atau menjadi industri besar.

**“Hidup sungguh
sangat sederhana.
Yang hebat-hebat
hanya tafsirannya.”**

Pramoedya Ananta Toer

Jejak Langkah

***Pemukiman Orang Punan
di Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur***

Foto: Timur Angin/Dok. Keyword Innovative Communication

ECO-ANARCHISM: KEMBALI PADA SEMANGAT KOMUNITAS

ECO-Anarchism berpendapat *small eco-villages* (tidak lebih dari 100 orang) adalah skala ruang hidup manusia yang paling layak pada masyarakat yang beradab. Karenanya, infrastruktur dan sistem politik hendaknya ditata ulang agar memenuhi kebutuhan *Eco-villages*. Secara umum, kaum *Eco-Anarchist* menolak konsep manusia lebih superior dibandingkan dengan alam dan mendesak organisasi-organisasi sosial dirancang sesuai dengan irama alam bukan melawannya.

Gerakan ini memadukan kecenderungan gerakan lama seperti *primitivism*, *tribalisme*, *bioregional democracy*, *eco-feminism*, *pacifism* dan komunitas kecil.

Beberapa *Eco-Anarchist* mempertimbangkan desa atau suku agar dipertahankan sebagai unit kehidupan manusia, dan menentang keluarga atau marga. Asumsi tentang keluarga amat dipertimbangkan oleh *Eco-Anarchist* dibandingkan dengan peran kerja. Filsafat *Eco-Anarchist* bisa dijelaskan sebagai tafsir antropologi dan kebenaran biologi. Inilah sebabnya kelompok *Eco-Anarchist* senang mengacu pada organisasi sosial primitif. Intinya kembali pada semangat komunitas.

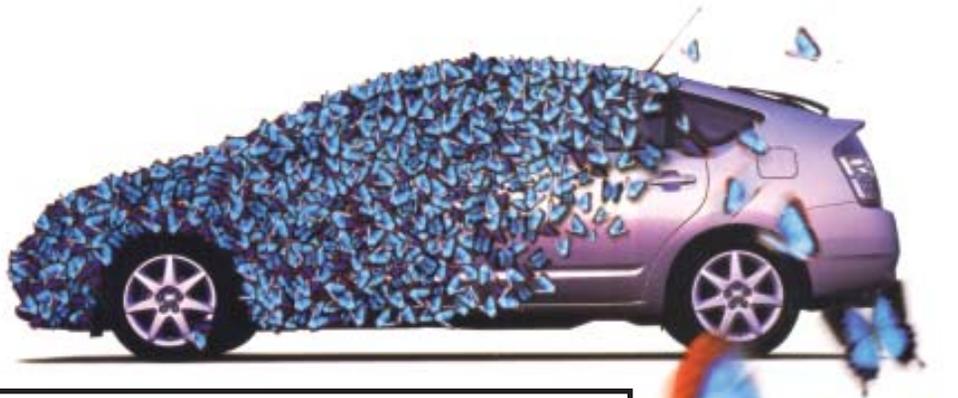


Kaum Eco-Anarchist menolak konsep manusia lebih superior dibandingkan dengan alam.

Foto-foto: Dok. WALHI

TOYOTA

Toyota hybrid technology:
It's only natural.



“Korporat harus memperhatikan emosi membangun lebih banyak ketimbang rasa takut dan raku.”

Anita Roddick

Hybrid Synergy Drive makes it happen.



Toyota was the very first to mass-produce hybrid technology, an example of our dedication to using technology to improve the environment. Today, more than 280,000* cars powered by Toyota's hybrid technology are on the road. Hybrid Synergy Drive, the new hybrid technology from Toyota, combines a gasoline engine with a more powerful electric motor that never needs to be plugged in. It achieves the world's highest level of fuel efficiency and ultra-low emissions, without sacrificing driving performance. Toyota's HSD is a more powerful, smarter—and more environmentally responsible—way to drive. *As of October 2005.

www.toyota.co.jp

Iklan ekologi modernisasi otomotif di majalah Time

Foto: Repro iklan Time

OPTIMISME EKOLOGI MODERNISASI

EKOLOGI Modernisasi adalah wacana lingkungan yang optimistik. Gagasan-nya, pembangunan ekonomi dan sosial dapat seirama dengan usaha-usaha penyelamatan lingkungan hidup. Teknologi tinggi bisa membantu pengurangan konsumsi sumberdaya alam dengan meningkatkan efisiensi seperti pencegahan pencemaran. Umumnya mereka menggunakan eksternalitas pada sebuah proses teknologi sebagai input pada proses teknologi yang lain, agar buangan semakin efisien. Konsep ini amat dekat dengan gagasan *Sustainable Development*.

Frasa lain yang banyak dikenal adalah *cradle to cradle manufacturing* sebagai oposisi dari format *crade to grave of manufacturing*, di mana buangan dilepaskan tanpa terintegrasi dengan siklus produk selanjutnya.

Sebagai sebuah strategi perubahan, hal ini banyak dipromosikan oleh kelompok-kelompok bisnis. Tapi, prinsip-prinsip pasar bebas tidak dipertanyakan pada mazhab ekologi modernisasi. Berbeda dengan strategi banyak gerakan lingkungan yang justru mendudukan perdagangan bebas sebagai akar penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Negara dipandang sebagai fasilitator bagi pasar untuk menciptakan teknologi tinggi serta mengatur perusahaan agar mengelola dan memanfaatkan limbah industrinya. Sebagai contoh, perusahaan mobil di Jerman

harus memanfaatkan bangkai-bangkai mobil bekas dalam siklus produksi mobil mereka.

Kritikus berpendapat Ekologi Modernisasi akan gagal menyelamatkan lingkungan. Pertanyaannya apakah teknologi tinggi sendiri mampu menyelamatkan alam jika diserahkan pada mekanisme pasar. Contoh, banyak teknologi ramah lingkungan telah tersedia tetapi tidak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis dengan alasan ekonomi. Variasi pilihan antara teknologi pro-lingkungan atau pro-bisnis ekonomi tidak selalu otomatis dipilih secara sukarela.

Liberalisme Hijau

Istilah *Green Liberalism* ditujukan kepada kaum liberal yang telah memasukan kepedulian lingkungan pada ideologinya. Kelompok ini menilai bumi sebagai sebuah sistem yang hidup. Karenanya tidak perlu ada tindakan konservasi. Yang penting, mengurangi kerusakan dan membantu proses regenerasi alam. Dewasa ini *Green Liberalism* dominan di beberapa negara seperti Jerman dan sedikit di Inggris. Bagaimana pun apa yang diusung oleh kelompok *Green Liberal* berbeda dengan Partai Hijau. Partai Hijau lebih pas disebut sebagai *Green Social Democracy* atau *Green Left*.



Green for Gore

Foto: Dok.WALHI

EMPAT PILAR POLITIK HIJAU

TIDAK semua *Political Ecologist* or Kaum *Greens* aktif di Partai Hijau. Banyak Kaum Green yang tidak suka pada politik praktis bahkan menolak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kaum Green ini mengaku banyak berkiblat pada perjuangan *a la* Gandhi. Yang tidak mereka ketahui, Mahatma Gandhi, yang menjadi pelopor gerakan tanpa kekerasan, sejak muda aktif dalam perjuangan politik.

Kaum Green juga kerap kali mendukung partai sosialis kiri atau partai kanan kapitalis, yang dikenal dengan aliansi “Merah Hijau” atau “Biru Hijau” untuk mencapai tujuan-tujuan taktis. Sekedar contoh, Gerakan Hijau mendukung calon presiden Al Gore dari Partai Demokrat dengan kampanye “*Green for Gore*”. Dan, tidak mendukung calon dari Partai Hijau Ralph Nader. Tujuannya, hanya untuk memecah suara agar Gore kalah. Mereka berjuang melawan George W. Bush.

Partai Hijau seluruh dunia memegang prinsip empat pilar, yakni Ekologi (*Ecological Wisdom* atau *Ecological Sustainability*), Keadilan Sosial (*Social Equality* dan *Economic Justice*), Demokrasi Kerakyatan (*Grass-roots Democracy*) dan Tanpa Kekerasan (*Non Violence*)

Keempat pilar Partai Hijau ini berakar dari empat gerakan terkemuka di dunia seperti Gerakan Perdamaian, Gerakan Hak-

“...tak akan pernah ada perdamaian di atas dunia dengan adanya kaum dominan...”

Arundhati Roy



Foto: Dok. WALHI



**Kekerasan aparat saat
kejatuhan rezim Suharto**

Foto: Achmad Ibrahim/AP

hak Sipil, Gerakan Lingkungan dan Gerakan Buruh.

Ekologi atau "*Ecological Wisdom*" menjadi poros ajaran gerakan lingkungan yang bercita-cita mengurangi dampak buruk kegiatan manusia. Dalam hal ini bukan sekadar menyelamatkan kehidupan manusia melainkan mengubah cara berpikir antroposentrik atau pandangan yang mendudukan manusia pusat segalanya dan bumi dipersembahkan bagi manusia.

Keadilan sosial ("*Social Squality*" dan "*Economic Justice*") mencerminkan penolakan terhadap berbagai diskriminasi, misalnya lewat perjuangan kelas, gender, etnisitas, atau kebudayaan. Ketidakadilan sosial menjadi akar perusakan lingkungan hidup oleh institusi buatan manusia seperti negara dan korporat.

Demokrasi Kerakyatan ("*Grassroots De-*

mocracy" atau "*Participatory Democracy*") dipandang sebagai satu-satunya cara pentadbiran untuk mencapai perubahan sosial. Pandangan ini mengubah cara memandang kedudukan para pemimpin-pemimpin tradisional. Untuk itu, Kaum Hijau menolak konstitusi yang mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan pada organisasi. Kaum Hijau setuju dengan proses-proses desentralisasi dan devolusi pemerintahan.

Non Violence atau pandangan tanpa kekerasan mencerminkan kebijakan Gerakan Hijau yang menolak setiap bentuk kekerasan dalam mengelola lawan-lawan politiknya. Gerakan Anti Kekerasan ini mengadaptasi tradisi perlawanan Gandhi di India dan Quaker di Amerika Serikat. Tujuannya, melakukan advokasi untuk menghindari eskalasi kekuatan dan tidak bekerjasama dengan kelompok mana pun yang melakukan kekerasan.

Keempat pilar ini berdiri saling bergantung dan menjadi sistem nilai yang ditegakkan secara konsisten dalam tindakan sehari-hari. Artinya, pencapaian satu pilar amat tergantung dari pencapaian ketiga pilar yang lain.

Contoh, keadilan distribusi kekayaan bumi tidak mungkin menghasilkan kesempatan internasional bila tetap ada ketidakadilan distribusi dengan cara melakukan kekerasan dan mengingkari proses-proses politik yang demokratik. Atau, struktur politik tradisional, yang berbasis pada patronase sebagai model pentadbiran internal, tak

mampu melakukan negosiasi internasional dan pula akan mengalami pengucilan secara internasional.

Arundhati Roy menjelaskan keterkaitan antara Demokrasi, Perdamaian dan Tanpa Kekerasan:

"Where is oppression, it will always be challenged...I don't believe that there can ever be peace without justice...The two go together. And there can not be peace in the world with full-spectrum dominance."

(Bila ada tindakan opresif, ini selalu harus ditantang, saya tidak percaya akan terjadi perdamaian tanpa keadilan. Keduanya berjalan seiring. Dan, tak akan pernah ada perdamaian di atas dunia dengan adanya kaum dominan. Ini pendekatan yang memadukan antara gerakan perdamaian dan gerakan ekologi).



Perkebunan Kaum Amish di Pennsylvania, AS

Foto-foto: Dok. WALHI

“Jika perdagangan menjadi tidak punya simpati moral atau perilaku yang terhormat, maka Tuhan tolonglah kami semua.”

Anita Roddick

Pendiri The Body Shop Foundation

Sustainability
Pada 1987, Brundtland Report menjelaskan konsep sustainability sebagai konsep untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Ini mirip pepatah nenek moyang yang harus menjaga alam hingga tujuh turunan.

SYAREKAT HIJAU, GERAKAN PERDAGANGAN BERKELANJUTAN

GREEN *Syndicalism* adalah filsafat Kaum Pedagang Hijau atau gerakan perdagangan yang berkelanjutan. Secara metodologi, kaum ini dikaitkan dengan *Anarcho-Syndicalism* dan *Eco-Anarchism*. Tapi, kelompok ini menolak anarkisme dan Marxisme sebagai ideologi.

Penolakan pada semua ideologi itu berkaitan dengan tekanan gerakan ini pada pendidikan, sertifikasi perdagangan dan pengawasan pada penggunaan modal alam dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Mereka menekankan pada kesadaran ekologi, standar lingkungan hidup, kesehatan ekologi dan kesehatan lingkungan hidup. Hal-hal ini ditunjukkan dengan munculnya ISO 14000, ISO 9000, Natural Step dan Natural Capitalism. Intinya selalu mempertanyakan kapital yang dimiliki privat, apakah kekayaan Anda dibangun dari perusakan alam? Pada kasus Indonesia, promosi ekolabel boleh jadi cabang dari gerakan Syarekat Hijau.

Metodenya adalah fusi organisasi perdagangan melampaui sindikasi formal dan aksi-aksi demonstrasi (*direct action*) serta gerakan demokrasi di tempat-tempat kerja. Karenanya gerakan ini memang dekat dengan Gerakan Hijau, yang bersamanya mendesak agenda perdagangan yang

bertanggung jawab pada lingkungan. Gerakannya tak selalu membicarakan hal-hal besar melainkan memperjuangkan pekerja-pekerja tradisional, seperti petani-petani organik dan para pengrajin barang-barang tradisional.

Kaum Syarekat Hijau sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok atau gerakan kembali ke alam, seperti kaum Amish, masyarakat Badui, yang tetap mempertahankan teknologi dan produk-produk alami. **Kelompok masyarakat seperti tidak berminat mengadopsi teknologi baru dan tidak berminat jejaring dengan organisasi internasional. Boleh jadi Kaum Syarikat Hijau lebih dekat dihubungkan dengan *eco-gastronomy movement* yang peduli pada cara-cara memproduksi yang menjaga modal alam. Kelompok terakhir ini menolak makanan yang berasal dari industri peternakan, pertanian dan perikanan. Mereka lebih suka makan yang bersumber dan hidup di alam.**



**Produksi pangan dunia
melimpah.
Mengapa semakin banyak
orang kelaparan
di mana-mana?
Apa kaitan pangan
dan lingkungan hidup?**

BAGIAN 2

**PANGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**



“Jika kita dapat menaklukkan angkasa luar, seharusnya kita dapat menaklukkan kelaparan anak-anak.”

Buzz Aldrin

Astronot AS

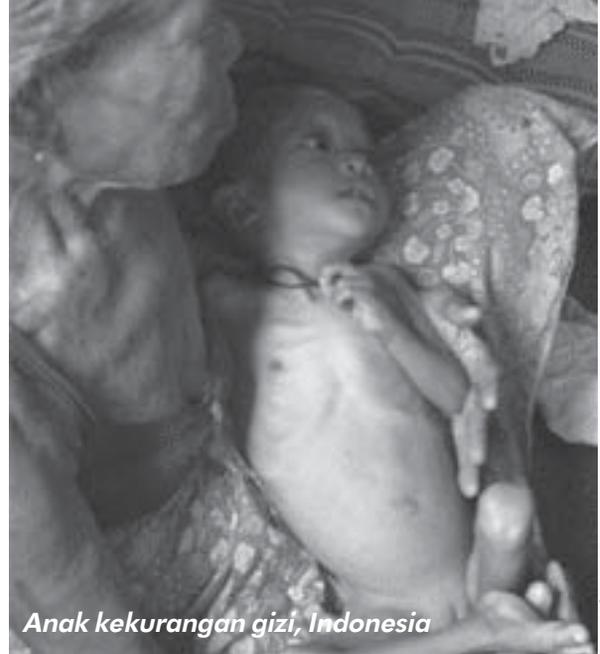
Anak-anak lapar mencari serangga untuk dimakan, Sudan

WILLIAM Godwin dan Antoine de Condorcet adalah pemikir optimistik pada jamannya. Mereka cenderung mengabaikan kemungkinan adanya ancaman kelaparan akibat kurang pangan. Tapi, itu mengganggu tidur Thomas Robert Malthus. Maka pada 1798, Malthus dalam tulisannya *Essay on Population* berteori, bahwa pertumbuhan penduduk itu berpola deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan itu berpola deret hitung. Karena itu, bakal ada suatu titik: jumlah penduduk dunia lebih besar dari pasokan pangan. Dan, kelaparan menjadi sebuah keniscayaan.

Perang Dunia II (1939-1945) menebar teror. Orang-orang hidup penuh ketakutan. Ketika perang usai, orang cenderung hidup damai di rumah. Hasilnya adalah ledakan penduduk yang amat dahsyat.

Memasuki abad 20, ramalan Malthus cenderung menjadi kenyataan. Amerika Latin, Afrika, dan Asia menjadi sentra-sentra kasus kelaparan dan kekurangan gizi, meski mata pencaharian pokok penduduk di wilayah tersebut adalah pertanian, yang antara lain menghasilkan pangan. Ketika itu, sementara seseorang menghisap sebatang rokok, maka di suatu tempat lain telah terjadi 100 kematian akibat kelaparan.

Dan kematian bukan menjadi akhir penderitaan. Kelaparan telah memilin suatu lingkaran setan menjadi lebih kejam. Kemiskinan menciptakan kelaparan, kelaparan membentuk manusia yang kurang produktif;



Anak kekurangan gizi, Indonesia

Foto: Dok. WALHI

karena itu akan tercipta masyarakat yang lebih miskin, dan demikian menjadi lebih lapar.

Pada awal 1970-an telah dilakukan suatu studi di barak-barak pengungsi yang menyebar dari Guatemala sampai India, dari Meksiko sampai Palestina. Studi terhadap 500 anak yang cenderung kekurangan gizi menunjukkan, bahwa 62% anak memiliki IQ di bawah 80. Sementara itu, studi terhadap 500 anak normal kelas menengah menunjukkan, hanya 1% anak yang memiliki IQ di bawah 80. Jika dikaitkan dengan kenyataan kurang gizi yang dialami banyak negara, maka magnitud dampaknya amat masif. Anak-anak di bawah usia lima tahun di banyak negara pada tahun 2000-an telah mengalami kekurangan gizi, misalnya Afganistan (25%), Somalia (17%), Kamboja (15%), Laos (15%), Madagaskar (14%), Nigeria (14%),



**“Tidak ada
kesalahan
yang lebih
besar
daripada
berdiam diri
di saat kita
mampu
melakukan
sesuatu,
meski kecil.”**

*Anak kekurangan gizi
di dekat sawah penuh
tanaman padi,
Bangladesh*

Edith Wharton

Novelis pemenang Pulitzer

Srilangka (14%), dan Burkina Faso (13%).

Anak-anak Indonesia juga mengalaminya, meski tidak pernah ada data yang transparan. Pemerintah Indonesia tidak pernah punya kecerdasan *pre-emptive*. Alih-alih melakukan tindakan penggalangan partisipasi masyarakat secara masif sebagai respons kasus kelaparan di banyak daerah; Pemerintah Indonesia malah menyampaikan fatwa “tidak ada kelaparan, yang ada hanya kasus gizi buruk”, meski seorang anak di Tangerang harus makan tanah liat untuk mengatasi rasa laparnya.

Kenyataan kelaparan sempat “menggelisahkan” dunia. Maka pada November 1977 telah diselenggarakan suatu World Food Conference. Temanya, *World Hunger: Causes and Remedies*. Konferensi itu terbilang “sukses”, karena berhasil menelurkan kesepakatan internasional dan segugus solusi.

Kelompok kritis justru mengecam konferensi tersebut. Dikatakannya bahwa solusi yang ditawarkan dalam konferensi amat berbobot teknologi. Lebih menekankan pada sisi produksi ketimbang soal distribusi pangan yang lebih berkeadilan.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa konferensi telah menjadi “pasar induk” untuk memasarkan teknologi pertanian yang menciptakan ketergantungan. Negara industri telah menjadikan sentra kelaparan sebagai pasar pangan dan produk industrinya melalui transaksi-transaksi yang hegemonik.

Kecaman kelompok ini bukan tidak ber-

alasan. Karena mantan Sekretaris Bidang Pertanian Amerika Serikat ketika itu pernah berkata: “Jangan pernah ragu untuk membicarakan soal pangan sebagai ‘senjata’ dan sebagai ‘alat’ yang dahsyat dalam perangkat negosiasi”. Bahkan CIA pernah berbisik rahasia, bahwa kelebihan cadangan pangan Amerika akan menjadikan “Washington...memiliki kekuatan virtual atas hidup dan matinya pihak-pihak yang membutuhkan pangan.” Kemudian terbukti, bahwa pangan telah digunakan sebagai alat untuk menumpuk keuntungan, alat kontrol politik dan ekonomi, dan menjadi penjamin yang efektif untuk menjalankan dominasi atas sebagian besar dunia.

Fakta

Para pemimpin 186 negara pada World Food Summit 1996 bersepakat akan mengurangi separuh angka kelaparan dunia pada 2015. Ini berarti diperlukan pengurangan 20 juta orang miskin per tahun. Padahal, sejak pertemuan 1996 itu, angka orang miskin di dunia hanya berkurang 8 juta orang.



Please,
think
before you eat.

Go Vegetarian!

PETA

For a free vegetarian starter kit
call 1-888-VEG-FOOD or visit GoVeg.com.

Foto: Istimewa

WTO Kills Farmers



DOWN DOWN WTO!
Peasants League

Foto: Istimewa

Jacques-Yves Cousteau

peneliti kelautan



Foto: Dek Wally

PERTIKAIAN TEKNOLOGI

SETELAH konferensi pangan itu, terjadi dua medan pertikaian. Pada satu sisi, negara industri (yang sekaligus juga sebagai penghasil pangan utama dunia) telah menghegemoni negara berkembang dengan kekuatan pangannya. Pada saat yang sama, hegemoni itu kian menguat, karena mereka berhasil menjadikan negara berkembang sebagai pasar produk industri dan teknologi yang terkait dengan soal pangan.

Pada sisi lain, terdapat kelompok kritis, yang pada awalnya hanya bersifat mengecam dan melakukan kampanye-kampanye

perlawanan. Namun aksi kelompok ini kemudian memasuki tataran praksis, dengan menawarkan dan mempraktekkan teknologi-teknologi dan pendekatan-pendekatan alternatif.

“Kita harus mengingatkan dan mengorganisir masyarakat dunia untuk menekan para pemimpin dunia agar mengambil langkah-langkah spesifik untuk menyelesaikan dua akar masalah krisis lingkungan – ledakan pertumbuhan populasi dan konsumsi berlebih pada sumberdaya alam tak terbarukan. Konsumsi dan populasi berlebih ada dibalik setiap masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang ini.”

Fakta

Jika kita tidak bisa menyediakan pangan untuk 6 miliar warga dunia sekarang ini, lantas bagaimana dengan 8 miliar orang (atau lebih) pada 2030? Banyak ahli percaya, tekanan populasi ini juga akan menghadirkan hal positif, selain kemiskinan yang meraja lela. Yaitu, ditemukannya teknologi-teknologi baru, manajemen lingkungan yang cerdas dan kebijakan-kebijakan yang sensitif sosial. Ketiganya ini akan menjadi kombinasi yang baik untuk melakukan sebuah revolusi ‘hijau’ baru.

“...jika dulu setiap usai panen dapat membeli sekian gram emas, kini tak ada emas yang mampu dibeli... malahan emas yang ada justru tergadaikan untuk membeli pupuk”.

Kekeringan di Banten, Jawa Barat

"SOLUSI" REVOLUSI HIJAU

REVOLUSI Hijau dibangun dengan tiga pilar utama. *Pertama*, perkembangan mekanisasi pertanian sejalan dengan revolusi industri. Para pandai besi di Amerika, seperti Charles Newbold (1833) dan John Deere (1830-an) berhasil menciptakan alat, yang kelak menjadi cikal-bakal mesin pertanian. Mesin penebar benih telah dikembangkan, melanjutkan temuan petani Inggris Jethro Tull pada awal 1700-an. Pada akhir 1800-an mesin-mesin uap mulai digunakan sebagai penarik bajak pengganti tenaga hewan. Kehadiran mesin pertanian telah mendorong manusia untuk mengelola lahan pertanian yang lebih luas.

Kedua, pada abad 19 muncul penemuan tentang pupuk inorganik yang berkhasiat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Justus von Liebig berhasil membuat pupuk posfat (TSP: *triple super phosphate*). Haber dan Bosch juga berhasil membuat pupuk urea dari campuran udara dan batubara, yang sekarang dimodifikasi dengan memanfaatkan gas alam. Aplikasi pupuk inorganik telah memacu pertumbuhan dan produksi tanaman melampaui pertumbuhan alaminya.

Ketiga, temuan benih unggul yang dilakukan oleh ahli genetika tanaman Amerika yang bekerja di CIMMYT (Internasional

"Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas."

Pramoedya Ananta Toer

Bumi Manusia

tional Wheat and Maize Center) di Meksiko pada 1943. Hasilnya, pada selang waktu 1947-1967, produktivitas gandum berlipat tiga kali dan jagung berlipat dua kali.

Merujuk pada kisah sukses tersebut, Rockefeller Foundation, pendana CIMMYT, bekerja sama dengan Ford Foundation mendukung pembentukan IRRI (International Rice Research Institute) di Filipina tahun 1962. Tujuh tahun kemudian, IRRI berhasil meluncurkan benih-unggul padi.

Hanya dalam kurun waktu tujuh tahun, areal pertanaman gandum-unggul di negara berkembang meningkat dari 10,000 hektar menjadi 17 juta hektar; areal pertanaman padi-unggul meningkat dari 49,000 hektar menjadi 16 juta hektar. Perluasan areal pertanaman itu, selain didorong oleh pemerin-

tah, juga karena terinsentif oleh peningkatan produktivitas pertanian. Dari sisi ini, fenomena itu mengisyaratkan suatu keberhasilan.

Namun demikian, keberhasilan itu mengundang kritik yang kian tajam. *Pertama*, meski berhasil meningkatkan produktivitas dan produksi total pangan, yang menghasilkan kelimpahan pangan; namun hal itu tidak serta merta menyelesaikan krisis pangan. Kelaparan tetap berlangsung, karena kelimpahan pangan itu tidak bisa diakses oleh setiap orang.

Manfaat kehadiran teknologi ini hanya bisa dinikmati oleh para pemilik tanah dan modal. Sementara para buruh tani tidak serta merta menikmati peningkatan upah kerja. Malahan dalam banyak kasus telah terjadi penyusutan kesempatan kerja pedesaan. Panen padi sistem babat dengan menggunakan sabit, menggantikan sistem ketam (ani-ani), telah menyingkirkan tenaga kerja perempuan. Serapan tenaga kerja dalam aktivitas panen pun menyusut 50-75%. Lapangan kerja tumbuk-padi manual juga menghilang, seiring dengan kehadiran mesin penggilingan padi.

Kedua, Revolusi Hijau dinilai telah mengeskalasi tingkat ketergantungan negara berkembang pada negara industri. Semula para petani hanya bergantung pada alam dengan mendayagunakan sumberdaya lokal. Kini mereka bergantung pada orang lain untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi: benih, pupuk, pestisida, herbisida, dan mesin-mesin pertanian. Itu semua meru-



Foto: Henry Lopulidan

Bibit unggul

pakan barang dagangan negara-negara industri. Situasi itu kian diperparah tatkala nilai tukar produk pertanian terhadap produk perkotaan kian mengecil. Artinya, ketika panen boleh jadi petani menerima uang dengan nilai nominal yang lebih besar. Namun kemampuan uang itu untuk dibelanjakan kian melemah. Perbandingan yang lazim dilakukan oleh petani adalah: "...jika dulu setiap usai panen dapat membeli sekian gram emas, kini tak ada emas yang mampu di-

beli...malahan emas yang ada justru terga-daikan untuk membeli pupuk”.

Ketiga, produktifitas tinggi yang dicapai oleh Revolusi Hijau bersifat artifisial. Ia hanya benar jika ditinjau menurut satuan waktu atau satuan luas lahan yang diusahakan. Namun ditinjau dari segi konversi erergi, pertanian Revolusi Hijau justru lebih tidak efisien dibanding dengan pertanian tradisional. Karena, untuk mencapai tingkat produktivitas dua kali lipat, misalnya, diperlukan *input* energi (benih, pupuk, dan pestisida) lebih dari dua kali lipat dibanding dengan energi yang dibutuhkan praktek pertanian tradisional. Pemborosan energi itu, tentu saja, akan menimbulkan dampak lingkungan, yang kini belum diperhitungkan.

Keempat, praktek Revolusi Hijau ternyata telah mendorong terjadinya krisis lingkungan yang serius. Pengolahan tanah telah mem-

bentuk struktur tanah yang lebih padat, yang menghalangi infiltrasi air ke dalam tanah. Karena itu, air tanah yang telah dikuras di banyak tempat, tidak dapat segera terisi- ulang. Selain itu, penurunan infiltrasi air itu akan meningkatkan volume aliran permukaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan erosi tanah.

Residu kimia pertanian telah mencemari badan sungai serta mengganggu kesehatan hewan liar pemakan biji-bijian. Pada saat yang sama pestisida telah turut memusnah- kan organisme non-pengganggu-tanaman. Plasma nutfah lokal juga tergusur dan menghilang karena petani dipaksa untuk menggunakan benih-benih eksotik. Kini nyaris mustahil untuk bisa memperoleh benih padi bengawan, gede, dan padi bulu “pri- madona-primadona varietas padi lokal pa- da pertanian masa lalu.

Fakta

Industrialisasi yang pesat di pelbagai negara pada tahun-tahun terakhir ini menyebabkan banyak hutan yang dibuka dan diubah fungsinya menjadi lahan-lahan pertanian. Negara-negara yang memiliki peringkat tertinggi kehilangan kawasan hutan antara 1990 hingga 2000 meliputi Brasil, Indonesia, Sudan, Zambia, Meksiko dan Republik Demokratik Kongo.



Pemukiman Orang Badui Luar

PRASYARAT KEARIFAN LOKAL

MASYARAKAT adat telah mempelajari perilaku lingkungannya selama puluhan dan bahkan ratusan tahun. Karena itu, mereka berhasil menerapkan praktek pertanian yang ramah lingkungan. *Agroforest*, perladangan gilir balik, dan praktek hidup eksklusif seperti yang dijalankan Suku Badui merupakan contoh-contoh yang amat mahsyur.

Banyak kalangan berharap, pemenuhan pangan dengan praktek-praktek indigenus merupakan praktek pertanian masa depan yang tentu saja ramah lingkungan. Namun praktek ini pun ternyata tidak luput dari kritik, terutama dari sudut pandang lingkungan. Praktek pertanian indigenus akan ramah lingkungan jika dan hanya jika memenuhi tiga prasyarat berikut: (1) Motif produksinya adalah subsisten; (2) Tekanan penduduk rendah; dan (3) Kelimpahan sumberdaya (*resources endowment*) tinggi. Jika salah satu prasyaratnya tidak terpenuhi, maka keseimbangan akan bergeser pada titik yang tidak ramah lingkungan.

Perladangan gilir balik, suatu praktek yang diterapkan di banyak daerah di Indonesia, semula berdaur 20 tahun. Artinya, dalam waktu 20 tahun, petani akan kembali ke tanah bukaan yang sama. Waktu selama itu cukup untuk memulihkan kesuburan tanah

“Alarm planet kita sudah berbunyi, ini waktunya bangun dan ambil tindakan!”

Leonardo DiCaprio

aktor Hollywood

dan keanekaragaman flora secara alamiah. Namun saat ini, para petani bukan hanya butuh makan. Mereka inginkan televisi dan sepeda motor. Karena itu mereka buka lahan lebih luas. Tatkala lahan yang tersedia kian menyusut, karena jumlah keluarga tani kian banyak, maka siklus pun diperpendek. Kini perladangan berpindah dengan siklus kurang dari lima tahun sudah lazim. Bahkan ada yang mengelola lahan sebanyak dua petak saja. Tahun ini mengolah lahan yang satu, tahun berikutnya mengolah lahan sebelahnya dan memberakan lahan lainnya. Tentu saja praktek seperti itu secara radikal telah meng-



Orang Badui Dalam

Foto: Kemal Jufriz/Repro



Perladangan gilir balik Orang Dayak di Kalimantan

Foto: Dek WALHI

Perladangan gilir balik, suatu praktek yang diterapkan di banyak daerah di Indonesia, semula berdaur 20 tahun. Artinya, dalam waktu 20 tahun, petani akan kembali ke tanah bukaan yang sama. Waktu selama itu cukup untuk memulihkan kesuburan tanah dan keanekaragaman flora secara alamiah.

hilangkan hakekat ramah lingkungan.

Suku Badui Dalam berhasil sampai sekarang mempertahankan praktek pertanian ramah lingkungan pada kondisi kelimpahan sumberdaya yang konstan (areal tidak bertambah). Mereka berkonsentrasi untuk menjalankan pertanian subsisten secara konsisten. Pada saat yang sama, mereka memiliki mekanisme internal untuk mempertahankan tekanan penduduk atas sumberdaya lahannya. Jumlah keluarga di lingkungan Badui Dalam dipertahankan secara konstan. Setiap ada kelebihan keluarga atau ada keluarga yang melakukan kesalahan substantif, maka selalu ada keluarga yang diekstradisi. Mereka tinggal di koridor permukiman Badui Dalam, yang disebut sebagai Badui Luar dan Orang Rawayan. Mekanisme tersebut telah berhasil mempertahankan praktek pertanian Badui Dalam yang ramah lingkungan. Namun praktek ini secara substantif telah mengeksplor persoalan dampak lingkungan ke wilayah lain.

Foto: Dok. WALHI



Perempuan Badui hendak ke ladang

“Setiap pilihan mendekatkan atau menjauhkan kita dari sesuatu. Untuk hidupmu, mana pilihan yang kamu ambil?”

Eric Allenbaugh

Penulis dan konsultan kepemimpinan

Pasar sekaligus kebun, Bolivia

TEKNOLOGI ALTERNATIF: Pertemuan akademis dan aktivis

REVOLUSI Hijau dan praktek pertanian selaras alam telah menjadi pelajaran bagi sebagian orang. Manusia kian sadar, bahwa praktek Revolusi Hijau menimbulkan banyak persoalan. Sementara itu praktek pertanian indigenus yang diakui sebagai ramah lingkungan pun ternyata mengandung implikasi ketidak-ramahan.

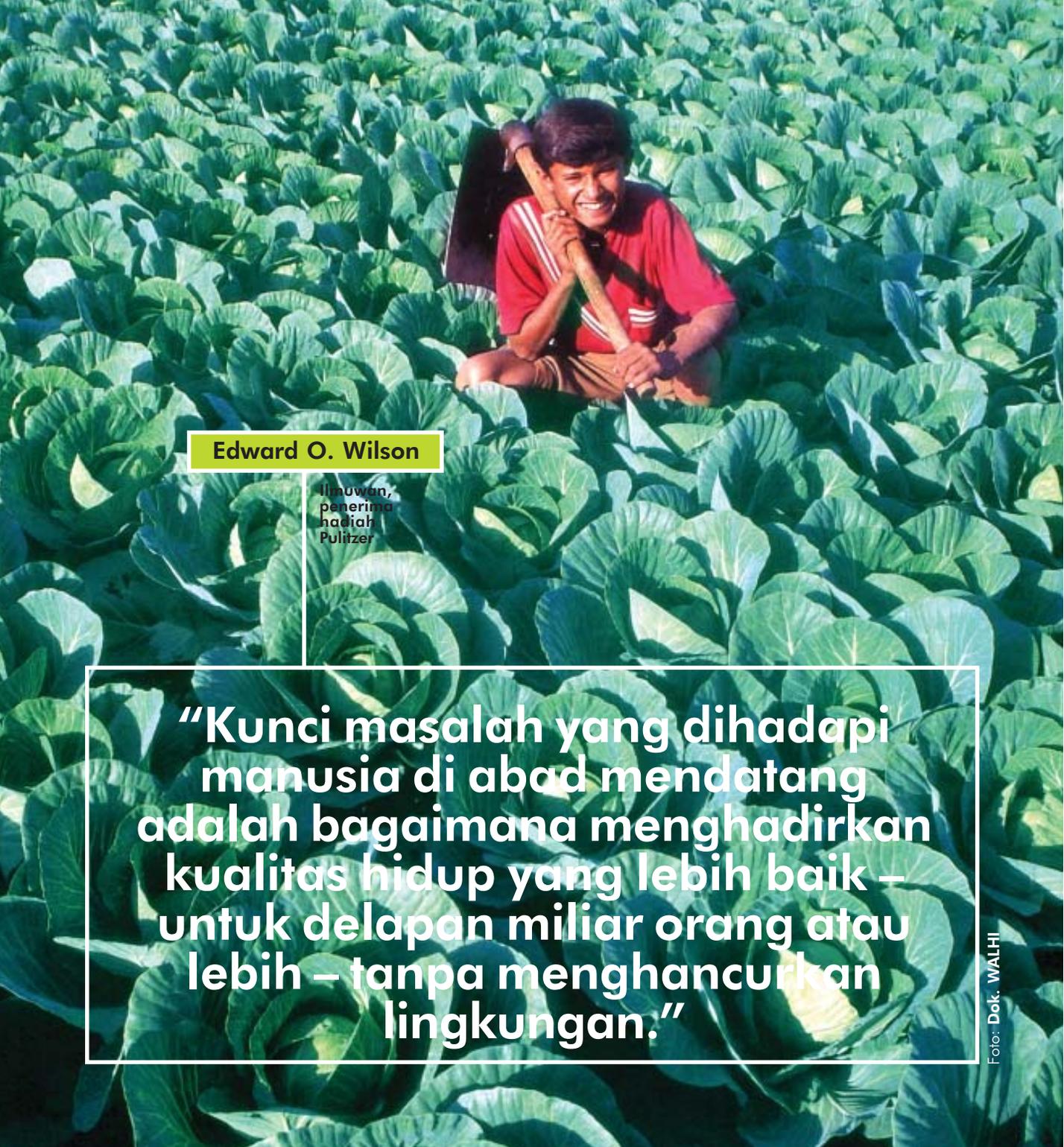
Situasi itu telah memaksa orang untuk menemukan pilihan yang lebih cerdas. Pada saat yang sama lantas tumbuh kesadaran, bahwa setiap tindakan manusia senantiasa akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Keseimbangan lingkungan akan selalu bergeser pada titik baru, setiap kali ada intervensi tindakan manusia atau ada fenomena alam yang mengganggu keseimbangan semula. Karena itu, muncul ukuran-ukuran penilaian lingkungan yang lebih praktikal: manfaat dan risiko yang dapat diterima. Manusia hanya mau memanen manfaat, jika risiko yang melekat padanya ada pada tataran yang dapat diterima.

Secara prakteknya, manusia menjadi lebih arif antara lain dengan cara meninggalkan pelbagai dikotomi yang tidak substantif. Tujuan pelestarian tidak diadu dengan tujuan pemanfaatan, karena keduanya bisa berimpit pada suatu titik temu. Polarisasi titik pandang antara aktivis lingkungan dengan para ilmuwan pun mulai mencair. Aktivis lingkungan tidak secara kukuh hanya bersandar pada tujuan pelestarian. Begitu juga para ilmuwan tidak mati kaku membela Revolusi Hijau. Para ilmuwan pun segera sadar, bahwa kaidah ilmiah yang dianutnya pun sebenarnya mengakui adanya prinsip-prinsip kelestarian, yang selama ini terhegemoni oleh tujuan-tujuan produksi yang pragmatis.

“Penggunaan minyak tanaman sebagai bahan bakar mungkin sekarang ini belum dianggap penting. Tapi, ada waktunya minyak tanaman akan menjadi sama pentingnya seperti minyak dan batu bara sekarang ini.”

Rudolf Diesel

penemu mesin disel, yang aslinya saat diciptakan menggunakan bahan bakar minyak kacang

A man in a red shirt is sitting in a vast field of green cabbages. He is holding a wooden tool, possibly a hoe or a similar agricultural implement, and has a thoughtful expression on his face. The field is densely packed with cabbages, and the lighting is bright, suggesting a sunny day.

Edward O. Wilson

Ilmuwan,
penerima
hadiah
Pulitzer

“Kunci masalah yang dihadapi manusia di abad mendatang adalah bagaimana menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik – untuk delapan miliar orang atau lebih – tanpa menghancurkan lingkungan.”

Semua pihak menyodorkan alternatif teknologi yang tidak eksklusif. Pertanian organik merupakan teknologi yang banyak disodorkan oleh aktivis lingkungan. Praktek ini dijalankan secara masif terutama oleh petani-petani hortikultura di dataran tinggi yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Kelompok ilmuwan mulai menyodorkan alternatif teknologi yang bersifat pro-biotik. Selanjutnya kedua kelompok secara bersama-sama menyodorkan pilihan pertanian dengan *input* eksternal rendah.



Energi matahari mulai banyak digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemakaian energi.

Foto: Dok. WALHI

Fakta

Di Denmark, biomassa digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Limbah pertanian, mulai dari batang tebu sampai debu beras, digunakan untuk bahan bakar, atau dijadikan gas untuk keperluan listrik. Di Brasil, ethanol telah menggantikan sekitar 220.000 barrel minyak perhari, dan menghemat pengeluaran negara sekitar 52 milyar dollar AS. Investasi industri ethanol sendiri di Brasil sudah berjalan selama 22

“Setiap hak yang berlebihan adalah penindasan.”

Pramoedya Ananta Toer

Jejak Langkah

Riau

KETIMPANGAN KELEMBAGAAN, TIDAK MEMIHAK KAUM MISKIN

LUAS daratan di bumi ini sekitar 13.5 miliar hektar. Sebanyak 70% berpegunungan terjal, terlalu kering, atau terlalu dingin “yang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Sisanya, wilayah potensial untuk pertanian; sebagian sudah dimanfaatkan dan sebagian lainnya masih merupakan daratan atau rawa bervegetasi hutan. Namun perluasan pemanfaatan pada wilayah potensial ini akan bertumbukan dengan dampak-dampak deforestasi, yang sudah dirasakan dalam tiga puluh tahun terakhir ini.

Lagipula perluasan itu tidak dipercaya akan mampu mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Karena kelembagaan yang berlaku efektif saat ini justru tidak memihak pada kelompok miskin. Amerika Selatan, misalnya, 17% pemilik lahan menguasai 90% lahan. Meski situasi di Asia tidak sedramatik itu, karena penguasaan lahan relatif lebih merata; namun seperlima

petani terkaya menguasai 3/5 lahan pertanian yang tersedia. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga petani di Amerika Latin hanya menguasai 1% lahan; tiga perempat petani di Afrika hanya menguasai akses terhadap 4% lahan pertanian; dan secara keseluruhan di dunia, sepertiga dari populasi petani malah tidak memiliki lahan sama sekali.

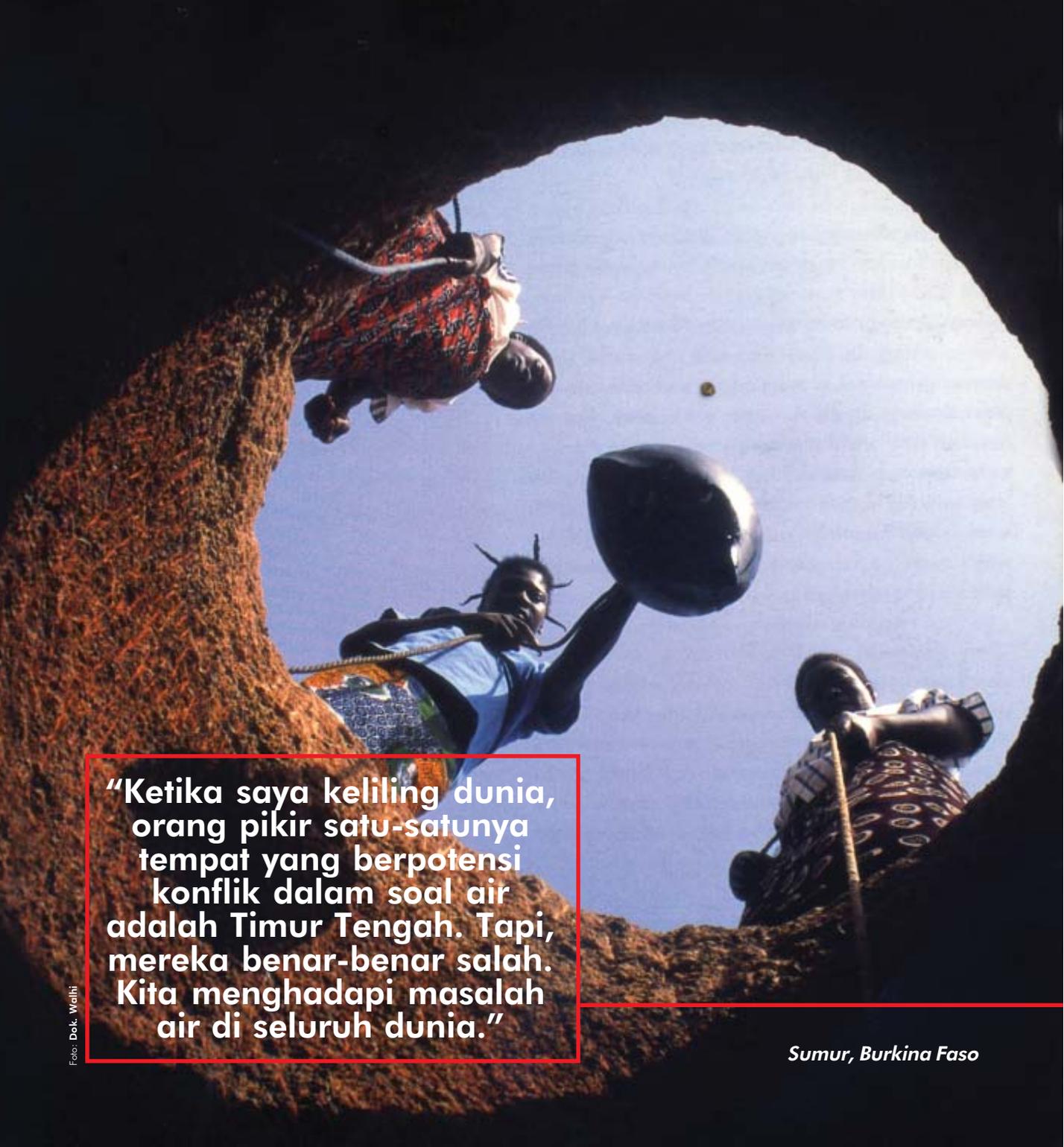
Fakta

10,9 juta balita meninggal di negara-negara sedang membangun setiap tahunnya. Kurang gizi dan penyakit yang berhubungan dengan kelaparan jadi penyebab 60% kematian.



Every 3.6 seconds a person dies of hunger

75%
of them are children



**“Ketika saya keliling dunia,
orang pikir satu-satunya
tempat yang berpotensi
konflik dalam soal air
adalah Timur Tengah. Tapi,
mereka benar-benar salah.
Kita menghadapi masalah
air di seluruh dunia.”**

Foto: Dek. Walhi

Sumur, Burkina Faso

AKSES PADA LAHAN DAN AIR

SEBAGIAN besar negara maju dikuniai iklim yang ramah dan curah hujan yang cukup. Jika iklimnya terlalu kering, mereka punya kesempatan dan kemampuan untuk membangun sistem irigasi. Sementara itu, negara berkembang banyak bersentuhan dengan iklim yang ekstrem. Hanya seperdelapan lahan pertaniannya yang beririgasi, dan sebagian besar tersebar di Asia; dan hanya separuhnya yang teririgasi secara efisien.

Soal akses pada lahan dan air ternyata akan menajamkan polarisasi kaya-miskin. Secara kuantum kelompok kaya menguasai sebagian besar lahan pertanian, dan meninggalkan kelompok mayoritas miskin mengeroyok lahan pertanian yang jauh lebih sempit. Lahan yang dikuasai oleh kelompok kaya adalah lahan-lahan bermutu, sementara lahan yang dikuasai oleh kelompok miskin adalah lahan marjinal.

Kondisi struktural seperti itu, tidak memungkinkan kelompok miskin bermutasi menjadi berkecukupan. Mereka akan akrab dengan persoalan kelaparan. Jumlah mereka akan semakin besar, karena ditambah dengan hasil proses pemiskinan pada seba-



Foto: Dok. WAHJI

Sawah kering

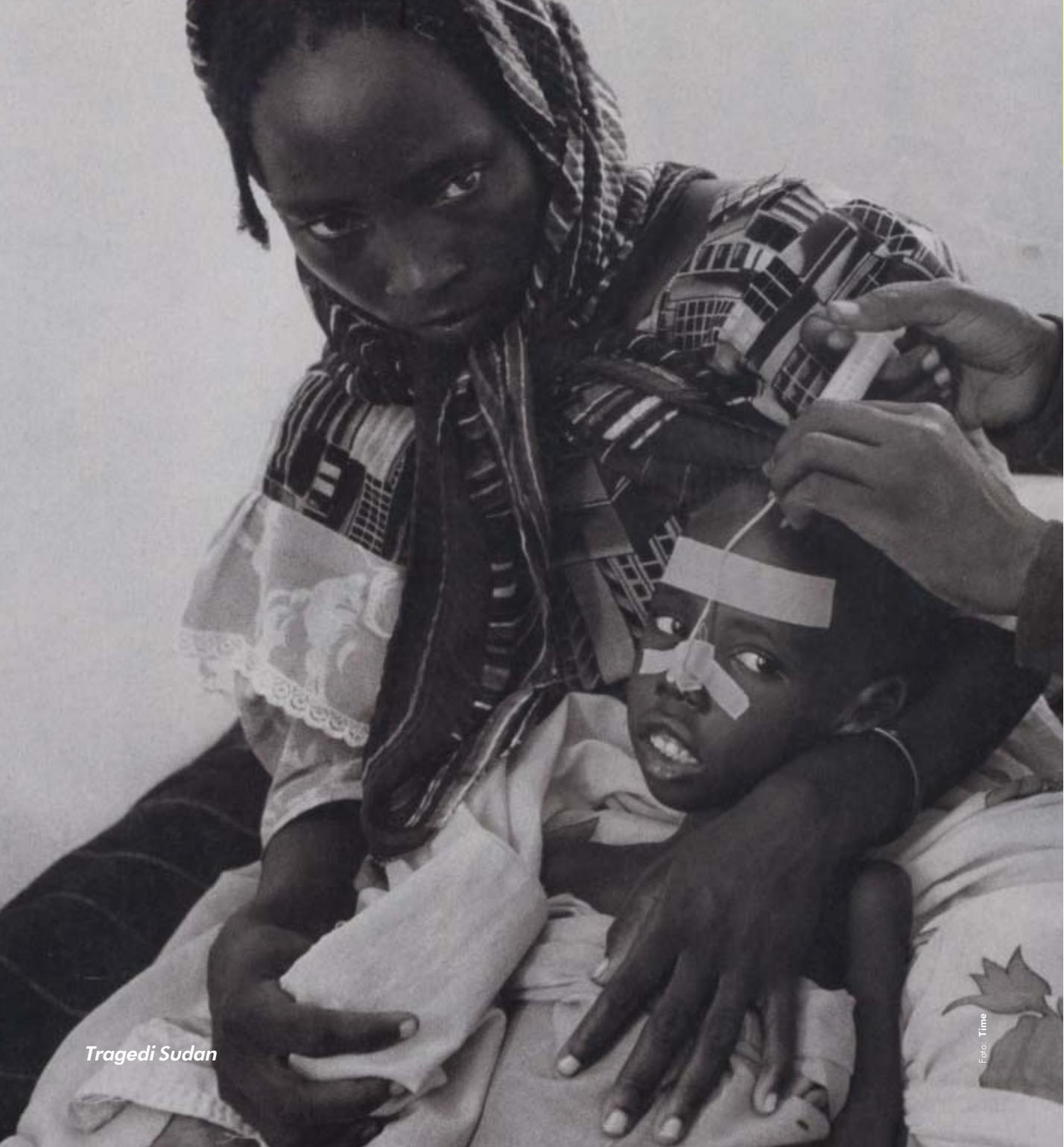
gian kelompok kaya. Tingkat kemiskinannya pun akan memburuk, mengikuti hukum lingkaran tak berujung pangkal (kausasi sirkular) seperti yang diungkapkan oleh Gunnar Myrdal.

Fakta

Sekarang ini, ada 31 negara, terhitung kurang dari 8% populasi dunia, mengalami kondisi kekurangan air bersih yang sangat parah. Beberapa negara yang mengalami masalah air tersebut sampai 25 tahun mendatang antara lain: Ethiopia, India, Kenya, Nigeria dan Peru. Negara-negara besar, macam China, malah sudah menghadapi masalah air yang sangat kronis sekarang ini.

Kofi Annan

Sekjen PBB



Tragedi Sudan

Foto: Time

Distribusi Pangan Yang Tidak Adil

TIDAK ada hukum ekonomi yang mengatakan, bahwa pangan akan mengalir otomatis dari daerah berkelebihan ke daerah berkekurangan. Tidak seperti air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Dalam soal ini berlaku norma “tidak ada makan siang gratis”.

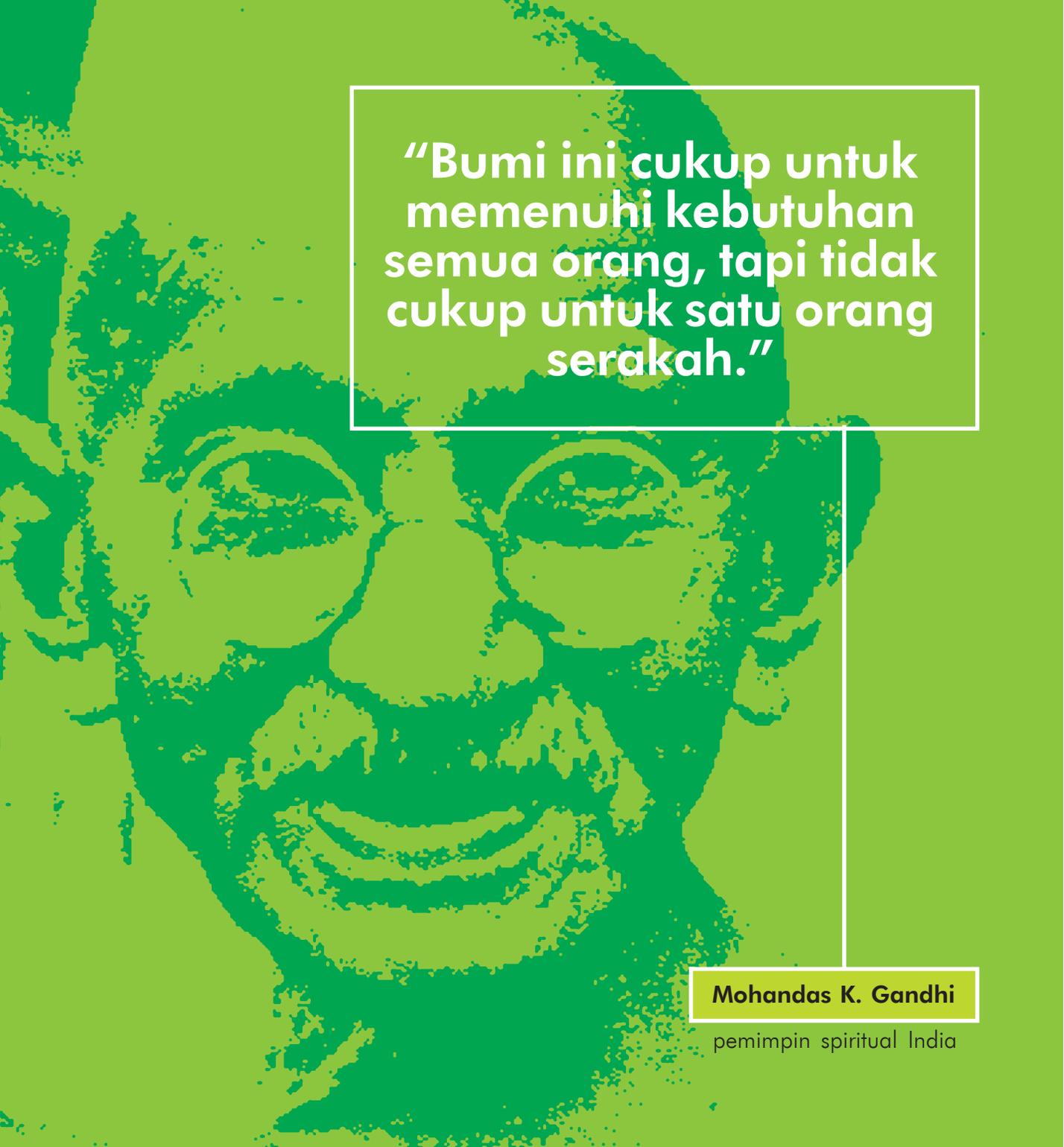
Artinya, tidak tersedia mekanisme kepedulian sosial yang organik yang mampu melakukan redistribusi kecukupan pangan secara lebih berkeadilan. Pada saat yang sama, pemerintah tidak tergerak untuk mengembangkan kebijakan yang afirmatif, yang secara substansial mampu mengentaskan kelompok miskin dari skandal kelaparan.

“Kebebasan hanya bisa dicapai ketika dominasi ekonomi atas rakyat diakhiri.”

Ernesto Che Guevara

Fakta

Orang-orang di negara maju rata-rata minum air 10 kali lebih banyak ketimbang orang-orang negara sedang membangun. Diperkirakan, rata-rata orang di negara maju menggunakan 500-800 liter air per hari (300 m³ per tahun). Bandingkan dengan penggunaan air di negara berkembang: 60-150 liter per hari (20m³ per tahun).



**“Bumi ini cukup untuk
memenuhi kebutuhan
semua orang, tapi tidak
cukup untuk satu orang
serakah.”**

Mohandas K. Gandhi

pemimpin spiritual India

MITOS DAN REALITAS TENTANG PANGAN

MITOS 1 TIDAK CUKUP PANGAN UNTUK SEMUA

Cadangan pangan itu sangat berlimpah untuk memasok kebutuhan pangan sebanyak 3,500 kalori/orang/hari. Bahkan cukup untuk membuat setiap orang menjadi gembrot. Cadangan itu bahkan cukup tersedia di beberapa negara yang dikenal sebagai sentra kelaparan, atau berposisi sebagai *net-exporter* pangan dan komoditi pertanian lainnya. Persoalan sesungguhnya adalah banyak orang yang terlalu miskin untuk membeli pangan yang berlimpah itu.

MITOS 2 KELAPARAN KARENA ALAM

Banyak kasus kelaparan terjadi dalam lingkungan alam yang ekstrem, seperti kemarau panjang. Tapi, bukan kemarau itu yang membuat kelaparan karena kemarau yang sama ternyata tidak membuat penduduk daerah lain menjadi lapar.

Sungguh terlalu serampangan menyalahkan alam (bencana alam) sebagai penyebab kelaparan. Penyebab sesungguhnya adalah kemiskinan, yang membuat penduduk di daerah rawan pangan tidak punya pilihan untuk bertempat tinggal di tempat lain. Mereka termarjinalkan dan terdesak ke

wilayah-wilayah ekstrem yang rawan bencana.

MITOS 3 TERLALU BANYAK MANUSIA

Kepadatan penduduk bukan faktor utama penyebab kelaparan. Kosta Rika, yang rata-rata penguasaan lahan pertaniannya hanya separuh dari Honduras, justru memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Rata-rata harapan hidup penduduknya 11 tahun lebih panjang dibanding dengan Honduras, bahkan hampir setara dengan harapan hidup penduduk di negara maju.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kelaparan ditemukan secara endemik pada negara-negara yang memberikan akses penduduk yang relatif buruk terhadap soal-soal pemilikan lahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan hari tua. Kasus-

Fakta

**Setiap 5 detik, 1
anak meninggal
karena lapar**

kasus Cina, Srilangka, dan Kolombia (yang sukses menurunkan laju pertumbuhan penduduknya) menunjukkan, bahwa kemiskinan perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk memiliki jumlah anak lebih sedikit.

MITOS 4

LINGKUNGAN VS PANGAN

Adalah benar bahwa krisis lingkungan akan mempengaruhi upaya-upaya penyediaan pangan. Namun upaya penyediaan pangan tidak berkorelasi positif dengan perusakan lingkungan. Krisis lingkungan justru terjadi pada aktifitas korporasi yang melakukan pembalakan kayu atau mengubah hutan menjadi kawasan perkebunan.

Para petani organik di Amerika dan negara maju lain menunjukkan, bahwa pengadaan pangan bisa sangat ramah lingkungan. Kuba pun mampu bangkit dari krisis pangan melalui aktivitas pertanian yang mandiri dan berkelanjutan, dengan mengurangi *input* pertanian kimiawi yang merusak lingkungan.

MITOS 5

REVOLUSI HIJAU SEBAGAI JAWABAN

Adalah benar bahwa Revolusi Hijau telah mampu melipatgandakan produksi pangan. Namun hal itu tidak mampu menyingkirkan kelaparan, karena tatanan yang tercipta justru makin memusatkan penguasaan kekuatan produktif pada tangan-tangan yang kian jauh dari kelompok miskin.

MITOS 6

MEMERLUKAN SKALA USAHA BESAR

Kian besar skala usaha pertanian tidak selalu kian produktif. Dalam praktek, malah sebaliknya. Petani yang menguasai lahan lebih sempit, justru mampu mencapai produktivitas empat sampai lima kali lipat per satuan luasnya, karena mereka mengelola lahan secara lebih intensif dan terintegrasi. Kasus di Brasil, tatkala dilakukan redistribusi penguasaan lahan dengan luasan yang lebih sempit, justru telah meningkatkan hasil sebanyak 80%.

MITOS 7

PASAR BEBAS

AKAN AKHIRI KELAPARAN

Sekarang terdapat formula ekonomi, bahwa efisiensi pasar akan tercipta dalam suatu pasar bebas. Kompetisi sempurna akan tumbuh. Intervensi pemerintah hanya akan membuat ekonomi menjadi sakit.

Itu hanya benar jika semua pelaku punya kesempatan dan kemampuan yang sama. Nyatanya semua kesamaan itu hanya sebuah ilusi. Dunia justru penuh dengan ketimpangan. Karena itu, pasar bebas tidak akan mengakhiri kelaparan. Privatisasi juga akan memperburuk ketimpangan. Skandal kelaparan butuh penanganan bijaksana, yang memungkinkan kelompok miskin mampu bangkit memberdayakan dirinya sendiri.

MITOS 8 **PERDAGANGAN BEBAS** **ADALAH JAWABAN**

Brasil mampu menggenjot ekspor kedele untuk menjadi pakan ternak di Jepang dan Eropa. Tapi pada saat yang sama, masalah kelaparan telah mengancam sepertiga sampai dua-pertiga penduduk Brasil. Mereka terlalu miskin untuk dapat membeli pangan yang diproduksi di tanah airnya sendiri. Perdagangan bebas hanya akan mensejahterakan kelompok yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berkompetisi. Dan tidak ada logika yang membenarkan orang lumpuh akan memenangkan lomba lari melawan atlet profesional.

MITOS 9 **TERLALU LAPAR UNTUK** **MEMPERJUANGKAN HAK**

Orang lapar harus didorong untuk memperjuangkan hak-haknya. Jika tidak, hanya sebagian kecil saja yang akan bertahan hidup. Petani lapar di Meksiko dan India mampu berjuang untuk itu. Jika kesadaran itu tidak tumbuh di kalangan mereka, harus ada pihak yang menyadarkan dan menunjukkan jalur yang benar bagi kehidupan mereka. Semua pihak harus sadar, bahwa kelaparan bukanlah takdir, melainkan skandal.

MITOS 10 **BANTUAN LUAR NEGERI AKAN** **AKHIRI KELAPARAN**

Memang tersedia bantuan langsung un-

tuk mengatasi kelangkaan pangan, termasuk bantuan kemanusiaan ketika ada bencana. Tetapi bantuan itu hanya untuk mengatasi rasa lapar sesaat. Kerangka global bantuan (pinjaman) justru tidak berperspektif memberdayakan. Malahan Susan George menggambarkan secara satirik, bahwa bantuan pangan itu cenderung menjadi “senjata” (ketimbang sebagai bantuan) yang dilakukan Si Kenyang untuk menghegemoni Si Lapar.

MITOS 11 **DIUNTUNGAN OLEH KEMISKINAN**

Tidak ada orang kaya yang bisa diuntungkan oleh kemiskinan. Keuntungan hanya bisa diambil jika masyarakat memiliki daya-beli yang tinggi, yang akan mendorong terjadinya transaksi dan pertukaran di pasar. Transaksi dan pertukaran yang adil itulah sebenarnya yang mampu memberikan keuntungan.

MITOS 12 **KEBIRI KEBEBASAN UNTUK** **MENGAKHIRI KELAPARAN**

Tidak ada alasan teoritikal maupun praktikal yang membenarkan bahwa pembebasan akan mengganggu upaya-upaya penanggulangan kelaparan. Ketika masyarakat melakukan aksi menuntut hak-hak aksesnya, mereka tidak berhenti memproduksi dan tidak merusak asset produktif untuk memproduksi pangan. Pembebasan justru harus dimaknai sebagai upaya mematahkan pelbagai ketidakadilan, yang menjadi penyebab utama kelaparan selama ini.

ellen

506801

Everything must go!

HATIRAS HATIRAS BAREBAREBAREI

DR BAREBAREBAREI DR BAREBAREBAREI DR BAREBAREBAREI

Spaced Spaced

lavader lavader

15.01.2001 15.01.2001

OUT NOW OUT NOW OUT NOW

KEMANA KEANEKARAGAMAN PANGAN KAMI?

BAYANGKAN mangga - ada mangga “endog”, bentuknya sedikit lonjong bulat seperti telur, kulitnya juga hijau muda nyaris putih jika masih mentah, kala matang akan berubah oranye menyala - harus matang benar baru manis. Jika tidak, aduh... asam rasanya.

Mangga “talijiwo” sering juga disebut mangga “kodok”. Bentuknya memang sedikit mirip kodok, warna kulitnya hijau tua dan rasanya agak gurih sejak masih muda. Ketika matang, warna kulitnya hanya bertambah tua - hijau tua sekali. Entah mengapa dinamakan “talijiwo”, mungkin karena bentuknya juga mirip hati, tempat di mana jiwa tertambat.

Satu yang aku sangat suka adalah mangga “santok-magetan”. Bentuknya memanjang, ujungnya sedikit terjungkit “seksi”, tak terlalu besar dan punya aroma yang sangat khas.. Sayangnya, sekarang sulit dicari, hampir tak bisa ditemui di pasar ataupun di *supermarket*.

Demikian pula sawo. Ada sawo kecil, bentuk tajuknya mirip pohon cemara - mengerucut ke atas, rapi jail. Kini, banyak dijadikan pohon *landscape* tapi orang tak makan buahnya. Padahal, enak. Buahnya lonjong-lonjong berwarna merah tua, berkulit tipis seperti anggur. Bila disobek, melepaskan dia. Bagian dalamnya mirip ubi jalar



Sawo



Juwet Ungu

Foto-foto: Dok.WALHI

kuning yang sudah direbus, rasanya manis.

Pohon lain yang satu famili dengan sawo kecil dan manilo adalah “sekar tanjung”. Bunganya mirip betul dengan bunga sawo kecil. Juga baunya, harum yang “sedep” kata orang Jawa. Tidak menusuk hidung namun menembus kalbu, membawa ketenangan. Mungkin itu sebabnya pelataran kraton selalu banyak ditanami sawo kecil.

Banyak sekali keragaman buah asli Indonesia. Misalnya saja, juwet ungu dan juwet putih. keduanya agak “sepet” enak untuk campuran rujak. Masih ada lagi buah kecap, buah sirsak, dan beraneka ragam pisang (pisang emas, susu, raja, raja sereh, kepok, kepok pipit, ambon, tanduk, dan masih banyak lagi). Demikian juga, jambu, baik jambu biji maupun jambu air, memiliki keragaman yang tinggi.

Tapi cobalah ke pasar, kita akan sulit mendapatkan sebagian besar dari buah-buahan di atas. Tanpa kita sadari, kita menggadai memori sejarah yang kita miliki, tentang budaya yang mengalir dalam darah dan DNA kita.

Hilangnya buah-buahan tersebut bukanlah hal yang sederhana. Itu menandai matinya sebagian dari kultur kita, kultur, Jawa, Sunda, dan kebudayaan lainnya yang ada di Nusantara. Kematian yang sepi, tanpa ada yang menangisi, bahkan hanya sedikit saja yang menyadarinya.

Jika merenungi ini, terasa menghunjam benar kata-kata bernas Gabriel Howearth, seorang pecinta keanekaragaman hayati

Hilangnya buah-buahan tersebut bukanlah hal yang sederhana. Itu menandai matinya sebagian dari kultur kita, kultur, Jawa, Sunda, dan kebudayaan lainnya yang ada di Nusantara. Kematian yang sepi, tanpa ada yang menangisi, bahkan hanya sedikit saja yang menyadarinya.

yang berjuang untuk menjaga kelangsungan benih-benih asli. Begini katanya “Saya tertarik pada kebudayaan yang hampir musnah. Kemusnahan ini biasanya akan diikuti oleh hilangnya sejumlah tanaman. Ada roh yang unik dalam makanan yang dimakan oleh orang-orang ini yang unik bagi kebudayaan mereka, dan bila Anda dapat menanamkan kembali kesadaran dengan menyebarkan kembali kebiasaan mengkonsumsi makanan itu ke dalam masyarakat *mainstream*, maka roh pangan itu akan dapat hidup terus”.

**(Chandra Kirana,
baca sekaralas.blogspot.com)**

**Kaum
Environ-
mentalis
percaya,
pengrusakan
hutan
secara tak
terkendali
menyebab-
kan
hancurnya**



Foto: Dok. WALHI

**seluruh
ekosistem.
Jika tidak
dihentikan,
hutan akan
menjadi
pegunungan
tandus atau
gurun pasir.
Bukti ada di
depan mata!**



Foto: Dok. WALHI



“Satu hal yang paling penting, jangan berhenti bertanya.”

Albert Einstein

Nasib anak bangsa

TANTANGAN BAGI ENVIRONMENTALIS

PARA environmentalis harus menyadari, bahwa memproduksi pangan itu satu soal, dan mendistribusikannya secara adil kepada seluruh masyarakat adalah soal lain. Keduanya sama-sama penting. Pada 2004, produksi pangan dunia berhasil menembus angka dua miliar ton untuk pertamakalinya dalam sejarah (meningkat sekitar 9% dari tahun sebelumnya). Pada saat yang sama, jumlah kelaparan juga mencapai titik tertinggi sejak 1970. Kelaparan sekarang telah membunuh lima juta anak-anak setiap tahun. Sebuah paradoks alam nyata.

Selanjutnya, Environmentalis sejati perlu memahami implikasi-implikasi sebagai berikut: *Pertama*, ketika perdebatan serba teknologi berlangsung, Environmentalis perlu mengambil sikap yang adil. Boleh jadi, teknologi itu tidak ada yang seratus persen baik. Kita membayangkan, bahwa pertanian organik itu lebih ramah lingkungan dibanding dengan pertanian konvensional. Itu benar! Tapi peneliti di Inggris menemukan fakta, bahwa membeli pangan lokal yang dihasilkan dengan teknologi konvensional, akan memberikan dampak positif lebih besar dibanding dengan membeli pangan organik yang diproduksi di tempat lain.

Kedua, kita membayangkan bahwa kelangkaan pangan telah menyebabkan kelaparan. dunia masa kini justru sedang kelimpahan pangan. Itu telah mendorong harga pangan lebih rendah dan dengan demikian menekan pendapatan sektor pedesaan. Kelimpahan pangan juga telah

“Kau pribumi terpelajar! Kalau mereka itu, pribumi itu, tidak terpelajar, kau harus bikin mereka jadi terpelajar. Kau harus, harus, harus bicara pada mereka, dengan bahasa yang mereka tahu.”

Pramoedya Ananta Toer



**“Minatku
pada masa depan
karena aku
akan menghabiskan
sisa hidupku di sana**

Charles F. Kattering

1876-1958, inovator di Amerika

mendorong praktek *dumping*: negara produsen pangan menjual pangan dengan harga lebih rendah dibanding dengan biaya produksinya.

Ketiga, kelebihan produksi pangan utama merupakan faktor utama yang mendorong rendahnya tingkat pendapatan pedesaan, dan dengan demikian menciptakan kemiskinan pedesaan. Kemiskinan pedesaan akan mendorong terciptanya kemiskinan perkotaan, karena di perkotaan terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja yang lari dari sektor pertanian.

Jadi, para Environmentalis dapat berinisiatif untuk mendorong bangsa ini memilih cara terbaik untuk mengatasi persoalan pangan dan kemiskinan. Pilihan itu bisa berupa replikasi dari praktek negara lain. Tapi, bisa juga hasil inovasi di dalam negeri. Bukankah Kuba juga menemukan jurus jitu yang mirip dengan “berdikari” yang

pernah jadi slogan Indonesia? Produksilah apa yang akan kita makan dan kita butuhkan, dengan cara dan arah yang kita inginkan, menggunakan modal kita sendiri!

Produksilah apa yang akan kita makan dan kita butuhkan, dengan cara dan arah yang kita inginkan, menggunakan modal kita sendiri!

Fakta

Lapar mempengaruhi kelahiran. Setiap tahun, ada 17 juta anak yang lahir kurang bobot karena ibu mereka kurang gizi.



Lingkungan rusak menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup? Kemiskinan menjadi tema sentral dalam penyelamatan lingkungan hidup di dunia.

BAGIAN 3

**KEMISKINAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**



DOKUMEN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) mencatat tiga sasaran pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut: *Pertama*, mengurangi tingkat pengangguran dari 9.5% (2003) menjadi 6.7% (2009). *Kedua*, menurunkan tingkat kemiskinan dari 16.6% (2003) menjadi 8.2% (2009). *Ketiga*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4.5% (2003) menjadi 7.2% (2009).

Sementara itu, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2005 sudah mencapai 28.8% dari jumlah penduduk Indonesia. Nilai aktual itu sudah mencapai tiga kali lipat dari dokumen rencana. Sementara itu, jumlah pengangguran pada 2005 mencapai 10.84% dari jumlah angkatan kerja, jauh lebih buruk dari angka dalam dokumen rencana. Dan angka itu pasti kian memburuk akibat kenaikan harga BBM pada akhir 2005, yang akan disusul dengan kenaikan harga jasa layanan umum lainnya pada 2006 ini.



Memburu teroris lebih penting daripada mengatasi kelaparan

Foto: Rendra Pradana/AP-PHOTO/Tempo

“Aku tidak mengerti keadaan di Indonesia ini. Ada orang yang sudah sepuluh tahun jadi tukang becak. Tidak meningkat-ningkat. Seorang tukang cukur bercerita bahwa dia sudah 20 tahun bekerja sebagai tukang cukur. Penghasilannya hampir tetap saja. Bagaimana ini?”

Ahmad Wahib

Catatan Harian 6 Juni 1969

“Jika Anda bukan bagian dari solusi, maka Anda bagian dari masalah.”

Eldridge Clever

Aktivis HAM dan penulis

Dalam situasi seperti itu, nurani pemerintah belum tersentuh. Pemerintah (sekurang-kurangnya selama dua periode kepresidenan terakhir) lebih asyik memburu teror, yang foto pelakunya dipasang dalam pamflet-pamflet seperti dalam film *cowboy* era 1970-an. Perhatian pemerintah justru berpaling dari teror yang lebih masif: kemiskinan yang amat menggigit masyarakat, kerusakan sumberdaya alam yang berpotensi untuk kian memiskinkan, dan kian merosotnya daya beli masyarakat.



“PASAR ITU BAIK”

J ARGON pembangunan ekonomi konvensional yang kerap didengungkan, antara lain “pasar itu baik” dan “intervensi pemerintah itu buruk”. Lantas, jika nasib negara bangsa Indonesia diserahkan bulat-bulat pada pasar, apa yang akan terjadi? Jawabannya: negara bangsa ini akan ambruk, seperti rumah kardus diterpa angin puting beliung. Argumennya bisa dilacak pada konsep sewa tanah (*land-rent*), yang melekat dalam paham ekonomi konvensional.

Setiap sektor ekonomi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar nilai sewa tanah pada ruang tertentu. Perniagaan merupakan sektor ekonomi yang mampu membayar sewa tanah paling tinggi. Karena itu, sektor inilah yang mampu hadir di tengah perkotaan. Sedangkan sektor lainnya akan bergeser menjauhi pusat kota. Jika diurutkan sektor ekonomi berdasarkan kemampuan membayar sewa tanah, dimulai dari yang paling kuat, maka akan diperoleh urutan sebagai berikut: perniagaan, perkantoran, industri, perumahan, pertanian intensif, pertanian ekstensif, dan kehutanan.

Seseorang yang menanam kangkung dalam sebidang tanah di pusat kota, pasti akan dibilang gila. Karena secara obyektif, dia berkesempatan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi jika menyewakan tanah

“Masyarakat modern tidak akan menemukan solusi atas problem ekologi, jika tidak melihat secara serius gaya hidup mereka.

Paus Johannes Paulus II

Pemimpin Gereja Katolik

tersebut untuk kegiatan lain seperti pertokoan atau perkantoran. Bahkan permukiman elit di tengah kota pun, seperti di lingkungan Menteng dan Kebayoran Baru di Jakarta atau kompleks Dago di Bandung, tidak mampu menangkal alih fungsi ruang dari permukiman menjadi ruang niaga. Fenomena itu dapat dilacak pada sejarah pertumbuhan kota mana pun di Indonesia, dari kota-kota metropolitan sampai dengan kota-kota kecil.

Dalam konsep tersebut, tidak ada fungsi ruang yang permanen. Sektor yang



Henry Lapulalan

Para pencari kerja

lebih kuat akan mendominasi sektor yang lebih lemah. Perniagaan dan perkantoran akan membentuk mega-blok di pusat kota. Industri dan perumahan akan mendepak sektor pertanian jauh ke luar kota. Selanjutnya aktifitas pertanian mulai merambah kawasan-kawasan hutan. Maka proses deforestasi pun terjadi sebagai sebuah keniscayaan mekanisme pasar.

Karena itu, sungguh jenaka jika pemerintah, yang amat patuh pada ekonomi pasar, menghujat perambahan hutan sebagai sebuah kejahatan. Sebab jika masyarakat cukup cerdas, sebenarnya mereka bisa bilang: "Maaf, tuan pemerintah, ini hanya sebuah mekanisme pasar." Dan masyarakat pun bisa kembalikan hal itu pada jargon bahwa "pasar itu baik."

Mekanisme di atas, akan menimbulkan

dampak-dampak yang sangat masif. *Pertama*, ukuran suatu kota akan kian membesar. Dulu ada empat kota bertetangga: Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Keempatnya merupakan entitas kota yang mandiri. Namun karena masing-masing kota membesarkan ukurannya, maka keempatnya menyatu menjadi sebuah mega-kota Jabotabek.

Teori ekonomi spasial menyebutkan, ada ukuran maksimum sebuah kota. Jika ukuran maksimum itu dilampaui, maka akan terjadi sejumlah ketidak-efisienan, antara lain yang disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas dan meningkatnya biaya transportasi.

Kedua, akan terjadi proses pencucian sumberdaya pedesaan (*backwash-effect*). Sumberdaya manusia bermutu tinggi akan mengalir ke kota. Sarjana dan wirausahawan

akan pergi ke kota, karena kota memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Karena itu, yang tertinggal di desa adalah sumberdaya yang bermutu lebih rendah.

Ketiga, akan terjadi ketidak-pastian fungsi ruang, karena setiap saat akan terjadi alih-fungsi ruang. Sektor perkotaan leluasa merancang masa depannya, karena mereka memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi. Mereka hanya punya satu cara untuk hidup: ekspansi! Sementara itu pelaku pertanian, tidak ada yang merasa pasti untuk tinggal dan melakukan aktifitas ekonomi di suatu kawasan. Setiap saat mereka harus tersingkir jauh ke luar kota.

Jika proses di atas dibiarkan secara liar, maka akan terjadi proses keruntuhan. Pertumbuhan kota pada akhirnya akan menghasilkan degradasi lingkungan yang akan diakhiri dengan bencana-bencana, karena aktifitas manusia di atasnya sudah melam-

pau daya-dukungnya. Bencana lingkungan itu dapat berupa polusi udara, pencemaran badan sungai, infiltrasi air laut, pencemaran air tanah, tanah longsor, banjir, dan sebagainya “yang kini sudah menjadi cerita nyata sehari-hari. Suatu ketika akan terjadi subsidi (tanah ambles) atau tanah longsor yang amat luas di perkotaan maupun di pedesaan, karena air tanah terpompa secara berlebihan tanpa ada kesempatan pengisian- ulang yang memadai melalui infiltrasi air hujan.

Skenario keruntuhan lainnya berdimensi ekonomi. Kini kota masih mampu memerah manfaat dari desa, karena desa masih memiliki daya beli. Tapi suatu ketika, daya beli masyarakat pedesaan akan merosot ke titik nol. Jika itu terjadi, maka akan terjadi perangkap permintaan (*demand trap*), yang secara langsung akan meruntuhkan roda ekonomi.

Fakta

Penjualan kopi ‘Fairtrade’ di Inggris meningkat 50% per tahunnya. Aslinya, perdagangan alternatif hanya memperdagangkan produksi pangan, tapi sekarang ini meluas hingga ke pakaian dan perabot rumah tangga. Perdagangan alternatif sekarang ini mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Banyak produknya tersedia di toko-toko besar dan supermarket di negara-negara Barat. Di Indonesia, beberapa kelompok komunitas petani di Bali telah bekerja sama dan mendapatkan sertifikasi dari The Fair Trade Foundation.



Berebut beras, 2007

GAYA PEMBANGUNAN Tak berubah

S EJAK masa Orde Baru sampai sekarang, mazhab pembangunan sebenarnya tidak berubah. Pemerintah percaya bahwa industri merupakan lokomotif pembangunan. Jika industri maju, maka negara ini akan aman, karena industri mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga negara.

Ini hanya sebuah mitos. Sektor industri (perbankan) yang justru menyedot dana bantuan pemerintah agar kehidupan bank bisa bertahan. Kemudian pada masa krisis moneter tahun 1997, industri merupakan sektor yang langsung ambruk.

Namun bagi pemerintah, ini sudah menjadi sebuah ideologi. Sayangnya, ideologi ini dianut oleh bangsa yang tidak memiliki kepercayaan diri. Indonesia hanya yakin industrinya bisa kompetitif jika dan hanya jika upah buruh ditekan serendah mungkin. Karena upah rendah itu merupakan satu-satunya keunggulan komparatif bangsa ini. Dengan kata lain, kemiskinan buruh itu merupakan modal bangsa untuk membangun sebuah industri.

Ideologi itu tercermin pada soal politik beras, yang amat mewakili seluruh politik ekonomi nasional. Pemerintah berusaha keras agar harga jual beras itu dapat ditekan serendah mungkin. Karena dengan harga beras yang rendah, maka kesejahteraan rela-

“Kita ini celaka. 70 persen tanah air kita laut, tetapi garam saja impor. Kalau bodoh sih gak apa-apa, tapi kalau disengaja kok bodoh. Saya tahu impor setiap satu ton dapat 10 dolar. Jadi impor itu hanya menguntungkan yang impor saja.”

Abdurrahman Wahid

Mantan Presiden Republik Indonesia

tif masyarakat bawah akan terdongkrak. Untuk itu pemerintah menyajikan data bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah *net consumers* dan bukan *net producers* beras. Namun tidak pernah menjadi wacana yang mengemuka: Mengapa harga eceran beras di Thailand (sebagai pengekspor utama beras ke Indonesia) lebih tinggi dibanding dengan harga eceran beras di Indonesia? Tidak juga pernah dipersoalkan: Apakah harga internasional beras itu

merupakan harga normal atau harga *dumping*?

Setiap argumentasi pemerintah pembelaan yang militan pada sektor industri dan pedagang. Sementara itu, dalam sebuah survei independen di Garut ketika terjadi kelangkaan pupuk pada bulan Desember 2005 ini, penulis menemukan argumentasi heroik para petani. Semua petani menyatakan:

“Biarkan pupuk tidak perlu disubsidi, karena subsidi hanya menguntungkan

para pedagang oportunis. Kami mampu beli pupuk Rp 1,500/kg (catatan: dari harga eceran tertinggi Rp 1,050/kg), asal beras kami dibeli dengan harga normal. Biarkan semua pelaku usaha memperoleh untung dengan cara terang-terangan, tidak usah sembunyi-sembunyi menimbun barang”.

Fakta

Tiga dari lima orang di wilayah pedesaan masih sulit mengakses sanitasi yang lebih baik dan 30% kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

**“Ketika
memakan
buah,
selalulah
ingat pada
siapa yang
menanam
pohonnya.”**

Pepatah Vietnam

*Petani di Boyolali,
Jawa Tengah*

“Harus seterkenal
apa kamu sebelum
sebuah kota dapat
mengetalmu?”

Martha Reeves

penyanyi

Operasi pemeriksaan KTP di Jakarta

KOTA SENTRIS

RUANG yang diisi sektor perniagaan, perkantoran, industri, dan perumahan dikenal sebagai kota (pusat pertumbuhan). Sedangkan ruang berikutnya (pertanian intensif, pertanian ekstensif, dan kehutanan) disebut sebagai wilayah penunjang (*hinterland*), yang secara sederhana dikenal sebagai desa. Sejak pada tataran teori, konsep tersebut sudah mengandung arogansi perkotaan. Karena eksistensi desa hanya sebagai pelayan kota.

Selanjutnya pemerintah membangun infrastruktur ekonomi agar bisnis perkotaan berjalan lancar. Infrastruktur pedesaan hanya diperbaiki dalam rangka melancarkan proses pengadaan bahan baku untuk industri atau bahan-bahan konsumsi lainnya yang dibutuhkan masyarakat kota.

Untuk membangun perkotaan, pemerintah meloloskan semua cara, termasuk kooperasi sektor-sektor pertanian. Contoh terbaik adalah pertumbuhan kota-kota di pantai utara Jawa Barat dan Banten. Bekasi, misalnya, dibangun di atas sawah beririgasi teknis. Saluran irigasi primer (Kali Malang) pun kehilangan fungsi-dasarnya. Kini bukan lagi sebagai saluran irigasi, melainkan sebagai saluran pemasok air-baku untuk kebutuhan bersih penduduk kota.

Urbanisasi, yang implikasi logis dari kebijakan pembangunan yang bersifat kota sentris, dianggap sebagai pengganggu. Maka Jakarta melakukan aktivitas pengusiran bagi pendatang haram yang tidak memiliki

kartu penduduk Jakarta.

Kebijakan yang kota sentris masih akan memanen dampak negatif yang akan membebani kota. Kuba pada masa pra-revolusi (1959) pernah memiliki distribusi penduduk yang memusat di Havana dan perkotaan lainnya (72%). Yang tinggal di desa hanya 28%. Padahal pada tahun 1956, jumlah penduduk pedesaan mencapai 56%. Itu menimbulkan segudang kesulitan terhadap ekonomi Kuba.

Kota-kota di Indonesia pun akan (se-dang) menuai beragam kesulitan: kemacetan lalu lintas, ketidak-teraturan, peningkatan kriminalitas, krisis air, krisis sampah, dan sangat mungkin adalah amuk massa. Itu semua pintu gerbang *chaos*, yang bila tidak direspons secara bijaksana, benar-benar akan meletupkan huru-hara yang liar.

Fakta

Pertumbuhan populasi yang cepat dapat memaksa petani dan nelayan melakukan eksploitasi ekosistem. Itu juga akan menaikkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Itu akan mempercepat angka urbanisasi, yang kerap kali memunculkan perumahan yang berbahaya, padat, dan tak terencana, dengan sanitasi yang buruk, kekurangan air bersih, dan udara yang tercemar.



Ricuh anggota DPR

Foto: YC. Kurniamoro

PEMBANGUNAN = “MIMPI” PARA ELIT

REFORMASI di Indonesia menghasilkan keterbukaan dan penajaman pertikaian kelompok kepentingan. Tapi soal perumusan kebijakan pembangunan, tidak banyak bergeser dari masa Orde Baru. Pembangunan disusun berdasarkan “mimpi” para elit (eksekutif dan legislatif).

Praktek desentralisasi dan otonomi daerah juga tidak merubah struktur elitis. Yang bergeser hanya pelakunya. Jika pada masa Orde Baru, yang berperan adalah elit Pusat; maka sekarang adalah elit pusat dan daerah. Masyarakat “diberi kesempatan” untuk berteriak secara lantang di depan pagar-pagar tinggi kantor pemerintah.

Ada sedikit perubahan eufimistik dalam proses perencanaan pembangunan. Jika dahulu melulu “dari atas”, kini ditumbuhkan proses “dari bawah”. Tapi proses itu amat verbal dan artifisial. Rencana pembangunan diusulkan “dari bawah” oleh orang-orang yang belum siap memahami “kebutuhan masyarakat”. Karena itu, hasilnya adalah layanan pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kota ini seperti ini karena warganya seperti itu.”

Plato

Filsuf Yunani



***Kemiskinan
rupanya eksotis
dan dapat
memunculkan
peluang usaha baru:
wisata kemiskinan!...
(Pelabuhan
Sunda Kelapa, 2007)***

KEMISKINAN

KEMISKINAN di Indonesia harus dipahami dalam tataran realitas. Jika data statistik menyebutkan kemiskinan pada 2005 sebesar 28.8% dari jumlah penduduk Indonesia, maka realitasnya boleh jadi dua kali lipat dari angka tersebut. Artinya, angka itu menunjukkan kemiskinan absolut menurut kriteria pemerintah. Sementara itu, orang-orang yang tidak memiliki daya beli yang cukup, namun mereka tidak masuk dalam kategori miskin, berjumlah jauh di atas angka itu. Mereka tidak akan mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan hari tua yang layak –menurut standar kepatutan manusiawi. Jika tesis itu bisa diterima, maka kemiskinan itu soal sebagian besar penduduk Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia bisa bersumber pada hal-hal struktural maupun kultural. Karena itu, pengentasan kemiskinan pun perlu didekati sesuai dengan sumber-sumber kemiskinannya. Memberikan sebidang tanah pada orang yang memiliki kemiskinan kultural, tidak akan membuat orang itu berdaya. Namun sangat mungkin, masyarakat miskin itu memiliki persoalan keduanya.

“...
**ada kata baru kapitalis,
baru? Ah tidak, tidak
sudah lama kita dihisap
bukan kata baru, bukan
kita dibayar murah
sudah lama, sudah
lama...”**

Wiji Thukul

Bukan Kata Baru

Fakta

Lebih dari separuh perempuan hamil tidak dapat mencukupi kebutuhan zat besi. Setiap hari, ada 300 anak meninggal pada saat dilahirkan.

KEMISKINAN STRUKTURAL

MASALAH struktural yang lazim menjadi sumber kemiskinan masyarakat antara lain adalah:

- Ketimpangan distribusi aset produktif;
- Penyumbatan akses masyarakat pada informasi dan modal;
- Penyumbatan akses kaum perempuan pada layanan kredit perbankan; dan
- Nilai tukar komoditi pertanian yang kian merosot.

Selain itu, fragmentasi lahan juga menjadi faktor percepatan kemiskinan di pedesaan. Seorang ustadz di pesantren ternama di Cianjur mengatakan: “Kakek saya punya lahan 10 hektar, hidup kami berkecukupan. Dari tanah tersebut, bapak saya memperoleh warisan 1.2 hektar, dan selanjutnya mewariskan kepada saya lahan seluas 0.15 hektar. Sungguh sulit hidup dengan mengandalkan hasil pertanian dari lahan sesempit itu.”

Proses pemiskinan struktural itu akan berjalan cepat. Jika tidak ada proses inovatif, yang secara langsung dapat membuka lapangan kerja baru di pedesaan, maka kemiskinan akan benar-benar melekat pada bangsa Indonesia.



Foto:Foto: Dok. Walhi

Tanah semakin sempit karena dibagi-bagi sebagai warisan

Fakta

HIV dan kelaparan bekerja tandem. Malnutrisi mempercepat perkembangan HIV. HIV memperburuk malnutrisi.

KEMISKINAN Kultural

DALAM kesempatan proses adaptasi teknologi tepat-guna tahun 1978 di Pesantren Pabelan, Muntilan, seorang ustadz memperingatkan: “Harus hati-hati, banyak orang kita yang miskin, karena mereka tidak ingin kaya.” Peringatan senada diungkapkan pula oleh ustadz di Pesantren Cibadak Sukabumi pada 1981, ketika berlangsung proses fasilitasi pemberdayaan koperasi pondok pesantren.

Peringatan itu senada dengan pandangan David McClelland, bahwa tiap kelompok masyarakat itu memiliki virus *n-Ach* (kebutuhan untuk berprestasi dan maju) yang berbeda. Bangsa Jepang dikatakan memiliki keinginan untuk maju yang amat kuat. Sebaliknya, bangsa-bangsa terjajah boleh jadi tidak pernah punya keinginan untuk merdeka. Karena itu mereka terjajah dalam jangka waktu yang amat panjang.

Indikasi adanya persoalan kultural, pernah terjadi di Sukabumi pada awal 1980-an. Di sana banyak tersedia lahan tidur (HGU terlantar) yang digarap oleh para petani secara “liar”. Agar tidak terjadi konflik terbuka, dan didorong untuk lebih mensejahterakan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan proyek sertifikasi tanah (PRONA). Masyarakat pun, yang semula adalah penggarap liar, berubah menjadi pemilik yang memegang sertifikat hak milik. Segera setelah sertifikat diterima, terjadi proses perpindahan pemilikan. Masyarakat menjual sebagian

tanahnya. Sebagian digunakan untuk membangun rumah, membeli motor, atau menjadi modal untuk pergi ke Saudi Arabia.

Aspek kultural seperti itu, dalam bidang ekonomi disebut sebagai rasionalitas terbatas (*bounded rationality*). Rasionalitas seperti ini pernah dibongkar dalam proses pemberdayaan masyarakat Krui pada 1990-an. Ketika itu, masyarakat melakukan pemanenan damar dengan siklus yang amat pendek, karena didesak kebutuhan ekonomi. Mutu panen damar pun rendah, yang tentu saja memiliki harga jual yang rendah pula. “Cepat panen, karena butuh uang segera,” itulah *bounded rationality*. Konsep yang benar adalah: panen pada saat yang tepat, agar diperoleh mutu damar yang bagus, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Melalui pencerahan, masyarakat ternyata bisa menjadi rasional!

Fakta

Dunia memproduksi cukup pangan untuk setiap orang. Tapi, lebih dari 800 juta orang berada dalam kelaparan yang sangat kronis.



Jambu Bangkok

THAILAND: PENATAAN EVOLUTIF

THAILAND secara bertahap dan konsisten melakukan langkah-langkah afirmatif. Persoalan ekonomi perkotaan dan pedesaan diselesaikan secara sistematis. Berikut beberapa contoh yang substansial. *Pertama*, pemerintah melakukan dukungan penuh untuk mengembangkan sektor pertanian, yang menjadi basis pemberdayaan ekonomi pedesaan, antara lain melalui hal-hal berikut:

Karena pertanian di desa, dituntut untuk menghasilkan produk bermutu, maka pemerintah mengembangkan benih dan bibit tanaman unggul, yang semuanya dilakukan melalui pemuliaan tanaman di dalam negeri. Bibit buah-buahan bermutu tinggi dibagikan menggantikan buah-buahan yang ada. Namun tanaman bermutu rendah milik petani tadi tidak dimusnahkan, melainkan dikoleksi dalam suatu bank plasma nuffah. Hasilnya bahkan dirasakan oleh petani Indonesia. Buah apa pun yang bermutu baik, pasti diberi label “Bangkok” oleh petani.

Untuk meningkatkan daya beli petani, pemerintah membeli seluruh beras produksi petani dengan harga tinggi (sekitar Rp 3,750/kg). Kemudian, beras dipasarkan dengan harga eceran sekitar Rp 4,500/kg. Dengan cara itu, petani memperoleh insentif produksi. Karena itu, produksi beras Thailand selalu berlimpah. Dan limpahan produksi



Pedagang perahu terapung mendapat dukungan modal dari pemerintah

Foto: Dok. WALHI



*Pekerja wisata dan
wisatawan di Bangkok*

itulah yang dijual dengan 'harga murah' di Indonesia "yang merangsang Bulog untuk menjadi tengkulak ketimbang menjalankan fungsi sejati sebagai lembaga penyangga.

Kedua, sektor informal memperoleh ruang hidup dan ruang usaha yang patut di perkotaan, tanpa mengganggu aktifitas sektor formal:

Jalan-jalan utama di pusat kota, difungsikan untuk menjadi pedagang kaki lima mulai pukul 19.00-24.00. Setiap pukul 18.00 toko-toko bersiap-siap untuk tutup, dan pedagang kaki lima bersiap-siap untuk menata dagangannya. Pada pukul 24.00 aktivitas pedagang kaki lima berakhir. Begitu peda-



Memperoleh ruang hidup yang patut di kota



Rakyat kecil tak terlupakan

Foto-foto: Dok. WALHI

gang sudah membereskan kios-kiosnya, pe-tugas kebersihan kota mulai bekerja. Dengan demikian, ketika pagi hari toko-toko mulai buka secara normal, karena jalanan sudah bersih kembali.

Sektor informal memperoleh tempat yang patut dalam kompleks perdagangan formal. Gerai makanan dijumpai di setiap mal, dan mereka dapat berjualan dengan menawarkan harga yang tergolong murah. Tukang pijat refleksi dapat membuka gerainya di pusat-pusat pertokoan, beberapa di antaranya berkombinasi dengan tukang cukur. Cerukan kecil di trotoar dialokasikan untuk pedagang kaki lima. Jumlahnya tidak boleh bertambah. Dan mereka hanya boleh berjualan dengan meminimalkan jumlah sampah buangan, misalnya kelapa muda diujakan dalam keadaan telah terkupas sabutnya.

Ketiga, penataan lingkungan dilakukan secara fasilitatif. Seperti di Jakarta, bantaran sungai di Bangkok juga digunakan sebagai areal permukiman. Ekstremnya, perumahan itu didisain untuk menggunakan jalan raya dan sungai sebagai jalan aksesnya. Adalah benar bahwa pemerintah memasang rambu-rambu "dilarang buang sampah" di sepanjang sungai; namun pada saat yang sama pemerintah juga menyediakan instalasi air bersih, septik-tank kolektif, dan tempat sampah. Penduduk terlayani dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membuang kotoran dan sampah ke badan sungai.



"Kami mungkin belum sebaik Singapura, tapi kami sedang menuju ke sana."



Foto: Dek. WALHI

Keempat, perguruan tinggi tidak dibiarkan menjadi rumah hantu atau menara gading. Perguruan tinggi difungsikan secara efektif sebagai “*innovation center*”. Semua pihak akan datang ke perguruan tinggi jika butuh informasi inovatif, karena mereka punya informasi yang sangat baik.

Banyak aspek lainnya yang ditangani secara cerdas. Itu semua didukung dengan upaya yang masif dalam soal pembentukan karakter bangsa. Kesakralan puri kerajaan, yang berlokasi di bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai “alasan” bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai secara keseluruhan. Pada beberapa wilayah, masyarakat menganggap tabu untuk menangkap ikan patin di sungai, karena mereka berkeyakinan bahwa jika ikan patin dibiarkan hidup di sungai, maka akan memberikan berkah bagi kehidupan ekonomi masyarakat (catatan: dan berkah itu memang efektif, karena ikan patin di sungai pun bisa menjadi atraksi wisata bagi para turis). Dalam soal meningkatkan kedisiplinan dan rasa hormat pada kebersihan, semua orang di perkotaan akan bilang “kami mungkin belum sebaik Singapura, tapi kami sedang menuju ke sana”. Di setiap tempat publik, akan dijumpai petunjuk: mana tempat masuk dan mana tempat keluar, sehingga secara otomatis orang akan antri dan tidak berdesak-desakan.

Kebijakan sektoral maupun regional dirancang secara cerdas, sehingga tidak ada suatu kebijaksanaan yang mengkanibal kebijakan lain. Suatu sektor mendukung sektor lainnya, dan suatu wilayah mendukung wilayah lainnya. Semua itu bukan kejadian kebetulan, melainkan hasil suatu rancangan yang sistematis. Untuk itulah gunanya pemerintah.



**"Jika kamu
mengubah
cara
berpikir,
maka kamu
dapat
mengubah
hidupmu"**

William James

Filsuf dan psikolog

Kebun sayur di Kuba

KUBA: REVOLUSI YANG SUKSES

KETIKA hubungan dagang dengan blok sosialis (COMECON) ambruk pada tahun 1990, Kuba kehilangan 80% pasokan impor pupuk dan pestisida serta separuh pasokan minyaknya. Situasi bertambah buruk, karena Amerika melakukan embargo ekonomi. Tahun 1992, Aturan Torricelli disetujui, yang intinya melakukan blokade pengapalan pangan dan obat-obatan oleh cabang perusahaan-perusahaan Amerika di luar negeri. Tahun 1996, keluar Akta Helms-Burton yang melarang investasi luar negeri di Kuba.

Situasi itu membuat Kuba melakukan perlawanan. Ketika Kuba didera dengan tingkat inflasi produk pangan dan pertanian yang mencapai 1000%, pemerintah menggalang kekuatan dalam negeri (ilmuwan, LSM, dan masyarakat) untuk menyiapkan dasar-dasar perombakan radikal sistem perekonomiannya yang berbasis pada sektor pertanian. Komponen revolusi pertanian itu antara lain adalah sebagai berikut:

Menerapkan sistem produksi “konsumsi sendiri”. Petani di pedesaan maupun perkotaan didorong untuk melakukan aktifitas produksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pangan diproduksi di pedesaan, sedangkan perkotaan memproduksi hortikultura.

Untuk merespons perubahan status hak garap atas lahan yang semula dikuasai pe-

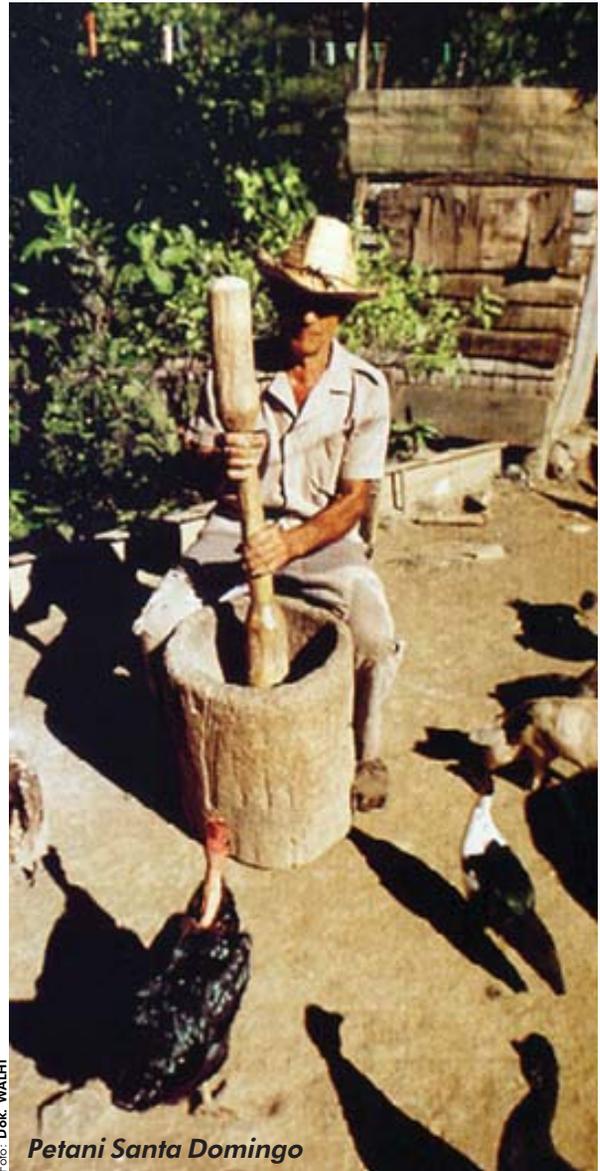


Foto: Dok. WALHI

Petani Santa Domingo



Foto: Dek. WALHI

Pertanian urban organik di Havana, Kuba

merintah, diintroduksikan lembaga koperasi yang dibentuk secara partisipatif. Kerja lembaga ini, selain melakukan kegiatan koordinasi produksi, juga untuk meredam guncangan sosial akibat merosotnya produksi pertanian, termasuk gula. Produksi gula semula mencapai 7.8 juta ton (1983), turun menjadi 7 juta ton (1992) dan 4.2 juta ton (1993).

Memecah unit produksi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Petani diberi hak garap atas lahan-lahan yang dikuasai oleh

pemerintah. Sejumlah lahan diserahkan pengelolaannya kepada satu kelompok petani, yang terdiri dari 4-5 orang untuk menggarap lahan sekitar 13.4 hektar yang diikat dengan aturan main yang jelas.

Melakukan debirokratisasi pemasaran. Produk bisa dijual langsung ke pasar tanpa harus melewati otoritas pemerintah seperti yang dijalankan selama ini. Dalam kegiatan ini dilibatkan suatu koperasi, yang menanganikan masalah transportasi produk. Dengan jalan ini, produk pertanian lebih cepat sampai ke pasar di kota-kota dibanding sebelumnya.

Melakukan liberalisasi pasar produk pertanian. "Pasar bebas" ternyata mampu 'membentuk' harga lebih bagus dibanding dengan pasar yang dikontrol pemerintah. Pemerintah juga memperkenankan petani menjual dengan harga berapa pun yang bisa diterima oleh pasar.

Untuk mendukung komponen revolusi pertanian, pemerintah Kuba melakukan reformasi pertanian pedesaan sebagai berikut:

Melakukan penguatan wilayah pedesaan sesuai dengan kondisi agro-ekologinya. Pada awalnya, interpretasi pola pertanian sejalan dengan agro-ekologi adalah menerapkan teknologi *input* rendah, kemudian menjadi proses minimisasi ketergantungan

pada *input* eksternal. Komponen reformasi pertanian ini antara lain adalah: (i) Melakukan daur-ulang biomas di ladang; (ii) Meningkatkan kandungan bahan organik tanah dalam rangka meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi biologi tanah; (iii) Menjalankan konservasi tanah dan air; (iv) Melakukan tumpang-sari, termasuk mengintegrasikan usaha ternak dengan budidaya tanaman; dan (v) Memperkaya keanekaragaman-hayati.

Karena pertanian perkotaan sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hor-

tikultura, maka pertanian pedesaan lebih berkonsentrasi pada produksi pangan.

Melakukan penguatan kelembagaan. Praktek menunjukkan bahwa petani yang bekerja pada lahan garapnya sendiri serta kerja kolektif, telah mendukung kesuksesan penerapan pertanian yang sejalan dengan agro-ekologi.

Mendorong pertanian pedesaan untuk berinteraksi dengan sistem-pasar. Harga pasar produk di sistem-pasar ternyata bisa lebih bagus dibanding dengan harga yang ditawarkan di pasar pemerintah.



Foto: Dok. WALHI

**“Jika kamu
tidak dapat
memberi
makan seribu
orang, lantas
berilah makan
seorang
saja.”**

Ibu Teresa

TANTANGAN BAGI ENVIRONMENTALIS

PARA Environmentalis perlu memahami bahwa kemiskinan bukan soal takdir dan ketidak-berdayaan individual. Itu soal struktural dan kultural. Jika seorang jatuh miskin, kemudian tidak bersedia untuk mencoba bangkit atau dia tidak melihat cara untuk bangkit padahal secara obyektif bisa bangkit; itu adalah persoalan kultural. Namun jika dia berusaha bangkit, tapi secara obyektif tidak ada cara masuk akal yang memungkinkan dia bisa bangkit; maka itu adalah persoalan struktural.

Memahami soal itu menjadi prasyarat bagi seorang Environmentalis agar mampu mendiagnosis persoalan kemiskinan secara cerdas. Dan dengan demikian, mempunyai kesempatan yang baik untuk memfasilitasi masyarakat secara benar. Contoh kisah sukses negara lain perlu untuk studi komparatif, siapa tahu ada yang bisa ditiru sesuai dengan kebutuhan negeri kita sendiri.

“Kalau kamu sangat terganggu dengan ketidakadilan, maka kamu kawan sejatiku.

Ernesto Che Guevara



Bersantai di kedai kopi Amerika

MENEMUKAN IDENTITAS KEBANGSAAN

KARAKTER yang kuat, amat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Masyarakat harus punya virus *n Ach* yang tinggi agar mampu keluar dari belenggu kultural dan struktural. Pada saat yang sama, masyarakat akan mampu bersaing dengan “produk impor” meski secara obyektif tidak memiliki keunggulan komparatif.

Di pasar buah-buahan, misalnya, dijumpai jeruk Medan dan jeruk impor. Ditinjau dari sudut tampilan dan rasa, jeruk Medan kalah bersaing dibanding dengan jeruk impor. Bahkan jika harganya hanya 60% dibanding dengan jeruk impor, jeruk Medan tetap akan jadi pilihan kedua. Berbeda soalnya jika bangsa sudah memutuskan

“Pandanglah lingkungan sebagai bagian dari diri sendiri. Jika lingkungan sakit, maka kita juga akan sakit. Bila lingkungan rusak, kita akan hancur.”

Rieke Dyah-Pitaloka,

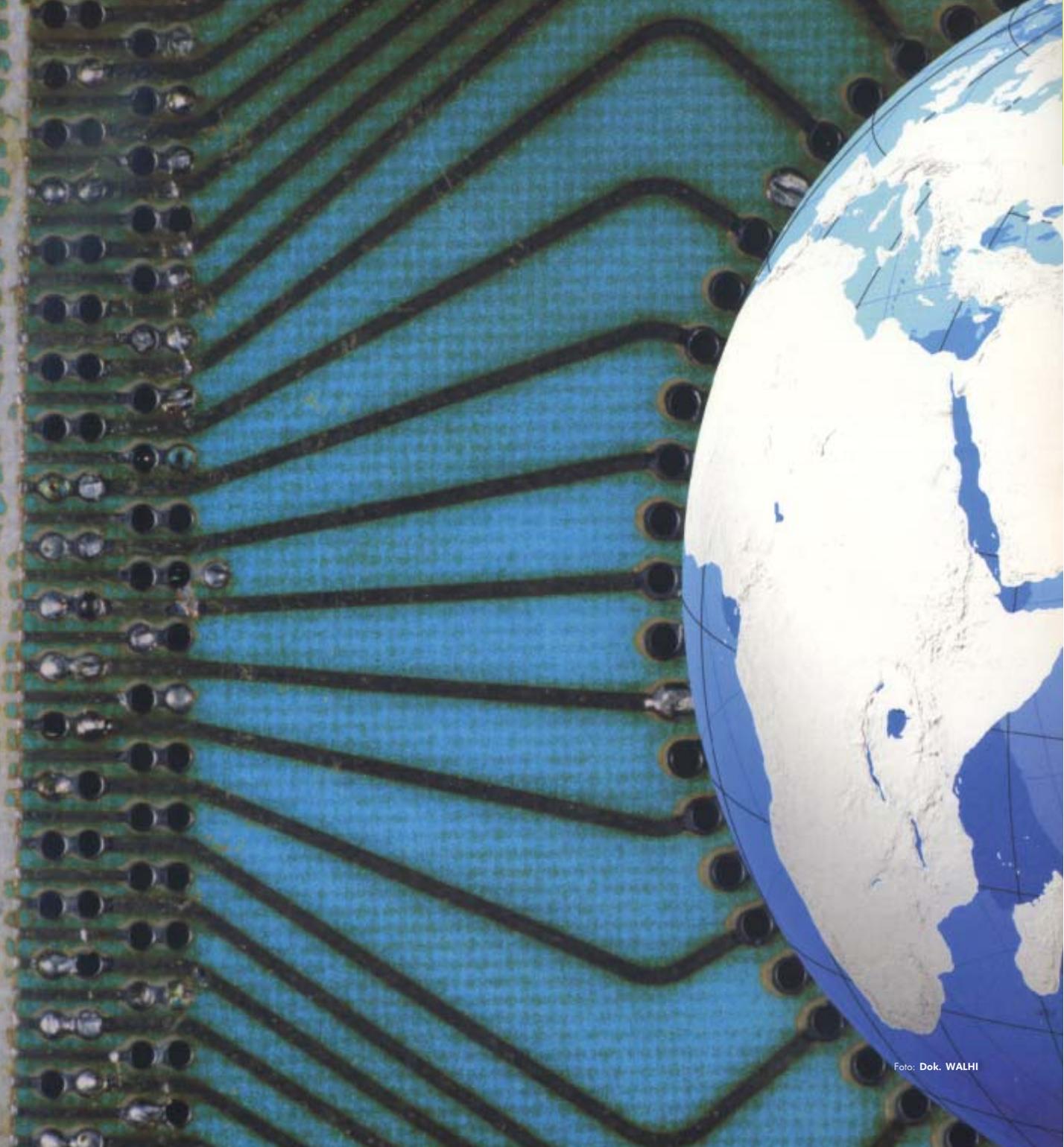
Metro TV, 12 Maret 2007

secara emosional, bahwa mengkonsumsi produk dalam negeri itu merupakan “sumbangan ekonomi” yang luar biasa; maka jeruk Medan akan laku. Selanjutnya, karena produknya laku di pasaran, maka akan tumbuh kesempatan petani untuk memperbaiki mutunya.

Environmentalis harus tampil di depan untuk berkampanye membentuk karakter bangsa. Jika sekarang kita bisa memilih untuk minum kopi di kafe tertentu yang lebih peduli lingkungan –meski harganya lebih tinggi; mengapa kita tidak bisa menjadi konsumen produk petani sendiri, meski mutunya sedikit lebih buruk dibanding dengan standar yang beredar di pasar? Pendekatan ini merupakan satu-satunya pilihan yang benar, karena menangkal produk impor (dengan tarif ataupun non tarif) tidak dibenarkan lagi.



Warung kopi di bawah jembatan penyebrangan



MEMELIHARA FORUM CERDAS

LMU manajemen-bisnis modern mengingatkan: agar suatu bisnis bisa berkelanjutan, maka *power* itu harus berimbang dengan *social responsibility*. *Power* menggambarkan pemupukan keuntungan –yang setiap usaha untuk memenuhinya merupakan *assertiveness* yang tinggi, sedang *social responsibility* menggambarkan mekanisme redistribusi manfaat bagi masyarakat –yang setiap usaha untuk meloloskannya merupakan *cooperativeness* yang tinggi. Pedesaan dan perkotaan akan berjuang untuk mencapai hal tersebut secara berimbang. Karena itu, cara terbaik bagi keduanya adalah melakukan kolaborasi.

Kerja kolaboratif itu tidak akan muncul dengan sendirinya, karena kerakusan pasar lazimnya memiliki pengaruh yang amat kuat. Karena itu, para Environmentalis harus mampu memfasilitasi tersedianya forum dialog yang cerdas yang melibatkan banyak pihak. Forum tersebut mampu menyampaikan pandangan kritis dan solusi-solusi terbaik, meski solusi tersebut harus diterima secara pahit.

“...tempat pertemuan kami sempit tapi pikiran ini makin luas makin terang bagi kami kegelapan disibak tukar-pikiran...”

Wiji Thukul

Makin Terang Bagi Kami

**”...Ayah hanya punya kelas,
tetapi tidak punya kehormatan.
Kenapa ayah berhak mendapatkan
kemewahan
yang sekarang ayah miliki ini?
Hasil dari bekerja? Bekerja apa?
Apakah produksi dan jasa
seorang birokrat
yang korupsi?...”**

PENCIPTAAN EKONOMI YANG TIDAK MENGECOH

PADA saat ini, ekonomi Indonesia menganut sistem yang mengecoh. Pedagang dari pedesaan banyak yang mampu berjualan di kota, karena untuk pergi-pulangnya bisa menyelundup menumpang kereta api secara gelap. Jika harus membayar ongkos angkut, maka berjualan di kota menjadi tidak rasional. Pengusaha fotokopi di kota bisa menawarkan harga murah, karena dia mencuri sebagian besar konsumsi listriknya. Selama ini, pemerintah membiarkan hal tersebut. Sehingga praktek yang terjadi di masyarakat, sama sekali tidak menggambarkan sinyal yang benar tentang nilai ekonomi suatu aktivitas.

Haji Ahmad menjadi pedagang pengumpul ikan di Cirata. Dia menjualnya ke

Muara Karang, dan barang-jualannya diterima oleh Haji Hasan. Di sini terlibat tiga pelaku: petani ikan, Haji Ahmad, dan Haji Hasan. Risiko bisnis yang terbesar adalah petani ikan, tapi mereka menerima marjin paling rendah. Sementara itu, Haji Hasan sama sekali tidak memiliki resiko bisnis, tapi justru dialah yang menjadi penentu harga dan dengan demikian menerima marjin terbesar. Jika rangkaian transaksi bisnis itu terjadi, bukan berarti bahwa setiap pihak itu menerima situasi berkeadilan. Itu tidak benar. Petani ikan maupun Haji Ahmad, terpaksa menerima hal tersebut sebab mereka tidak punya pilihan lain. Lagi-lagi ini adalah ekonomi yang mengecoh.

Para Environmentalis perlu mendorong semua pihak, agar ekonomi berjalan secara transparan dan benar. Kenapa fotokopi (dengan listrik curian) harus bertarif Rp 150/lembar, jika bisnis jujur harus mematok tarif Rp 200/lembar? Kenapa konsumen harus menerima harga beras murah, jika harga murah itu harus dibayar dengan penderitaan petani produsen?

Rendra

Sajak Potret Keluarga

A woman with dark skin, wearing a blue headscarf with red floral patterns, a white beaded necklace, and a colorful patterned wrap around her waist, is pouring grain from a large, light-colored wooden bowl. She is looking down at the grain as it falls. The background is a dry, sandy landscape with sparse green vegetation.

Pribahasa Afrika

**“Matahari
tidak lupa
pada desa
hanya karena
ia kecil.”**

PEMBARUAN DESA

Persoalan desa merupakan akar persoalan krisis perkotaan. Karena itu, perbaikan pedesaan akan mengurangi persoalan perkotaan. Jika desa makmur, urbanisasi akan tertekan.

Para Environmentalis perlu mendorong jiwa kepemimpinan dan wirausaha pedesaan. Sehingga masyarakat desa mampu menemukan modus bisnis yang selaras dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat.

Pada saat yang sama, perlu dilakukan kampanye simpatik kepada semua pihak, agar mereka mendukung upaya-upaya afirmatif untuk memakmurkan desa. Tapi hendaknya tidak perlu berhenti, jika pihak-pihak tersebut ternyata tidak memiliki perhatian yang wajar terhadap soal ini. Hanya para Environmentalis sajalah yang punya kesempatan yang lebih baik untuk memahami persoalan kemiskinan secara realistik.



**Puncak produksi minyak bumi
telah terlewati.
Kita hidup pada jaman
pasca adiksi minyak bumi.
Bagaimana kita
melanjutkah kehidupan
di bumi?**

**ENERGI
DAN LINGKUNGAN HIDUP**



"Perhatikan gambar...buldozerlah dan bukan bom atom yang dapat digelari sebagai penemuan paling menghancurkan di abad 20 ini."

Philip Shabecoff,

New York Times

Tambang batubara

KECENDERUNGAN ENERGI DUNIA

ENERGI dunia terutama dipasok dari batubara sebelum 1965. Tapi, pola konsumsi kemudian beralih ke minyak. Perkembangan konsumsi minyak dunia amat mencengangkan. Pada 1950 baru mencapai 500 juta ton, dan selama 50 tahun berikutnya, konsumsi minyak meningkat sebanyak 2,500 juta ton menjadi 3,000 juta ton (2000). Namun dalam lima tahun kemudian (2005), meningkat sebanyak 1,000 juta ton menjadi 4,000 juta ton.

Sumber pasokan energi dunia pada 2002 adalah: minyak (35.0%), batubara (23.5%), gas (21.2%), nuklir (6.8%), dan energi terbarukan (13.5%). Berdasarkan sumber pasokannya, energi terbarukan itu adalah biomas (10.8%), hidro (2.2%), dan lainnya (0.5%). Sementara itu, sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dunia pada 2002 adalah batubara (39.1%), gas (19.1%),



Foto: Dok. Greenpeace

Reaktor nuklir

“Aku akan menaruh uangku pada energi matahari. Sebuah sumber energi yang luar biasa! Saya harap kita tidak perlu menunggu sampai minyak dan batubara habis.”

Thomas Edison

1847–1931



Tambang Uranium

Foto: Dok. Greenpeace

nuklir (16.6%), minyak (7.2%), dan energi terbarukan (18%).

Kuantum maupun laju pertumbuhan konsumsi energi itu amat mengerikan, apalagi ditambah dengan kebangkitan ekonomi Cina bangkit tidak terbayangkan. Konsumsi Cina melaju: baja 26%, beras 32%, kapas 37%, dan semen 47%. Bila pada 1990 Cina masih swasembada minyak, maka pada 2005 dengan konsumsi sudah mencapai 3.2 juta barrel per hari, Cina melejit menjadi importir minyak bumi

Foto: Henry Lopulalan



kedua setelah Amerika.

Cina tidak sendirian. Karena ekonomi India juga sedang menggeliat. Keduanya adalah juara dalam soal jumlah penduduk di dunia. Konsumsi minyak India saat ini, dua kali lipat dibanding 1992. Cina dan India kini dikenal pula sebagai konsumen batubara utama di dunia. Batubara digunakan untuk memasok dua-pertiga kebutuhan energi di Cina dan memasok kebutuhan energi di India. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, kini Cina dan India secara agresif menjalin hubungan dengan pemasok minyak baru, dari Venezuela dan Siberia sampai ke Sudan. Bahkan junta militer Myanmar pun di ekatinya, meski Barat menjauhinya.

Konsumsi minyak dunia akan meningkat dari posisi sekarang sebesar 85 juta barrel

Fakta

Orang-orang di negara maju rata-rata minum air 10 kali lebih banyak ketimbang orang-orang negara sedang membangun. Diperkirakan, rata-rata orang di negara maju menggunakan 500-800 liter air per hari (300 m³ per tahun). Bandingkan dengan penggunaan air di negara sedang membangun: 60-150 liter per hari (20m³ per tahun).



Foto: Dok. WALHI

Presiden Bolivia Evo Morales

menjadi 200 juta barrel per hari. Itu artinya, dunia hanya akan mampu memasok minyak sampai 2050 saja. Suatu krisis energi yang tak terelakkan. Minyak mulai menjadi barang langka. Maka patutlah bila Presiden Bolivia terpilih, Evo Morales, dengan gagah bisa menuntut: "Perbaiki kontrak bagi hasil eksploitasi minyak di Bolivia, kalau tidak, silakan angkat kaki dan biarkan kami garap sendiri!" Tuntutan itu ternyata dikabulkan para kontraktor asing; karena mereka me-nyadari bahwa minyak sudah mulai langka.



John Lennon

Penulis lagu asal Inggris,
anggota The Beatles

“Hidup adalah apa yang terjadi pada dunia sekarang ini, sementara kamu sibuk membuat rencana-rencana lain.”

ENERGI TERBARUKAN

PADA era 1970-an, negara-negara pengekspor minyak (OPEC) melakukan embargo minyak ke negara-negara barat. Dunia berguncang. Kejadian itu telah mendorong dua tren global, khususnya di negara-negara barat. *Pertama*, negara-negara maju memperoleh alasan baru untuk menghegemoni negara berkembang, yaitu minyak. Maka selama era 1990-an telah terjadi banyak pertikaian yang disebabkan oleh perebutan sumberdaya, termasuk minyak bumi. Pada peristiwa itu, sebanyak lima juta orang terbunuh, dan 17-21 juta orang tersingkirkan ke barak-barak pengungsian. Sekitar 25% dari 50-an peperangan yang berlangsung pada masa itu, ternyata berakar pada soal pencaplokan sumberdaya alam seperti batu mulia, kayu, dan minyak. Dan semua peperangan itu terjadi di negara miskin. Namun para elit dan negara kaya justru memperoleh untung, sedangkan rakyat miskin kian menderita.

Kedua, barat mulai melakukan perburuan energi terbarukan, sebagai alternatif energi fosil (minyak dan batubara). Sejak 1970-an berlangsung riset sangat intensif, terutama menyangkut: energi surya, energi angin, energi pasang surut dan gelombang air laut, serta biogas.

Selain itu, penelitian untuk menemukan energi non-konvensional menjadi sangat



Foto: Henry Lopuldan

melebar, memasuki wilayah yang sebelumnya masih dalam tataran teoritik. Memecah hidrogen dari air, energi berbasis bioteknologi, eksplorasi energi kinetik, dan peningkatan efisiensi energi listrik.

Riset-riset seperti itu tampaknya tidak didorong berdasarkan pertimbangan lingkungan. Perusahaan-perusahaan energi dan negara-negara industri melakukan pencarian energi alternatif lebih terdorong oleh motif-motif ekonomi baru, sebagai strategi cadangan jika energi fosil benar-benar sudah habis. Nyatanya, riset-riset tentang energi ramah lingkungan justru banyak dilakukan



“Ketika mesin-mesin dan komputer-komputer, motif-motif keuntungan dan hak-hak kepemilikan lebih penting ketimbang manusia; tiga kekuatan raksasa rasisme, militerisme, dan eksploitasi ekonomi tidak akan bisa dihentikan. Revolusi nilai-nilai sesungguhnya kemudian hari akan menyebabkan kita bertanya tentang keadilan dari banyak kebijakan politik yang kita putuskan hari ini.”

Martin Luther King, Jr

Pejuang kemanusiaan dan antirasialisme

PLTA skala kecil

oleh pelaku perusakan lingkungan. Namun demikian, mereka menggunakan isu-isu lingkungan sebagai konsideran-resmi pencarian energi alternatif yang mereka kemukakan kepada publik. Karena itu, ketika Environmentalis mengkhawatirkan efek pemanasan global, pihak industri menjadikan isu itu sebagai landasan riset-riset dan pengembangan teknologinya.

Pemanasan global atau perubahan iklim dunia disebabkan oleh peningkatan kadar karbon-dioksida dan gas-gas polutif lainnya di dalam atmosfer. Gas itu (yang dihasilkan akibat pembakaran batubara, minyak bumi, dan gas serta penebangan hutan) menyelimuti bumi, dan menjebak panas (yang dipancarkan matahari) di seputar permukaan bumi. Sekali emisi gas itu memasuki atmosfer akibat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembakaran energi fosil, ia akan menetap di sana selama beberapa tahun.

Sejak 1751, sebanyak 290 miliar ton karbon dilepas ke atmosfer akibat pembakaran energi fosil dan industri semen dunia. Separuhnya dihasilkan sejak pertengahan 1970-an. Kenaikan yang sistematis juga terjadi untuk wilayah Asia Timur Jauh. Pada 1997-1998 terjadi penurunan emisi, yang kemungkinan besar karena terjadi penurunan aktifitas industri selama krisis ekonomi yang menerpa wilayah ini. Emisi karbon-dioksida pada 2002, mencapai 798 juta ton, setara dengan 28 kali lipat dari emisi 1950. Peningkatan emisi itu ketika itu disumbang

terutama oleh India dan Korea Selatan, yang keduanya secara kumulatif menyumbang 56.9% emisi di wilayah ini. Tujuh negara lainnya menyumbang sekitar 40%, yaitu Indonesia, Taiwan, Thailand, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Pada 2002, Amerika, Jerman, Inggris, dan Jepang tercatat sebagai negara penghasil emisi gas karbon (salah satu gas penghasil efek rumah kaca terbesar) terbesar di dunia. Dibandingkan juga, posisi Cina dan



Foto: Dok. Greenpeace

Panel surya



Biomassa

Karena itu, jika Cina dan India terus memacu konsumsi energi fosilnya, kemudian mencapai tingkat emisi per kapita seperti yang dicapai oleh Amerika; maka dibutuhkan dua Bumi hanya untuk menopang dampak yang ditimbulkan oleh keduanya.

India ketika itu. Sekarang, dengan intensifnya penggunaan minyak bumi dan terutama batubara di Cina dan India, serta jumlah penduduk yang sangat besar, Cina dan India menjadi salah satu penghasil gas emisi karbon terbesar. Cina tercatat sebagai nomor dua dan India nomor empat terbesar. Peringkat itu akan menguat, karena keduanya sedang memacu diri untuk produsen mobil terbesar di dunia. Karena itu, jika Cina dan India terus memacu konsumsi energi fosilnya, kemudian mencapai tingkat emisi per kapita seperti yang dicapai oleh Amerika; maka dibutuhkan dua Bumi hanya untuk menopang dampak yang ditimbulkan oleh keduanya.

Penggunaan batubara yang masif di Cina dan India, yang tidak disertai dengan upaya pengurangan polusi, ternyata telah menghasilkan polusi udara yang dampaknya amat luas. Sebanyak 80 kota di Cina mengandung emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida di atas ambang yang ditetapkan WHO. Meski polusi timbul di kota, tapi dalam beberapa kasus bisa meluas ke dae-

rah yang amat jauh. Hujan asam yang meningkatkan kemasaman danau-danau di Skandinavia, misalnya, timbul karena polusi yang terjadi di Amerika.

Negara-negara industri secara keseluruhan merupakan produser gas rumah kaca. Amerika, yang memiliki penduduk sebanyak 5% dari penduduk dunia, menghasilkan emisi 24%. Sedangkan Inggris dengan jumlah penduduk hanya 1%, menghasilkan emisi 2.3%.

Efek rumah kaca menghasilkan pemanasan global. Pada 2002 tercatat sebagai tahun terpanas kedua sejak 1880-an dengan suhu rata-rata dunia 14.52°C. Pemanasan global menimbulkan kenaikan rata-rata

Fakta

Konsumsi energi dunia diperkirakan meningkat 40% sampai 50% pada 2010, dan perbandingan bahan bakar global – terbarukan (18%), nuklir (4%), dan fosil (78%) – diproyeksikan sama seperti sekarang. Emisi karbondioksida global juga meningkat 50% hingga 60%.

permukaan air laut, karena sebagian es di daerah kutub mencair. Banjir-banjir besar, kekeringan, kebakaran hutan, dan tumbuhnya badai juga ditimbulkan oleh pemanasan global.

Dampak lainnya adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, karena permukaan laut naik sekitar 10-20 cm.

Penduduk yang tinggal di pulau kecil dengan ketinggian sekitar 1 meter di atas permukaan laut, sudah banyak yang dievakuasi. Aliran udara panas juga terjadi di mana-mana. Suhu yang lebih hangat juga merangsang timbulnya pelbagai penyakit.

Malapetaka-malapetaka itu banyak menimbulkan korban jiwa. Dan kehancuran dahsyat (katastropi) diduga akan terjadi pada tahun 2050.

Pemanasan global ternyata juga menumbuhkan sikap positif dunia. Environmentalis mendorong dunia agar mampu menurunkan konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer sebesar 60-80%. Pada gilirannya, penggunaan energi alternatif yang terbaru dan lebih ramah lingkungan, bukan hanya ada pada tataran wacana; namun

sudah dipraktekkan.

Bio-etanol, yaitu bahan bakar pengganti premium yang terutama terbuat dari tanaman gula-gulaan: tebu dan bit. Namun bisa juga terbuat dari singkong, biji-bijian, selulosa, dan sumber-sumber lainnya. Bio-etanol bisa digunakan 100% sebagai pengganti premium, namun bisa digunakan pula sebagai campuran yang berperan sebagai pembangkit nilai oktan bahan bakar minyak. Amerika, Uni Eropa, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia telah mengembangkan etanol secara besar-besaran. Konsumsi etanol Amerika sebagai pengganti BBM adalah 24.8 juta barrel (1992), meningkat dua kali lipat menjadi 49.6 juta barrel (2002), dan tahun berikutnya meningkat 50% menjadi 67.6 juta barrel (2003). Kanada menargetkan 35% konsumsi BBM pada 2010

Fakta

Di seluruh dunia, ada 2 milyar orang yang tidak punya akses ke energi listrik atau peralatan modern.



sudah menggunakan etanol 10%. Uni Eropa menargetkan sumbangan etanol sebesar 2% (2005) dan meningkat menjadi 5.75% (2010). Beberapa negara Amerika Latin sudah menjadi eksporter etanol, selain menggunakan untuk keperluannya sendiri di dalam negeri. India, Thailand, dan Cina mendorong peningkatan penggunaan etanol dalam negeri. Thailand dan Cina bahkan sudah memiliki unit produksi dalam negeri dengan kapasitas masing-masing 360,000 dan 600,000 ton/tahun.

Bio-diesel, yaitu bahan bakar pengganti solar terbuat dari minyak nabati. Yang

sudah dicoba di banyak negara adalah minyak canola, kedelai, buah jarak, dan minyak kelapa sawit. Dianjurkan juga untuk memanfaatkan limbah minyak sayur (jelantah) untuk digunakan sebagai bahan baku pembuat bio-diesel. Bio-diesel biasanya digunakan sebagai bahan campuran (20%) solar, yang kemudian bisa menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan. Malaysia memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan energi ini.

Energi angin. Total penggunaan energi angin dunia pada 2004 diperkirakan mencapai 47,760 MW yang cukup untuk memasok kebutuhan listrik rumah-tangga rata-rata di Eropa sebanyak 22 juta keluarga. Eropa merupakan wilayah terkemuka pengguna energi ini, yang mencapai 72% konsumsi dunia. Di Asia, India yang maju di bidang ini mampu memasok listrik energi angin sebesar 875 MW (2004). Itu setara dengan 3% konsumsi energi nasional. Pertumbuhan penggunaan energi angin di Cina juga melonjak tajam. Pada 2004 mencapai 770 MW; dan menargetkan angka 4,000 MW pada 2010. Filipina membangun pembangkit listrik tenaga angin komersial terbesar di Asia Tenggara di Propinsi Ilocos Norte, terdiri dari 15 turbin angin dengan kapasitas 25 MW. Amerika Latin juga mulai mengembangkan energi ini, misal Ekuador yang punya instalasi dengan kapasitas 15 MW.

Energi gelombang dan pasang-surut laut. Konversi energi gelombang menjadi energi listrik sudah mulai dikembangkan



Terus menyembur ke udara sepanjang hari dan malam



Iklan hydro-car versi Toyota

kan. Inggris telah melakukan pemetaan komprehensif untuk menentukan lokasi yang cocok untuk pengembangan energi gelombang di sepanjang garis pantai Inggris. Selama ini dipercaya, bahwa energi ini terutama sangat cocok dikembangkan di daerah subtropika, yang memiliki gelombang tinggi dan konstan. Tapi, daerah tropika pun memiliki kriteria daerah yang sangat mungkin untuk pengembangan energi laut.

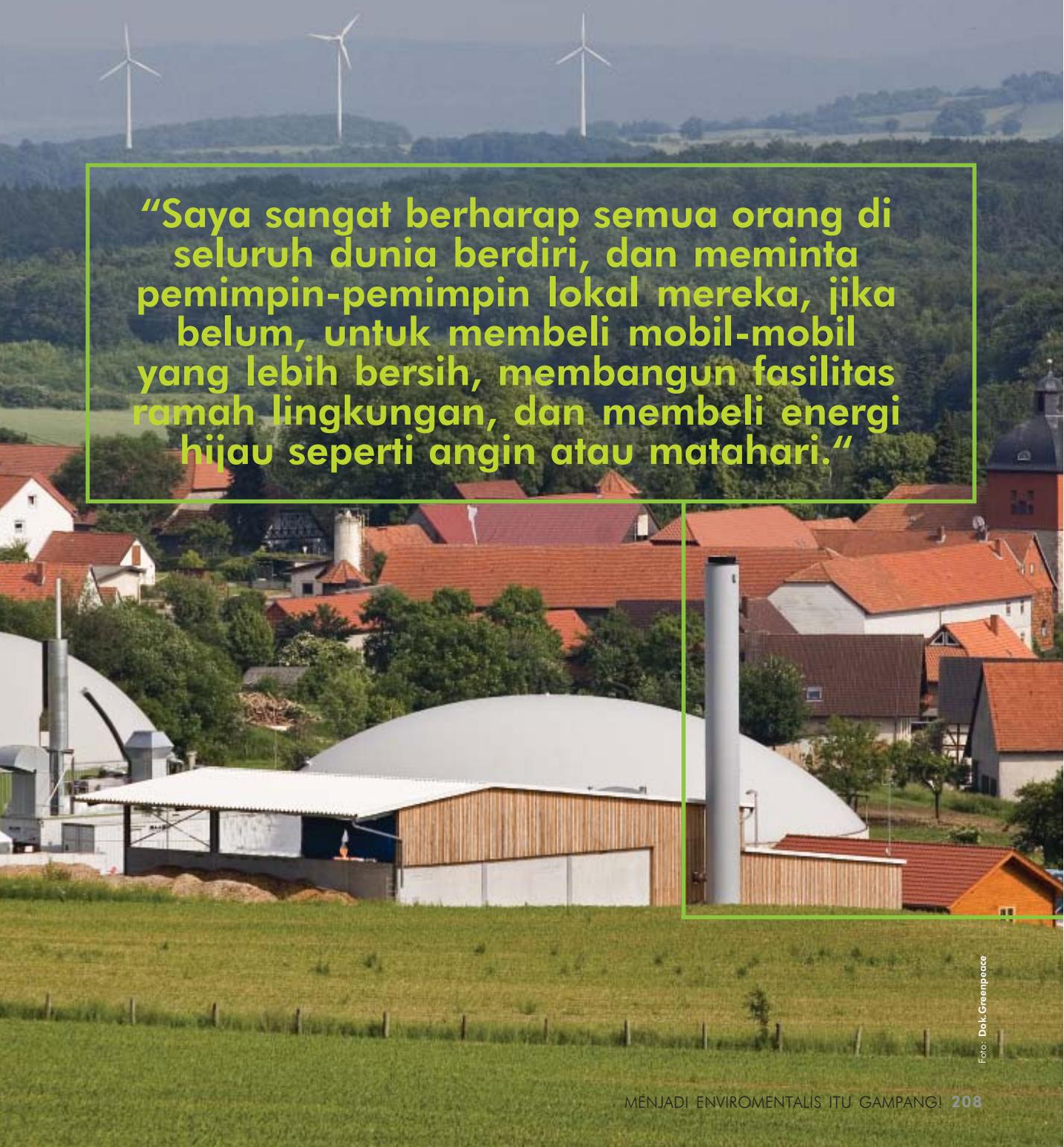
Energi surya. Teknologinya terus dikembangkan, menyangkut pengembangan sen-

sor penangkap radiasi matahari (foto-voltai) sampai pengembangan baterai penyimpanan vanadium-bromida yang ternyata memiliki efisiensi yang lebih tinggi.

Hidrogen ramah lingkungan. Memecah molekul air untuk memperoleh hidrogen biasanya terjadi pada suhu 2.500 derajat Celsius. Para ahli Israel, Swiss, Swedia, dan Perancis di Weitzman Institute di Israel, menemukan cara bahwa pemisahan itu bisa dilakukan pada suhu 350 derajat Celsius dengan menggunakan katalisator seng murni. Sebagai catatan, seng merupakan logam yang berlimpah di alam, merupakan keempat terbesar setelah besi, aluminium, dan tembaga. Kategori ramah lingkungannya adalah dalam hal pemisahan sengoksida menjadi logam seng murni dengan menggunakan energi surya.

Fakta

Sumber-sumber energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, angin, matahari, gelombang laut, dan air menyumbang 2% dari konsumsi energi dunia. Meskipun termasuk tumbuh cepat, tapi diperkirakan hanya mampu menyediakan 3% dari seluruh energi pada 2020.

A scenic view of a village with red-tiled roofs and wind turbines in the background. The image shows a lush green landscape with rolling hills and a clear sky. In the foreground, there is a green field with a fence. In the middle ground, there are several buildings, including a large white dome-shaped structure and a wooden building. In the background, there are rolling hills and three wind turbines. A green box highlights a quote in the upper part of the image.

“Saya sangat berharap semua orang di seluruh dunia berdiri, dan meminta pemimpin-pemimpin lokal mereka, jika belum, untuk membeli mobil-mobil yang lebih bersih, membangun fasilitas ramah lingkungan, dan membeli energi hijau seperti angin atau matahari.”

“ENERGI” MASA DEPAN

PADA saat yang sama, sedang dikembangkan penelitian terapan (setelah penelitian dasarnya selesai) untuk mengembangkan “energi masa depan” “meski tidak semuanya tergolong energi terbarukan, misalnya:

Pendayagunaan Desulfitobacteria untuk mendaur ulang limbah kimia beracun paling bermasalah seperti PCB (*polychlorinated biphenyl*). Bakteri yang ditemukan oleh Charles Milliken dan Harold May itu memanfaatkan limbah kimia beracun sebagai makanannya, dan pada saat yang sama dapat menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk peralatan listrik berdaya-rendah.

Energi protein dari bahan organik. Shuguang Zhang, menemukan bahwa dinding protein yang disebut *detergent peptides* dapat dimanipulasi untuk menjaga kelangsungan hidup protein. Kemudian protein (dari daun bayam) itu diletakkan pada semikonduktor organik, dan mampu menghasilkan listrik. Memang energi yang dihasilkan masih kecil, tapi peluang pendayagunaannya masih amat terbuka.

Cold Fog Accelerator. Dr. Peter Gra-
neau menemukan proses untuk memanfaatkan energi potensial pada ikatan molekul air dengan menggunakan tembakan voltase tinggi dengan energi sebesar 39.8 Joule,



Foto: Dok. WALHI

yang mampu menghasilkan energi kinetik sebesar 29.2 Joule serta panas rendah sebesar 31.2 Joule. Artinya, total *output* energinya hampir mencapai dua kali lipat *input* energi yang digunakan.

Beta-voltaic Battery. Alat temuan Paul Brown itu sudah dipatenkan. Baterie ini mendayagunakan energi isotop hidrogen, yang setiap elektronnya mampu menghasilkan energi sebesar 5.7 keV, dan dapat bertahan selama 25 tahun tanpa *recharge*. Limbah yang timbul setelah habis masa pakainya,

Leonardo DiCaprio

Aktor Hollywood

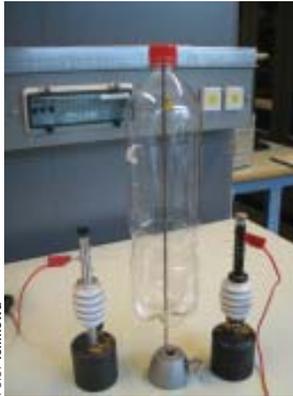


Foto: Isifmewa

masih relatif lebih aman dibanding dengan limbah detektor asap.

Remediasi Nuklir. Ini memanfaatkan prinsip Dr. Paul Brown, yang menyatakan bahwa energi photon pada tingkatan 10 Mev

(mega elektron volt) dapat berfungsi secara efektif untuk mentransformasikan limbah nuklir menjadi isotop berumur-luruh pendek, yang memungkinkan limbah itu bisa ditimbun secara aman di mana pun. Pada saat yang sama, proses itu dapat menghasilkan listrik.

Motor Elektro-statik. Alat temuan Dr. Oleg Jefimenko ini memanfaatkan prinsip Ben Franklin pada abad 18. Antena tajam alat ini mampu menyadap energi listrik dari atmosfer. Sebagai gambaran, potensi listrik atmosfer itu setara dengan

200,000 megawatt.

Gasifikasi biomasa. David Wallman telah memantapkan alat ini. Dengan menggunakan *input* energi sebesar 1 kWh (setara dengan 3,300 BTU). Energi yang dihasilkannya 4,000-5,000 BTU, lebih tinggi dibanding dengan *input* energinya.

Charge Clusters. Ken Shoulders telah memantapkan alat untuk membangkitkan energi dari gugus elektron. Dengan menggunakan *input* energi 20 mikrojoule, dapat dihasilkan energi setara dengan 25,000 derajat celsius.

Film Elektrolit. Temuan Dr George Miley ini adalah film elektrolit dari nikel, paladium, atau titanium yang amat tipis, mampu menghasilkan energi 10 kali lipat dibanding dengan *input* energinya.

Energi yang dibangkitkan dari ruang vakum, disebut **zero point energy** (ZPE). Prinsip kerjanya dikembangkan oleh puluhan ahli. Meski belum operasional, energi ini amat menjanjikan, karena membuka tersedianya energi yang tidak terbatas.

Fakta

Pembakaran bahan bakar fosil, untuk memproduksi energi, melepas karbondioksida dan pelbagai gas penyebab pemanasan global ke atmosfer. Pemanasan global akan memunculkan berbagai wabah penyakit tak terduga, kematian akibat gelombang panas, sinar terik, banjir, dan kehancuran spesies.

“Jika hati berkehendak, seorang manusia akan menemukan seribu jalan. Tapi, jika hati tak berkenan maka ia akan menemukan seribu alasan.”

Foto: Istimewa

Peribahasa Dayak



Hasil kebakaran hutan di Riau

SITUASI ENERGI DI INDONESIA

BENTUK pemakaian energi final Indonesia pada 2003: BBM 63%, gas 17%, listrik 10%, batubara 8%, dan LPG 2%. Jenis energi masih mengandalkan energi fosil (95%), yaitu minyak bumi 54.4%, gas bumi 26.5%, dan batubara 14.1%. Energi lainnya hanya menyumbang 5% saja, yaitu PLTA 3.4%, panas bumi 1.4%, dan energi lain 0.2%.

Indonesia masih konsumen murni energi tidak terbarukan. Dengan pola konsumsi energi seperti itu, Indonesia merupakan salah satu penghasil gas karbon dioksida terkemuka di Asia. Merujuk pada aktifitas pembakaran energi fosil, aktifitas pabrik semen, dan pembakaran gas di lapangan, kontribusi emisi gas karbon Indonesia adalah seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tahun	Emisi Karbon (ton)	Tahun	Emisi Karbon (ton)
1890	4	1950	2,683
1900	330	1960	5,837
1910	1,071	1970	9,046
1920	1,452	1980	25,822
1930	2,292	1990	45,222
1940	3,319	2000	61,818

Sebenarnya, cadangan energi andalan Indonesia itu sudah semakin menipis. Apabila laju eksploitasi energi tetap seperti yang berlangsung saat ini, cadangan minyak hanya cukup untuk 18 tahun, gas 61 tahun,



Foto: Dok.Greenpeace

dan batubara 147 tahun. Cadangan uranium di daerah Kalimantan Barat cukup untuk produksi 3 gigawatt untuk masa 11 tahun.

Fakta

Penggunaan tenaga angin di tingkat global mengalami pertumbuhan sampai angka 30% setiap tahunnya pada dekade lalu. Turbin-turbin berkekuatan lebih dari 40.000 MW sekarang berputar di seluruh dunia, cukup untuk memenuhi 19 juta rumah-rumah orang Eropa (atau 9 juta di AS). Tenaga angin sekarang memenuhi 20% kebutuhan listrik di Denmark dan lebih dari 6% di Jerman. Angin sekarang dilirik sebagai penghasil listrik di 48 negara.

A photograph of a nuclear power plant with several large, white, hyperboloid cooling towers. Thick white steam is rising from the towers and filling the upper portion of the frame. In the foreground, there is a lush green field with a dirt path or road winding through it. The overall scene is a juxtaposition of industrial activity and nature.

“Perlombaan senjata nuklir seperti dua orang sedang duduk di kolam bensin dan menghabiskan waktu mereka dengan menyalakan korek api.”

ARAH PENGEMBANGAN ENERGI

PADA 2005-2025, tidak ada perubahan kebijakan keenergian nasional secara substansial. Sumber energi masih mengandalkan pada energi fosil, dengan sedikit penurunan dari 94% (2005) menjadi 89.5% (2025). Jadi penurunan komposisi energi ini dalam 20 tahun ke depan hanya sebesar 4.5%. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat pergeseran-pergeseran sebagai berikut:

Batubara muncul sebagai sumber energi yang dominan, dari porsi penggunaan sebesar 14.1% (2005) menjadi 32.7% (2025).

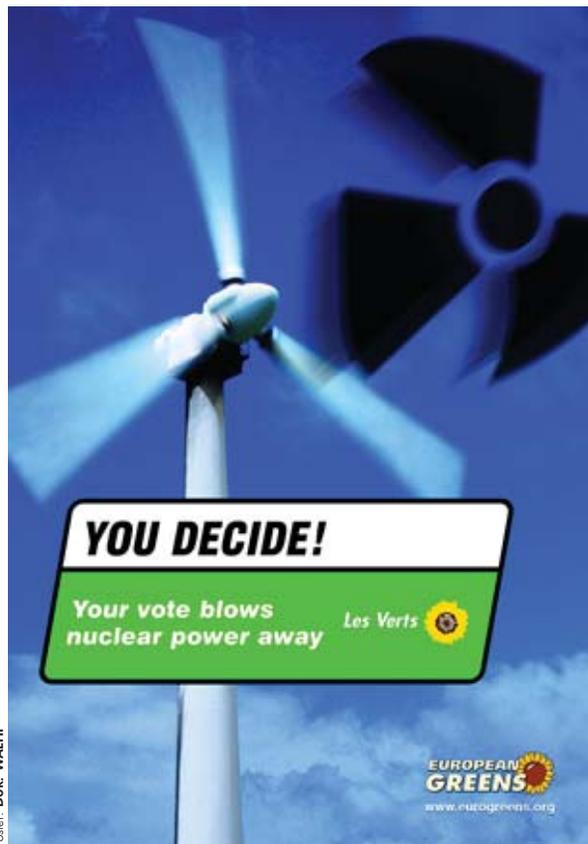
Gas bumi tetap menempati posisi kedua dengan peningkatan proporsi dari 26.5% (2005) menjadi 30.6% (2025).

Meski cadangan minyak nasional diduga sudah terkuras habis pada 2023, namun proporsi konsumsi minyak nasional 2025 masih tinggi (26.2%) meski menyusut secara signifikan dibanding 54.4% pada tahun 2005.

Sumber energi panas bumi meningkat dari 1.4% (2005) menjadi 3.8% (2025).

Sumber energi nuklir akan dioperasikan pada 2015, dan pada 2005 akan memberikan sumbangan sebesar 1.99%.

Meski dari segi kapasitas akan mengalami sedikit kenaikan, namun proporsi sumber energi PLTA mengalami penurunan dari



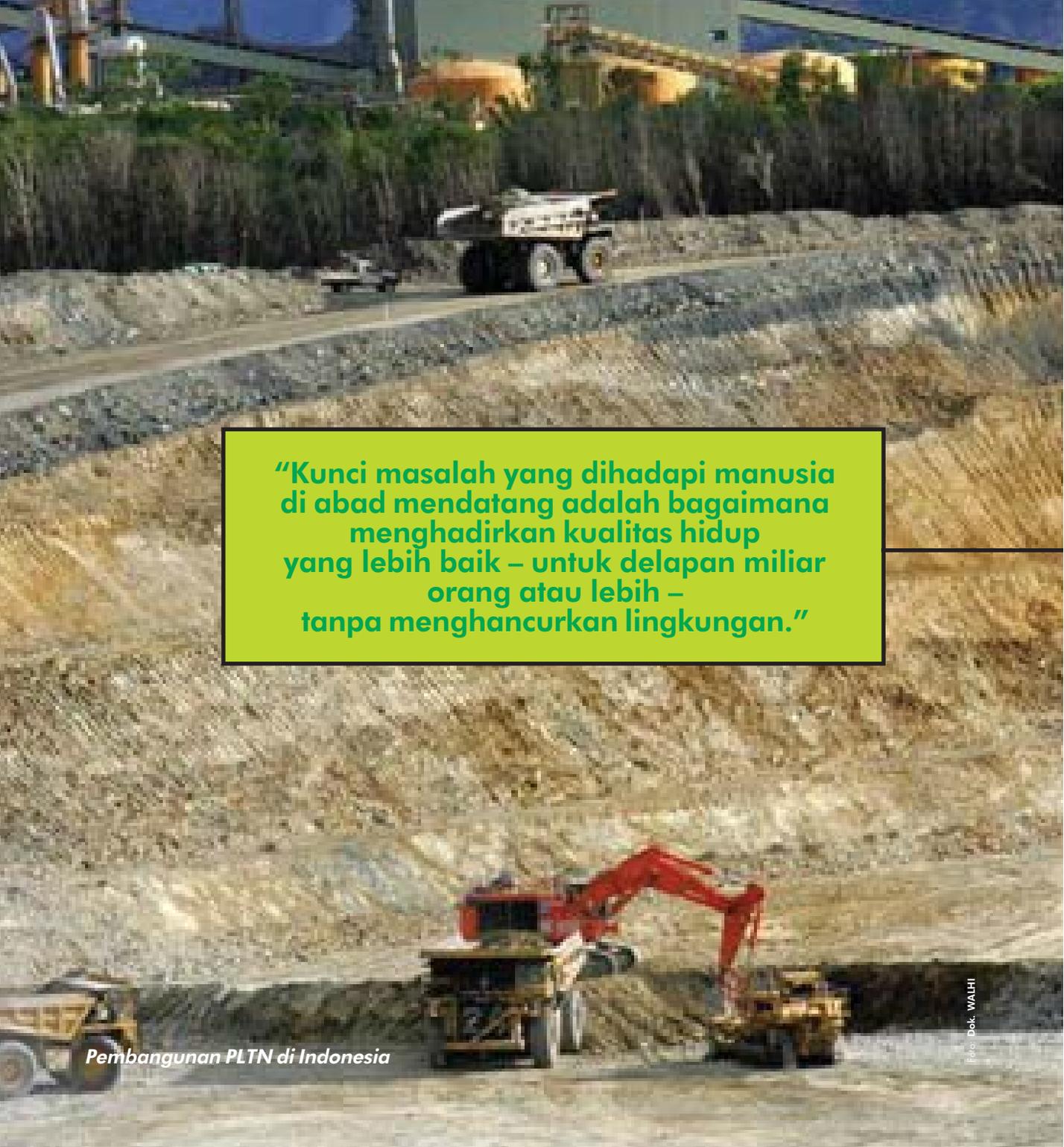
Poster: Dok. WALHI

John Denver

Penyanyi dan pencipta lagu

3.4% (2005) menjadi 2.4% (2025).

Komposisi energi terbarukan di luar PLTA meningkat secara amat tidak signifikan dari 0.2% (2005) menjadi 2.31% (2025).



“Kunci masalah yang dihadapi manusia di abad mendatang adalah bagaimana menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik – untuk delapan miliar orang atau lebih – tanpa menghancurkan lingkungan.”

TANTANGAN PARA ENVIRONMENTALIS

INDONESIA ternyata secara sungguh-sungguh tidak memiliki niat politik untuk mengembangkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Itu amat bertentangan dengan kecenderungan global yang memberikan respek yang tinggi terhadap nilai-nilai lingkungan. Selain mengembangkan bahan bakar organik, dunia kini malah memberi perhatian untuk mengkonversi biomasa menjadi energi, baik berupa panas, listrik, dan energi untuk transportasi. Kota Vaxjo di selatan Swedia, misalnya, telah

membangun unit pengolah biomasa berkapasitas 77,000 MW. Targetnya adalah menurunkan emisi gas karbon pada 2010 menjadi separuh dari emisi pada 1993. Dan sekarang, emisi gas karbon kota itu hanya 3,680 kg/th dibandingkan dengan rata-rata Swedia yang mencapai 6,000 kg/th dan rata-rata Eropa 9,000 kg/tahun. Airport Oslo di Norwegia, dipasok dengan energi biomasa berkapasitas 50-60 GWh/tahun. Di Essent Belanda telah dibangun unit pengolah biomasa berkapasitas 600,000 ton biomasa/th yang memanfaatkan limbah pertanian serta cangkang kernel sawit. Inggris membangun fasilitas pengolah *litter* (biomas kering sebagai alas kandang) pada unit usaha peternakan unggas berkapasitas 38.5 MW, yang dapat memasok kebutuhan listrik

sebanyak 93,000 rumahtangga. Kota Kohuku di Pulau Shihoku yang 84% arealnya ditutup hutan, membangun pusat pembangkit tenaga biomas yang berasal dari limbah hutan.

Indonesia masa depan adalah pengguna energi batubara dari semula minyak bumi. Maknanya, Indonesia telah memilih sumber energi fosil yang memiliki potensi emisi yang paling besar. Sebagai catatan, emisi karbon batubara (>80%), minyak bumi (70-80%), dan gas (60%). Selain emisi

Apakah Indonesia tidak tertarik untuk memanfaatkan sumberdaya matahari, angin, gelombang laut, air gravitasi, dan biomasa sebagai sumber penghasil energi yang ramah lingkungan.

Edward O. Wilson

Ilmuwan, penerima hadiah Pulitzer

karbon, penggunaan energi batubara berpotensi untuk menghasilkan partikel debu-debu radioaktif dalam bentuk debu karbon, debu silika, debu alumina, dan oksida besi. Jenis radioaktif yang timbul dari penggunaan batubara disajikan pada tabel berikut.

Nama Polutan	Jenis Radiasi	Waktu Paruh (tahun)*
1. Timbal-210	Radiasi Beta	19.4
2. Polonium-210	Radiasi Alpha	138.3
3. Protactinium-231	Radiasi Alpha	3.43×10^4
4. Radium-226	Radiasi Alpha	1,620
5. Thorium-232	Radiasi Alpha	1.39×10^{10}
6. Uranium-238	Radiasi Alpha	4.5×10^9
7. Karbon-14	Radiasi Beta	5,730

Keterangan: * Satuan untuk Polonium adalah hari.

Polutan radioaktif nomor 1-6 merupakan logam berat, yang apabila memasuki

tubuh akan mengikuti jalur peredaran hati yang amat membahayakan kesehatan. Radiasi beta merupakan jenis radiasi eksternal dan internal. Sedangkan radiasi alpha merupakan radiasi internal. Radiasi eksternal artinya, sudah berbahaya meski berada di luar tubuh manusia. Sedangkan radiasi internal, baru berbahaya tatkala unsur itu memasuki tubuh manusia. Selain aspek kesehatan tersebut, aspek lingkungan yang diakibatkan dari pertambangan tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaharukan baik di darat maupun di laut, dimana di darat akan membuat gunung-gunung atau bukit-bukit yang mengandung unsur mineral dikeruk dan akan menjadi danau-danau raksasa, dan pembuangan "tailing" yang dibuang ke sungai dan akhirnya



Penampungan Reaktor Nuklir Hanford dekat Richland, Washington. Foto diambil pada pertengahan 1940-an.



Salah satu sudut Bandara Oslo, Norwegia

Foto: Dok. WALHI

mengalir kelaut akan berdampak pada matinya atau tercemarnya ekosistem biota air yang ada di sepanjang sungai dan laut tersebut. Pembuangan tailing akan mampu menghasilkan kerusakan di wilayah produktif berupa hutan, sungai, lahan basah dan pesisir pantai dan laut.

Menghadapi situasi itu, para environmentalis perlu memberikan pandangan kritis terhadap jalur yang dipilih oleh pemerintah. Misalnya, pemanfaatan batubara harus benar-benar diikuti dengan penerapan metoda-metoda *clean coal combustion*, misalnya melalui penggunaan teknologi FBC (*fluidized bed combustion*) sebagai ganti dari teknologi PCC (*pulverized coal combustion*), FGD (*flue-gas desulfurization*), dan EBM (*electron beam machine*).

Pada saat yang sama, pemerintah perlu diminta untuk menyampaikan argumentasi: kenapa memilih jalur pola pendayagunaan energi seperti itu. Apakah Indonesia tidak tertarik untuk memanfaatkan sumberdaya

matahari, angin, gelombang laut, air gravitasi, dan biomasa sebagai sumber penghasil energi yang ramah lingkungan.

Lebih jauh, semua pihak harus menyadari, bahwa dunia sudah sepakat untuk mereduksi jumlah emisi gas rumah kaca nominal ke dalam atmosfer. Jika pola penggunaan energi masa depan seperti pilihan Indonesia itu akan meningkatkan neraca karbon di atmosfer, maka negara harus melakukan pelbagai kebijakan pengimbang untuk menurunkan neraca karbon, seperti program-program reforestasi serta penanaman tumbuhan lain secara masif. Tanpa hal langka pengimbang itu, Indonesia bisa terjerumus menjadi negara yang harus “membeli” karbon; padahal Indonesia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memungkinkan dalam posisi seperti itu.

Fakta

Lingkungan yang buruk bertanggung jawab langsung pada sekitar 25% dari persoalan kesehatan dunia sekarang ini, dan 2/3 dari kasus kesehatan tersebut menimpa anak-anak.



*Pembangunan energi matahari
di Aceh pasca-tsunami*

EVALUASI DIVERSIFIKASI ENERGI

INDONESIA pernah mencoba untuk melakukan penganekaragaman penggunaan energi pada masa lalu. Mikro-hidro dan energi surya sebagai sumber daya listrik, yang sedang *trendy* saat itu, diintroduksikan di banyak tempat. Tapi keduanya tidak pernah benar-benar memasyarakat, sebab pendekatannya yang amat formal-keproyekan, tanpa sosialisasi yang memadai.

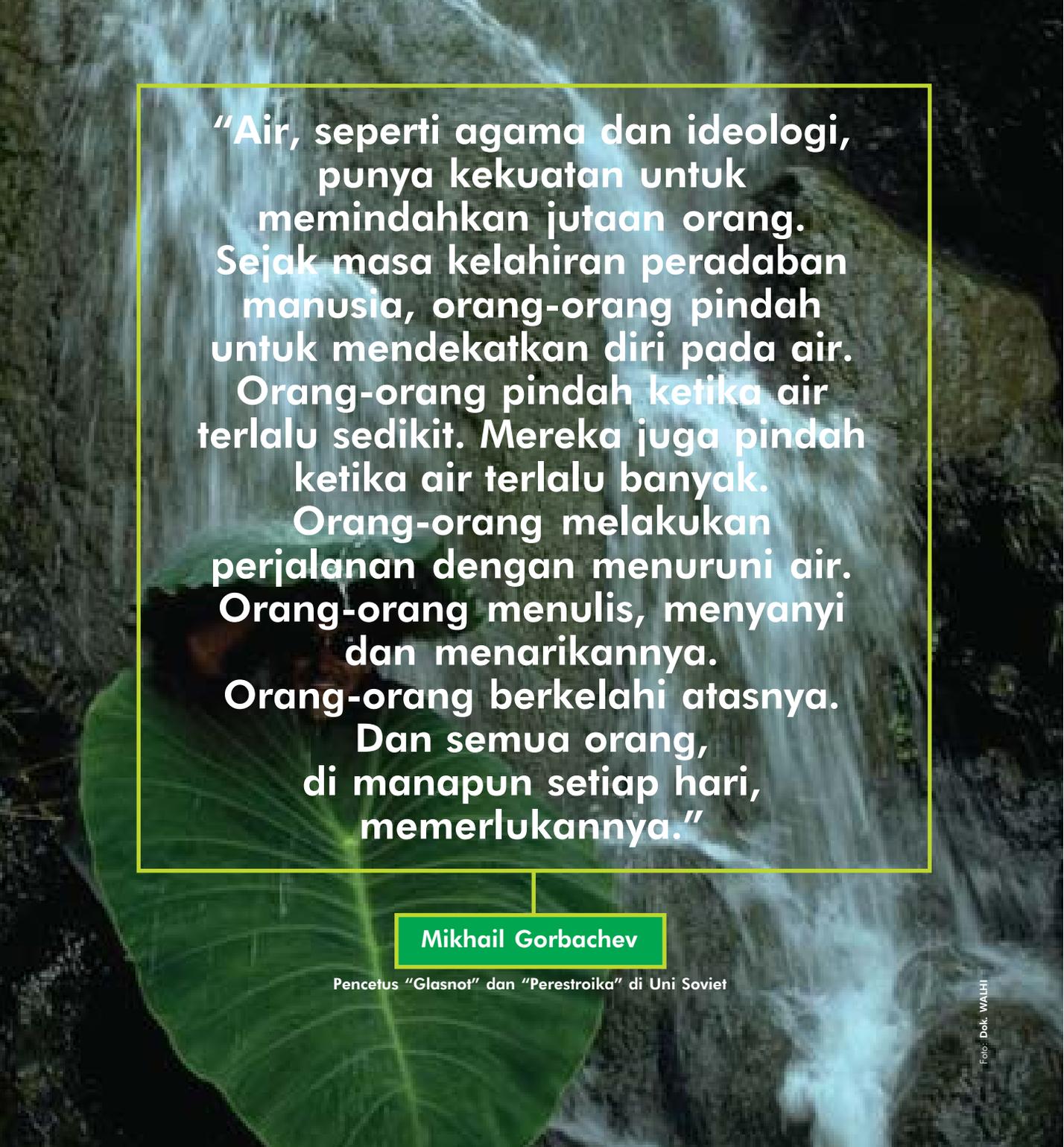
Setiap desa di daerah permukiman transmigrasi yang baru dibuka, sekurang-kurangnya terdapat satu panel pembangkit listrik tenaga surya yang ditempatkan di kantor desa. Namun karena tidak disertai dengan sosialisasi cara pemeliharaan dan perbaikannya, maka tatkala ada panel tenaga surya yang rusak, masyarakat tidak termotivasi untuk memperbaiki atau memperbaruinya.

Proyek listrik mikrohidro pun hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen listrik. Pemeliharaan unit merupakan tanggungjawab "proyek". Maka ketika proyek berakhir, bangunan maupun alat-alat mikrohidro itu pun pada akhirnya tidak berfungsi.

Masyarakat perlu tahu benar: mengapa energi terbarukan itu diperlukan, apa konsekuensinya jika tidak memilih energi terbarukan, dan apa prasyarat agar penerapan energi terbarukan itu benar-benar bisa direalisasikan. Masyarakat, peneliti, dan pihak-pihak lainnya perlu memperoleh insentif agar mereka tertarik untuk mengadaptasi energi terbarukan.

Fakta

Pemanas air tenaga surya menawarkan penghematan yang sangat besar. Pemilik pemanas tenaga surya akan menghemat 50% hingga 85% tagihan rekening listrik dibandingkan jika menggunakan pemanas air tenaga listrik.



**“Air, seperti agama dan ideologi,
punya kekuatan untuk
memindahkan jutaan orang.
Sejak masa kelahiran peradaban
manusia, orang-orang pindah
untuk mendekatkan diri pada air.
Orang-orang pindah ketika air
terlalu sedikit. Mereka juga pindah
ketika air terlalu banyak.
Orang-orang melakukan
perjalanan dengan menuruni air.
Orang-orang menulis, menyanyi
dan menarikannya.
Orang-orang berkelahi atasnya.
Dan semua orang,
di manapun setiap hari,
memerlukannya.”**

Mikhail Gorbachev

Pencetus “Glasnot” dan “Perestroika” di Uni Soviet

KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN

SECARA obyektif, Indonesia memiliki cadangan sumber energi alternatif yang cukup besar, namun pemanfaatannya masih relatif rendah. Tingkat pemanfaatan sumber energi alternatif dapat disimak pada tabel berikut. Namun demikian, agar potensi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan tindakan-tindakan pelestarian. Melesetkan daerah tangkapan hujan akan memelihara potensi tenaga air, baik PLTA maupun mikro-hidro.

Jenis Sumber	Potensi	Kapasitas Terpasang		
	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
1. Tenaga Air	75.67	GW	4,200.00	MW
2. Panas Bumi	27.00	GW	800.00	MW
3. Mini/Micro hydro	458.75	GW	84.00	MW
4. Biomasa	49.81	GW	302.40	MW
5. Tenaga Surya	4.80	kwH/m ² /hr	8.00	MW
6. Tenaga Angin	9.29	GW	0.50	MW

Sumber: Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 (2005)

Para environmentalis perlu mendorong semua pihak agar memberikan perhatian yang patut terhadap masalah energi terbarukan yang ramah lingkungan, kecuali *biofuel* yang melalui pembukaan hutan dan nuklir. Semua pihak terkait akan melakukan aktifitas penelitian dasar, penelitian terapan, proses adaptasi teknologi, dan investasi teknologi.

Fakta

Selama lima tahun, masyarakat di Propinsi Negros, Filipina, menentang sebuah proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara dengan kapasitas 50-MW karena akan merugikan lingkungan dan kesehatan warga lokal. Pada Agustus 2002, Departemen Energi Filipina akhirnya mengabulkan penolakan itu dan membangun pembangkit listrik tenaga terbarukan. Negros akan mendapatkan 100% energi dari sumber yang tidak menimbulkan polusi, tidak akan habis dan tidak perlu mengimpor, energi terbarukan.



***“Only
truly
radicals
finance
the
revolu-
tion by
himself.”***

Fast Company

KEUNGGULAN ENERGI LOKAL

INDONESIA bukan ruang hampa dari gagasan energi hijau. Ini adalah ruang yang memberikan banyak kearifan lokal. Pada kesempatan menyongsong Hari Bumi dan Tahun Padi Nasional 2004, suatu LSM menca-nangkan untuk memasang 1,000 buah kincir angin pompa air “Egra” (energi gratis) di sepanjang jalur pantura dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jatim). Tujuannya antara lain untuk memasyarakatkan teknologi sederhana, tepat guna, dan ramah lingkungan. Masyarakat dikenalkan dengan mesin pompa air bertenaga angin yang dapat digunakan untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Satu unit alat tersebut (dengan tambahan sebuah inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC 220 volt) dapat memasok listrik 1,000 watt jika angin bertiup selama 10 jam.

Tenaga ahli nasional tingkatan doktor, pernah menyajikan potensi silisium (anasir yang dijumpai dalam pasir) yang amat potensial untuk dijadikan sumber energi. Gagasan pemanfaatan biomasa, sebagai kebun energi sinar matahari, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi juga sudah diungkapkan pada tahun 2003.

Seorang siswi SMU di Singaraja juga membuktikan, dirinya mampu mengkonversi energi gelombang menjadi energi listrik dengan peralatan sederhana. Baginya, pantai

Para Environmentalis perlu mendorong munculnya pikiran-pikiran unggul dalam negeri, baik orisinal maupun adaptasi; serta mendorong agar pikiran itu terus berkembang.

Buleleng merupakan lautan energi terbaru yang belum digali kemanfaatannya.

Itu semua merupakan contoh dari keunggulan lokal, yang sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi praktek-praktek pengadaan energi ramah lingkungan. Para Environmentalis perlu mendorong munculnya pikiran-pikiran unggul dalam negeri, baik orisinal maupun adaptasi; serta mendorong agar pikiran itu terus berkembang.



pembangkit mikro hidro menggunakan turbin model cross flow listrik

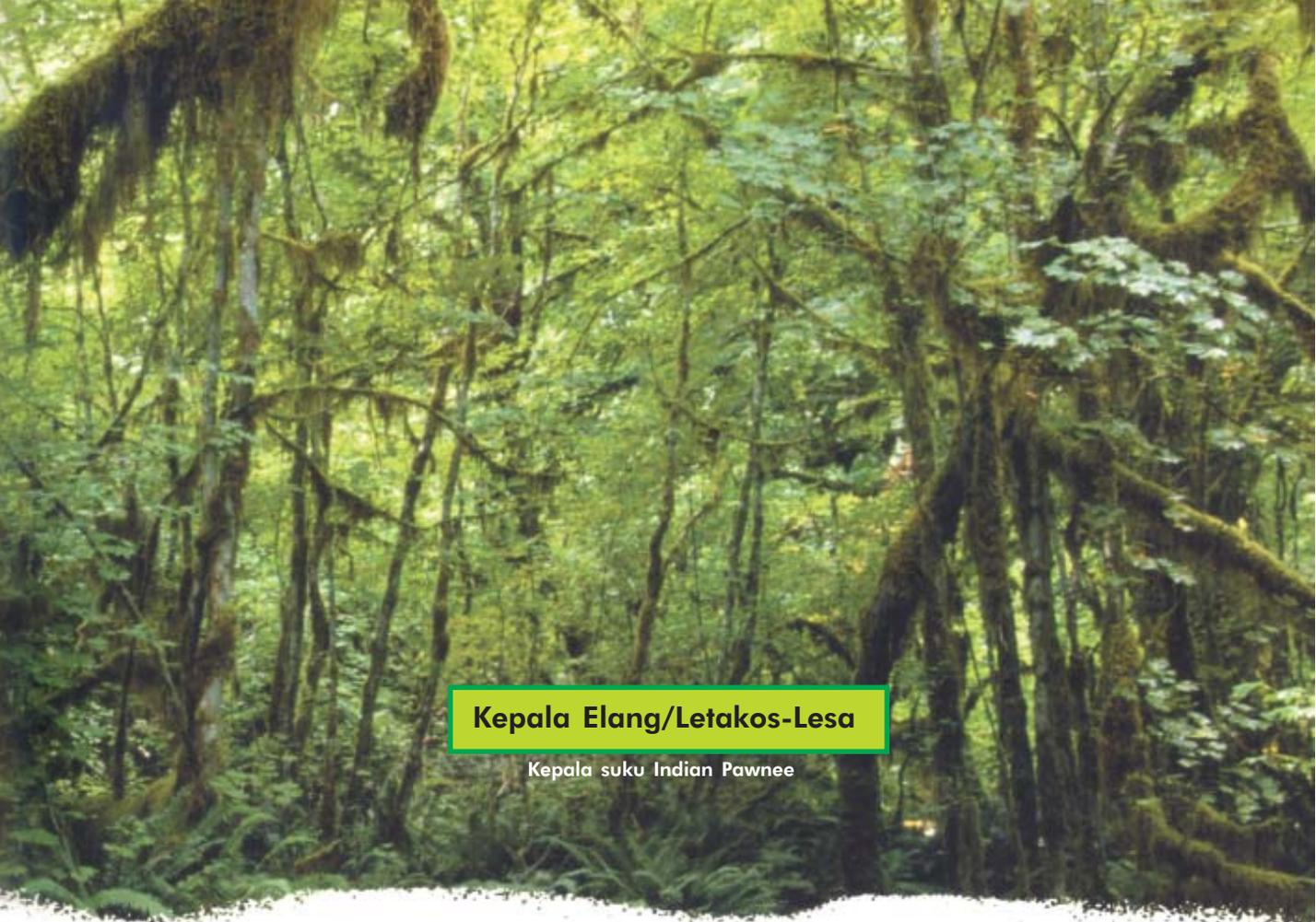
Ilustrasi: Dok. WALHI



**Pemerintah semakin imajiner
dan minimalis.
Ini kehendak
Washington Concensus.
Lantas, bagaimana
mengendalikan kehidupan
rakyat kebanyakan?**

BAGIAN 5

**KORPORASI
DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Kepala Elang/Letakos-Lesa

Kepala suku Indian Pawnee

“Segala hal di dunia ini ada dua. Di kepala kita, kita ada dua, baik dan jahat. Dengan mata kita, kita melihat dua hal, hal yang adil dan hal yang buruk. Kita punya tangan kanan yang memukul untuk kejahatan, dan kita punya tangan kiri yang penuh dengan kebaikan, dekat dengan hati. Satu kaki kita mungkin memimpin kita menuju jalan kejahatan, kaki yang lain mungkin membawa kita ke jalan yang baik. Jadi semua hal ada dua, semua dua.”

NEW YORK, 2001. Hari itu sidang resmi PBB dalam rangka persiapan menuju Pertemuan Puncak tentang Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*). Ketika perwakilan masing-masing negara yang hadir memberikan komentar, seorang laki-laki yang mengaku berasal dari Shell, perusahaan raksasa minyak, berbicara atas nama Pemerintah Nigeria. Alih-alih memberikan respon yang terkait dengan topik yang sedang didiskusikan, perwakilan Shell ini mempromosikan apa yang Shell telah “sumbangkan” kepada Nigeria. Wakil resmi Pemerintah Nigeria yang juga hadir dalam sidang itu hanya diam dan membiarkan pegawai lokal Shell tersebut meneruskan pidatonya.

Di belahan bumi lainnya, tepatnya di Indonesia, Dutabesar Kerajaan Inggris di Indonesia memberikan pernyataan yang dikutip berbagai media massa lokal dan nasional agar Pemerintah DKI Jakarta menyetujui permintaan perusahaan air Inggris, Thames, untuk menaikkan harga air bersih. Thames merupakan salah satu perusahaan multi-nasional yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan air bersih di Jakarta.

Belum lama ini sejumlah petinggi Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengakui di depan parlemen Australia bahwa mereka melakukan serangkaian lobi kepada pejabat-pejabat pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melancarkan usaha perusahaan-perusahaan per-

“Fasisme seharusnya lebih pantas disebut sebagai korporatisme karena ia hasil merger antara kekuatan negara dan korporat.”

Benito Mussolini

Pemimpin fasis Italia

tambangan Australia yang ingin melakukan operasi pertambangan di hutan-hutan lindung di Indonesia. Padahal, operasi semacam itu merupakan jenis kegiatan yang terlarang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun

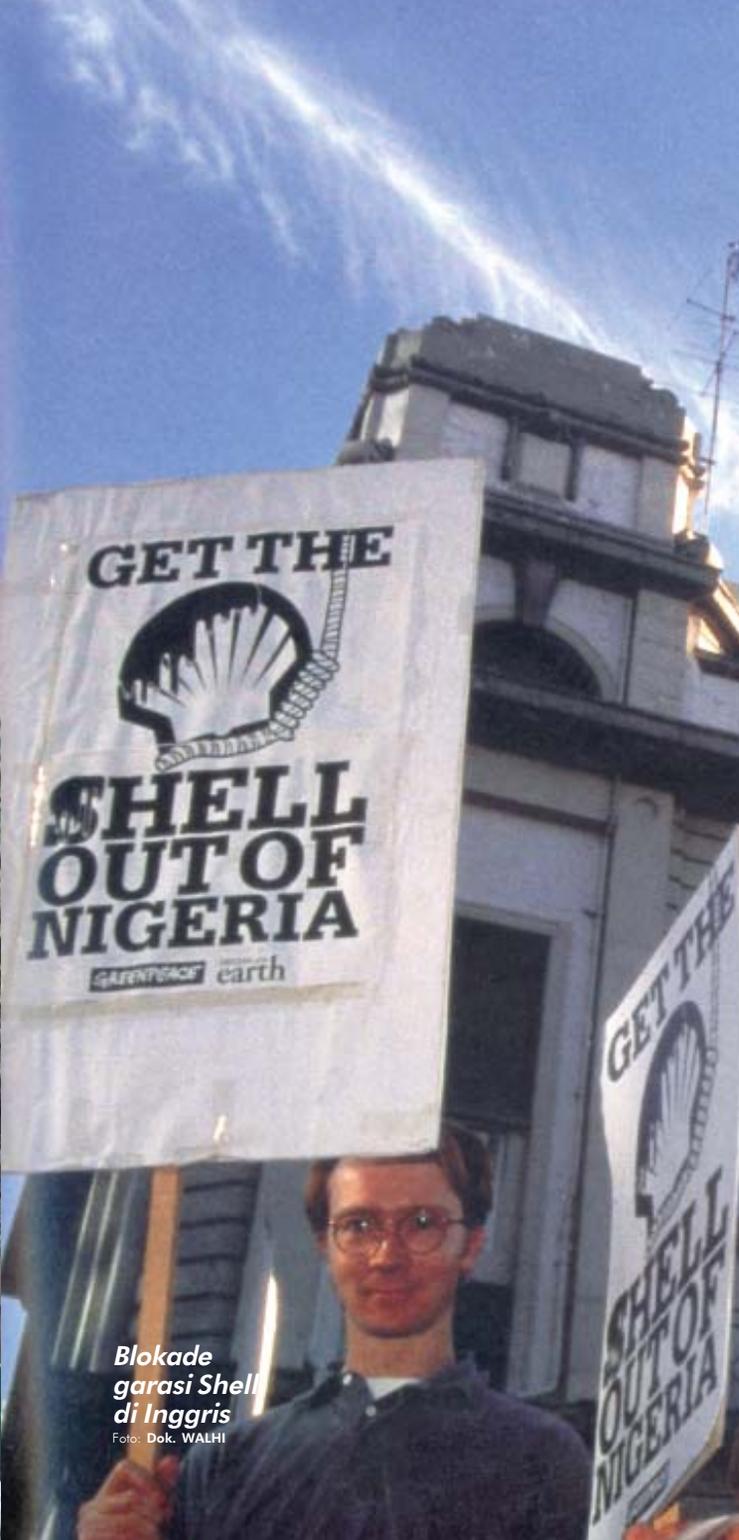
1999 tentang Kehutanan. Dan akhir cerita menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengabdikan permintaan perusahaan-perusahaan pertambangan itu dan mengorbankan hutan-hutan lindung yang merupakan wilayah penyangga terakhir yang dapat menghindarkan rakyat banyak dari berbagai bencana.

Dalam konteks yang berbeda-beda, ke-tiga situasi di atas merupakan potret kondisi mutakhir yang menggambarkan kekuasaan

korporasi terhadap negara yang berdaulat. Contoh-contoh tersebut juga menggambarkan bagaimana negara sebagai pemegang mandat rakyat –dan oleh karenanya berkewajiban melindungi kepentingan rakyat—telah bertindak untuk dan atas nama korporasi serta mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar.

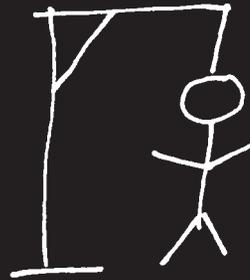


Sampah di Jakarta



**Blokade
garasi Shell
di Inggris**

Foto: Dok. WALHI



S H E L L

Perusahaan-perusahaan besar juga mengeluarkan banyak uang untuk iklan-iklan mengkilap yang mengampanyekan betapa dalamnya komitmen atas persoalan komunitas dan lingkungan. Iklan Shell pada Oktober 1999 di majalah *National Geographic*, menampilkan foto-foto hutan yang lebat dan pernyataan komitmen Shell untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dapat dijadikan sebagai contoh.

Shell seharusnya tahu, iklan-iklan mengkilap tidak mampu menghapus ingatan tentang penggantungan pemimpin-pemimpin Ogoni oleh pemerintah Nigeria karena memprotes penghancuran hutan oleh Shell di kampung halaman mereka. Akan sungguh berbeda hasilnya, jika mereka mau menggunakan uang itu untuk membersihkan operasional kerja dan memperbaiki kehidupan masyarakat yang berdiam di wilayah yang terkena dampak kehadiran perusahaan.



“Bukanlah tingkat kemakmuran yang mendatangkan kebahagiaan, tapi relasi hati ke hati dan cara kita memandang dunia. Kedua perilaku ini ada dalam kekuatan kita.”

Alexandr Solzhenitsyn

NEGARA, KORPORASI DAN RAKYAT

KORPORASI adalah subyek hukum yang memiliki hak-hak yang serupa dengan individu. Kata korporasi diadopsi dari bahasa Inggris *corporation* yang berasal dari bahasa Latin "*corpus*" yang berarti "badan". *Oxford English Dictionary* mengartikan *corporation* sebagai "*a group of people authorized to act as an individual*" (sekumpulan orang yang diberi kekuasaan (oleh negara) untuk bertindak sebagaimana individu). Dalam melakukan aktifitasnya, korporasi bertanggung jawab kepada segelintir orang yang menjadi pemegang sahamnya.

Keberadaan korporasi mendapatkan pengesahan dari negara. Namun demikian, seringkali negara bertindak dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada dasarnya melayani kepentingan korporasi dan abai terhadap kepentingan rakyatnya. Padahal, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menyelenggarakan tata kelola (*governance*) yang dapat menjamin terciptanya penghormatan dan pemenuhan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Sekarang ini ada lebih dari 40.000 korporasi di seluruh dunia yang beroperasi di berbagai negara melalui 250.000 afiliasinya. Dua ratus diantaranya menguasai 25% dari seluruh aktifitas perekonomian dunia¹. Beberapa raksasa korporasi global

"Apa yang disebut 'kapitalisme' sesungguhnya sebuah sistem merkantilisme korporat, dengan tirani privat yang tak terhitung besar dan luasnya mengontrol ekonomi, sistem politik, serta sosial dan budaya kehidupan, mengoperasikan usaha tertutup, mendapat dukungan masif dari negara yang berkuasa dalam bidang ekonomi domestik dan masyarakat internasional."

Noam Chomsky

Ilmuwan dan kritikus AS

bahkan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada negara. Philip Morris, misalnya, memiliki aktifitas ekonomi yang melebihi New Zealand dan beroperasi di 170 negara. Kekuatan ekonomi Mitsubishi melebihi Indonesia, negara yang menempati



Size 12

Made in Haiti

50% Cotton

50% Polyester

100% Sweatshop labour

14 hour shifts, Seven day week

28 cents per hour

No right to speak out

P Bottling Company is one of the fastest growing soft drinks manufacturers in Haiti. Recent expansion has meant that we now require;

MACHINE OPERATORS

We are seeking enthusiastic and desperate individuals to fill ten positions. The unfortunate applicants will be forced to prioritise heavy work loads seven days a week. You will need to possess phenomenal stamina, basic machinery skills and not complain as you work well under pressure. No disputes or qualifications are required. Compulsory contraception will be enforced.

Previous experience is irrelevant.

To apply, quote ref: **UR/BEING EXPLOITED.**

Applications close when you start taking notice

urutan ke-4 dari segi jumlah populasi dunia.

Dari 100 kekuatan ekonomi terbesar di dunia, 51 di antaranya korporasi dan sisanya adalah negara. Dengan kekuatan ekonomi semacam ini korporasi memiliki kekuasaan untuk mengontrol berbagai kebijakan di berbagai negara demi maksimalisasi keuntungan (profit) yang merupakan tujuan utama mereka.

Korporasi multinasional (*Multinational Corporation*, MNC)² merupakan korporasi yang memiliki operasi di dua negara atau lebih. MNC memainkan peran yang sangat besar dalam globalisasi yang mengusung ideologi neoliberalisme³. Dengan jangkauan pengaruh dan kapital yang sangat besar, MNC memiliki keunggulan untuk berinvestasi di manapun di belahan bumi. Hal ini mengakibatkan persaingan di antara negara-negara untuk dapat mengundang MNC berinvestasi di negara-negara tersebut. Negara-negara menawarkan berbagai keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) seperti pengurangan pajak, asistensi teknis, penyiapan infrastruktur, serta standar lingkungan dan buruh yang rendah.

Ideologi neoliberalisme secara sistematis diejawantahkan oleh tiga anak kandungnya, yaitu WTO (World Trade Organization), Bank Dunia (World Bank dan bank-bank pembangunan multilateral lainnya, seperti ADB/Asian Development Bank, dll), serta IMF (International Monetary Fund). Ketiga anak kandung neo-liberalisme menjadi agen-agen yang memuluskan agenda korporasi melalui

pemaksaan berbagai kebijakan dengan imbalan diberikannya “akses pasar” serta “bantuan teknis dan finansial” (seringkali dalam bentuk utang) kepada negara-negara penerima “bantuan”. Alih-alih menjadi sejahtera, rakyat di negara penerima “bantuan” harus terjebak dalam jeratan utang dan mengalami bentuk baru dari kolonialisme korporasi⁴.

Lihatlah apa yang terjadi di Indonesia? Pada 1999 pemerintah Indonesia menandatangani paket utang dari Bank Dunia yang disebut WATSAL (*Water Sector Structural Adjustment Loan*) senilai US\$ 300 juta. WATSAL salah satu dari empat paket program penyesuaian struktural (PRSA II, SSNAL, dan *Governance Reform Loan*) sebagai imbalan dari pinjaman (utang) yang diberikan Bank Dunia dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak 1997.

Menurut Bank Dunia, restrukturisasi sektor air ini akan menghemat belanja negara dan mempercepat pemulihan makroekonomi Indonesia selepas krisis. Inefisiensi yang melekat pada pengelolaan sektor air diharapkan juga akan hilang. Selain itu Bank Dunia akan memberikan keleluasaan yang besar bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan di sektor air karena berbagai hambatan regulasi akan dihilangkan.

Salah satu keluaran yang harus dihasilkan oleh pemerintah sebagai syarat pencairan utang adalah adanya suatu Undang-undang Sumberdaya Air (UU SDA) sebagai pengganti UU No.11/1974 tentang Pengair-

an. Walaupun judulnya adalah “Sumberdaya Air”, namun dari segi substansi sebenarnya UU SDA ini tidak jauh bergerak dari sektor pengairan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sejak Oktober 2001, DPR telah sibuk membahas RUU SDA. Proses ini jauh dari pengawasan publik dan hanya melibatkan pemerintah sebagai satu-satunya narasumber dan mitra dalam pembahasannya. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya RUU ini disusun sebagai satu syarat pencairan utang dari Bank Dunia, sehingga kerangka yang dibangun juga akan menyesuaikan dengan kerangka Bank Dunia yaitu promosi liberalisasi sektor publik. Beberapa hal yang menjadi ciri liberalisasi sektor air di antaranya adalah:

KUASA KORPORASI MENGUAT

Perubahan mendasar yang terdapat dalam UU SDA bila dibandingkan dengan UU NO.11/1974 adalah dibedakannya hak guna air menjadi dua kategori, yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna pakai air adalah hak penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau non-komersial, sementara hak guna usaha air adalah hak untuk mengusahakan air bagi tujuan-tujuan komersial. Hal ini secara eksplisit telah menempatkan air sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Selain itu dalam UU SDA juga diperkenalkan sistem kemitraan antara pihak pengelola sumberdaya air (dalam hal ini pemerin-



Foto: Henry Lopulalan

ta) dengan pihak swasta. Hal ini di kemudian hari dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di mana perusahaan atau swasta yang berorientasi profit diberikan kewenangan untuk melakukan juga fungsi-fungsi sosial yaitu menyediakan air yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pada 1997 saja, sedikitnya 20 investor asing dan nasional telah antri untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia dengan nilai total investasi sebesar Rp 3,68 triliun. Di antara investor asing yang terlibat dan tertarik dalam bisnis ini terdapat nama-nama yang sudah tidak asing lagi di kancah internasional, antara lain Suez Lyonnaise Des Eaux (Perancis) dan Thames Water (Inggris). Dunia privatisasi air global saat ini didominasi oleh dua pemain utama yang keduanya berasal dari Perancis, yaitu Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) serta Suez Lyonnaise des Eaux. Kedua korporasi multi/transnasional ini memiliki dan mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di lima benua.

AIR JADI KOMODITI

Dalam UU disebutkan bahwa sumberdaya air yang dapat diusahakan meliputi sumberdaya air yang terkandung pada air permukaan (seperti sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya), air tanah yang meliputi wilayah cekungan air tanah,



Foto: foto: Dok. WALHI

Aksi anti privatisasi air di Brasil

air hujan, serta air laut yang dimanfaatkan di darat.

Hal ini sangat mengkhawatirkan karena membuka pintu bagi penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber air tanah (*aquifer*) bagi industri air dalam kemasan. Saat ini di Indonesia, pasar air dalam kemasan dikuasai oleh dua merk utama yaitu *Aqua* (yang dimiliki oleh *Danone*) serta *Ades* (yang dimiliki oleh *Coca-Cola*). *Coca-Cola* bahkan memprediksikan bahwa dalam sepuluh tahun mendatang penjualan air dalam kemasannya akan melebihi penjualan minuman ringannya. Menurut Harian *Sinar Harapan*, kedua korporasi multinasional tersebut menyedot 2,73 miliar liter air tanah pada

2001. Pasar air dalam kemasan memang sangat mencengangkan. Pada 1998, di seluruh dunia volume air dalam kemasan yang diperdagangkan mencapai 18 miliar liter. Dapatlah dibayangkan berapa keuntungan yang didapatkan oleh korporasi multinasional tersebut.

ONGKOS HIDUP SEMAKIN MAHAL

Prinsip *full cost recovery* pada dasarnya membebankan biaya penyelenggaraan penyediaan air untuk berbagai kebutuhan tersebut kepada pengguna air (konsumen), tanpa membedakan apakah penggunaanya dari kalangan yang tidak mampu atau pun

Gaji CEO vs Buruh

Berapa ongkos kerja dalam sehari? Tanyakan itu pada dirimu sambil membandingkan gaji CEO korporat dengan upah harian pekerja di dunia ketiga.

Gaji buruh/jam		Pendapatan CEO pada 1998 (termasuk gaji, bonus, saham)	
Guatemala	Rp3.367E1	Millard Drexler, GAP	Rp6.006.000.000.000
Savador	Rp5.460	Phil Knight, Nike	Rp27.300.000.000
Nikaragua	Rp2.093	David Glass, Wal-Mart	Rp364.000.000.000
Honduras	Rp3.913	Kekayaan keluarga Walton Wal-Mart	Rp614.250.000.000.000
Haiti	Rp2.730]		
Meksiko	Rp4.550		
China	Rp2.548		
Indonesia	Rp1.820		
Burma	Rp364		
Bangladesh	Rp1.183-Rp1.820		
Rumania	Rp1.547-Rp3.367		
Rusia	Rp1.001-Rp5.096		
Toko Kulit AS	Rp27.300-Rp35.400		
Teritori AS di Saipan	Rp27.300		

dari kalangan berduit.

Di dalam UU SDA disebutkan, pengguna sumberdaya air dikenakan iuran untuk menanggung pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang penentuannya didasarkan atas perhitungan ekonomi rasional. Meskipun besarnya iuran harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi kelompok pengguna namun tidak disebutkan mekanisme penghitungannya bagi kelompok yang tidak mampu.

Liberalisasi berbagai sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak terlepas dari skema dominan dari globalisasi ekonomi. Dampak yang sangat gamblang adalah terjadinya suatu fenomena *everything is for sale*, bahkan untuk hal-hal yang semula dianggap keramat dan tidak mung-

kin dijual, seperti kesehatan, pendidikan, kearifan tradisional, kode genetik, bibit, dll. Demikian pula di sektor air. Beberapa pengalaman di negara-negara yang sebelumnya telah menerapkan liberalisasi sektor air membuktikan bahwa telah terjadi berbagai dampak di antaranya sebagai berikut:

Terjadinya ketidakadilan sosial; satu dampak utama dari globalisasi ekonomi adalah makin lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Seperlima (20%) populasi terkaya dunia mengkonsumsi 86% total sumberdaya yang ada di dunia. Liberalisasi di sektor air juga akan menyebabkan keterbatasan akses bagi rakyat miskin untuk mendapatkan air dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Liberalisasi air di berbagai



Foto: Istimedia

negara menunjukkan bahwa harga air yang dijual oleh korporasi makin lama mengalami peningkatan, yang seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Privatisasi PDAM di DKI Jakarta yang dimulai pada 1 Februari 1998 ternyata tidak menunjukan kinerja yang menggembirakan. Dari jajak pendapat yang dilakukan Majalah *Tempo* edisi 26 November 2000 di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas dan layanan produksi PDAM belum bagus. Oleh karena itu sebagian besar responden menolak kenaikan tarif yang diusulkan oleh PDAM. Kesimpulan yang hampir mirip juga pernah dilakukan oleh Harian *Republika* edisi 26 Februari 2000 yang mengatakan bahwa hasil jajak pendapat dari pemakai PDAM DKI Jakarta mengeluhkan kualitas dan pelayanan yang belum meningkat semenjak diswastanisasi-

kan. Hilangnya ketahanan dan kedaulatan pangan; ketika suatu DAS dikuasai oleh korporasi—sebagaimana yang dipersyaratkan dalam WATSAL—petani skala kecil tidak lagi memiliki kedaulatan atas pemanfaatan air bagi pertaniannya. Aliran air ke sawah mereka dapat sewaktu-waktu diputus oleh korporasi penguasa DAS untuk kepentingan kelompok tertentu yang dapat membayar lebih mahal. Ketika terjadi musim kering di Meksiko bagian tengah (1995) pemerintah Meksiko memutuskan suplai air ke petani demi memenuhi kebutuhan industri asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Di Indonesia, petani harus rela tidak mendapat-

kan air karena pintu air dari waduk Jatiluhur ditutup untuk kepentingan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Bayangkan bila nantinya DAS tersebut dikuasi sepenuhnya oleh korporasi multinasional.

Kerusakan lingkungan; pengelolaan sumberdaya air yang bertumpu pada korporasi multinasional akan lebih mengutamakan profit di atas fungsi-fungsi sosial dan kelestarian. Apalagi ketika terjadi liberalisasi dimana air akan dapat dijadikan komoditi untuk ekspor. Paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor akan menyebabkan terjadinya pengurusan sumber-sumber air secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian dan fungsi-fungsi ekologisnya, seperti halnya yang telah terjadi di sektor kehutanan dan pertambangan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa seringkali privatisasi selalu diikuti dengan terjadinya PHK. Di Inggris, korporasi mem-PHK sekitar 25% dari pekerjanya, yang mencakup sekitar 100.000 orang pekerja, ketika mereka memperoleh hak atas sistem pengelolaan air. Di Eropa Timur, ketika terjadi privatisasi sektor air, mereka merumahkan 30% dari pekerjanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Demikian pula yang terjadi di Sidney, Australia. Ketika Dewan Air diprivatisasi, ribuan pekerja kehilangan pekerjaannya dan harga air yang dibebankan kepada konsumen naik dua kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun.

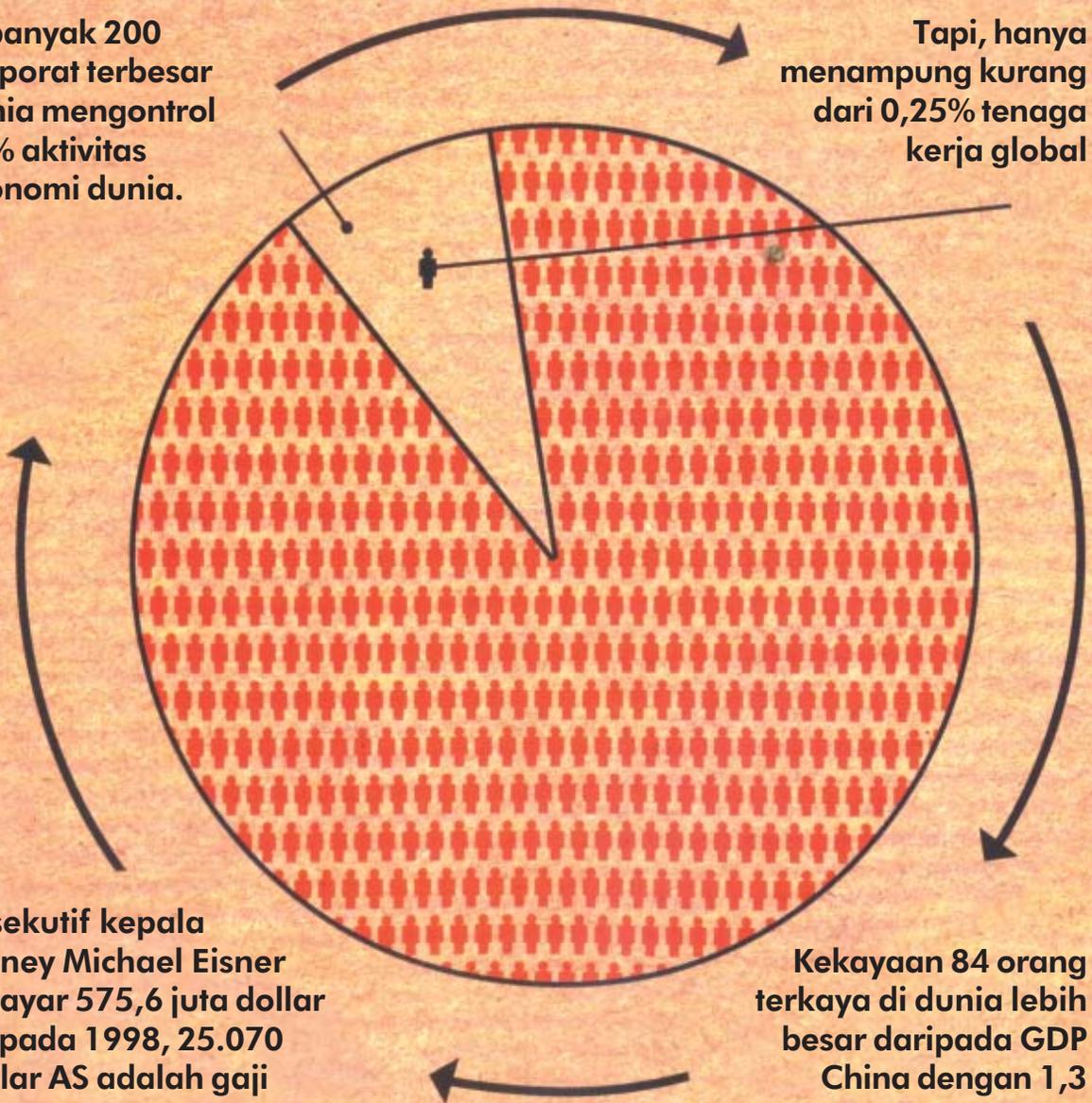
Aktivitas Ekonomi Dunia

Sebanyak 200 korporat terbesar dunia mengontrol 28% aktivitas ekonomi dunia.

Tapi, hanya menampung kurang dari 0,25% tenaga kerja global

Eksekutif kepala Disney Michael Eisner dibayar 575,6 juta dollar AS pada 1998, 25.070 dollar AS adalah gaji rata-rata di Disney.

Kekayaan 84 orang terkaya di dunia lebih besar daripada GDP China dengan 1,3 milyar jiwa.



Berkaca pada Porto Alegre: Mengklaim Kembali Domain Publik

Pengelolaan air di kota Porto Alegre, ibukota Propinsi Rio Grande do Sul di Brasil, satu contoh yang menunjukkan bahwa publik dapat mengambil alih kembali domainnya. Departamento Municipal do Agua e Esgoto (DMAE), perusahaan pengelola air di Porto Alegre, mengalami transformasi ketika Partai Buruh (Partido dos Trabalhadores, PT) meraih suara dalam Pemilu 15 tahun lalu. Setelahnya, DMAE menunjukkan perubahan yang cukup mendasar dalam hal partisipasi dan kontrol publik secara demokratis atas operasi dan investasinya.

Suatu dewan yang terdiri atas perwakilan warga dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan atas kinerja harian perusahaan. Selain itu, keputusan-keputusan mengenai operasi dan investasi DMAE dilakukan berdasarkan proses penganggaran (*budgeting*) yang partisipatif. Seperti sektor-sektor publik lainnya di Porto Alegre, warga menentukan secara langsung prioritas anggaran di dalam perusahaan pengelola air milik publik tersebut. Melalui proses-proses pertemuan publik, setiap warga memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Model partisipasi semacam ini memungkinkan terjaminnya akses air bersih bagi kaum miskin karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penentuan kebijakan dan bisa mendapatkan prioritas. Pada saat ini, 99,5% warga kota Porto Alegre memiliki akses air bersih.



**“Militerisme...
adalah tembok
pelindung utama
kapitalisme.
Jika militerisme tidak
menyokong,
kapitalisme
akan jatuh.”**

Kapal perang Amsterdam milik VOC

Helen Keller

Foto: Dek, WALHI

DEMOKRASI TAK ADA HARAPAN

Dijung timur Nusantara, di satu pulau yang dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat besar namun sebagian besar penduduknya berada di jurang kemiskinan, bercokol raksasa korporasi multinasional pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Saham PTFI dikuasai oleh Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc. (81,28%), satu korporasi multinasional yang berkantor pusat di New Orleans, Amerika Serikat. Rio Tinto, satu raksasa pertambangan Anglo-Australia, menguasai 16,6% saham Freeport McMoRan dan 40% saham di operasi pertambangan PTFI.

Dan bayangkan kekayaan rakyat Papua yang dikuasai oleh korporasi multinasional tersebut: 2,3 sampai 3 milyar ton bijih mineral berharga yang mengandung 1,17% tembaga dan 1,18 ppm (satu bagian persepuluh) emas. Angka tersebut setara dengan 26,9 milyar kilogram sampai dengan 35 milyar kilogram perak, dan 2,7 juta kilogram sampai 3,5 juta kilogram emas. Belum lagi berbagai logam dan mineral berharga lainnya yang kandungannya tidak sebesar emas dan perak namun jenisnya sangat beragam. Melalui sistem Kontrak Karya, pemerintah Republik Indonesia memberikan kuasa penuh kepada PTFI berupa wilayah konsesi seluas 2.160.182 hektar (kira-kira seluas Belgia) yang mencakup wilayah

pegunungan berketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut sampai dengan wilayah pesisir di selatan.

Dan apakah kiranya yang didapat oleh rakyat Papua? Hilangnya gunung-gunung yang merupakan tempat sakral komunitas adat dan danau-danau di pegunungan yang menjadi tempat bersemayamnya arwah para leluhur; tercemarnya sungai-sungai oleh limbah hasil proses pemurnian bijih (tailing); hilangnya sungai di dataran rendah yang dijadikan tempat pembuangan ratusan juta ton tailing; puluhan ribu hektar daratan dan puluhan ribu hektar lautan yang tercemar. Dan daftar ini masih terus berlanjut dengan berbagai catatan kekerasan aparat keamanan negara yang selama puluhan tahun bertindak untuk dan atas nama korporasi melakukan berbagai tindakan represi –penangkapan,



Foto: Dok. WALHI



Foto: Isimeva

Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan proses kapitalisme akan berujung pada kolonialisme. Revolusi kapitalisme di Barat mulai tumbuh sejak kehancuran sistem feodal dan berekspansi secara cepat dan masif melalui sistem pasar kolonial yang lebih besar.

penyiksaan, pembunuhan, penculikan, perusakan harta benda— kepada warga Papua yang bersuara menuntut tindakan yang sewajarnya dari tamu yang sedang bertandang ke rumahnya.⁵

Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan proses kapitalisme akan berujung pada kolonialisme. Revolusi kapitalisme di Barat mulai tumbuh sejak kehancuran sistem feodal dan berekspansi secara cepat dan masif melalui sistem pasar kolonial yang lebih besar. Sistem ini melibatkan hubungan segitiga antara Eropa (pusat manufaktur), Afrika (sumber tenaga kerja), dan 'Dunia Baru' (sumber bahan mentah dan bahan baku) yang me-

ngalami proses ekstraksi dengan biaya semurah mungkin. Akumulasi dari sistem ekonomi semacam ini membantu mempercepat proses industrialisasi di Barat. Proses pencarian "Dunia Baru" sebagai bagian integral dari sistem pasar global pada masa itu mendorong perkembangan kolonialisme korporasi yang juga berfungsi sebagai pembuka jalan bagi kolonialisme negara.

Sejarah penjajahan di Nusantara juga tidak terlepas dari peran dominan korporasi di dalamnya. The Dutch East India Company atau lebih dikenal di Indonesia sebagai VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dibentuk pada 1602 ketika pemerintah Kera-

jaan Belanda memberikan hak monopoli untuk menjalankan aktivitas kolonial di Asia. VOC merupakan korporasi multinasional pertama di dunia. VOC juga merupakan korporasi pertama di dunia yang menjual saham untuk mendapatkan modal. Pada paruh kedua abad ke-17 VOC merupakan

korporasi terkaya di dunia dengan kekayaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kekayaan VOC mencakup 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata berkekuatan 10.000 tentara, dengan pembayaran dividen mencapai 40%.

Swadeshi: Gerakan Melawan Kolonialisme Korporasi

Gerakan Swadeshi sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan India, tak lain strategi ekonomi yang berhasil mengusir penjajahan Inggris dan meningkatkan kondisi perekonomian India. Kaum nasionalis India percaya bahwa penyebab kehancuran ekonomi India sebagian disebabkan oleh kolonisasi Inggris. "Swadeshi" yang berarti "keswadayaan" digambarkan oleh Mahatma Gandhi sebagai "...seruan kepada konsumen agar menyadari bahwa dia juga melakukan penindasan melalui dukungan terhadap industri-industri yang telah mengakibatkan pemiskinan, bahaya terhadap pekerja, umat manusia dan makhluk lainnya".

Gerakan Swadeshi dilakukan antara lain dengan memboikot produk-produk Inggris dan menghidupkan kembali produk-produk lokal yang dihasilkan sendiri serta menghidupkan teknik-teknik produksi yang ditemukan oleh warga setempat. Swadeshi sebagai strategi merupakan fokus utama dari Mahatma Gandhi, yang menyebutnya sebagai jiwa dari *Swaraj* (penguasaan diri).

Gerakan Swadeshi juga memfokuskan gerakannya pada pemberdayaan desa atau kampung. Sebagaimana diucapkan oleh Mahatma Gandhi: "India sejatinya tidak ditemukan di beberapa kota yang ada, tetapi pada 700.000 lebih kampung yang ada di India. Bila kampung-kampung tersebut hancur, maka India juga akan hancur".



KAMUFLASE KORPORASI HIJAU

SALAH satu cara yang dipakai oleh korporasi untuk meluaskan pasarnya dan meningkatkan dominasinya atas ekonomi global adalah dengan melakukan praktik-praktik kehumasan dan kamufalse hijau (*greenwash*). Dalam banyak kesempatan korporasi menggambarkan dirinya sebagai “sahabat lingkungan” serta “penyelamat kaum miskin”.

Strategi kamufalse hijau juga digunakan oleh korporasi untuk menjawab berbagai kritik yang dialamatkan kepadanya. Alih-alih melakukan perbaikan secara sungguh-sungguh atas berbagai kinerja operasinya, korporasi memilih mengeluarkan dana jutaan dollar dan meminta konsultan kehumasan menyiapkan berbagai kemasan iklan dan kampanye untuk menutupi berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh operasinya.

Menjelang dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Pembangunan Berkelanjutan pada 2002, korporasi dan kelompok-kelompok lobi mereka telah memperbaiki keterampilan kamufalse hijau mereka dan berusaha meyakinkan pemerintah serta badan-badan global lainnya agar terus dapat mendominasi pasar global. Transformasi image dan peran dari industri (terutama MNC) dilakukan untuk membajak agenda-agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dicetuskan pada

“Ketika mesin-mesin dan komputer-komputer, motif-motif keuntungan dan hak-hak kepemilikan lebih penting ketimbang manusia; tiga kekuatan raksasa rasisme, militerisme, dan eksploitasi ekonomi tidak akan bisa dihentikan. Revolusi nilai-nilai sesungguhnya kemudian hari akan menyebabkan kita bertanya tentang keadilan dari banyak kebijakan politik yang kita putuskan hari ini.”

Martin Luther King, Jr

pejuang kemanusiaan dan antirasialisme

KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Propaganda sistematis ini dilakukan oleh korporasi secara terus menerus sehingga akhirnya publik percaya bahwa korporasi

memang memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan melupakan kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari masalah.

Upaya pembajakan agenda pembangunan berkelanjutan ini dimulai pada tahun 1990, ketika seorang industriawan Swiss, Stephan Schmidheiny, membentuk Forum Bisnis bagi Pembangunan Berkelanjutan (*Business Council for Sustainable Development, BCSD*). Selanjutnya Schmidheiny berhasil meyakinkan 48 pemimpin bisnis dari korporasi-korporasi besar dunia untuk

Dari lubuk hati kami yang paling dalam

Terima Kasih Indonesia

Syukur kami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kerja keras dan dukungan semua, kami telah meraih sejumlah prestasi dan penghargaan di bidang sosial dan lingkungan




Iklan Riaupulp di Tempo

Foto: Repro Tempo



With current technology, one acre of soybeans yields 60 gallons of cleanburning biodiesel fuel.

Why biodiesel from CPO could soon replace conventional diesel: bigger part of the energy mix. That's the reason Chevron is investing millions to help build one of the first large-scale biodiesel plants in the world.

Iklan Cevron di majalah internasional

Chevron
Human Energy

Foto: Repro Time

bergabung dan mengembangkan WBCSD. Korporasi-korporasi ini, bersama dengan Kamar Dagang International (*International Chambers of Commerce, ICC*) dengan suksesnya mempromosikan agenda pasar bebas, teknologi baru, dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. BCSD merupakan salah satu sponsor utama yang ikut mendanai KTT Bumi tahun 1992.

Walau berusaha menunjukkan berbagai niat baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan, WBCSD dan ICC tidak dapat

menyembunyikan wajah mereka yang sebenarnya terkait dengan konferensi-konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, Bahan Beracun Berbahaya, serta isu-isu yang terkait dengan krisis ekologi global. WBCSD dan ICC secara sistematis melakukan lobi untuk menghambat ditetapkannya berbagai aturan global yang lebih efektif. Yang menjadi prioritas utama mereka adalah

mempertahankan aturan-aturan ekspansi perdagangan dan investasi global yang bersifat pro-bisnis.

Dan wajah sejati korporasi nampak dengan jelas ketika praktik-praktik pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup, pelecehan hak-hak pekerja, serta pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung di seluruh dunia.



Lumpur panas dampak kecerobohan PT Lapindo Brantas menggenangi pemukiman di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur

EARTH FIRST!



No Compromise in the Defense of Mother Earth!

Merdeka dari Belenggu Propaganda

STRATEGI aksi langsung menantang asumsi (*direct action at the point of assumption*) ini menargetkan mitos-mitos, kebohongan, argumen irasional serta propaganda sistematis yang digunakan oleh korporasi untuk melanggengkan pengambilalihan diam-diam (*silent take over*) cara berpikir kita. Aksi semacam ini bermain di wilayah ide dan gagasan, di mana tujuan utamanya adalah mengekspos logika yang salah kaprah dan menawarkan cara pandang baru. Aksi langsung di aras ini salah satu alat untuk mendekolonisasi cara berpikir kita yang selama ini terhegemoni oleh propaganda korporasi yang sistemik.

Aksi pertama yang dilakukan oleh jaringan ekologi radikal Earth First! satu contoh yang bagus untuk menggambarkan bagaimana aksi langsung menantang asumsi ini dilaksanakan. Pada 1981, ketika banyak kelompok konservasi berkampanye menentang pembangunan bendungan baru, Earth First! memasang spanduk raksasa pada tembok bendungan Glen Canyon yang menggambarkan retakan pada dinding dam tersebut. Simbol yang sangat sederhana ini mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada kelompok-kelompok lainnya bahwa menghadang pembangunan dam baru tidaklah cukup. Kampanye harus dilakukan untuk membongkar dam-dam yang ada dan melakukan restorasi sungai menjadi seperti kondisi alamnya semula.

Dalam paradigma industri yang mendominasi alam, pertanyaan tentang pembongkaran dam raksasa merupakan satu hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Aksi tersebut kemudian menantang asumsi yang ada dan membuka ruang politik bagi wacana baru untuk mendorong agenda tersebut. Dua dekade berikutnya, di akhir 1990-an, pemerintah Amerika Serikat ternyata benar-benar melakukan pembongkaran dam tersebut.



Aksi Earth First! di Portland



Menolak pembakaran batubara

Foto: Dok. WALHI

Foto: Dok. WALHI



AKUNTABILITAS KORPORASI

BANYAK pemimpin negara menyadari bahwa globalisasi harus mendukung upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Suatu kerangka legal yang mengatur akuntabilitas (tanggung gugat) korporasi multinasional merupakan aspek penting dalam rangka mendorong agenda pembangunan berkelanjutan agar benar-benar dapat terwujud.

Pertumbuhan korporasi multinasional berskala global secara cepat dan masif yang lintas batas negara telah menyulitkan komunitas-komunitas lokal yang berusaha menuntut tanggung gugat korporasi. Korporasi multinasional dalam hal ini dapat “berwajah ganda” sehingga sulit bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menentukan “kewarganegaraan” dari korporasi yang bersangkutan dan mengajukan tuntutan tanggung gugat terhadapnya.

Dari waktu ke waktu, korporasi multinasional mengkonsolidasikan kekuasaan dan pengaruhnya kepada pemerintah dan politikus lokal dan nasional. Dengan kondisi tersebut, sulit terwujud keadilan dari sistem lokal dan nasional yang diharapkan oleh komunitas yang berusaha menuntut tanggung gugat korporasi melalui mekanisme legal nasional yang ada.

Menjawab tuntutan adanya kerangka legal bagi tanggung gugat korporasi, PBB

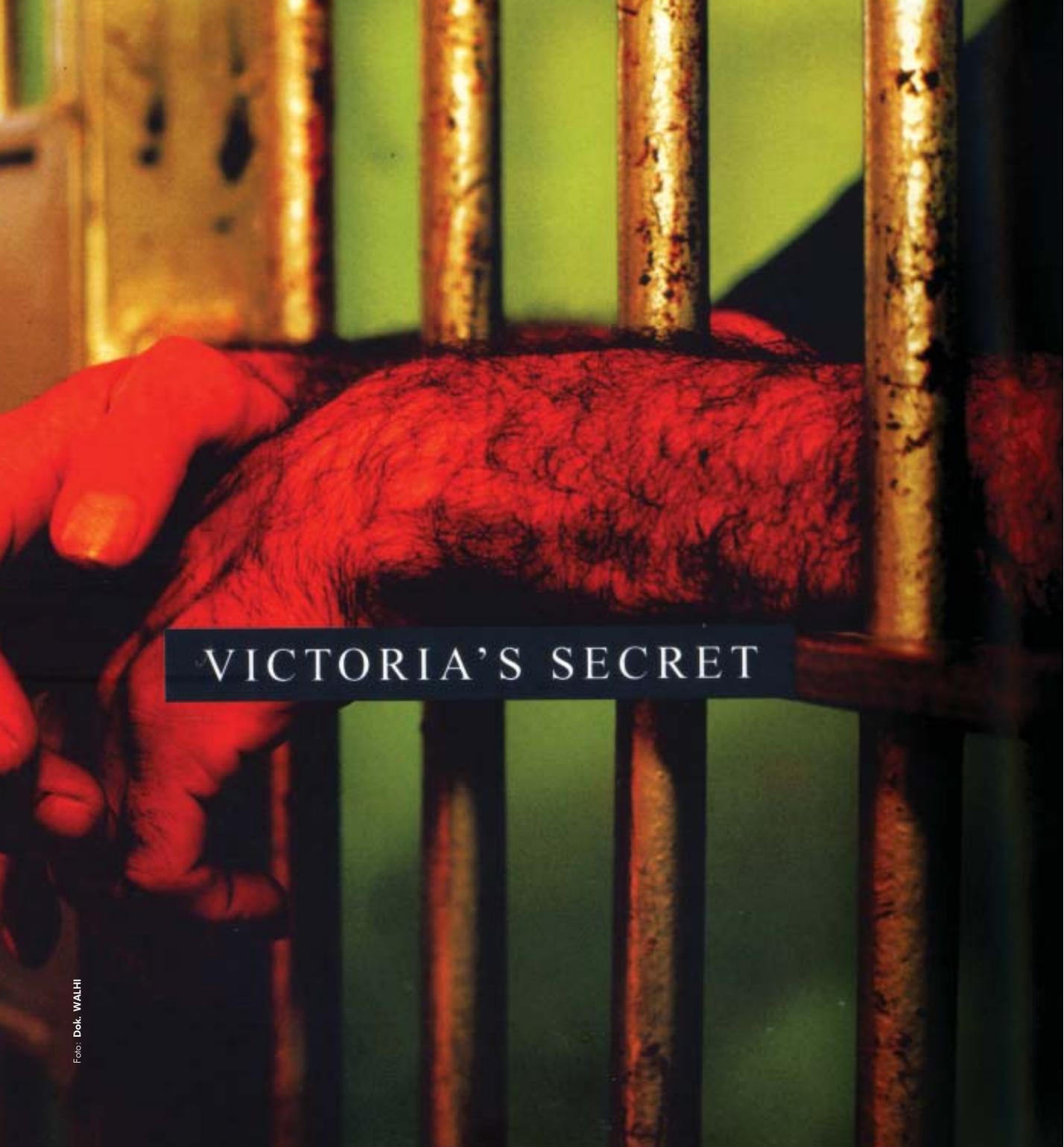
“Kita hidup di dunia benda, dan hubungan kita dengan benda itu bahwa kita tahu cara memanipulasi atau mengkonsumsi mereka.”

Erich Fromm

Filsuf dan psikoanalisis Jerman kelahiran Amerika, 1900-1980

yang dipengaruhi oleh kelompok lobi korporasi lebih memilih untuk mengambil strategi yang didasarkan pada inisiatif sukarela dari korporasi. UN Global Compact diciptakan untuk mendukung proses menuju inisiatif sukarela korporasi. Beberapa inisiatif regional lainnya juga dikembangkan yang kesemuanya merupakan mekanisme sukarela yang tidak menyediakan sarana dan mekanisme tanggung gugat secara hukum yang mengikat.⁶

Sementara itu kelompok-kelompok bisnis mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam praktiknya, CSR lebih upaya kehumasan korporasi yang memfokuskan upaya-upayanya pada aktifitas-aktifitas karitatif dan tidak menjawab problem mendasar yang menjadi keprihatinan utama kelompok-kelompok komunitas dan masyarakat madani lainnya.



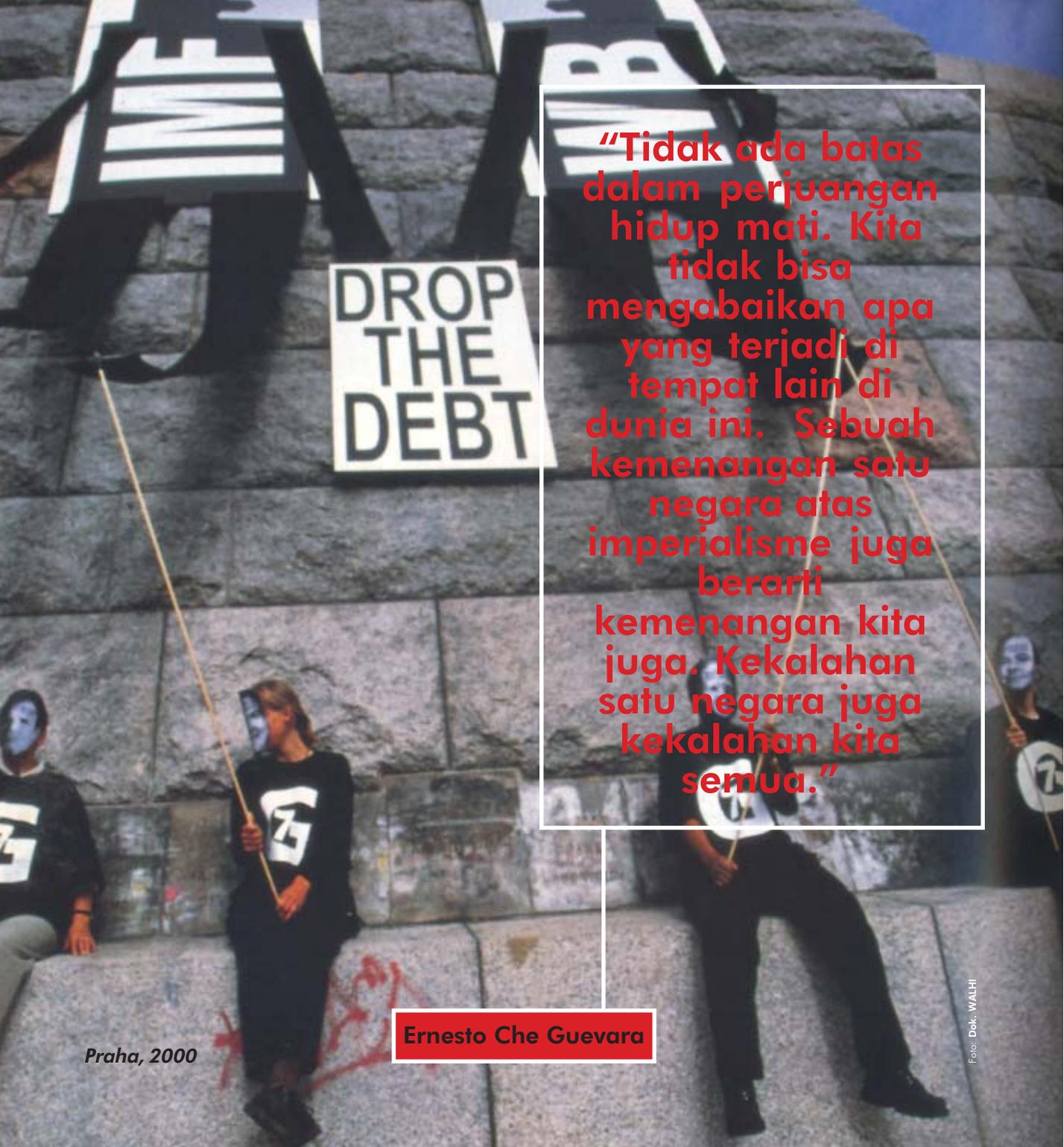
VICTORIA'S SECRET

JC Penny, Victoria's Secret, IBM, Toys R Us, dan TWA adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang mendapatkan keuntungan dengan memerkerjakan para tahanan. Para tahanan yang dikenai hukuman penjara panjang untuk kesalahan penggunaan drug dalam skala kecil, sangat bias rasisme, dan **penjara-penjara dijalankan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.** Penjualan buruh-buruh murah ke perusahaan-perusahaan, pengenaan tarif untuk tempat tidur dan kamar tahanan, maka kamu akan mendapati sebuah sistem modern **pekerja terbelenggu – sebuah kondisi sosial yang disebut juga sebagai perbudakan.**



**Semua sudah tandas.
Negara tak punya apa-apa lagi.
Kita hanya budak dan harus
menanggung utang
yang tak kita nikmati.
Republik kita telah tergadai.
Inilah kisah kebangkrutan
sebuah negeri di khatulistiwa.**

**GLOBALISASI
DAN LINGKUNGAN HIDUP**



“Tidak ada batas dalam perjuangan hidup mati. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di tempat lain di dunia ini. Sebuah kemenangan satu negara atas imperialisme juga berarti kemenangan kita juga. Kekalahan satu negara juga kekalahan kita semua.”

Praha, 2000

Ernesto Che Guevara

BAYANGKAN Indonesia sebuah rumah tangga. Dan, bayangkan anggaran negara adalah anggaran keluarga. Kita akan tahu Indonesia adalah rumah tangga yang bangkrut.

Dan jika kita bangkrut secara finansial sangat mungkin kita juga bangkrut secara sosial, moral dan lingkungan (*enviromental*).

Jangan silau pada mobil-mobil mewah yang berseliweran di sela-sela gedung perkantoran mentereng Jakarta. Jangan pula percaya begitu saja pada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dipaparkan presiden dan para menterinya. Angka-angka itu mengecoh.

Saatnya mengakui, Indonesia adalah salah satu negeri pengutang terbesar di dunia. Dan makin hari, makin besar jumlah utang kita, serta makin berat beban yang harus kita tanggung. Setiap tahun Indonesia harus menyisihkan makin banyak dana untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Anggaran untuk membayar utang mengalahkan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, untuk membiayai pendidikan dan kesehatan rakyatnya, untuk membiayai pemberantasan kemiskinan, serta untuk membiayai pemeliharaan lingkungan alamnya.

Lebih buruk dari itu. Seperti keluarga yang terjerat utang kepada rentenir, Indonesia kehilangan baik martabat, kendali maupun kedaulatannya untuk mengurus diri-

sendiri. Ada banyak cerita di dunia nyata tentang bagaimana seorang ayah rela melakukannya apa saja, termasuk menjual anak gadisnya, karena jeratan utang yang menggunung. Analogi ini persis bisa diterapkan pada Indonesia.

Demi membayar utang, para pejabat negara melakukan apa saja tanpa banyak pikir. Menjual murah perusahaan negara yang strategis dan sensitif seperti Indosat. Menjual murah nasib puluhan jutaan rakyatnya dengan mencabut subsidi sosial dan bahan bakar seperti belum lama ini dilakukan. Menjual murah aturan hukum dan perundangan—hukum perburuhan, pertanahan, lingkungan, bahkan hukum yang melindungi hak asasi manusia—demi memikat investor swasta asing maupun domestik.

Besarnya beban pembayaran utang dan terlalu sedikitnya dana serta subsidi pembangunan, khususnya pembangunan sosial, telah memperparah problem kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Makin miskin negara dan bangsa, makin sulit bangkit secara ekonomi dan makin besar utangnya. Bahkan untuk membayar utang kini kita harus menambah utang baru. Indonesia sudah masuk ke "*debt trap*", terjerat dalam lingkaran setan utang terus-menerus yang membawa konsekuensi makin buruk bagi rakyatnya.

Terlalu Besar untuk Diampuni

TAHUN 2006 lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) setuju menghapuskan utang 19 negara miskin yang totalnya mencapai US\$ 3,3 miliar. Dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar.

Negara miskin yang utangnya diampuni: Benin, Bolivia, Burkina Paso, Kambodia, Ethiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mozambik, Nikaragua, Niger, Rwanda, Sinegal, Tajikistan, Tanzania, Uganda dan Zambia.

Negeri-negeri itu dinilai punya beban utang terlalu berat sehingga kemungkinan kecil bisa bangkit, bahkan untuk memberi makan atau layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi rakyatnya. Seperti apakah negeri yang bisa dikategorikan "sulit bangkit" itu?

IMF mengelompokkan negeri yang dihapuskan utangnya ke dalam kategori HIPC (*heavily indebted poor countries*). Mereka adalah negeri yang rasio utang terhadap eksportnya lebih besar dari 150% dan rasio pembayaran bunga utangnya terhadap ekspor lebih besar dari 15%.

Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori itu. Rasio Indonesia untuk dua indikator tadi bahkan lebih buruk dari rata-rata negeri HIPC. Pada 1998, rasio utang Indonesia terhadap eksportnya mencapai 252% dan rasio bunga utang terhadap

ekspor mencapai 33%. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata separuh pengeluaran pemerintah pusat dipakai untuk membayar utang.

Pada 2006, total pembayaran utang luar dan dalam negeri mencapai Rp 166,64 triliun. Tidak ada negeri yang proporsi pembayaran utangnya terhadap anggaran tahunan seberat Indonesia.

Tapi, Indonesia anehnya tidak masuk kategori negeri yang utangnya bisa dihapuskan. Meski Bank Dunia dalam laporan "*Global Development Finance 2000 dan 2001*" memasukkan Indonesia ke klasifikasi negeri termiskin, yakni SILIC (*severely indebted low income countries*), Indonesia dikeluarkan dari daftar negeri yang diusulkan utangnya dihapuskan. Alasannya? Badan-badan keuangan dunia menilai jumlah utang Indonesia terlalu besar untuk bisa diampuni, yang jika dilakukan bakal membuat rugi para kreditor, yakni negeri-negeri maju.

Total utang 19 negara yang diampuni tadi hanya 5% dari utang luar negeri Indonesia. Boleh jadi Indonesia adalah negeri miskin yang sombong dan tidak pernah belajar dari kemiskinannya.

Utang Negara yang Menggantung

PADA 1967, utang pemerintah Indonesia hanya 2 miliar dollar AS (atau hanya Rp 2 triliun, dengan nilai dollar AS kala itu setara Rp 1.000). Selama Orde Baru dan Orde Reformasi, Indonesia terus menumpuk utang makin besar, yang pada 2005 nilainya mencapai Rp 1.282 triliun atau sekitar 130 miliar dollar AS.

Sebelum Krisis Ekonomi 1997, Pemerintah Indonesia tidak punya utang domestik dalam valuta rupiah. Namun, setelah menerbitkan obligasi dalam negeri untuk membiayai penyelamatan dunia perbankan, pemerintah berutang baru Rp 658 triliun.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran

utang asing maupun domestik sekitar 50% dari anggaran, dan 60% dari pendapatan pajak, atau 52 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada 2004, pemerintah setuju membayar seluruh cicilan pokok dan bunga utang luar negeri senilai Rp 68,8 triliun (US\$ 6,8 miliar). Pada tahun berikutnya, Indonesia mengalokasikan Rp 71,98 triliun (US\$ 7,1 miliar) untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri.

Pada 2006 pemerintah harus membayar angsuran pokok dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 91,71 triliun dan Rp 74,93 triliun utang dalam negeri. Total utang harus dibayar sebesar Rp 166,64 triliun.

**“Jika kamu hanya bisa
menghadiahi satu hal
pada anak-anak, maka
hadiahkanlah
semangat hidup.”**

Bruce Barton



Sekolah dasar di pedalaman Kalimantan

Privatisasi: Perlombaan ke Dasar Sumur

DANA publik (negara) yang tersedia untuk pembangunan makin sedikit akibat beratnya beban pembayaran utang. Itu membuat ketergantungan pemerintah kepada investor swasta makin besar.

Pengusaha dan pemodal swasta, baik asing maupun domestik, diundang dan dipikat untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, layanan air minum dan perumahan rakyat yang semuanya dulu dipandang merupakan sektor publik dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya.

Dari sinilah muncul gagasan tentang privatisasi. Dan privatisasi menuntut deregulasi. Privatisasi menuntut penyusutan peran dan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak ekonomi-sosial masyarakatnya, khususnya masyarakat yang termiskin.

Swasta berorientasi pada laba, dan pemerintah harus menawarkan iming-iming yang menarik agar pengusaha dan investor mau menanam modalnya ke sektor-sektor publik tadi.

Iming-imingnya tidak hanya keringanan pajak. Tapi juga mempermudah perizinan, memperluas konsesi monopolistik, melonggarkan sanksi dan aturan, termasuk aturan pelestarian lingkungan. Artinya, menuntut pemerintah melonggarkan aturan dan menurunkan standar perlindungan kepada masyarakatnya.

Dalam rangka memikat investor, peme-

"Sepuluh orang Indonesia meninggal setiap hari akibat kemiskinan"

Sujana Royat

Deputi Menko Kesra
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

rintah juga memberi wewenang swasta memasang tarif "sesuai pasar" bagi setiap produk dan jasa yang dijual kepada publik, yang seringkali terlalu lebih mahal dan membuat orang miskin sulit mendapatkannya. Indonesia tidak sendirian dalam persaingan memikat investor. Banyak negara kini berlomba untuk menarik investasi yang jumlahnya makin sedikit.

Dengan jumlah utang yang kelewat besar dan sangat dahaga akan dana untuk pembangunan, Indonesia punya tantangan lebih besar dibanding banyak negara Asia lain dalam memikat investor. Tawaran Indonesia harus sangat menarik. Akibatnya jelas: makin rendah standar dan kualitas sosial-ekonomi rakyatnya, serta makin rendah pula kualitas lingkungan hidupnya.

"A beggar can't choose". Seorang pengemis tidak punya banyak pilihan, bahkan tidak berhak memilih.

Indonesia mungkin masih memiliki wilayah dan batas fisik yang jelas, dari Sabang sampai Merauke. Tapi, negeri ini sudah bukan lagi milik kita. Indonesia seisinya sudah tergedai.

3 FRENCH

4 R

“Utang adalah kemiskinan terparah”

Foto: Dok. WALHI

HAIRMAN

*Suharto di PBB
New York,
1970-an*

DARI MANA DATANGNYA UTANG?

KORUPSI, kolusi dan nepotisme adalah salah satu penyakit serius Indonesia dan merupakan salah satu faktor yang membuat negeri ini berutang besar. Namun, ketergantungan pada utang yang terus membesar juga dipicu oleh strategi pembangunan ekonomi yang keliru dan didiktekan badan-badan keuangan internasional seperti IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia.

Pada 1967, sebentar setelah jatuhnya Presiden Soekarno, Indonesia bergabung dengan IMF. Langkah ini merupakan syarat

pinjaman dan bantuan yang diberikan lembaga itu untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang rusak sepeninggal Soekarno.

Sejak itu, Indonesia berada di bawah kendali Inter-Governmental Group on Indonesia atau IGGI (belakangan diubah jadi The Consultative Group on Indonesia atau CGI), sebuah badan yang berisi semua negeri dan lembaga keuangan Barat, termasuk IMF. Badan asing itu memutuskan berapa besarnya utang yang dikucurkan, namun lebih dari itu, memiliki wewenang menyetujui neraca anggaran Indonesia (belanja negara tak boleh lebih dari 10% terhadap PDB) dan mendiktekan arah kebijakan ekonomi negeri ini.

Lewat para ekonom dan menteri yang

kemudian dikenal sebagai "Kelompok Mafia Berkeley", IMF dan Bank Dunia antara lain mengarahkan Indonesia menjadi negeri produsen barang ekspor atau yang dikenal dengan "*export-led growth development*". IMF dan Bank Dunia juga menarik Indonesia lebih jauh untuk menerapkan konsep ekonomi makin liberal yang dicirikan antara lain oleh privatisasi dan deregulasi.

Sejak itu standar kehidupan masyarakat Indonesia memang membaik, kemiskinan menurun secara drastis, dan pendapatan per

Magnus Gottfried Lichtwer

Penulis Jerman

kapita terus meningkat, meski semua ini ditopang oleh utang. Namun, bahkan utang tadi tidak dinikmati secara merata oleh rakyat Indonesia.

Barat menilai Indonesia patut menjadi contoh sukses pembangunan ekonomi, kandati secara politik Orde Baru di bawah Soeharto berwatak represif dan korup. Negara-negara kreditor, bank serta lembaga keuangan internasional sangat senang menawarkan pinjaman baru terus-menerus yang pada akhirnya membuat Indonesia kian tergantung pada utang.

Jumlah utang luar negeri meningkat tajam menjelang akhir pemerintah Soeharto.

A black and white photograph of a newborn baby lying in a hospital bed. The baby's hands are held up in the air. The text is overlaid in red on the image.

**Setiap bayi
yang baru lahir
di Indonesia
telah terbebani
utang
sebanyak
Rp 7,3 juta.**

Hanya dalam tempo lima tahun (1991-1995), utang luar negeri Indonesia melonjak 50% dari US\$ 72 miliar menjadi US\$ 107 miliar.

Pinjaman bahkan masih terus diberikan meski Bank Dunia tahu bahwa dalam jumlah cukup besar pinjaman itu hilang ke liang korupsi. Dalam sebuah laporannya setelah kejatuhan Soeharto, Bank Dunia mengatakan sekitar 30% dari pinjamannya ke Indonesia telah dikorupsi.

Besarnya utang tidak dinikmati secara merata oleh rakyat Indonesia. Meski angka kemiskinan absolut turun menjadi sekitar 20% pada dasawarsa 1990-an, sekitar separoh penduduk Indonesia hanya berada sedikit saja di atas garis kemiskinan. Hampir 100 juta orang mudah tergelincir menjadi miskin akibat guncangan inflasi sedikit saja, apalagi setelah Krisis 1997.

**Badan Dunia untuk Anak-Anak
(Unicef)**

Foto: Dek. Walhi





Kerusahan besar melanda Jakarta 13-14 Mei 1998: penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan. Ratusan orang, mungkin ribuan, tewas terpenggang di pusat-pusat pertokoan yang sengaja dibakar.

RESEP BERACUN BANK DUNIA DAN IMF

K **RISIS** ekonomi 1997, tidak hanya menciptakan inflasi yang memicu pengangguran dan proses pemiskinan. Krisis ini menambah jumlah utang Indonesia bengkak lebih besar lagi melalui beberapa cara.

Pertama, Indonesia harus berutang lebih banyak untuk memulihkan diri dari krisis. utang luar negeri bertambah menjadi US\$ 144 miliar pada 1998.

Kedua, penambahan jumlah utang diikuti dengan memberatnya beban pembayaran utang akibat jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar. Utang dibayar dalam bentuk dolar yang nilainya naik lima kali lipat dari sebelum krisis.

Ketiga, pemerintah Indonesia membiayai dunia perbankan yang kolaps dengan cara menerbitkan surat utang (obligasi). Meski obligasi ini dalam bentuk rupiah dan diterbitkan hanya di Indonesia, jumlahnya sangat besar: Rp 600 triliun. Rakyat, lewat pemerintah, harus membayar utang domestik ini baik pokok maupun bunganya.

Pada 1998, Indonesia menandatangani paket keuangan darurat, pinjaman US\$ 43 miliar. Pemerintah Indonesia menyediakan diri untuk menjalankan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program* SAP) yang meliputi liberalisasi perdagangan dan merestrukturisasi sektor kehutanan. Paket itu

“Selama bertahun-tahun, negara-negara kaya dan lembaga-lembaga kantong mereka seperti Bank Dunia dan IMF melemparkan batu ke negara-negara miskin, meminta mereka untuk membayar hutang.”

Andrew Simms

Ketua Program Ekonomi Global
di New Economics Foundation

juga menuntut penghapusan subsidi sosial pada bahan bakar dan makanan, menyebabkan kesulitan besar bagi orang miskin, menciptakan kekacauan sosial.

Krisis yang terjadi pada 1997 tidak bisa dipisahkan dari resep-resep kebijakan IMF dan Bank Dunia yang keliru di masa lalu.

Di samping menutup mata terhadap korupsi Orde Baru, IMF dan Bank Dunia terus menekan Indonesia untuk makin jauh terlibat dalam ekonomi berbasis pasar. Pada pertengahan 1980-an, misalnya, IMF dan Bank Dunia mendesakkan deregulasi (liberalisasi) perbankan yang sangat berisiko dengan membuka seluas-luasnya sistem perbankan tanpa ada proteksi dan kontrol.

Akibat deregulasi, jumlah bank swasta meningkat tajam seperti cendawan musim hujan. Kebijakan ini telah membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap bencana finansial yang kemudian memang terjadi pada 1997.

Ketika krisis memagut, pada Oktober 1997, tanpa pertimbangan masak IMF berbalik arah: meminta Bank Indonesia menutup 16 bank. Pemerintah tak bertanggungjawab ini memberi pukulan telak kepada seluruh bank. Dan pemerintah, lewat Bank Indonesia, dipaksa menyelamatkan situasi. Dengan menerbitkan obligasi rekap, pemerintah menambah utang baru sebesar Rp 600 triliun untuk menyuntik modal bank-bank itu, termasuk bank-bank swasta milik konglomerat.

Pemerintah Indonesia kini memiliki utang luar negeri yang besar dan utang dalam negeri yang sama besarnya. Dengan dua beban itu, Indonesia sangat rawan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Setiap guncangan ekonomi dunia potensial memperlemah rupiah dan sekaligus inflasi meningkat, yang keduanya bisa membuat pembayaran utang pemerintah meningkat secara berlipat-lipat.

Besarnya pembayaran utang luar negeri dipengaruhi oleh nilai rupiah. Jika rupiah jatuh maka beban utang luar negeri otomatis meningkat. Sementara besarnya pembayaran utang domestik tergantung pada tingkat suku bunga. Jika suku bunga meningkat akibat inflasi, seperti setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar belum lama ini, maka beban pembayaran otomatis meningkat.

Untuk mencapai kestabilan fiskal, pemerintah harus menjalankan surplus primer. Konsekuensinya pemerintah harus menyunat pengeluaran, termasuk menghapus subsidi dan memangkas dana pembangunan, meningkatkan pendapatan lewat pajak (yang juga memberatkan rakyat) serta meminta tambahan utang baru. Gali lubang tutup lubang.



Suharto menyatakan berhenti dan menyerahkan kekuasaan pada Habibie, serta meninggalkan hutang segunung

Foto: Antara

Bank Dunia Mengaku Bersalah

PADA Oktober 1998, sebuah laporan inter Bank Dunia menyebutkan “setidaknya 20%-30% dari dana pembangunan Indonesia masuk ke dalam kantong staf dan politisi Indonesia tanpa bisa dipertanggungjawabkan.”

Beberapa bulan kemudian, pada Februari 1999, Bank Dunia mengeluarkan laporan pengakuan dosa: para staf lembaga keuangan itu tidak berusaha mencegah—justru ikut berkolusi—dalam korupsi Rezim Orde Baru.

Selama 32 tahun pemerintahannya, Soeharto menerima US\$ 25 miliar pinjaman Bank Dunia. Dan selama itu pula, Bank Dunia selalu membuat pujian terhadap situasi ekonomi Indonesia yang disebutnya sebagai “keajaiban Asia”.

Para staf Bank Dunia di Jakarta, menurut laporan tadi, berusaha memoles citra keajaiban Indonesia terlalu lama demi menjaga hubungan baik dengan salah satu klien terbaiknya.

Atau mungkin, kata laporan itu lagi, staf Bank Dunia terlalu bersemangat untuk menunjukkan prestasi dirinya dengan membuat penilaian bagus terhadap kerja mereka di Indonesia.

Para staf Bank Dunia memegang peran kunci dalam setiap kebijakan ekonomi Indonesia, negeri yang “secara luas dipersepsi-



Foto: Dok. WALHI

kan dalam lingkungan Bank Dunia sebagai keajaiban dan simbol sukses lembaga itu.”

Dengan kantor perwakilan yang besar, staf Bank Dunia sebenarnya memiliki akses yang mudah ke pejabat senior yang biasanya menyiapkan catatan kebijakan rahasia sehingga semestinya mereka bisa memiliki peran untuk mencegah korupsi. Tapi, itu tak dilakukan.

Melaporkan korupsi hanya akan merusak reputasi Bank Dunia di Indonesia, sehingga para staf enggan “melihat secara teliti model pembangunan Indonesia.”

Manajemen Bank Dunia cenderung mengumbar pepujian terus-menerus terhadap kinerja pemerintah Indonesia dan secara signifikan mendukung munculnya rasa puas diri serta sikap toleran terhadap penyelewengan. Hasilnya: korupsi terus menjadi problem di Indonesia.

A photograph of a man sitting on the ground next to a car, looking distressed. He is wearing a hat and is shirtless. The car is a dark-colored sedan with a license plate that reads "B 1080 LI". In the background, there is another car, a silver SUV, with a license plate that reads "B 1371 UD". The scene is set outdoors, possibly on a street or parking lot. The overall tone is somber and highlights social inequality.

“Pemerintah memilih memuaskan kreditor daripada melindungi belanja sosial masyarakat”

Kusfiardi

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU)

BENALU YANG TAK MAU PERGI

DIBAYANGI kurangnya dana pembangunan, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menambah utang baru secara signifikan. Sepanjang 2005, pemerintah menerbitkan obligasi internasional (dalam bentuk dolar) senilai Rp 25 triliun, dan ditambah obligasi serupa senilai Rp 25 triliun lagi pada 2006.

Utang kepada bank dan kreditor internasional lain juga bertambah, meski penambahannya kecil. Pada awal 2006 ini, Asian Development Bank (ADB) menyetujui utang baru sebesar US\$ 50 juta (atau Rp 0,5 triliun) yang akan dipakai untuk menyelenggarakan program infrastruktur pedesaan miskin.

Jika saja tidak membayar cicilan dan pokok sebesar Rp 170 triliun pada 2006, Indonesia bisa membiayai program pemberantasan kemiskinan jauh lebih besar dari pinjaman ADB tadi. Tanpa berutang baru, Indonesia bahkan sebenarnya bisa membiayai peningkatan anggaran sosial sebanyak 6% dari PDB seperti yang pada 2004 diusulkan UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan). Indonesia adalah salah satu negeri dunia yang anggaran sosialnya untuk pendidikan dan kesehatan sangat kecil: yakni 3%.

Meski Soeharto telah lama jatuh, kebijakan penanganan utang tidak berubah.



Foto: Dok. WALHI

John Howard dan SBY

Pemerintah tetap memilih menambah utang baru ketimbang meminta pengurangan utang. Tradisi gali lubang tutup lubang masih lestari.

Para elit Indonesia memilih untuk menambah utang baru ketimbang meminta pemotongan utang. Lingkaran setan utang ini lestari karena adanya semacam simbiosis mutualisme antara kaum elit Indonesia, yakni ekonom dan politisinya, dengan para pejabat keuangan dunia seperti Bank Dunia serta IMF.

Kaum elit Indonesia menginginkan jalan pintas mendapatkan dana pembangunan, yang sebagian bisa dikorup. Mereka patuh melaksanakan resep pembangunan ala IMF/Bank Dunia meski tahu resep itu beracun.

Di ujung lain, lembaga keuangan dunia membutuhkan "customer" patuh seperti Indonesia. Dengan utangnya yang besar, Indonesia dikenal sebagai klien utama, dan

selalu setia membayar utang tak peduli berapa ongkos yang diharuskan ditanggung publik.

Ini juga simbiosis yang tidak demokratis, sekaligus anomali dalam era reformasi Indonesia belakangan ini. Meski dalam aspek lain telah tersentuh keterbukaan politik, perundingan-perundingan tentang utang dan apa konsekuensinya terhadap nasib jutaan orang tidak pernah menjadi perdebatan publik yang transparan. Perundingan tentang utang tetap terbatas di kalangan elit.

Simbiosis mutualisme itu menjadi parasit bagi publik. Utang akhirnya menjadi sarana eksploitatif baik bagi kaum elit Indonesia maupun bagi lembaga keuangan negara maju. Beberapa studi menunjukkan bahwa alih-alih membantu negeri miskin seperti Indonesia, mekanisme utang justru telah lebih banyak menyedot sumber daya ke negeri-negeri Barat dan Utara. Kolonialisme belum hilang meski banyak negara di Asia maupun Afrika telah secara formal merdeka.

Dalam konteks Indonesia, eksploitasi itu dimungkinkan oleh kepatuhan yang nyaris total ekonom dan politisi Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan dunia, seperti IMF dan Bank Dunia. Padahal, di banyak belahan dunia lain, gelombang kritik terhadap lembaga keuangan dunia ini sedang mengalami pasang naik.

IMF dan Bank Dunia tidak hanya dipandang eksploitatif dalam soal utang negeri berkembang. Dua lembaga itu dinilai menyebarkan resep pembangunan, yakni



Foto: Henry Lupulian

neoliberalisme di bawah dalih globalisasi, yang implikasinya merusak. Bersama WTO dan forum seperti World Economic Forum, dua lembaga itu dituduh sebagai penyebab ketimpangan dunia yang makin lebar, proses pemiskinan, eksploitasi dan kerusakan lingkungan dalam derajad serius.

Inti Pandangan Neoliberalisme

PASAR YANG BERKUASA

Mempreteli peran dan kewajiban pemerintah, serta membebaskan perusahaan "swasta" dari setiap ikatan yang dikenakan oleh pemerintah tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang bisa disebabkan.

PANGKAS ANGGARAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL

Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, semua itu atas nama pengurangan peran negara.

DEREGULASI

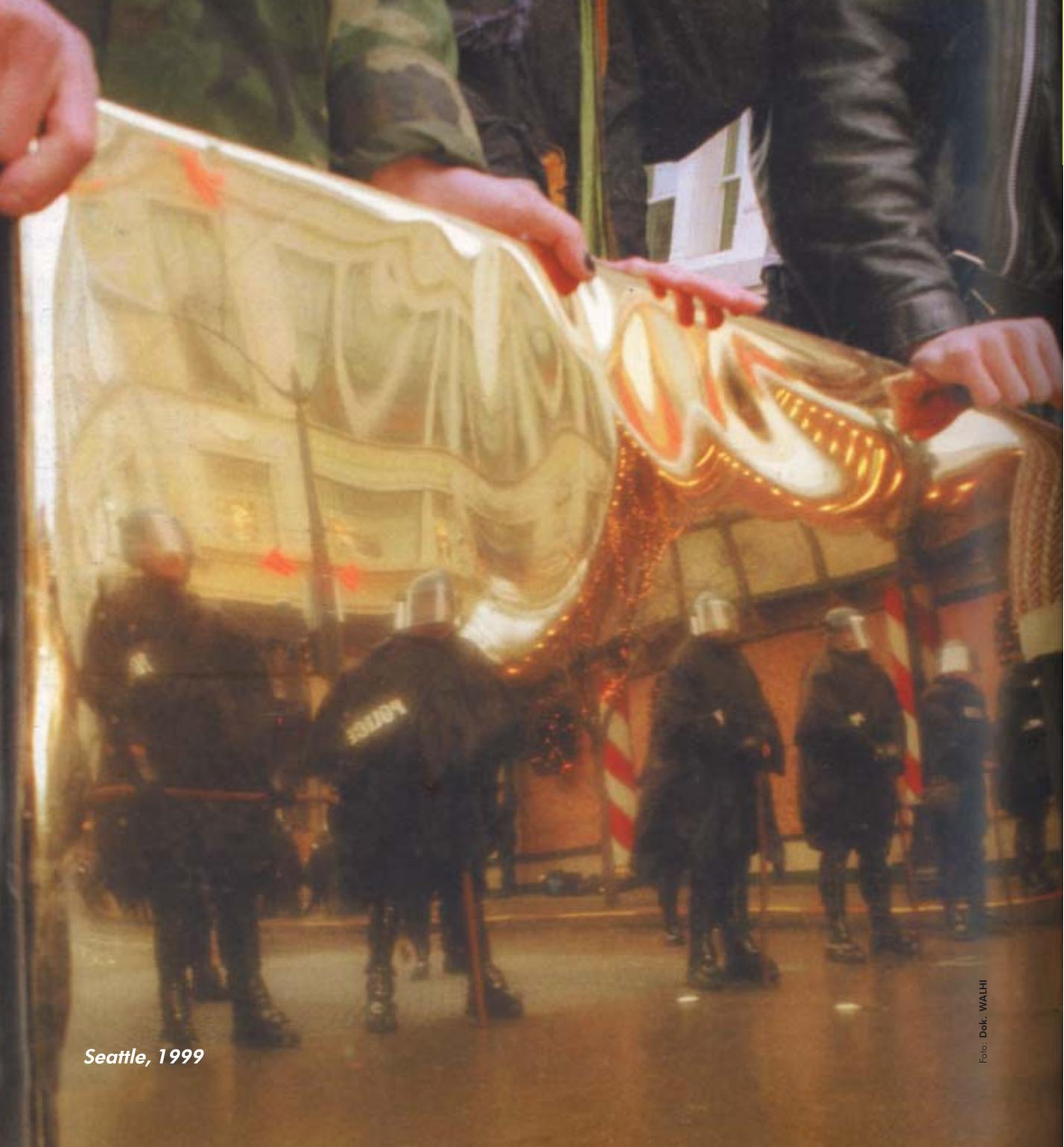
Memangkas hukum dan aturan yang bisa mengurangi penciptaan laba, termasuk ukuran-ukuran untuk melindungi hak buruh dan pelestarian lingkungan hidup.

PRIVATISASI

Menjual perusahaan, barang dan layanan milik negara kepada investor swasta. Walaupun dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang seringkali memang dibutuhkan, privatisasi mengkonsentrasikan kemakmuran kepada segelintir tangan dan membuat rakyat miskin tak bisa mendapatkan barang serta layanan yang mahal.

MENGENYAHKAN KONSEP "THE PUBLIC GOOD"

Mengurangi tanggungjawab bersama dan menggantikannya dengan "kewajiban individu". Membiarkan kaum termiskin untuk menemukan solusi sendiri atas mahalnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial serta menyebut mereka "malas" jika mereka gagal.



Seattle, 1999

GERAKAN ANTINEOLIBERAL

SEATTLE, Amerika Serikat, berderak pada 30 November 1999. Di jalan-an kota tempat Microsoft bermarkas itu sekitar 70.000 orang berdemonstrasi. Mereka mewakili 700 organisasi di seluruh dunia. Sasaran demonstrasi mereka adalah Pertemuan Tingkat Menteri WTO yang berlangsung di kota itu, yang antara lain membicarakan penyatuan dunia menjadi satu kesatuan dagang, atau yang sering disebut sebagai globalisasi. Para demonstran berhadapan dengan pengamanan ketat. Bentrok tak terhindarkan. Demonstrasi damai ini berakhir ricuh, ribuan terluka dan ratusan lainnya dijebloskan ke tahanan.

Sampai beberapa tahun kemudian, peristiwa itu dikenal sebagai "*The Battle of Seattle*" atau "Pertempuran Seattle". Ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar di kota Amerika sejak Perang Vietnam, dan menjadi simbol gerakan anti-globalisasi yang menguat belakangan ini.

Hampir seperti ritual, demonstrasi besar yang militan kini mewarnai hampir setiap kali diselenggarakan perundingan WTO. Terakhir, belasan orang ditangkap dalam protes terhadap sidang itu di Hongkong, Desember 2005.

Apa sebenarnya yang salah dengan globalisasi sehingga memperoleh penentangan yang demikian keras? Bukankah globalisasi

"Manusia yang tahu bahwa cukup adalah cukup akan selalu cukup."

Lao-Tzu

adalah sesuatu yang mulia, menyatukan umat manusia dalam kemakmuran kebersamaan? Tidakkah globalisasi sesuatu yang tak terhindarkan ketika dunia menyusut dan batas-batas negara luruh akibat perkembangan teknologi dan sarana transportasi?

Tapi, yang lebih penting, kenapa globalisasi harus menjadi kepedulian kaum environmentalis seperti kita? Dan di mana posisi kita dalam hal ini?

Seperti setiap fenomena modern, globalisasi adalah tren yang penuh kontradiksi. Globalisasi menawarkan harapan, namun juga merampok harapan. Globalisasi menyediakan potensi munculnya tatanan dunia yang manusiawi, namun juga barbar.

Globalisasi sebagai simbol kerjasama bangsa-bangsa dunia dalam menuju kemakmuran bersama secara bermartabat tidak selayaknya ditolak. Namun, gelombang protes terhadap globalisasi sekarang ini memang lebih terfokus terutama pada

aspek ekonomi yang terbukti merusak.

Globalisasi ekonomi gagal meningkatkan kesejahteraan dunia seperti dijanjikan, dan justru sebaliknya menciptakan struktur yang timpang dan eksploitatif. Kegagalan itu terletak terutama pada serangkaian kebijakan ekonomi neoliberal salah arah, namun dipromosikan besar-besaran.

Kritik terhadap globalisasi akhirnya identik dengan kritik terhadap neoliberalisme, serangkaian kebijakan ekonomi yang efeknya sangat mencolok: si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Neoliberalisme bercirikan antara lain pada promosi lantang tentang liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi dan deregulasi, kata-kata yang setiap hari kita baca dan dengar di media massa.

Pandangan ini tidak hanya dipromosikan tapi dipaksakan secara tidak demokratis. Banyak negara berkembang, seperti Indonesia, resep neoliberalisme merupakan bagian terpadu dari paket utang yang diberikan oleh negara-negara Barat dan Utara, oleh IMF, Bank Dunia dan ADB. Negara berkembang yang berutang, seperti Indonesia, tidak bisa merumuskan kebijakan ekonomi sendiri sesuai kepentingan rakyatnya. Mereka tidak bisa memilih lain kecuali menerapkan rangkaian kebijakan itu dirumuskan oleh elit ekonomi dunia IMF dan Bank Dunia yang bermarkas di Washington, dan karenanya sering disebut sebagai "*The Washington Consensus*".

IMF dan Bank Dunia menjadi semacam



Foto-foto: Dok. WALHI

lembaga "supra pemerintah" dengan politisi dan ekonom yang tidak pernah dipilih dan tidak akuntabel meski kebijakannya punya pengaruh dahsyat di negara-negara berkembang.

"*The Washington Consensus*" menciptakan pengangguran dan proses pemiskinan dengan resep-resep kebijakannya yang secara patuh dilaksanakan para ekonom kita: memperketat belanja pemerintah de-

ngan memangkas anggaran sosial dan menghapus subsidi; membuka pasarnya untuk impor, termasuk impor bahan pangan yang berakibat pada kehancuran ekonomi pertanian lokal; serta membuka lebar negeri untuk modal asing meski itu harus dilakukan dengan melonggarkan hukum dan undang-

undang yang melindungi rakyat setempat.

Sesuai dengan namanya, "*The Washington Consensus*" juga seringkali menjadi bagian integral dari kebijakan politik luar negeri AS. Mengikuti secara buta resep IMF dan Bank Dunia artinya sama saja dengan menjadi orbit ekonomi-politik Amerika.

Peran IMF yang Tidak Demokratis

IMF punya peran kunci dalam menggunungnya beban utang publik Indonesia, baik luar negeri maupun domestik. Lembaga itu didominasi oleh negeri-negeri maju seperti Amerika, Jepang dan Inggris, pemilik saham terbesar. IMF juga bertindak sebagai penyaring akses Indonesia ke keuangan dan modal internasional. Untuk bisa meminjam ke pasar modal dunia, atau memperoleh pinjaman dari negeri maju, pertama-tama dia harus memperoleh restu dari IMF.

IMF sendiri mengakui membuat kesalahan ketika sebuah tim staf kecil IMF, hanya setelah dua pekan di Jakarta, meminta Bank Indonesia menutup 16 bank pada 1 November 1997. Ongkos dari blunder ini telah berakibat pada meningkatnya beban utang domestik raksasa senilai 80 milyar dollar AS (Rp 700 triliun). Sebelum krisis ini, Indonesia tidak memiliki beban utang domestik yang

signifikan.

IMF tidak hanya bertanggungjawab atas utangyang menggunung. Tekanan IMF agar negeri-negeri pengutang menghapus subsidi bahan bakar, misalnya, juga tidak dipertimbangkan secara masak-masak dan tidak akuntabel terhadap kekuatan demokratik. Kenaikan harga bahan bakar merupakan alat bagi IMF untuk secara cepat mengumpulkan dana bagi anggaran Indonesia, yang sebagian besar di antaranya untuk membayar utang.

Para pejabat IMF dan Bank Dunia yang mewakili investor asing punya suara lebih kuat dari keputusan politisi Indonesia yang dipilih secara demokratis.

Negosiasi IMF/Bank Dunia dan pemerintah Indonesia hampir selalu bersifat rahasia. Warga Indonesia tidak tahu persis apa yang dilakukan atas nama mereka dan biaya besar yang berkaitan dengan kebijakan yang dipaksakan oleh kreditor asing. Sangat tidak demokratis.



GLOBALISASI: MITOS DAN REALITAS

MITOS: Demokrasi dan kapitalisme berjalan seiring

REALITAS: Demokrasi dan ekonomi pasar yang sehat memang cita-cita bagus karena menjadi basis bagi berkembangnya masyarakat yang mampu mengorganisasikan diri dan memperlakukan anggotanya secara setara. Tapi, kapitalisme adalah pembunuh maut bagi keduanya. Kapitalisme menciptakan ilusi di dalam pikiran mereka yang berkuasa bahwa ideologi ini merupakan mesin kemakmuran sementara faktanya merupakan mesin perusak dan pencipta ketimpangan. Dalam definisi, desain dan praktek, kapitalisme adalah sistem yang akan mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi ke tangan segelintir orang dan mengenyampingkan banyak orang, artinya tidak demokratis.

MITOS: Globalisasi akan mengakhiri kemiskinan

REALITAS: Globalisasi ekonomi menciptakan kemakmuran, tapi hanya untuk segelintir elit yang diuntungkan oleh konsolidasi kapital, merger, teknologi skala global, dan aktivitas finansial seperti bursa saham dan bursa uang. Pasang naik perdagangan bebas dan globalisasi semestinya "mengangkat semua kapal" dan mengakhiri kemiskinan. Tapi, dalam setengah abad setelah diperkenalkan, lebih banyak kemiskinan di dunia ketimbang

Globalisasi ekonomi menciptakan kemakmuran, tapi hanya untuk segelintir elit yang diuntungkan oleh konsolidasi kapital, merger, teknologi skala global, dan aktivitas finansial seperti bursa saham dan bursa uang.

sebelumnya, dan situasinya terus memburuk.

MITOS: Globalisasi akan mengakhiri kelaparan dunia

REALITAS: Globalisasi pertanian telah gagal dalam mengatasi krisis kelaparan di dunia. Pada kenyataannya, justru telah memperburuk krisis. Selama dua dasawarsa terakhir, jumlah pangan di dunia terus meningkat, namun meningkat pula jumlah kelaparan. Sebuah studi PBB belum lama ini menunjukkan bahwa dunia sebenarnya cukup akan pangan. Masalahnya ada dalam distribusi yang tak merata. Globalisasi produksi pangan telah meminggirkan petani kecil dari tanahnya dan menggantinya dengan industri



Aksi Perempuan

Foto: Dok. WALHI

pertanian kimiawi yang padat mesin. Globalisasi produksi pangan memproduksi pangan yang salah dalam suatu proses yang membuat jutaan petani kehilangan tanah, tak punya rumah, miskin uang, dan bahkan tak bisa memberi makan sendiri.

MITOS: Globalisasi baik untuk lingkungan

REALITAS: Globalisasi secara inheren bersifat merusak alam karena menuntut produk dan jasa bergerak ribuan kilometer keliling dunia, melonjakkan ongkos lingkungan yang demikian mahal dalam bentuk polusi udara dan air, peningkatan konsumsi energi, dan penggunaan bahan kemasan serta pengawet kimiawi yang tak terurai. Kemakmuran yang diperoleh dari perdagangan dunia sangat sedikit yang dibelanjakan untuk program perbaikan lingkungan. IMF dan Bank Dunia justru praktis memastikan perusakan lingkungan.

MITOS: Globalisasi ekonomi tidak bisa dihindari

REALITAS: Para pendukung globalisasi ekonomi cenderung melukiskan globalisasi sebagai proses yang tak terhindarkan, atau menjadi muara logis dari seluruh benturan gaya ekonomi dan teknologi yang berjalan selama berabad-abad. Mereka melihat globalisasi sebagai hukum alam. Tapi, globalisasi ekonomi bukanlah evolusi yang natural. Lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, GATT, NAFTA dan WTO menempatkan nilai ekonomi di atas nilai-nilai lainnya,

Globalisasi produksi pangan memproduksi pangan yang salah dalam suatu proses yang membuat jutaan petani kehilangan tanah, tak punya rumah, miskin uang, dan bahkan tak bisa memberi makan sendiri.

serta menindas kemampuan tiap negara untuk melindungi lingkungan, buruh, dan konsumen. Globalisasi semacam itu bahkan cenderung menolak kedaulatan serta demokrasi sebuah negeri jika negeri itu nampak merintanginya "perdagangan bebas". Tapi, tak satu pun dari itu tak bisa dihindari. Menyebut globalisasi sebagai tak terhindarkan adalah upaya menghipnotis orang untuk meyakini bahwa tak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah globalisasi, sehingga menciptakan sikap pasrah dan pasif.

Banyak

Sebarkan pertanyaan. Perubahan politik membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat awam. Bicaralah pada teman-teman dan kolegamu tentang globalisasi – tunjukkan bahwa itu hal yang paling penting di hadapan kita sekarang ini. Gunakan pesan-pesan kunci, seperti “kita kehilangan etika berpolitik,” atau “pelayanan kesehatan buruk karena hanya diurus sedikit tangan, tanpa melibatkan publik.” Dan lain-lain. Dan kamu tidak perlu punya semua jawaban – yang penting melontarkan pertanyaan. Sebuah organisasi bernama Ruckus menjalankan sekolah perlawanan damai dan memiliki banyak ide bagaimana cara menyampaikan pesan dengan aksi langsung tanpa menyertakan kekerasan. Tengok saja www.ruckus.org

Kampanye. Dukung satu dari banyak kampanye yang berusaha untuk mengontrol globalisasi, seperti kampanye-kampanye yang dilakukan The World Development Movement, People and Planet, Friends of Earth, Sahabat Walhi, dan lain-lainnya.

Ubah Gaya Hidupmu. Ukur jejak ekologi dirimu dan keluargamu dan berusaha untuk menurunkannya hingga ke level *sustainable*. Fokuslah, baik pada hal-hal yang memberi perbedaan besar (bersepeda daripada berkendara) maupun pada perbaikan-perbaikan kecil (seperti daur ulang) – lihat saja situs *People and Planet* dan *Best Foot Forward*.

Bikin Pilihan-Pilihan Etis. Setiap hendak mengkonsumsi sesuatu, biasakan untuk membuat pilihan-pilihan positif. Bergaya hidup organik. Beli produk *fair trade*. Kurangi makan daging. Hindari multinasional. Dukung usaha lokal. Kunjungi pasar tradisional.

Jadilah Karyawan Pro-Aktif. Tingkatkan praktek bisnis bertanggung jawab dengan karyawanmu – sekarang ini ada banyak contoh praktek yang bagus dari perilaku korporat progresif, seperti *socially-responsible sourcing*, audit lingkungan, investasi etika, dan lain-lain. (Di bagian ini juga dapat menjadi versi *hard-core* dari pesan, “jangan

bekerja untuk kekuasaan korporat” atau yang lainnya.)

Lobby. Naikkan isu keadilan global dengan semua pengambil keputusan. Perubahan iklim dapat kamu bicarakan dengan anggota DPRD atau para birokrat pemerintahan

panye isu-isu tertentu dengan menggunakan *e-mail*.

Etis dalam investasi. Pastikan uangmu tidak melawan keadilan. Simpan dan investasi secara etis. Dan periksa baik-baik apa yang kamu maksudkan dengan etis itu (menurut



yang bisa kamu lakukan

desa, aturan perdagangan internasional dengan pejabat pemerintahan dan anggota parlemen, juga isu Protokol Kyoto (dan sikap AS atas protokol tersebut) yang penting diketahui para pengambil kebijakan di negara ini. Agar mudah dipahami, kaitkan dengan isu-isu lokal dan nasional. Bagaimana globalisasi memberikan dampak di tingkat nasional dan lokal. Cara paling mudah dari kesemuanya, mengirimkan surat progresif ke lembaga-lembaga berkepentingan dan media massa. Kamu bisa saja bergabung ke kelompok-kelompok yang melakukan kam-

bahasa kamu sendiri).

Di atas semuanya, terhubung dengan orang lain. Sangat sulit untuk belajar atau beraksi secara efektif jika kamu cuma sendirian. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok lain yang peduli pada isu-isu lingkungan dan angkat isu tersebut dalam segala konteks pekerjaanmu. Jika kamu seorang guru atau pendidikan, masukkan isu-isu tersebut. Jika kamu aktif di organisasi perempuan lokal, katakan bagaimana globalisasi melukai perempuan-perempuan di dunia sedang membangun.



**Indonesia bukan lagi
zamrud khatulistiwa.
Indonesia adalah negara budak
yang tak punya apa-apa.
Saatnya kaum muda bangkit
menata Indonesia yang lebih baik
dan berkelanjutan.
Kita bawa Indonesia
menuju demokrasi kerakyatan
atau demokrasi bumi.**

**MENUJU
DEMOKRASI BUMI**



**Globalisasi ekonomi
membuat masalah
menjadi makin kompleks
bagi Indonesia.**

Land clearing hutan di Riau

ZAMRUD KHATULISTIWA, NO MORE!

KETIKA kita menyebut Kepulauan Indonesia sebagai “Zamrud Khatulistiwa”, kita tidak hanya membayangkan sebuah negeri dengan nyiur melambai di pantai indah atau pohon cemara menuding langit di pegunungan. Kita tidak hanya membayangkan sebuah gugusan pulau yang kaya akan keragaman flora dan fauna. Tapi, kita juga membayangkan sebuah negeri yang makmur, sejahtera, adil dan damai.

Namun, menerapkan kata “Zamrud Khatulistiwa” untuk Indonesia hari-hari ini mungkin hanya akan membuat kita sedih serta frustrasi. Betapa jauh antara impian dan kenyataan.

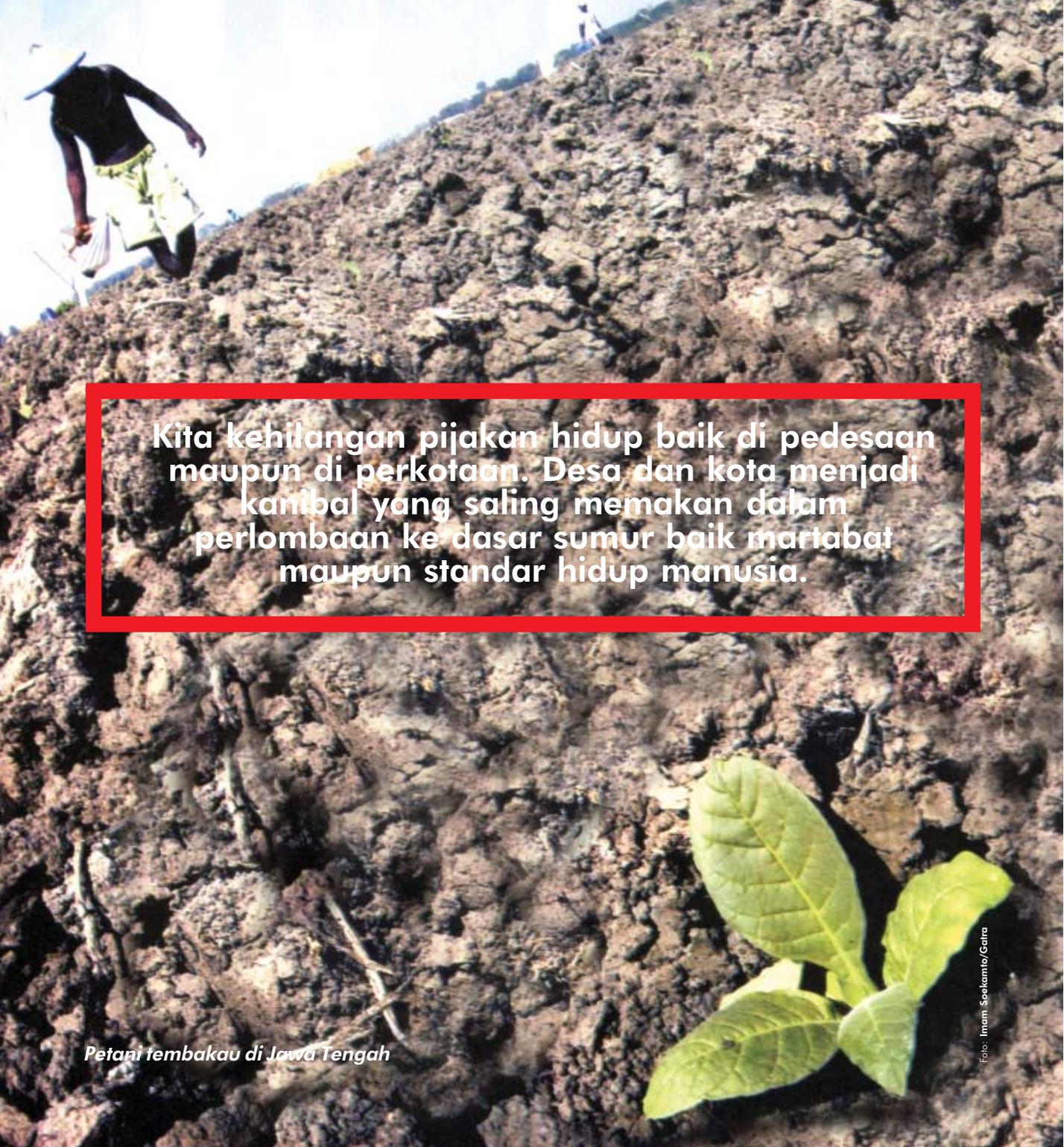
Penjarahan oleh industri per kayu, meluasnya kawasan penambangan mineral dan kebakaran hutan mengancam keutuhan hutan tropis kita yang dinilai menjadi paru-paru bumi kedua setelah hutan Amazon di Amerika Latin. Penjarahan dan kebakaran itu makin gila dari tahun ke tahun, menghabiskan spesies flora dan fauna yang bahkan belum sempat kita identifikasi.

Bencana banjir dan longsor makin sering dan makin luas terjadi, merusak ruang hidup jutaan petani di pedesaan. Pestisida dan pupuk kimiawi mengerogoti lahan hidup dan ekosistem mereka. Perkebunan-perkebunan besar dengan tanaman monokultur tumbuh

“Pada saat ini terlihat bahwa seluruh sikap-sikap mental mengalami degradasi di Indonesia, termasuk sikap mental bertanggung jawab. Beberapa orang yang pada mulanya kelihatan sangat potent untuk berwatak penuh tanggung jawab, ternyata menjadi pelempar tanggung jawab. Ada suatu bahaya bahwa masyarakat Indonesia akan menjadi *society of responsibility shifters*. Karena itu dari kalangan anak-anak muda di samping orang-orang tua, harus tampil beberapa orang yang berani melawan arus ini dan menegakan suatu masyarakat yang bertanggung jawab.”

Ahmad Wahib

Catatan Harian 20 Februari 1970



Kita kehilangan pijakan hidup baik di pedesaan maupun di perkotaan. Desa dan kota menjadi kanibal yang saling memakan dalam perlombaan ke dasar sumur baik martabat maupun standar hidup manusia.

Petani tembakau di Jawa Tengah



Foto: Henry Lopulatan

Pameran bursa kerja

pesat tak hanya mematikan keanekaragaman hayati serta mengguncang ekosistem, tapi juga merangsek perkampungan manusia, budaya dan kearifan tradisional mereka.

Hilangnya sumber kehidupan dan proses pemiskinan terus-menerus di pedesaan memaksa orang pergi ke kota. Tapi, jutaan orang menemui jebakan sama di kawasan perkotaan: habitat yang tidak nyaman dan makin rendah kualitasnya sebagai penopang kehidupan. Kota-kota kita diwarnai kesemrawutan tata ruang, kemacetan, polusi udara, mahalnya air bersih di musim kemarau serta banjir di musim penghujan. Konsumsi energi meningkat drastis untuk produktivitas yang

makin rendah.

Kemiskinan di pedesaan dan keruwetan hidup di perkotaan telah memacu ketegangan sosial dan segala penyakit ikutannya: kriminalitas, konflik, tawuran, penyalahgunaan narkotika, angka bunuh diri, dan semua jenis penyakit sosial lain yang menurunkan martabat kemanusiaan.

Kita kehilangan pijakan hidup baik di pedesaan maupun di perkotaan. Desa dan kota menjadi kanibal yang saling memakan dalam perlombaan ke dasar sumur baik martabat maupun standar hidup manusia. Makin hari kita makin kehilangan modal untuk kesejahteraan ekonomi bersama, yang

A woman wearing a large, wide-brimmed woven hat and a pink floral-patterned shirt is operating a manual water pump in a dry, agricultural field. She is leaning forward, holding the handle of the pump. The pump is a simple mechanical device with a blue plastic pipe leading to a blue container. The ground is dry and covered with straw and soil. The background shows more of the field under bright sunlight.

“Kita mesti memperlakukan air sebagai benda paling berharga di dunia, sumberdaya alam yang paling bernilai. Berhematlah dengan air! Jangan menyia-nyiakannya! Kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu atas persoalan ini sebelum terlampau terlambat.”

Mikhail Gorbachev

membuat kita makin tak mampu untuk melindungi alam tempat hidup kita, bahkan—bagi banyak orang—untuk bisa sekadar makan dan bertahan hidup.

Globalisasi ekonomi membuat masalah menjadi makin kompleks bagi Indonesia. Apa yang terjadi suku-suku tradisional Papua dekat pertambangan Freeport di Timika, misalnya, tak bisa dipisahkan dari dinamika politik dan bisnis di Washington. Rezim perdagangan bebas dunia telah memungkinkan perusahaan multinasional, misalnya, tak hanya menjarah mineral di tempat yang jauh tapi juga mempatenkan benih dan obat tradisional, sedemikian sehingga kelak kita harus membayar lisensi dari setiap tanaman pangan atau obat-obatan yang kita tumbuhkan di halaman rumah kita.

Nasib petani di pedalaman Jawa dan Sumatera makin hari makin ditentukan oleh para juru runding WTO yang tak pernah mereka kenal dan tak pernah mereka pilih secara demokratis. Hidup dan kesejahteraan nelayan serta buruh industri makin ditentukan oleh kebijakan ekonomi para bankir di Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang anti-subsidi. Penduduk kumuh perkotaan kehilangan hak dasar mereka atas air bersih akibat privatisasi dan deregulasi yang menyertai promosi besar-besaran perdagangan bebas dunia.

Kolonialisme model lama, yang bersifat fisik, sudah berakhir, namun kita tetap mengalami penjajahan dalam bentuk baru, alias neo-kolonialisme. Inti dari penjajahan



Desain foto: Martha Sakellarios/Image Photodisc/FOE

adalah masing-masing kita tidak bisa me-mentukan nasib kita sendiri dan pilihan hidup kita sendiri.

Indonesia ibarat seekor ikan di kolam besar yang keruh, yang makin hari makin kehilangan kendali terhadap hidupnya sen-diri. Secara kolektif masyarakat Indonesia makin miskin. Utang publik membengkak, sumber daya ekonomi menyusut, ketergan-tungan makin besar terhadap dunia luar dan kerusakan habitat makin parah.

**Saatnya untuk mengakui
"Zamrud Khatulistiwa *No More!*"
Bukan untuk bersikap pesimistis,
namun untuk bersikap realistis
dan merangsang renungan
tentang apa yang sebenarnya
salah dari semua ini. Dengan
model pembangunan baik fisik,
ekonomi maupun sosial seperti
sekarang, Indonesia sedang
melaju ke kiamat kecilnya sendiri.
Model pembangunan yang ada
sekarang tidak *sustainable*, tidak
berkelanjutan dan akan berakhir
pada malapetaka baik sosial,
ekonomi maupun ekologis.**

Pidato yang Abadi

Seorang ketua suku Indian Suquamish di Amerika pada 1848 mengucapkan sebuah pidato yang relevan kita dengar, justru sekarang-sekarang ini.

“Bagaimana kami bisa membeli dan menjual langit, serta hangatnya tanah? Gagasan seperti itu asing bagi kami.”

“Jika kami tak punya segarnya udara dan gemericiknya air, bagaimana kami bisa membelinya?”

“Setiap bagian dari bumi adalah sakral bagi kami. Setiap kilau pucuk pohon pinus, setiap pantai berpasir, setiap embun di pepohonan, setiap dengung serangga adalah suci dalam ingatan dan pengalaman rakyat kami. Cairan yang mengalir dalam setiap pohon membawa ingatan orang-orang kami.”

“Inilah yang kami tahu: bumi bukan milik manusia; manusialah milik bumi. Inilah yang kami pahami. Semua hal berhubungan seperti darah yang menyatukan sebuah keluarga. Semua hal berhubungan.”

Pidato satu setengah abad lalu itu kini menemukan gemanya dalam demonstrasi para aktivis penentang globalisasi korporat: “Bumi bukan milik manusia”, “Bumi tidak dijual”, “Air tidak dijual”.



Aksi anti CGI di Jakarta

SUKU INDIAN, SCHUMACHER DAN HATTA

MELESTARIKAN habitat kita kini tak cukup hanya dengan gerakan menanam ribuan pohon atau gerakan membersihkan sungai penuh sampah di kawasan perkotaan. Bahkan jika jumlahnya jutaan, pohon yang kita tanam tak sebanding dengan laju penebangan yang berlangsung. Bahkan jika setiap hari kita melakukannya, sampah di perkotaan akan terus datang dengan laju lebih tinggi akibat gaya hidup, pola konsumsi dan sistem ekonomi yang kita anut.

Proses ekologi tak bisa dipisahkan dari proses sosial, ekonomi dan politik, yang berhubungan dan bertabrakan satu-samalah, yang tidak hanya berlangsung di tingkat lokal, tapi nasional dan bahkan global. Dan, sayangnya, kita tak bisa mengendalikan semua gaya tadi, apalagi dalam cakupan yang demikian luas. Kita hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, ruang dan waktu lokal. Adakah cara untuk merujukkan dua dimensi ini: apa yang kita lakukan secara lokal memiliki dampak pembaruan di tingkat nasional atau bahkan global?

Ada, dan untuk itu kita memerlukan perubahan cara berpikir yang lebih komprehensif, lebih holistik, meskipun untuk banyak hal kita hanya bisa bertindak di tingkat lokal, dalam dunia kita yang terbatas.

Banyak masyarakat tradisional, suku-

“Pada akhirnya, kita hanya menjaga apa yang kita cintai. Kita hanya mencintai apa yang kita mengerti. Kita hanya mengerti apa yang diajarkan pada kita.”

Baba Dioum

Penyair Senegal

suku yang kita pandang primitif seperti Suku Indian Suquamish di Amerika, memiliki—dalam dunia sempit mereka—pandangan yang menyeluruh tentang planet kita. “Bumi bukan milik manusia; manusialah milik bumi” dan “Semua hal berhubungan”.

Dalam dunia mereka yang sempit, yang lokal, mereka berpikir planet bumi dalam keutuhannya, bahkan dalam kontinum antar generasi—masa lalu, masa kini dan masa depan. “Semua hal berhubungan, seperti darah yang menyatukan sebuah keluarga.”

Bandingkan kearifan yang makin tersisih itu dengan pandangan baru yang kini lazim dan terus dipopulerkan oleh para pendukung

globalisasi korporat. Perusahaan multinasional memandang dunia hanya sesuatu yang bisa dimiliki, dan memandang pasar hanya sebuah sistem yang didorong oleh keuntungan.

Kita tak bisa memutar jam ke masa lalu. Namun, pada kenyataannya, kita tak perlu hidup di abad lalu untuk bisa mengambil dan menerapkan filosofi hidup seperti itu, yang sederhana namun mendalam maknanya.

Filosofi Suquamish bahkan bisa kita temukan dalam buku *Kecil itu Indah (Small is Beautiful)* karangan EF Schumacher yang terbit pada 1970-an. Tiga puluh tahun silam Schumacher telah mulai mempertanyakan arah pembangunan ekonomi global yang bersifat merusak seperti sekarang. Ekonomi modern, menurut dia, tidak mempertimbangkan ongkos ekologis dalam proses produksi dan konsumsi. Hutan, air bersih, flora dan fauna, serta keseluruhan ekosistem tidak dimasukkan dalam kalkulasi ekonomi, melainkan dianggap sebagai obyek jorjoran yang murah.

Schumacher mulai mempertanyakan skala, menggugat obsesi manusia pada sesuatu yang serba besar yang justru memandu umat manusia kepada kerusakan lebih besar. Ketika komoditas pangan diproduksi dalam skala besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, misalnya, industri membutuhkan bahan pengawet kimiawi dan kemasan yang tahan lama, seperti plastik, yang tidak mudah

terurai. Bandingkan dengan bahan pangan yang diperjualbelikan secara lokal, dalam kemasan daun pisang yang mudah diurai dan bersifat ramah lingkungan! Tak hanya memicu penggunaan bahan yang merusak lingkungan, perdagangan dunia juga merangsang konsumsi bahan bakar transportasi barang dan jasa. Schumacher mengingatkan kita pada keindahan dari yang kecil-kecil, dari yang bersifat lokal.

Dan andai saja kita mempelajari serta menerapkan pemikiran Bung Hatta, salah satu proklamator Indonesia, negeri ini mungkin tidak serusak seperti sekarang. Tiga puluh atau empat puluh tahun lalu, Bung Hatta banyak menulis tentang konsep demokrasi politik dan ekonomi. Seperti Schumacher, Hatta juga menekankan pada dimensi lokal.

Bagi Hatta, desa adalah perwujudan demokrasi yang paling hakiki, yakni ketika individu masyarakat terlibat menentukan jalan hidupnya, pilihan hidupnya. Hatta juga menekankan kerjasama dan pemerataan ekonomi yang dikenal sebagai demokrasi ekonomi seperti tertuang dalam konsep koperasi.

Namun, yang paling penting dari sumbangan Hatta adalah pasal 33 dalam UUD 1945, konstitusi kita, yang menyatakan bahwa "bumi, air dan seisinya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan bersama". Mirip dengan pidato kepala suku Suquamish, Hatta berpandangan bumi dan air tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ada kepemilikan privat atasnya.

“Siapa yang menanam pohon, sesungguhnya menanam harapan”

Lucy Larcom

Aksi kecil di tingkat lokal



Berat sama dijinjing

DEMOKRASI BUMI, BERFIKIR DAN BERTINDAK BERBEDA

PANDANGAN suku Indian, konsep “kecil itu indah” dari Schumacher serta konsep Bung Hatta tentang demokrasi dan koperasi di tingkat desa kini menemukan gaungnya dalam gerakan semacam *World Social Forum* yang makin luas. Berseberangan dengan pandangan globalisasi korporat, gerakan ini membela prinsip, baik di tingkat lokal maupun global, bahwa planet bumi adalah milik bersama.

Sebaliknya dari itu, filosofi hidup Suquamish mengajak kita kepada kesadaran tentang keterhubungan semua hal di alam, serta hak dan tanggungjawab yang mengalir dalam hubungan-hubungan tadi. Penulis India Vandana Shiva menyebut ini sebagai embrio dari tatanan yang lebih besar: “Demokrasi Bumi”.

Berlawanan dengan pandangan bahwa dunia itu sebuah *supermarket* global, tempat barang dan jasa diproduksi dengan ongkos ekologis, sosial dan ekonomi yang demikian tinggi namun dijual teramat murah, masyarakat di berbagai belahan dunia kini makin sadar untuk menolak kerusakan biologis, keragaman budaya dan kehidupan mereka.

Berlawanan dengan ekonomi pasar bebas yang terglobalisasi dan bersifat bunuh diri karena didasarkan pada penjarahan serta pencemaran sumberdaya vital di alam,

“Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan.”

Soe Hok Gie

Catatan Seorang Demontran

yang mencerabut jutaan orang petani, perajin tradisional, dan buruh, masyarakat di berbagai belahan dunia kini berkeras untuk membela dan mendukung ekonomi kehidupan yang melindungi bumi serta mendorong kreativitas.

Alih-alih menciptakan kelimpahruahan, globalisasi yang didorong keuntungan semata telah menciptakan kultur pengasingan, kemiskinan dan kelangkaan. Barang yang langka makin mahal harganya, dan makin menguntungkan segelintir orang. Produksi global semua makhluk dan sumberdaya menjadi komoditas telah merampok hak banyak spesies dan bangsa atas ruang-ruang ekologis, kultural, ekonomi dan politik. “Kepe-

milikan” segelintir orang kaya didasarkan pada “ketidak-punyaan” yang miskin. Adalah barang dan sumberdaya publik milik orang miskin yang pada dasarnya kini banyak diprivatisasi, yang akhirnya membuat si miskin tetap miskin secara ekonomi, politik dan budaya.

Sementara kolonialisme di masa lalu hanya mencuri lahan, kini hampir semua aspek kehidupan dikuasai secara tertutup oleh segelintir orang—

pengetahuan, budaya, air, keragaman hayati dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Lewat hak paten dan hak milik intelektual, globalisasi korporat memonopoli semua berkah alam dan kreatifitas seluruh umat manusia.

Kesadaran akan barang milik bersama dan kebersamaan merupakan ekspresi ter-



Generasi baru Nusantara

tinggi dari demokrasi ekonomi yang merupakan elemen dari Demokrasi Bumi.

"Demokrasi Bumi", berbeda dengan demokrasi yang dipromosikan secara egoistik oleh sejumlah negeri industri maju, adalah demokrasi di bawah atmosfer dialog dan penghargaan pada keragaman, di bawah atmosfer pluralisme dan kemitraan, serta atmosfer kesediaan berbagi dan kesetiakawanan.

Mempromosikan "Demokrasi Bumi" tidak hanya dilakukan dengan protes serta aktivisme turun ke jalan, namun dengan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam realitas yang kita hadapi sehari-hari, serta dalam tindakan nyata mengubah yang global lewat perubahan di tingkat lokal. Perubahan di tingkat lokal mungkin hanya kecil namun memiliki dampak yang besar dan luas karena mencerminkan evolusi di alam yang mengerahkan seluruh potensi manusia; karena perannya dalam perubahan dari spiral kekerasan, yang di dalamnya budaya bunuh diri, ekonomi bunuh diri dan politik bunuh diri saling mendukung satu-sama-lain, ke arah spiral perdamaian, yang di dalamnya budaya kehidupan mendukung demokrasi kehidupan dan ekonomi kehidupan.

Demokrasi Bumi bukanlah sekadar konsep. Dia dibentuk oleh beragam praktek dan tindakan orang-orang yang menuntut balik barang-barang milik bersama, sumber daya mereka, kehidupan mereka, kemerdekaan, martabat, identitas dan ruang hidup mereka.



"Kecil itu indah"



Melaju bersemangat menuju Demokrasi Bumi

10 PRINSIP DEMOKRASI BUMI

1. SEMUA SPESIES, MANUSIA DAN BUDAYA MEMILIKI NILAI SENDIRI YANG PENTING

Semua makhluk hidup adalah subyek yang memiliki integritas, kecerdasan dan identitas. Mereka bukan obyek kepemilikan, manipulasi dan eksploitasi dan penjarahan. Tak satupun manusia punya hak untuk menguasai spesies lain, manusia lain, atau pengetahuan dari budaya lain melalui paten dan hak-hak milik intelektual.

2. MASYARAKAT BUMI ADALAH SEBUAH SISTEM DEMOKRASI UNTUK SEMUA KEHIDUPAN

Kita semua anggota keluarga bumi, saling terhubung melalui jaring halus kehidupan planet ini. Kita semua memiliki kewajiban untuk hidup dengan melindungi proses ekologis bumi, dan melindungi hak serta kesejahteraan semua spesies dan semua manusia. Tak satu pun manusia memiliki hak untuk merusak ruang ekologis spesies lain dan orang lain, atau untuk memperlakukannya secara kasar dan dengan jalan kekerasan.

3. KERAGAMAN HAYATI DAN KERAGAMAN BUDAYA HARUS DIPERTAHANKAN

Keragaman hayati dan budaya memiliki tujuan dalam dirinya. Keragaman hayati adalah sebuah nilai dan sumber kekayaan,

baik material maupun budaya, yang menciptakan kondisi bagi keberlanjutan. Keragaman budaya menciptakan kondisi bagi perdamaian. Mempertahankan keragaman hayati dan budaya merupakan kewajiban umat manusia.

4. SEMUA MAHLUK HIDUP MEMILIKI HAK ALAMI UNTUK BERTAHAN HIDUP

Semua makhluk hidup di bumi, termasuk seluruh umat manusia, memiliki hak untuk bertahan hidup – hak terhadap air, terhadap pangan, terhadap habitat yang aman dan bersih, serta terhadap keamanan ruang ekologisnya. Sumberdaya yang vital untuk bertahan hidup harus tetap merupakan barang bersama. Hak untuk bertahan hidup merupakan hak alamiah. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau perusahaan, dan tidak bisa dihilangkan oleh tindakan negara atau perusahaan. Tak satu pun negeri atau korporasi memiliki hak untuk menggerogoti atau menindas hak-hak alamiah ini atau mengambil-alih hak eksklusif barang bersama yang penting untuk bertahan hidup.

5. DEMOKRASI BUMI BERBASIS PADA EKONOMI KEHIDUPAN DAN DEMOKRASI EKONOMI

Demokrasi bumi didasarkan pada demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi dalam Demokrasi Bumi melindungi ekosistem dan keutuhannya; sistem itu melindungi kehidupan

manusia dan memberikan kebutuhan dasar kepada semua. Dalam ekonomi bumi tidak ada orang yang terlantar dan tidak ada spesies dan budaya yang bisa disingkirkan. Ekonomi bumi adalah ekonomi kehidupan. Ekonomi ini didasarkan pada sistem yang beragam, pluralistik dan berkelanjutan yang melindungi alam maupun manusia, yang dipilih oleh manusia, dan bekerja untuk kemaslahatan bersama.

6. EKONOMI KEHIDUPAN BERTUMPU PADA EKONOMI LOKAL

Pelestarian sumberdaya bumi dan pembentukan kehidupan yang berkelanjutan serta memuaskan bisa dicapai dalam wujud paling kasih, paling kreatif, paling efisien dan paling merata hanya pada level lokal. Lokalisasi ekonomi adalah keharusan sosial dan ekologis. Hanya barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi secara lokal—menggunakan sumberdaya dan pengetahuan lokal—yang boleh diproduksi di luar daerah dan dipasarkan dalam jarak yang jauh. Demokrasi Bumi didasarkan pada ekonomi lokal yang bergairah, yang mendukung ekonomi nasional dan global. Dalam Demokrasi Bumi, ekonomi global tidak merusak dan menghancurkan ekonomi lokal, ataupun menciptakan orang yang terlantar. Ekonomi kehidupan mengakui kreatifitas semua umat manusia dan menciptakan ruang untuk kreatifitas yang beragam demi mencapai potensi penuh mereka. Ekonomi kehidupan adalah ekonomi yang beragam dan terdesentralisasi.

7. DEMOKRASI BUMI ADALAH DEMOKRASI KEHIDUPAN

Demokrasi kehidupan didasarkan pada demokrasi seluruh bentuk kehidupan dan demokrasi hidup keseharian. Dalam demokrasi kehidupan manusia harus bisa mempengaruhi keputusan dan menentukan jenis pangan yang dimakan, air yang diminum, dan layanan kesehatan serta pendidikan yang dikenyam. Demokrasi kehidupan tumbuh seperti pohon, dari bawah ke atas. Demokrasi Bumi didasarkan pada demokrasi lokal, dengan komunitas lokal, yang terorganisasi di atas prinsip kebersamaan, keragaman dan tanggungjawab ekologis serta sosial—memiliki otoritas tertinggi terhadap keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam dan terhadap keberlanjutan serta kehidupan manusia. Otoritas itu didelegasikan ke level pemerintahan yang lebih jauh atas prinsip subsidi. Penentuan nasib sendiri dan pemerintahan diri sendiri merupakan fondasi dari Demokrasi Bumi.

8. DEMOKRASI BUMI DIDASARKAN PADA BUDAYA KEHIDUPAN.

Budaya kehidupan mendukung perdamaian dan menciptakan ruang untuk mempraktekkan agama yang berbeda dan mengadopsi keyakinan serta identitas yang berbeda. Budaya sehari-hari memungkinkan keragaman budaya berkembang dari bawah, dari dasar kemanusiaan yang sama dan hak yang sama sebagai anggota masyarakat dunia.



Penentuan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri fondasi Demokrasi Bumi

Foto: Timur Angin/Keyword Innovative Communication

9. BUDAYA KEHIDUPAN ADALAH KASIH TERHADAP KEHIDUPAN

Budaya kehidupan sehari-hari didasarkan pada martabat dan penghargaan kepada semua kehidupan, manusia, bukan manusia, semua jenis kelamin dan budaya, generasi sekarang dan yang akan datang. Budaya kehidupan karenanya budaya ekologis yang tidak mempromosikan gaya hidup atau pola produksi-konsumsi yang menghancurkan kehidupan, atau penggunaan dan eksploitasi sumberdaya secara berlebihan. Budaya kehidupan beragam dan didasarkan pada rujukan untuk kehidupan. Budaya kehidupan mengakui adanya keragaman identitas yang didasarkan pada sebuah identitas tempat dan masyarakat lokal—serta kesadaran kebumian yang menghubungkan individu dengan bumi dan semua kehidupan di muka bumi.

10. DEMOKRASI BUMI MERAWAT PERDAMAIAN, KASIH DAN SAYANG

Demokrasi Bumi

menghubungkan manusia dalam rantai kasih, kerjasama dan sayang ketimbang membelah mereka melalui kompetisi dan konflik, ketakutan dan kebencian. Di hadapan sebuah dunia yang penuh kerakusan, ketimpangan dan konsumsi berlebihan, Demokrasi Bumi mengglobalkan kasih, keadilan dan keberlanjutan.



**Pilihan ada pada tanganmu.
Bahu membahu menyelamatkan
bumi manusia.
Atau, duduk menjadi penonton.
Indonesia masa depan
membutuhkan kecerdasan baru.
Berlatihlah berpikir
dan bertindak berbeda
sejak dini.**

BAGIAN AKHIR

**MENJADI
ENVIRONMENTALIS
ITU GAMPANG**



**“Tindakan
lebih nyaring
daripada
perkataan”**

Slogan The Ruckus Society

PERNAH menancapkan paku pada kayu dengan menggunakan palu? Paku dipukul dan akhirnya menancap. Ketika kita pegang kepala paku itu, segera setelah dipukul, akan terasa amat panas. Dalam bahasa fisika dikatakan: "Energi kinetik dari ayunan tangan dimanfaatkan untuk menancapkan paku. Tapi sebagian energi ayunan tangan ada yang terbuang, berupa panas yang akhirnya 'terbang' ke atmosfer".

Di alam, setiap bentuk energi bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Dinamo mengubah energi gerak menjadi listrik. Energi listrik diubah menjadi panas, seperti pada setrika. Energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak, seperti pada mixer atau blender.

Kini perhatikanlah fenomena alam: Semua yang terjadi di alam pada hakekatnya merupakan proses transformasi energi. Matahari membakar cadangan nuklirnya untuk diubah menjadi panas, yang kemudian dipancar-luaskan ke alam-ruya, yang antara lain sampai ke permukaan bumi. Tanaman berfotosintesa untuk merubah energi sinar matahari dan mineral tanah menjadi pati, gula, lemak, atau protein.

Setiap transformasi energi itu, termasuk proses yang alamiah sekalipun, tidak ada yang seratus persen efisien. Selalu ada energi yang terbuang. Karena itu, secara alamiah, energi-tersedia di alam ini akan semakin berkurang. Suatu ketika, alam-ruya akan mengalami kehancuran alamiah "sebagai

"Revolusi tidak seperti buah apel yang jatuh ketika masak. Kamu yang harus menjatuhkannya."

Ernesto Che Guevara

ekspresi tidak cukupnya energi-tersedia untuk menopang kelangsungan hidup alam dan manusia, dengan ataupun tanpa intervensi manusia.

Menghadapi fenomena alam apapun, setiap orang merdeka untuk memilih: menjadi penonton atau penyelamat? Persis ketika banjir secara reguler menerjang Jakarta. Kita bisa cuma menonton sambil berkomentar: "Mengapa mereka bersikukuh untuk tinggal di bantaran sungai, padahal pemerintah sudah menyediakan alternatif perumahan yang lebih layak?"

Kita juga bisa sekadar merenung: "Mestinya Jakarta mengalokasikan dananya untuk memperbaiki tata-air mulai dari hulunya di Gunung Salak; bukan sekadar

menata bantaran Sungai Ciliwung yang masuk wilayah Jakarta saja. Kalau mutu lingkungan di gunung sana terjaga baik, tentu akan banyak air hujan yang meresap ke dalam tanah, dan dengan demikian tidak terjadi banjir. Tapi apakah sudi Jakarta mengalirkan dana ke daerah lain?”

Namun kita juga bisa menyikapinya dengan pelbagai aksi nyata. Ketika banjir tiba, bisa memberikan sumbangan pangan, obat-obatan, dan selimut. Pada kesempatan lain pergi ke gunung salak, melakukan aksi perbaikan mutu lingkungan; pergi ke Bogor untuk memasyarakatkan penyediaan sumur

**Suatu ketika, alam-
raya akan mengalami
kehancuran alamiah
“sebagai ekspresi tidak
cukupnya energi-
tersedia untuk
menopang
kelangsungan hidup
alam dan manusia,
dengan ataupun tanpa
intervensi manusia.**



Aksi pelajar menolak kenaikan BBM

Foto: Dok. WALHI



Aksi petani Korea menolak perubahan peraturan impor beras yang merugikan.

resapan pada setiap rumah di komplek-komplek perumahan menengah dan atas. Jika itu tidak sempat dilakukan, mungkin bisa melakukan kampanye kepada semua pihak agar mereka memberikan perhatian yang patut terhadap masalah banjir.

Agaknya tidak ada etika yang pernah membenarkan sikap hidup yang tidak peduli. Sebaliknya, ideologi dan agama apapun yang dianut seseorang, pasti menganjurkan untuk menghormati dan menyayangi sesama. Kita mengenal istilah filantropisme (rasa sayang kepada sesama atau pihak lain) dan altruisme (kepedulian kepada pihak lain). Itu, sekurang-kurangnya, menjadi sikap yang

seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Sebaliknya, jika seseorang sama sekali tidak memiliki rasa hormat dan sayang kepada sesama dan lingkungan, maka akan dinilai tidak patut oleh anggota masyarakat lainnya. Lingkungan akan menilainya sebagai super-egois, tidak peduli lingkungan, atau *ndableg*.

Karena itu, adalah amat patut apabila setiap orang memilih bersikap berperan aktif terhadap persoalan lingkungan. Jika punya kemampuan dan kemauan yang baik, gunakan kekuatan tangan dan kaki kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jika itu tak sanggup, gunakan kemampuan kita untuk melakukan kampanye-kampanye

lingkungan. Jika itu pun tak mampu kita lakukan, maka duduklah dengan manis sambil berdoa: “Semoga ada orang lain yang menyelamatkan lingkungan dan hidup kita!” Tapi tetap harus diingat, bahwa peran aktif itu menunjukkan sebegas-bagusnya mutu kemanusiaan seseorang.

Seseorang yang mulai tertarik untuk berbuat baik terhadap lingkungan atau mulai terganggu harga dirinya tatkala menemui persoalan lingkungan, boleh jadi ia sedang berproses untuk menjadi seorang environmentalis. Jika benar adrenalin environmentalisme sedang mengalir, deras maupun gemericik, seyogyanya mulai memahami tiga perkara berikut:

Karena itu, adalah amat patut apabila setiap orang memilih bersikap berperan aktif terhadap persoalan lingkungan. Jika punya kemampuan dan kemauan yang baik, guna-kan kekuatan tangan dan kaki kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

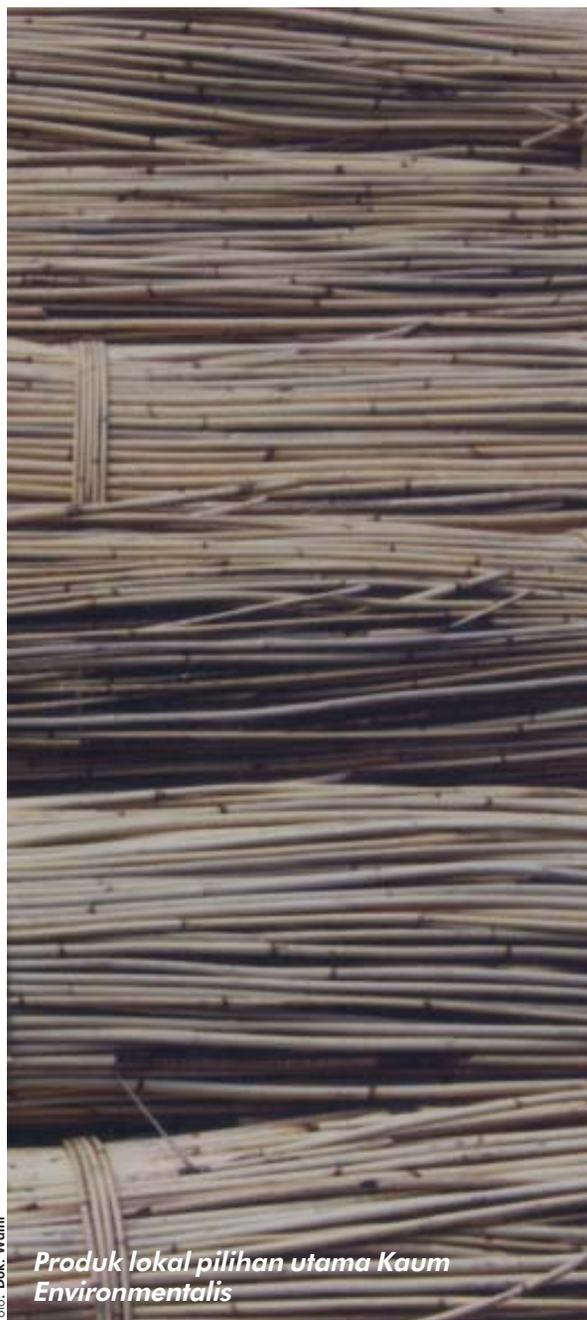


Banjir besar di Jakarta, 2007

Pertama, pahamiilah persoalan lingkungan itu secara holistik, karena lingkungan bukanlah suatu mosaik yang masing-masing potongannya berdiri sendiri. Alam semesta merupakan organisme besar yang tersusun dari organisme-organisme kecil. Organisme-organisme itu saling berinteraksi membentuk rantai keseimbangan yang rapuh. Jika ada gangguan atas alam, maka keseimbangan akan bergeser ke titik yang tidak pernah bisa diduga. Sebaliknya, jika gangguan itu diperbaiki secara “sempurna”, keseimbangan itu tidak pernah akan kembali ke titik semula. Seperti goresan benda tajam pada kulit tangan manusia, meski diobati dengan baik, kerap meninggalkan luka parut yang permanen. Tentu saja, perumpamaan ini amat simplistik.

Jika alam terlanjur terganggu (rusak), maka upaya-upaya perbaikannya akan memerlukan energi yang jauh lebih besar dibanding dengan memeliharanya tatkala ia belum rusak. Bayangkan ada hamparan tanah pada bidang yang curam. Secara arif setiap orang bisa memeliharanya dengan cara menjaga vegetasi pepohonan agar tetap tumbuh di atasnya, serta tidak memberikan beban berlebihan, misalnya tidak menjadikan lahan seperti itu menjadi kompleks permukiman. Secara teknis, itu bisa dilakukan secara amat mudah. Namun tatkala hamparan lahan itu sudah longsor, maka mengembalikan lahan itu menempel pada bentang alam semula, adalah pekerjaan yang memerlukan energi yang amat dahsyat.

Foto: Dok. Walhi



**Produk lokal pilihan utama Kaum
Environmentalis**

Kedua, alam itu memiliki daya-dukung yang terbatas. Meski pengetahuan manusia atas batas-tegas daya dukung itu bisa salah, namun itu tidak menjelaskan bahwa daya-dukung alam itu tidak terbatas. Ahli demografi, misalnya, pernah meramalkan bahwa Pulau Jawa akan tenggelam jika dihuni penduduk sebanyak 100 juta. Kenyataannya, Pulau Jawa masih berkibar ketika penduduknya mencapai 150 juta. Namun tanda-tanda akan terlampauinya daya dukung alam, sudah tampak di beberapa daerah. Yang akan membatasi daya dukung itu antara lain: ketersediaan air, pangan, energi, udara segar, dan kemampuan lahan untuk menaham beban di atasnya.

Ketiga, manusia itu bagian tidak terpisahkan dari alam semesta. Tampaknya, manusia merupakan komponen alam yang memiliki kekuatan untuk “melawan” dan “membuat kerusakan”. Harimau dan gajah Sumatera lenyap ketika habitatnya dirusak. Burung bangau dan kuntul pun musnah tatkala rawa-rawa tempat migrasinya dikonversi menjadi ruang aktifitas manusia. Tapi manusia memiliki keluwesan yang amat dahsyat ketika menghadapi kondisi lingkungannya, dan sekaligus memiliki kekuatan yang besar untuk memengaruhi lingkungannya.

Dahulu, manusia desa mampu hidup berdampingan dengan flora dan fauna secara akrab. Suara burung kutilang terdengar dari pohon-pohon di pekarangan rumah. Lebah-madu bersarang di atap rumah. Ayam-ayam peliharaan berkeliaran di peka-

Jika alam terlanjur terganggu (rusak), maka upaya-upaya perbaikannya akan memerlukan energi yang jauh lebih besar dibanding dengan memeliharanya tatkala ia belum rusak.

rangan. Sesekali ayam itu hilang dimangsa musang; tapi pemiliknya hanya berujar “Si Putih dimangsa musang” tanpa disertai dendam untuk memusnahkan sang musang.

Situasi itu terjadi ketika manusia masih bersahabat dengan alam. Motif produksinya masih subsistens (hanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarganya). Tekanan penduduk atas alam masih relatif rendah. Kepadatan penduduk masih amat kecil. Selain itu, kelimpahan sumberdaya juga masih besar. Ikan deleg dan uceng masih bisa didapat di kali kecil belakang rumah. Belut dan *uling* pun masih bisa dipancing di sungai atau danau.

Tapi manusia memiliki spektrum watak yang amat lebar; paling lebar dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Manusia bisa menjadi amat arif, dan sebaliknya bisa menjadi amat rakus. Sayangnya, kecenderungan alamiah manusia adalah hidup kian rakus



Manusia tidak terlepas dari lingkungannya

dan egois. Motif produksi sekarang sudah melampaui “kebutuhan subsistens”; karena manusia ternyata butuh radio, televisi berwarna, dan kendaraan. Rumah pun tidak sekedar tempat bernaung, tetapi adalah gedung dengan aneka bentuk dan fungsi khusus ruangnya. Pada saat yang sama, jumlah penduduk pun kian membesar. Semuanya memberikan tekanan lebih dahsyat pada lingkungan.

Jika hal itu dibiarkan secara liar, maka akan intervensi manusia secara berlebihan terhadap alam. Tentu saja hal itu akan mengakselerasi proses kehancuran alam. Sekarang penduduk Jakarta pada radius tertentu dari pantai (misal sampai dengan Salemba dan Jatinegara), tidak bisa menikmati air segar dari dalam tanah, karena pada kawasan itu telah terjadi intrusi air laut. Orang kota harus berkendara menempuh jarak 70 km hanya untuk bisa menghirup udara segar. Dan suatu ketika, kita akan kesulitan untuk menjelaskan sosok burung kepada anak-cucu kita, karena tidak terdapat lagi seekor burung pun yang bisa ditunjukkan kepada mereka.

Kecenderungan liar itu tentu saja tidak bisa dibiarkan. Harus ada sejumlah perlakuan yang lebih ramah. Proses kehancuran itu harus dihambat. Setiap orang hendaknya melakukannya dengan cara apa pun yang mereka bisa; dimulai hari ini dan berawal dari diri sendiri. Dan para environmentalis yang menjadi pandu dalam proses-proses ramah lingkungan itu.

Kecenderungan liar itu tentu saja tidak bisa dibiarkan. Harus ada sejumlah perlakuan yang lebih ramah. Proses kehancuran itu harus dihambat. Setiap orang hendaknya melakukannya dengan cara apa pun yang mereka bisa; dimulai hari ini dan berawal dari diri sendiri. Dan para environmentalis yang menjadi pandu dalam proses-proses ramah lingkungan itu.

STOP
CO₂

Aksi Greenpeace di Jerman

A young girl with dark hair, wearing a light blue patterned top and a grey skirt, is sitting on a wooden bench. She is holding an open book and looking down at it intently. The background is a wooden fence. The image has a soft, slightly blurred quality.

Michael Jackson

**“Mungkin kamu dan aku
tidak bisa membuat hal-hal besar
Kita mungkin tidak mengubah
dunia dalam satu hari
Tapi kita masih dapat mengubah
beberapa hal hari ini...
Dalam cara kecil kita.”**

CARA MUDAH MENJADI ENVIRONMENTALIS

BILA kamu memutuskan menjadi penyelamat lingkungan tak perlu berpikir rumit melainkan mulailah berani berpikir berbeda. Atau, berpikir skeptikal. Selalu bertanya, bertanya dan bertanya pada apa yang kamu pikirkan, kamu lihat, kamu dengar dan kamu rasakan!

Pertama-tama coba kenali diri kamu sendiri. Apakah kamu merasa senang dengan situasi lingkungan dan kehidupan masyarakat di rumah, di kampung, di kampus dan di kampungmu? Apakah kamu merasa senang dengan koran yang kamu baca, radio yang kamu dengar, internet yang kamu jelajahi dan televisi yang kamu tonton? Apakah kamu senang dengan kebijakan penguasa di kampus, di kota, di provinsi dan di negaramu?

Bila kamu merasa senang, panduan ini tak perlu bagimu. Sebaliknya, bila kamu merasa frustrasi atau gelisah dengan keadaan di sekelilingmu, panduan ini akan mengantarkanmu pada perjuangan menuju kehidupan di bumi yang lebih baik.

Sekali lagi teguhkan dirimu akan menjadi penyelamat kehidupan di bumi. Menjadi Environmentalis lagi-lagi bukan bakat melainkan pilihan hidup. Alam mengundang kamu menjadi pejuangnya.

Menjadi Environmentalis yang efektif pada abad 21 bukan dengan cara



Foto: Julian Sihombing/Repro halaman sampul Katalog Pameran Karya Pewarta Foto Indonesia: "Suara Rakyat"

mengikatkan dirimu pada sebuah pohon atau menjadi laskar lingkungan yang bertempur di garda wacana. Kaum Environmentalis baru akan berpikir lokal dan bertindak lokal. Biasanya bergandeng tangan dengan mitra sejati yang memiliki kesamaan nilai-nilai

A photograph of three children playing on a wooden structure made of logs in a grassy field. The child on the left is standing on a log, leaning forward. The child in the middle is also on a log, looking towards the camera. The child on the right is standing on the ground, holding a log. The background shows a grassy field, trees, and a cloudy sky.

**“Perhatian
utamaku bukan
pada kegagalan
yang kamu alami,
tapi bagaimana
kamu memaknai
kegagalan itu.”**

**Abraham Lincoln
(1809-1865)**

Presiden ke-16 Amerika
dan pembebas perbudakan.

perjuangan dan komitmen tinggi terlibat dalam proses-proses yang berbasis komunitas. Teks berikut menerangkan bagaimana kamu bisa mencoba memperjuangkan kelestarian lingkungan dan keselamatan komunitasmu sendiri dengan cara-cara yang efektif dan langkah-langkah yang menjanjikan.

Garrett Hardin membantu menjelaskan istilah *tragedy of the commons*. Ia menulis pada majalah *Science* pada 1968 tentang kecenderungan manusia menghancurkan kekayaan alam (*shared resources*) seperti kayu di hutan, ikan di lautan. Pada kekayaan alam yang bersifat "*commons*", hak milik pribadi dan peraturan pemerintah tidak ada. Pikiran Hardin kemudian diplintir untuk mendorong privatisasi kekayaan alam dan penguasaan sumberdaya alam oleh negara. Sekadar teladan, pemerintah Indonesia memberikan hak-hak eksklusif kepada para jenderal untuk memperoleh hak pengusahaan hutan sejak 1970-an.

Kemudian Hardin menciptakan mantra baru pada 1985 lewat buku *Filters against Folly: How to Survive Despite Ecologists, Economists and the Merely Eloquent*. Ia menulis jangan pernah meningkatkan eskalasi masalah ke tingkat global jika masih bisa diselesaikan di tingkat lokal. Ia menjelaskan sepuluh tahun kemudian bahwa amat mudah membuat komite-komite di tingkat global atau nasional tetapi hasilnya adalah malapetaka.

Ia menjelaskan bila di depan rumahmu ada sebuah lubang besar menganga dan



Foto: Dok. WALHI

kamu tidak bisa menimbunnya karena harus memperoleh ijin dari sebuah komite global yang berkedudukan ribuan kilometer dari rumahmu. Karenanya, jangan bodoh, timbulah lubang itu dengan tanganmu biar hidupmu lebih nyaman.

Ia bukan mengajak orang mundur ke belakang. Ia mengingatkan pembangunan ekonomi tak mungkin berfungsi sempurna bila ongkos lingkungan menjadi beban publik sedangkan keuntungannya dinikmati oleh perseorangan. Ilustrasinya, orang tak perlu memanggil PBB atau lembaga penyelamatan lingkungan untuk menyelesaikan masalah lingkungan di halaman kita. Masalah lingkungan di kampung halamanmu harus di-

selesaikan sendiri oleh komunitasmu.

Bila kamu sama sekali tidak ada keinginan menuntaskan masalah lingkungan hidup di rumah, komunitas dan kampusmu maka sulit untuk mulai melakukan penyelamatan. Kita harus selalu bertanya, bertanya dan bertanya. Dimana kita bisa memperoleh tanah untuk menimbun lubang di depan rumah kita? Peralatan apa saja yang dibutuhkan supaya kamu bisa menimbun dengan baik? Apa manfaat bagi orang-orang di sekitarmu, bila lubang itu ditimbun? Berapa biaya menimbun lubang itu? Bisakah kamu lakukan sendirian atau kamu membutuhkan bantuan orang lain? Bagaimana kamu memperoleh ijin dari pemerintah setempat?

Bila kamu ingin menjadi Environmentalis, kamu harus sering bertanya pada dirimu sendiri tentang lingkungan hidup di rumah, kampung dan kampusmu. Apa yang harus dilakukan pertama, kedua dan seterusnya, ini pertanyaan harus selalu muncul dalam benakmu. Baru kemudian kamu bisa menemukan isu lingkungan di sekitarmu. Tak ada buku teks untuk membangun gerakan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat (*Community-Based Environmentalism*). Penyelamatan lingkungan berbasis komunitas adalah menemukan solusi tempatan untuk menjawab masalah setempat dan dilakukan oleh komunitas setempat.

Environmentalisme seperti ini berbeda dengan penyelamatan lingkungan yang mengandalkan peraturan pemerintah, proses formal dan menggunakan aturan hukum yang

ada. Sedangkan "Environmentalisme Terlibat" (*Hands-on Environmentalism*) berakar pada kreativitas, kemampuan beradaptasi dan kaya improvisasi dan sedikit spontanitas. Kegiatan penyelamatan lingkungan yang paling efektif bila ia unik baik tempat maupun konteks sosialnya.

Seperti kegiatan-kegiatan lain, aktivitas penyelamatan lingkungan yang berbasis komunitas harus diurus supaya benar-benar bekerja. Ia harus punya kegiatan awal, tengah-tengah, akhir dan kemudian kembali ke awal yang baru. Berikut adalah model sederhana bagaimana membangun kegiatan bersama komunitasmu baik kecil-kecilan maupun besar-besaran.

Pertama, pahami situasi dan isu setempat. Kemudian, rencanakan pendekatan yang akan kamu lakukan. Lantas, laksanakan rencanamu. Akhirnya, evaluasi hasil dan lakukan penyesuaian bila diperlukan. Inilah langkah-langkah sederhana menjadi Environmentalis sejati.

Pikirkanlah keempat langkah dasar di muka untuk menjadikan kedua tanganmu bekerja menyelamatkan lingkungan hidup pada komunitas, kampung atau kampusmu. Atau, keempat langkah itu bisa dibayangkan sebagai langkah-langkah untuk membangun "rumah bayangan". Bahasa Yunani, rumah adalah "*oikos*". Dan, ekologi modern adalah studi tentang "rumah" yang kita panggil sebagai "alam sekitar". Berikut ini rincian bagaimana kelompok dan kaum environmentalis menyelamatkan rumah kita.

“Sebuah komunitas akan tumbuh besar jika orang-orang tua menanam pohon-pohon meski tahu bahwa mereka tidak akan pernah duduk di bawah kerindangannya.”



Pepatah Yunani

Kalimantan, 2007

Langkah Pertama: Nilailah Situasi di Sekitarmu

Aldo Leopold adalah penulis buku ekologi terkenal *Gaia*. Ia orang pertama yang berhasil mengartikulasikan perihal “etika tanah” - suatu kewajiban untuk menghargai hak tanah dan melindungi kesehatan dengan merawat proses-proses biotiknya. Ringkasnya, Leopold mendesak orang untuk membuat sebuah alam berkait, untuk memahami bagaimana manusia bisa dan seharusnya berinteraksi dengan tanah supaya keduanya menerima manfaat.

“Siapa sang tanah itu?” tanya



Foto: Dok. WALHI

Leopold. Tanah adalah kita, tapi tak lebih dari bunga-bunga yang beterbangan. Ekologi tanah boleh jadi titian antara komunitas liar di satu sisi dan komunitas manusia di sisi lain.

Menjadikan keduanya berhubungan sebenarnya mudah. Biarkan tanah itu hidup, biarkan riak air itu mengalir, biarkan padang rumput itu menghampar, biarkan pesisir itu rumah bertelur pagi penyu. Biarkan tanah itu menyuburkan dirinya sendiri. Koneksi itu dimulai melalui sensasi kita, saat tangan kita bisa menyentuhnya, mata kita bisa melihatnya, hidung kita bisa menciumnya.

Kegiatan Environmentalisme selalu mulai dengan suara alam dan irama alam. Biasanya mulai dengan mempertanyakan tentang tanah, air, tanaman dan binatang di lokasi itu. Baru selanjutnya kamu mulai melakukan apresiasi hubungan antara sejarah alam dan sejarah manusia; antara lansekap lokal dan komunitas lokal; keinginan mengatasi tujuan politik dan tujuan ekonomi; hasrat menyimak dan berbagi informasi yang diperoleh; dan tertarik melakukan dialog dari hati ke hati. Tanpa empati seperti ini sulit melakukan penyelamatan lingkungan hidup dan kamu hanya layak menjadi penonton.

Langkah **Kedua** : Rencanakan Pendekatanmu

Perencanaan amat menentukan dalam kegiatan penyelamatan lingkungan hidup. Bila kamu ingin melakukannya sendirian, tentu menjadi lebih sederhana. Namun, bila ingin melibatkan banyak orang, kamu harus memilih rencana dan pendekatan yang sesuai dengan pihak yang ingin kamu ajak kerjasama.

Pada tahap penilaian, kamu menemukan siapa saja pihak yang potensial dijadikan mitra. Anda mengumpulkan dan menguji berbagai fakta. Anda harus komunikasikan fakta itu pada segelintir pihak yang benar-benar dekat denganmu.

Pada tahap ini penting bagimu mengumpulkan para pendukung duduk dalam satu meja. Pertemuan sejenis ini amat penting untuk menciptakan lingkungan senyaman dan senetral mungkin. Tujuannya, agar setiap pihak yang ingin diajak dalam kerja-kerja penyelamatan lingkungan menentukan perannya dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang.

Beberapa pertanyaan yang penting diajukan : Apa tata aturan pertemuan? Nilai-nilai apa saja yang dibawa setiap mitra? Apa mereka akan mengharapkan imbalan — keuangan, kebudayaan dan lingkungan hidup— dalam membangun kolaborasi ke depan? Dapatkah anggota kelompok setuju dengan tujuan perjuangan secara umum? Bila tidak, bisakah mereka setuju dengan beberapa proses yang sedang dibangun bersama?

Salah satu bagian dalam proses perencanaan adalah merumuskan “pernyataan misi” atau “pernyataan maksud” yang mampu menciptakan hasrat berjuang bersama. Pernyataan misi yang bagus bila ia bisa menjawab mengapa kita melakukan semua hal ini. Sebuah alasan unik mengapa kita harus ada. Bentuk pernyataan misi hendaknya menjadi



Foto: Dok. WALHI

terompet tunggal dan konsisten disuarakan oleh kamu dan semua orang yang berada dalam barisanmu. Jangan berharap menulis pernyataan misi dalam satu kali pertemuan. Lakukan beberapa kali agar menemukan pernyataan misi yang sederhana, tajam, kuat dan menggugah.

Mengevaluasi kembali fakta-fakta awal adalah satu bagian dari proses perencanaan. Boleh jadi pihak-pihak yang kamu ajak bergabung memiliki cara pandang yang berbeda — mungkin dari aspek ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Reevaluasi seperti ini bisa membantu mengoreksi pandangan pertama pada sebuah fakta dan membangun informasi dasar yang bersuara.

Fakta-fakta itu menjadi satu set parameter untuk memantau secara terus menerus capaian usaha-usaha penyelamatan. Pada proses monitoring perlu hati-hati karena tidak semua fakta atau informasi penting diukur dan sebaliknya informasi yang bisa diukur belum tentu penting diketahui. Jadi, pilih variabel-variabel yang benar-benar penting dan bisa membantu kita menuju misi penyelamatan lingkungan hidup.

Fakta-fakta ini akan membantu kita merumuskan rencana bertindak. Perencanaan adalah perspektif, proses dan sekaligus tahapan kita merengkuh apa yang kita cita-cita. Sebuah rencana yang baik hari ini lebih penting dibandingkan perencanaan yang sempurna besok pagi. Ingatlah empat tahap perencanaan mulai dari penilaian, perencanaan, eksekusi dan evaluasi. Sebelum melaksanakan perencanaan secara penuh, kamu bisa istirahat beberapa jenak untuk menilai kembali apakah semua perencanaan itu bisa mengantarkan ke gerbang sukses yang besar bagi semua anggota kelompok. Pada proses ini setiap anggota kelompok tak perlu menggunakan kemampuan rasionalitas melainkan kemampuan emosional dan intuisinya. Bila semua setuju, lakukanlah apa yang telah direncanakan.

Langkah Ketiga: Laksanakan Rencanamu



Foto: Dok. WALHI

Kamu telah menilai seberapa besar peluang dan tantangan dalam menyelamatkan lingkungan hidup di rumah, kampung dan kampusmu. Kamu pun telah bertemu dengan para pendukung idemu dengan terbuka dan akrab. Kamu telah siap melaksanakan kata-katamu menjadi kenyataan.

Tak perlu terburu-buru. Bacalah selalu kondisi internal kelompokmu, siapa tahu beberapa orang belum jelas atau ragu-ragu dengan ide perjuanganmu. Kamu harus meyakinkan mereka mengapa ide penyelamatan lingkungan ini penting dan mendesak dilakukan.

Buatlah sebuah nama. Kamu tak perlu menyewa konsultan strategi komunikasi yang mahal untuk membuat logo dan nama perjuanganmu. Tapi, kamu harus hadir dengan nama yang menangkap misi, citra dan lokasi yang sedang kamu perjuangkan. Idealnya, nama sebuah upaya perubahan, hendaknya positif, deskriptif dan sederhana. Nama itu harus melukiskan sesuatu bukan melawan sesuatu. Kampanye kebersihan kampung lebih menarik dibandingkan kampanye antisampah.

Nama perjuangan jangan lucu-lucuan dan juga jangan membosankan. Lawanmu akan menari-menari gembira bila kamu menggunakan nama perjuangan yang mudah diejek. Semisal Mahasiswa Bandung untuk Kelestarian Tangkuban Perahu, nama singkatannya bisa menjadi Mabuk Tape. Nama amat penting karena konstruksi sosial bisa dibangun dari produksi kata-kata.

Pilih status hukum kelompokmu. Bila kampanye yang akan kamu lakukan hanya bersifat temporer dan tidak butuh waktu lama. Kamu bisa membentuk kelompok kerja sederhana yang bersifat *ad hoc*, bila kegiatan telah dilakukan, lantas bubar dengan sendirinya. Tetapi, bila perjuangan atau

proyek lingkunganmu membutuhkan durasi yang lebih lama, kamu perlu memikirkan status hukum kelompokmu. Kamu bisa mendirikan yayasan atau perkumpulan atau perseroan terbatas. Bila proyek perjuanganmu membutuhkan dana dari pihak lagi seperti lembaga donor atau donatur individual, kamu bisa menggunakan yayasan atau perkumpulan. Sebaliknya, bila proyek lingkunganmu membutuhkan modal dari pihak lain, bisa juga mendirikan perusahaan atau koperasi. Semisal perusahaan atau koperasi pengolahan energi dari sampah perkotaan. Perusahaan sejenis ini biasanya dikenal sebagai perusahaan sosial karena tidak sepenuhnya mengejar untung.

Langkah Keempat : Selalu Belajar dari Pengalaman

Banyak organisasi lingkungan hidup sukses karena mereka melakukan kampanye lingkungan dengan sebuah rancangan (*environmental movement by design*). Cara bekerjanya mereka akan menentukan prioritas, kemudian mengembangkan strategi, lantas melakukan tindakan dan akhirnya mengukur tingkat kesuksesan.

Mengukur kesuksesan tidak perlu selalu diukur saat seluruh kegiatan selesai. Kamu bisa melakukannya setiap saat. Yang penting setiap keberhasilan atau kegagalan hendaknya selalu menjadi pelajaran untuk selalu berubah dan memperbaiki diri.

Biasanya evaluasi dilakukan dengan hasil yang mudah diukur atau dirasakan. Kelompok penyelamat lingkungan hidup tak perlu merasa terancam atau frustrasi jika pekerjaannya dinilai gagal atau tidak sesuai dengan rencana. Karena, kerja menyelamatkan lingkungan bukan pekerjaan yang sekali jadi tapi membutuhkan keuletan, keteguhan dan konsisten pada misi perjuangan.

Pada proses evaluasi dan monitoring, kamu bisa memeriksa apa yang telah dihasilkan tapi juga bisa mempertanyakan hal-hal yang lebih mendasar. Prinsipnya lakukan yang terbaik yang kamu bisa.

Sambil melakukan keempat langkah mudah menjadi environmentalis. Berikut ini akan disenaraikan beberapa langkah lain yang bisa kamu tempuh, seperti:

- Temukenali isu-isu lingkungan di rumah, kampung, kota dan kampusmu
- Tetapkan diri terlibat aktif dalam menggeluti isu lingkungan pilihanmu?
- Temukan strategi yang jitu
- Bangun koalisi dan perkawanan yang luas
- Pengaruhi pemerintah setempat
- Lakukan kampanye media
- Galang sumberdana dan sumberdaya manusia
- Lawan pengusaha yang tak bertanggung jawab
- Kelola proses dengan cara-cara yang segar, inovatif dan ingat selalu tanpa kekerasan.





**“Kamu
benar-benar
dapat mengubah
dunia,
jika kamu cukup
mempedulikannya.”**

**Marian Wright
Edelman**

Pengacara, aktivis HAM dan pendiri
Children’s Defense Fund”



Foto-foto: Dok. WALHI Jatim

KAUM MUDA BERGERAK

BEGITU derap yang dikabarkan Kaum Environmentalis di Jawa Timur. *Visioning* dan pelatihan yang dilakukan para penggiat di WALHI Jawa Timur menjadi penggerak lahirnya *Special Generation* yang bersemangat melahirkan inovasi-inovasi baru. Keadilan lingkungan menjadi ruh Gerakan Environmentalis itu. Menurut Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur Ridho Saiful, sejak melakukan *visioning*, WALHI Jawa Timur menetapkan diri dengan sadar dan sepenuh hati melakukan tiga hal utama: promosi gagasan keadilan lingkungan hidup, pendidikan environmentalisme dan sekretariat sebagai *learning hub*.

“WALHI Jawa Timur, adalah **walhi-i** (walhi *innovative*-maupun *impian*). Rumah pucang di mana kami berada menjadi tempat bersama lingkaran komunitas yang sepenuh hati peduli pada keadilan lingkungan hidup. Kami selalu bekerja dengan nilai-nilai baru W.A.L.H.I => *Willy, Agile, Learning Oriented, Hub, Innovation*,” ujar Ridho Saiful. **Willy** berarti setiap Environmentalis terlatih dan unggul dalam bidang yang diminatinya. **Agile** adalah setiap Environmentalis tangkas menghadapi tantangan dan menjadikan tantangan sebagai peluang meraih perubahan. **Learning Oriented** adalah setiap Environmentalis senantiasa terbuka pada hal-hal

“Jadilah bambu. Jangan jadi pisang. Daunnya lebar membuat anaknya tidak kebagian sinar matahari. Bambu lain: rela telanjang asal anaknya, rebung, pakaiannya lengkap.”

Nurcholis Madjid

baru dan menjadikan proses pengalaman adalah sumber pengetahuan. **Hip** setiap Environmentalis selalu mampu beradaptasi dan mengenali kecenderungan-kecenderungan sosial dan gaya hidup kelompok sasaran. Dan, **Innovation** adalah setiap Environmentalis tidak pernah berhenti menciptakan pembaruan sosial untuk mempercepat terwujudnya keadilan lingkungan hidup serta selalu kreatif dan berani berfikir berbeda untuk merengkuh masa depan yang lebih baik.

Hingga Maret 2007, Training for pact yang diselenggarakan WALHI Jawa Timur telah menjangkau 300 anak muda (dari rencana 30.000 dalam tiga tahun) bersemangat di beberapa kota di Jawa Timur. Desain awalnya, kelompok sasaran utama pelatihan itu "kaum muda terpelajar" dengan usia 18-22 tahun dan bersekolah (mahasiswa). Namun pada prakteknya, banyak permintaan dari beberapa kampung, pondok pesantren, komunitas, dan pelajar SLTA. Meskipun mahasiswa tetap menjadi prioritas Green Student Movement (GSM), tim di WALHI Jawa Timur melakukan perluasan gerakan environmentalis kaum muda dengan menggunakan identitas baru yang disebut Green Student Environmentalist (GSE). Dan, dalam perjalanannya yang tak sampai setahun, beberapa inisiasi telah telahirkan, sedang berkembang, dan terus mengembangkan kelompok serta jaringan, sehingga seperti sulur tanaman rambat yang menjalar ke mana-mana. Beberapa di antaranya sebagai berikut.



Green Light **1 Menjangkau 10**

Di kota Surabaya sekelompok Environmentalis mendedikasikan minatnya untuk mengembangkan penulisan dan menyebarkan informasi tentang kondisi lingkungan hidup. *Green Light* adalah nama yang dipilih untuk buletin yang mereka terbitkan.

Melalui proses diskusi kelompok, komunitas ini menentukan rubrik, membuat jadwal peliputan, menuliskan menjadi bahan berita, mengedit, menataletak, hingga mencetak dan mendistribusikan kepada pemuda atau mahasiswa yang lain. Semuanya dilakukan secara mandiri. Terbitan perdana sebanyak 250 eksemplar yang berisikan berbagai artikel, mulai dari luapan Lumur Lapindo di Porong hingga aneka kegiatan *Environmentalist Community*. Selain ajang pengkabaran, buletin ini juga memuat formulir pendaftaran calon anggota GSE baru. Sungguh menarik, *Green Light* sebagai sarana untuk menjangkau teman-temannya yang lain, dengan kesepakatan satu orang menjangkau sepuluh orang muda baru. Ya, inilah metode penyebaran gerakan yang tidak hanya berbasis produk, tetapi berbasis nilai dan informasi serta gerakan lingkungan melalui metode MLM (*multi level movement*).



Green Movie Community

Menyebarkan “Virus Environmentalisme”

Selain komunitas *Green Light*, berangkat dari tradisi nonton film bersama di Rumah Pucang, terlahir Komunitas Green Movie. Komunitas ini telah bersepakat untuk membuat film perjalanan GSE (aktivitas, dinamika dan efek). Tidak itu saja, komunitas ini juga memiliki keinginan yang kuat untuk melahirkan film-film lingkungan yang mampu menggugah kesadaran publik dan mempercepat perubahan sosial. Harapannya, dengan film-film yang diproduksi secara mandiri oleh komunitas ini akan terciptakan alat penguat baru penyebaran “Virus Environmentalisme” di Jawa Timur. Audio-visual diyakini memiliki daya pikat dan tenaga yang kuat untuk memperluas Gerakan Environmentalisme. Dan, memang begitu adanya.



Environmental Trainer Club

Terus Meluaskan Gerakan

Pada akhir Januari 2007, di Kota Batu dilakukan Training of Trainer Environmentalist Movement yang dikemas dalam topik *Green Youth Movement (GYM)*. Kegiatan ini dibuat spesial dengan melalui tahap pendaftaran, tahap wawancara, tahap seleksi dan penentuan. Memang sengaja ini dikemas bahwa yang terpilih adalah para calon *trainer GYM* andalan di Jawa Timur dan perluasan gerakan lingkungan di Indonesia.

Pada tahap seleksi dilakukan dengan acara yang menyenangkan. Dari 35 pendaftar, 24 peserta dinyatakan lolos menjadi calon pelatih andalan Gerakan Environmentalis. Mereka kemudian menetapkan diri untuk membangun Environmental Trainer Club. Wilayah pengembangan komunitas ini sekarang menjangkau lima kabupaten dan kota (Surabaya, Malang, Jombang, Lamongan dan Jember). Mereka berkomitmen untuk menyebarkan informasi, memasarkan “virus ide”, merekrut, dan menyelenggarakan pelatihan gratis di wilayah

masing-masing. Menariknya, gerakan ini benar-benar mengalami percepatan dengan terus digulirkannya pelatihan-pelatihan yang melibatkan orang-orang muda dari kota dan kabupaten lain, seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.



Kids Environmental Network (KEN) Trainer Club

Diminati beberapa calon donatur

Ini ajang penyaluran minat dan bakat kaum muda yang percaya pada jalur pendidikan anak. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan membuat pendidikan lingkungan ke beberapa sekolah-sekolah, misalnya sekolah Ibnu Husain di daerah Sidotopo, Kota Surabaya dan sekolah Al-Uswah di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Alumni angkatan ke-1 di Kota Malang juga melakukan pendidikan untuk anak-anak adalah mengenalkan bencana dan cara menghadapinya jika terjadi. Perkembangan yang cukup menarik, inisiasi membuat proyek pendidikan ini diminati juga oleh beberapa calon donatur yang mau menyumbangkan lahannya untuk ditempati.



Forum Pemuda Pemudi untuk Lingkungan (FPPL)

Terlahir karena kecerobohan korporat

Forum Pemuda Pemudi untuk Lingkungan (FPPL) terbangun dari proses relasi ketika berhadapan dengan situasi sulit. Sejarah kelompok ini dimulai ketika beberapa alumni GSM dan *trainer* GSM tinggal di wilayah Porong, mendampingi anak-anak muda korban Lumpur Lapindo, selama berbulan-bulan. Relasi terbangun di antara mereka dan dirasakan perlunya membentuk wadah perjuangan. Terpilihlah nama FPPL. Para organisir ini melakukan berbagai proses pendidikan dan pertemuan kampung untuk memperluas gerakan transformasi *environmental justice*. Karena para pemuda-pemudi ini sudah kehilangan

harapan hidup, akibat seluruh tanah dan tempat tinggal mereka ditenggelamkan lumpur panas yang tersedur ke muka bumi “berkat” kecorobohan PT Lapindo Brantas selaku perusahaan eksplorasi minyak dan gas. Mereka membuat selebaran, melakukan aksi-aksi demonstrasi, baik aksi massa sampai aksi teatrikal *Manusia Lumpur Beserta Konspirasi Kasus ini* di Surabaya. Mereka juga memperluas pengorganisasiannya ke Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang sebentar lagi hendak dieksploitasi oleh Exxon mobile, serta Pulau Madura untuk merespon rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).



Green Galery dan Forum Budaya Rumah ekspresi dan tempat berinovasi

Adalah komunitas yang mengedepankan apresiasi dan kesenian dalam meramaikan Rumah Pucang (Sekretariat WALHI Jatim yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur II No.21, Surabaya). Mereka mengembangkan forum budaya dengan menjadikan Rumah Pucang sebagai rumah ekspresi dan tempat berinovasi kesenian. Menggelar pameran lukisan dan foto bertema *Tiga Ruang Satu Dimensi* mengawali keberadaan rumah yang diharapkan menjadi ruang bertemu, berekspresi, dan belajar untuk Kaum Environmentalis. Kemudian yang kedua adalah menggelar seni lukis instalasi dan melukis model hidup dengan berbagai aliran pelukis (natural, surealis dan sketsa) mengiringi langkah-langkah perdana para penggiat Green Galery dan Forum Budaya. Selanjutnya, pameran foto bertema Seni *Sebenarnya*. Pameran foto ini menampilkan hasil bidikan “spontan” kaum muda yang bertemu dan beraktivitas di Rumah Pucang. Pameran ini diselenggarakan selama tiga minggu. Kelompok pengelola Forum Budaya juga mengembangkan konsepsi dan penyelenggaraan “*street art*” dalam bentuk ekspresi bersama para pekerja seni jalanan di Jalan Darmawangsa, Surabaya. Ini semacam upaya untuk menghidupkan jalan dengan nyawa kesenian dan menjadikannya sebagai ruang untuk menawarkan pesan pada publik. Kegiatan yang dilaksanakan berupa

pameran lukisan, foto, musik, sablon tematik dan berbagai ekspresi lainnya, seperti puisi, seni instalasi, dll. Kegiatan Jalan Darmawangsa ini dimulai pada April pada saat peringatan Hari Bumi sedunia 22 april 2007.

SEDANG DAN AKAN TERLAHIR



Teguh, alumni GSE angkatan ke-7 di Surabaya, bersama kelompoknya sedang mengembangkan radio kampus yang akan mengangkat tema-tema lingkungan di sekitar kampus. Selain sebagai penyiar, Teguh juga pemain gitar yang handal. Dalam waktu dekat dia akan membentuk Green Music yang merupakan motor gerakan mengajak, mengkritik dan menyuarakan keadilan lingkungan. Bermusik untuk lingkungan.



Yuli, alumni TOT Environmentalis sedang menginisiasi dan membangun kelompok yang akan menjadi “Task Force Lahan Kering Perkotaan” dengan melakukan penghijauan. Saat ini, Yuli sedang menyusun jadwal penelusuran kawasan kota Surabaya yang kering dan butuh segera dihijaukan. Dia akan berbagi peran dengan kelompoknya untuk mendata dan mengumpulkan bibit tanaman yang cocok untuk ditanam di Surabaya.



Selain dua Environmentalis di atas, ada banyak alumni pelatihan yang sedang mempersiapkan inisiasi-inisiasi baru dengan tujuan menyebarkan ideologi environmentalisme. Bukan cuma di Surabaya, tapi juga di Malang, Jember, Banyuwangi, Madura, dan kota/kabupaten di Jawa Timur, denyut Gerakan Environmentalisme semakin terasa. Semakin hari, semakin kuat. Bagaimana dengan di tempatmu?

“Saya telah mempelajari bahwa orang-orang akan melupakan apa yang kamu katakan, orang-orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tapi orang-orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu menyentuh perasaan mereka.”

Maya Angelou

Penyair dan penulis

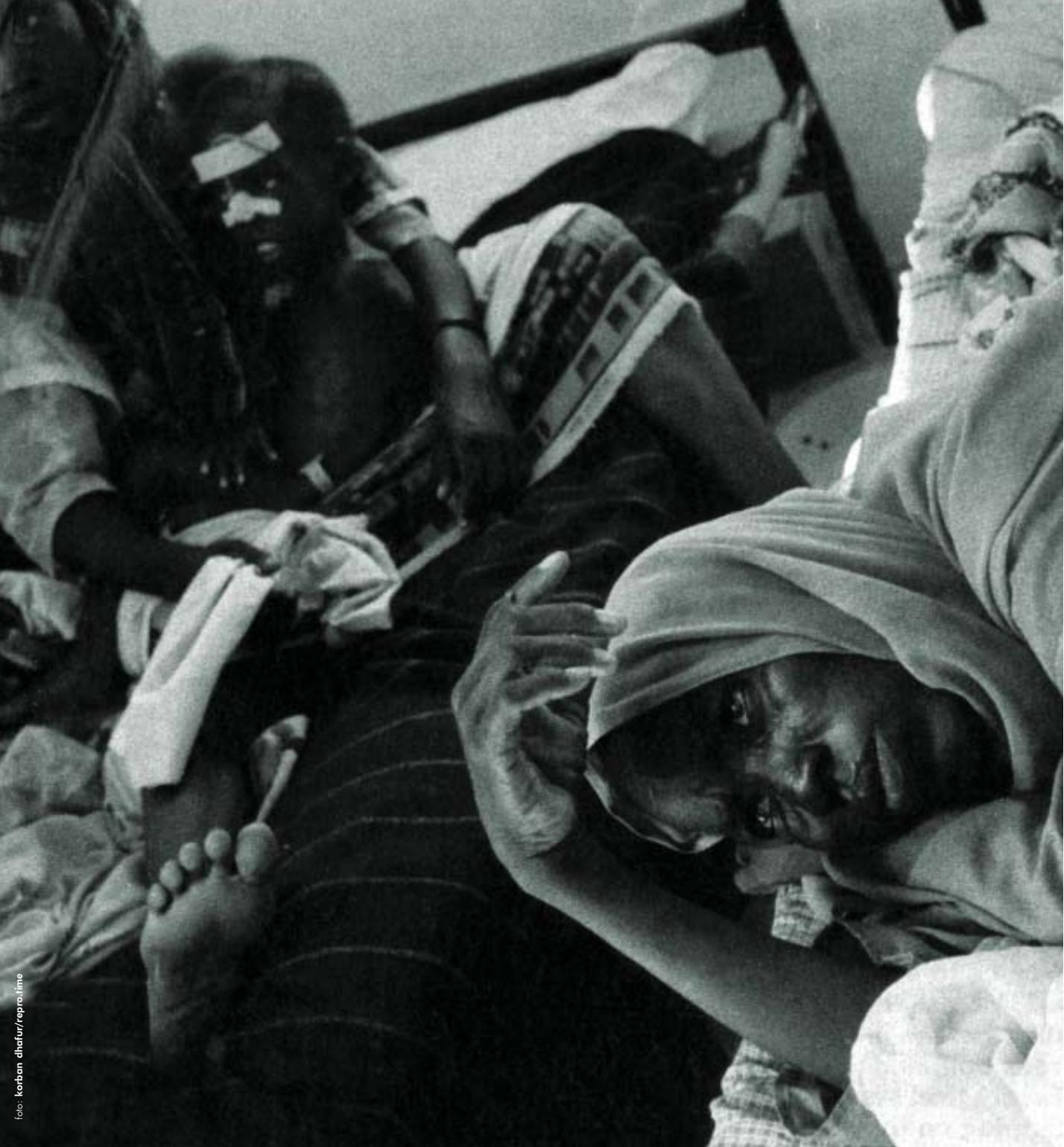


foto: korban dhatur/reproline



**“Manakala
kamu ragu-
ragu,
cobalah
lakukan tes
ini:
munculkan
wajah orang
termiskin
dan
terlemah
yang
mungkin
pernah
kamu lihat
dan
tanyakan
pada dirimu
sendiri,
adakah yang
bisa kamu
lakukan
untuk
mereka.”**

Mahatma Gandhi



Belajar!

BAHAN DISKUSI DAN BACAAN LANJUTAN

ORGANISASI



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

www.walhi.or.id

Kunjungi selalu *website* Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kamu bisa memperoleh berita lingkungan terkini, kampanye lingkungan terkini, kegiatan Sahabat WALHI dan lain-lain. Kamu juga bisa meng-klik jaringan Friends of The Earth Internasional dari sini.



Greenpeace

www.greenpeace.org

Greenpeace adalah organisasi kampanye lingkungan independen yang menggunakan prinsip antikekerasan dan konfrontasi yang kreatif untuk mengungkap masalah lingkungan hidup global dan mendesak agenda perubahan menuju masa depan yang damai dan “hijau”.



Friends of Earth

www.foe.org

Kelompok lingkungan hidup internasional yang fokus pada dampak lingkungan dari globalisasi.



Corporate Watch

www.corporatewatch.org

Kelompok yang aktif memantau operasi perusahaan-perusahaan transnasional dan dampaknya pada sektor ekonomi, sosial dan ekologi.



The World Watch

www.worldwatch.org

Lembaga ini didedikasikan untuk mendorong evolusi masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Mereka punya prinsip kebutuhan manusia dipenuhi tanpa mengorbankan alam dan generasi mendatang.



Protest Net

www.protest.net

Website ini menampilkan aksi-aksi protes di pelbagai belahan dunia.



Reclaim the Streets

www.reclaimthestreets.net

Kelompok *direct action* telah mendapatkan pengakuan luas beberapa tahun belakangan ini. Aksi-aksi baik pemblokiran jalan untuk pesta di jalan, penyerangan kantor-kantor korporat minyak, hingga mengorganisir aksi para pekerja, aksi-aksi dan ide-idenya telah menarik perhatian banyak orang dan dunia internasional.



The Ruckus Society

www.ruckus.org

Sejak 1995 Ruckus menjadi kelompok *training* untuk para aktivis. *Website* ini berisikan contoh lusinan organisasi-organisasi lingkungan dan HAM, bagaimana mereka merancang dan membuat aksi mereka menjadi dinamis, inspiratif, mendidik, dan punya nilai berita.



Computer Professionals for Social Responsibility

www.cpsr.org

Kumpulan ilmuwan komputer yang peduli atas dampak teknologi komputer pada komunitas.



Amnesty International

www.amnesty.org

Amnesty International adalah gerakan kampanye dunia yang mempromosikan hak-hak asasi manusia. Amnesty Internasional mengkampanyekan pembebasan semua tahanan tak bersalah; memastikan peradilan yang adil dan bersih bagi para tahanan politik; menghapuskan hukuman mati, penyiksaan dan perlakuan mengerikan pada para tahanan; mengakhiri politik pembunuhan dan penghilangan dan menolak pelecehan hak asasi-asai manusia oleh kelompok-kelompok oposisi.

Amnesty International memiliki sekitar satu juta anggota dan pendukung di 162 negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan beragam, dari demonstrasi publik sampai menulis surat, dari pendidikan HAM hingga konser penggalangan dana, dari kemunculan individu hingga kampanye global pada isu tertentu.



Fair Trade Foundation
www.fairtrade.org.uk



World Development Movement
www.wdm.org.uk



Institute for Local Self Reliance
www.islr.org

Institute for Local Self Reliance (ILSR) adalah organisasi pendidikan dan penelitian nirlaba yang menyediakan technical assistance dan informasi atas strategi-strategi pembangunan ekonomi lingkungan. Sejak 1974, ILSR telah bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta dalam pengembangan kebijakan yang menimba nilai-nilai maksimum sumberdaya lokal.



The Nation
www.thenation.com



WTO Watch

www.wtowatch.org

Pusat informasi global tentang WTO, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan. Di sini kamu bisa belajar tentang isu-isu seputar WTO.



TNI

www.tni.org

Didirikan pada 1974, TNI adalah jaringan internasional aktivis-akademisi yang peduli pada analisis dan penemuan solusi yang mungkin atas masalah-masalah global seperti militerisme dan konflik; kemiskinan dan marginalisasi; ketidakadilan sosial; degradasi lingkungan. TNI jembatan akademisi dan aktivis.



Best Environmental Directories

www.ulb.ac.be/ceese/meta/cds.html

Direktori isu-isu lingkungan. Ada lebih 600 subyek di *website* ini.



World Wildlife Fund

www.wwf.org



**International Institute
for Environment & Development**
www.iied.org



Indymedia
www.indymedia.org

Ini sebuah kolektif organisasi media independen dan ratusan jurnalis yang menawarkan liputan akar rumput dan non-korporat. Indymedia adalah outlet media demokratis untuk penciptaan radikalitas, akurasi, dan gairah mengatakan kebenaran.



Whole Earth
www.wholeearthmag.com



Institute for Policy Studies
www.ips.dc.org

Pusat independen untuk penelitian dan pendidikan progresif; termasuk proyek-proyek tentang ekonomi, perdamaian, dan keamanan global.

M A J A L A H



Mother Jones Online www.motherjones.com

Ini majalah online yang dikelola secara independen dan non profit. Mother Jones memfokuskan pada isu-isu keadilan sosial, lingkungan, politik, dan budaya pop. Terkenal dengan laporan-laporan investigasinya, majalah ini telah menerima delapan nominasi penghargaan National Magazine dan tiga National Magazine Awards, dua kali digelar "Best in the Business" oleh American Journalism Review untuk laporan investigasinya dan memenangkan Alternative Press Award untuk *General Excellence*.



Adbusters www.adbusters.org

Majalah Adbusters adalah kerja global jaringan seniman, aktivis, penulis, *pranksters*, pendidik, dan *entrepreneur* yang ingin meningkatkan gerakan aktivis sosial baru di era informasi seperti sekarang ini.



Resurgence www.resurgence.org

Resurgence memublikasikan artikel-artikel pemikiran terbaru, memperkenalkan kreativitas, ekologi, dan spiritualitas.



E-Magazine
www.emagazine.com



YES! A Journal of Positive Futures
www.yesmagazine.org

Majalah ini didipublikasikan empat kali setahun oleh Positive Future Network, sebuah organisasi nirlaba, independen yang mendukung pembangunan berkelanjutan, evolusi keadilan, dan masa depan yang lebih bersemangat.



Rabble (Globalisasi)
www.rabble.ca



CovertAction (Globalisasi)
www.covertaction.org



A close-up photograph of a person's hands holding a yellow string. The hands are positioned in the center-left of the frame, with the fingers gripping the string. The background is a dense, out-of-focus green foliage, likely a forest or garden. The lighting is bright, suggesting daylight. The overall mood is one of focus and determination.

***“Hasta la victoria
siempre!
Berjuang terus
sampai menang!”***

Ernesto Che Guevara



MENJADI
ENVIRONMENTALIS
ITU
GAMPANG!
Sebuah Panduan Bagi Pemula

“Alarm planet kita sudah berbunyi, ini waktunya bangun dan ambil tindakan.”

Leonardo DiCaprio
Environmentalis
dan Aktor Hollywood

“Kalau kamu yakin, sungguh-sungguh yakin, akan jalan yang telah kamu pilih, maka alam semesta akan membukakan jalan untukmu.”

Paulo Coelho
Penulis asal Brasil

ISBN 978-979-8071-71-3

Kekeringan, banjir, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, polusi, pembalakan liar, es kutub mencair, lapisan ozon berlubang, dan sederet lagi dengan persoalan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini mungkin membuat kamu termangu, gelisah, khawatir, gemas, dan ingin melakukan sesuatu. Tapi, apa dan bagaimana? *Buku Menjadi Environmentalis Itu Gampang!* ini akan menjawab semua pertanyaan kegelisahanmu, sekaligus membukakan sejuta kemungkinan untukmu berbuat sesuatu.

Buku ini untuk kaum muda yang optimis, bersemangat, tak henti bertanya, serta mencintai Planet Bumi dan bersedia membelanya dengan cara apapun, demi kepentingan generasi mendatang.



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No.14 Mampang, Jakarta Selatan 12790
Telepon (021) 7941672 Fax (021) 7941673 E-mail info@walhi.or.id